LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdullillahirrobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Balikpapan tahun 2023 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa diamanatkan LPPD disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD merupakan informasi utama dan dasar untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. LPPD bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Sebagai sarana laporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka paling tidak ada 4 (empat) substansi pokok capaian kinerja disajikan, yaitu: (1) capaian kinerja penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), (2) capaian realisasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah, (3) capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan, dan (4) capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Penyusunan LPPD Kota Balikpapan Tahun 2023 mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA tanggal 11 Desember 2023, perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Tahun 2023. Dengan demikian penyajiannya secara maksimal telah memenuhi semua aspek, fokus dan indikator yang ditetapkan dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kota Balikpapan di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni, dan semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan Tahun 2023 ini memberi manfaat serta dapat dijadikan landasan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan yang strategis untuk kepentingan rakyat dan demi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat sehingga terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin. Semoga Allah SWT,Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

"Balikpapan Kota Beriman (Bersih, Indah, Aman dan Nyaman)
Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela (Kubangun dengan Amal, Kujaga dengan Iman dan Kubela dengan Doa)"

Balikpapan, 28 Maret 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN

H. RAHMAD MAS'UD, S.E, M.E

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG.....1

1.1.1 PENJELASAN UMUM 1

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah 1

B. Data Geografis Wilayah 2

C. Jumlah Penduduk 9

D. Jumlah Kecamatan Dan Kelurahan 10

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah 12

F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....14

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....15

A. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah.....15

B. Visi Dan Misi Kepala Daerah.....19

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....39

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....61

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....85

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 94

2.1 Capaian Kinerja Makro.....94

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....94

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....95

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan 127

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....133

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....334

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 335

4.1 Jenis Pelayanan Dasar 335

4.1.1 Pendidikan 335

4.1.2 Kesehatan 335

4.1.3 Pekerjaan Umum 335

4.1.4 Perumahan Rakyat 336

4.1.5 Trantibumlinmas 36

4.1.6 Sosial 336

4.2 TARGET PENCAPAIAN 337

4.2.1 Pendidikan 337

4.2.2 Kesehatan 339

4.2.3 Pekerjaan Umum 347

4.2.4 Perumahan Rakyat 349

4.2.5 Trantibumlinmas 350

4.2.6 Sosial 355

4.3 ANGGARAN 360

4.3.1 Pendidikan 360

4.3.2 Kesehatan 367

4.3.3 Pekerjaan Umum 368

4.3.4 Perumahan Rakyat 371

4.3.5 Trantibumlinmas 373

4.3.6 Sosial 379

4.4 DUKUNGAN PERSONIL 404

4.4.1 Pendidikan 404

4.4.2 Kesehatan 404

4.4.3 Pekerjaan Umum 404

4.4.4 Perumahan Rakyat 405

4.4.5 Trantibumlinmas 405

4.4.6 Sosial 406

4.5 HASIL CAPAIAN 406

4.5.1 Pendidikan 406

4.5.2 Kesehatan 410

4.5.3 Pekerjaan Umum 425

4.5.4 Perumahan Rakyat 428

4.5.5 Trantibumlinmas 430
4.5.6 Sosial 438
4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI 444
4.6.1 Pendidikan 444
4.6.2 Kesehatan 446
4.6.3 Pekerjaan Umum 451
4.6.4 Perumahan Rakyat 452
4.6.5 Trantibumlinmas 454
4.6.6 Sosial 454

BAB V PENUTUP 456

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan 3
Tabel 1.2 Daerah Aliran Sungai (Das) Kota Balikpapan 7
Tabel 1.3 Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian). 8
Tabel 1.4 Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan 8
Tabel 1.5 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Setiap Kecamatan Tahun 2023 9
Tabel 1.6 Kecamatan Dan Kelurahan 10
Tabel 1.7 Jumlah Perangkat Daerah Dan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Kota Balikpapan Tahun 2023 12
Tabel 1.8 Anggaran Dan Belanja Apbd Tahun 2023 14
Tabel 1.9 Permasalahan Pembangunan Daerah 15
Tabel 1.10 Sasaran, Indikator Sasaran Dan Target Rpjmd Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 39
Tabel 1.11 Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2023 45
Tabel 1.12 Program Dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2023 46
Tabel 1.13 Kegiatan Dan Anggaran Di Pemerintah Kota Balikpapan 61
Tabel 1.14 Kegiatan Dan Sub Kegiatan Spm Bidang Pendidikan 86
Tabel 1.15 Kegiatandan Sub Kegiatan Spm Bidang Kesehatan 88
Tabel 1.16 Kegiatandan Sub Kegiatan Spm Bidang Pekerjaan Umum 89
Tabel 1.17 Kegiatandan Sub Kegiatan Spm Bidang Perumahan Rakyat 90
Tabel 1.18 Kegiatandan Sub Kegiatan Spm Bidang Trantibumlinmas 90
Tabel 1.19 Kegiatandan Sub Kegiatan Spm Bidang Sosial 93
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro 94
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci *Outcome* 95
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 127
Tabel 2.4 Skala Skala Nilai Peringkat Kinerja 133
Tabel 2.5 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2023 134
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Indikator Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023 135
Tabel 2.7 Perbandingan Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya 138
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rpjmd Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 141
Tabel 2.9 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional Tahun 2023 144
Tabel 2.10 Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Dan Indeks Kualitas Lahan Kota Balikpapan 223

Tabel 2.11 Angka Kemiskinan Di Kota Balikpapan Tahun 2020-2023.....245
Tabel 2.12 Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023.....246
Tabel 2.13 Jumlah Program Per IKU Sasaran Strategis Kota Balikpapan Tahun 2023yang Mendukung.....277
Tabel 2.14 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja.....280
Tabel 2.15 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2023.....312
Tabel 2.16 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023.....313
Tabel 2.17 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja.....316
Tabel 2.18 Prestasi Dan Dan Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Kota Balikpapantahun 2023.....320
Tabel 2.1 9 Dokumentasi Penerimaan Penghargaan.....321
Tabel 4.1 Indikator **Kinerja Pencapaian SPM Pendidikan 2023 .....337**
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2023 339
Tabel 4.3 Indikator **Kinerja Pencapaian SPM [Ekerjaan Umum 2023.....347**
Tabel 4.4 Indikator **Kinerja Pencapaian SPM Perumahan Rakyat 2023.....349**
Tabel 4.5 Indikator **Kinerja Pencapaian SPM Trantibumlinmas 2023.....350**
Tabel 4.6 Indikator **Kinerja Pencapaian SPM Sosial 2023.....355**
Tabel 4.7 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 360
Tabel 4.8 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023.....367
Tabel 4.9 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023.....368
Tabel 4.10 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023.....371
Tabel 4.11 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023 373
Tabel 4.12 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2023.....379
Tabel 4.13 Dukungan Personil SPM Pendidikan Tahun 2023.....404
Tabel 4.14 Dukungan Personil SPM Kesehatan Tahun 2023 404
Tabel 4.15 Dukungan Personil SPM Pekerjaan Umum Tahun 2023 404
Tabel 4.16 Dukungan Personil SPM Perumahan Rakyat Tahun 2023.....405
Tabel 4.17 Dukungan Personil SPM Trantibumlinmas Tahun 2023 405
Tabel 4.18 Dukungan Personil SPM Sosial Tahun 2023.....406
Tabel 4.19 Realisasi Capaian SPM Pendidikan Tahun 2023.....406
Tabel 4.20 Indeks Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2023.....406
Tabel 4.21 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 410

Tabel 4.22 Realisasi Capaian SPM Kesehatan Tahun 2023 411
Tabel 4.23 Indeks Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 412
Tabel 4.24 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 425
Tabel 4.25 Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2023 425
Tabel 4.26 Indeks Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2023 426
Tabel 4.27 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 428
Tabel 4.28 Realisasi Capaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2023 428
Tabel 4.29 Indeks Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2023 429
Tabel 4.30 Indeks Pencapaian (IP) Perumahan Rakyat Tahun 2023 430
Tabel 4.31 Realisasi Capaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2023 430
Tabel 4.32 Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2023 431
Tabel 4.33 Indeks Pencapaian (IP) Trantibumlinmas Tahun 2023 437
Tabel 4.34 Realisasi Capaian SPM Sosial Tahun 2023 438
Tabel 4.35 Indeks Pencapaian SPM Sosial Tahun 2023 438
Tabel 4.36 Indeks Pencapaian (IP) Sosial Tahun 2023 443
Tabel 4.37 Permasalahan Dan Solusi Urusan Pendidikan 444
Tabel 4.38 Permasalahan Dan Solusi Urusan Kesehatan 446
Tabel 4.39 Permasalahan Dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum 451
Tabel 4.40 Permasalahan Dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat 452
Tabel 4.41 Permasalahan Dan Solusi Urusan Trantibumlinmas 454
Tabel 4.42 Permasalahan Dan Solusi Urusan Sosial 454

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan suatu wilayah tidak bisa lepas dari sejarah pembentukannya sebagai perjalanan sejarah dari masa ke masa. Secara historis yuridis,dasar pembentukan Kota Balikpapan sejak awal pendiriannya setelah kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 55/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penyempurnaan dan Penegasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 2 Februari 1969 Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 384 Tahun 1990 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 140/SK.149/1995 tanggal 16 Mei 1995 tentang Penetapan Pemecahan Kelurahan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 146/SK.144/1996 tanggal 17 Mei 1996 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat pada Kota Administratif Tarakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan dan Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56);
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 1996 tentang Penetapan 7 (Tujuh) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dan 5 (Lima) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda menjadi Kelurahan Definitif;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 8).

b. Data Geografis Wilayah

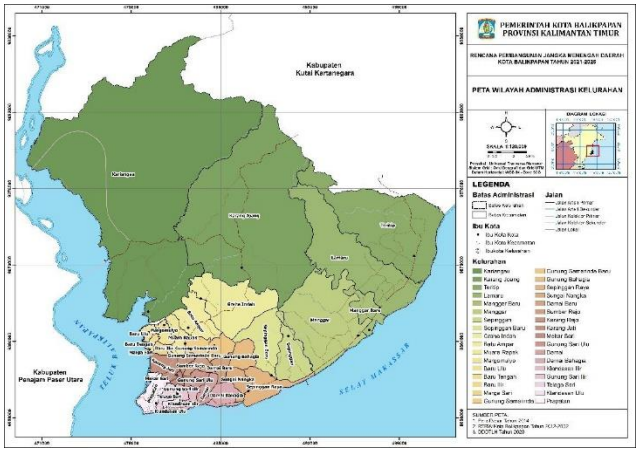
1. Luas, Batas Wilayah, Letak dan Kondisi Geografis

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan adalah 51.101,24 Ha. Secara geografis, Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5º Bujur Timur dan 117,0º Bujur Timur serta diantara 1,0º Lintang Selatan dan 1,5º Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar; dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kota Balikpapan wilayah utara—tenggara memiliki wilayah administratif yang luas di tiap kecamatan atau kelurahannya. Hal ini disebabkan banyak hutan

lindung, termasuk hutan lindung Sungai Wain yang berada di kawasan Kota Balikpapan bagian utara. Gambaran jelas Kota Balikpapan dapat dilihat pada Peta di bawah ini:



Gambar 1.1 Peta Peta Administrasi Kota Balikpapan

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun sejak dikeluarkannya Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, kini Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
Kecamatan Balikpapan Selatan		3.880,97
1	Damai Baru	215,53
2	Damai Bahagia	375,63
3	Sepinggan Baru	1.063,70
4	Sungai Nangka	319,95
5	Sepinggan Raya	662,58
6	Gunung Bahagia	373,86
7	Sepinggan	869,72

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
Kecamatan Balikpapan Kota		1.109,82
1	Prapatan	442,47
2	Telaga Sari	176,39
3	Klandasan Ulu	106,97
4	Klandasan Ilir	161,67
5	Damai	222,31
Kecamatan Balikpapan Timur		11.915,52
1	Manggar	3.303,73
2	Manggar Baru	521,35
3	Lamaru	3.607,02
4	Teritip	4.483,42
Kecamatan Balikpapan Tengah		1.082,58
1	Gunung Sari Ilir	108,51
2	Gunung Sari Ulu	205,61
3	Mekar Sari	72,37
4	Karang Rejo	121,90
5	Sumber Rejo	216,10
6	Karang Jati	358,10
Kecamatan Balikpapan Barat		19.288,02
1	Baru Ilir	71,31
2	Margo Mulyo	197,07
3	Marga Sari	56,94
4	Baru Tengah	91,25
5	Baru Ulu	121,21
6	Kariangau	18.750,25
Kecamatan Balikpapan Utara		13.824,34
1	Gunung Samarinda	266,42
2	Muara Rapak	316,71
3	Batu Ampar	780,04
4	Karang Joang	10.232,37
5	Gunung Samarinda Baru	266,42
6	Graha Indah	1.924,59

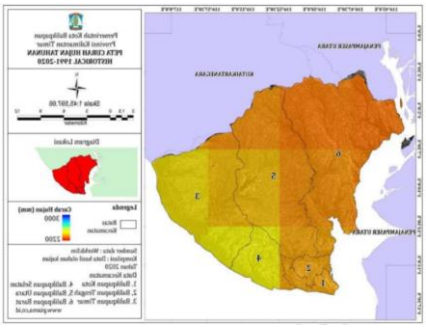
No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
Total Luas		**51.101,24**

Sumber: Rencana Detail Tata RuangKota Balikpapan Tahun 2021-2041.

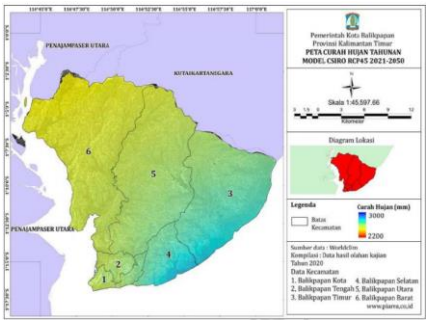
2. Iklim

2.1 Curah Hujan Kota Balikpapan

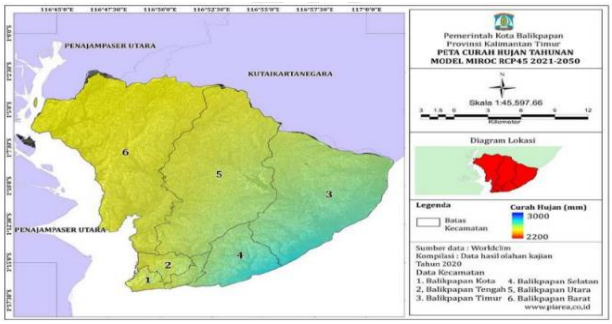
Curah hujan tahunan Kota Balikpapan historikal 1991-2020 memiliki rentang dari 2200 mm hingga 2400 mm yang ditunjukkan dengan sebaran warna kuning hingga merah. Pola sebaran curah hujan tahunan historikal tersebut dari hulu ke hilir menunjukkan peningkatan. Hal ini ditandai dengan sebaran warna kuning berada pada daerah pesisir dan sebaran warna jingga hingga merah berada di daerah perbukitan Kota Balikpapan (Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara). Curah hujan Kota Balikpapan diproyeksikan mengalami peningkatan secara merata dimasa depan dalam rentang 2500-2800 mm dengan sebaran pola tinggi hujan tetap.



Gambar 1.2 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.



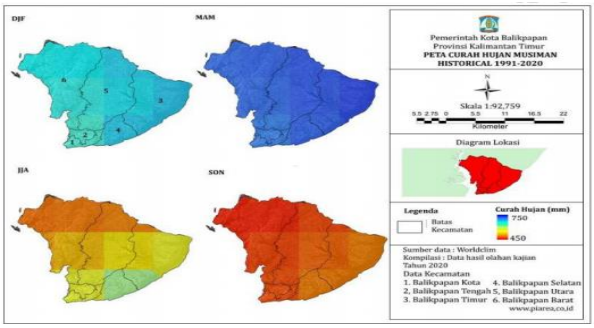
Gambar 1.3 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP452021-2050
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.



Gambar 1.4 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 Periode 2021-2050

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

Curah hujan musiman Kota Balikpapan berada dikisaran 750–450 mm. Curah hujan tertinggi historikal tahun 1991- 2020 terdapat pada bulan MAM (Maret, April dan Mei) yang ditunjukkan dengan warna yang lebih biru dibandingkan dengan bulannya lainnya.



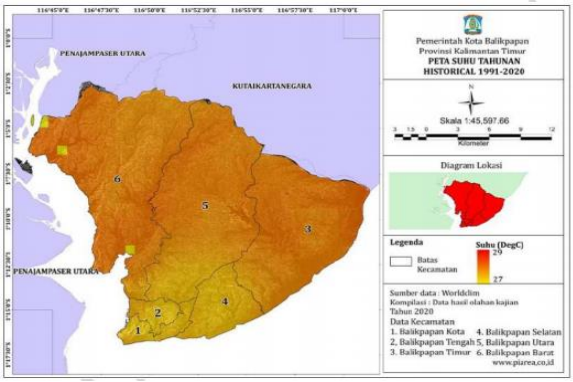
Gambar 1.5 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Musiman Historikal 1991-2020

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

Curah hujan musiman pada bulan SON (September, Oktober, dan November) lebih rendah dibandingkan dengan bulan lainnya ditunjukkan dengan warna yang semakin merah. Hal ini menunjukkan puncak musim hujan Kota Balikpapan berada pada musim MAM dan puncak musim kemarau pada musim SON.

2.2. Suhu Kota Balikpapan

Sebaran suhu Kota Balikpapan berada dikisaran 27°C hingga 29°C, warna semakin merah menunjukkan suhu yang semakin tinggi, sedangkan warna kuning menunjukkan suhu yang semakin rendah.



Gambar 1.6 Peta Suhu Kota Balikpapan TahunanHistorikal 1991-2020
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

3. Hidrologi

Balikpapan termasuk dalam WS strategis nasional Mahakam mencakup 32 Daerah Aliran Sungai (DAS). Potensi hidrologi yang terdapat di Kota Balikpapan meliputi air tanah dan air permukaan (sungai). Potensi air tanah di Kota Balikpapan termasuk dalam klasifikasi cukup baik. Sesuai dengan kondisi topografi dan fisiografi wilayah yang berbukit, menyebabkan pola aliran air tanah yang terbentuk mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah bagian selatan kota. Adanya keterbatasan penyediaan air bersih PDAM meyebabkan banyak penduduk yang memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Berikut dibawah ini DAS di Kota Balikpapan sebagai berikut.

Tabel 1.2
Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan

No.	Nama DAS	Grand Total	No.	Nama DAS	Grand Total
1	Gunungdubbs	42.05	17	Teluk Waru	479.71
2	Klandasan Besar/Ampal	4894.65	18	Tempadung	6571.97
3	Klandasan Kecil	1328.52	19	Tengah	657.52
4	Pandansari	1795.77	20	Wain	25349.31
5	Saluran I	245.83	21	Ajiraden	2806.05
6	Telagasari	210.75	22	Batakan	1866.75
7	Baru	221.12	23	Batakan Kecil	623.73
8	Beranga	2064.17	24	Lamaru	1075.14
9	Beruang	634.21	25	Manggar Besar	19752.86
10	Getah	887.38	26	Manggar Kecil	3998.02
11	Kemantis	641.42	27	Selok Api	3209.32

No.	Nama DAS	Grand Total	No.	Nama DAS	Grand Total
12	Keminting	2171.84	28	Sepinggan	3801.39
13	Sanrumukti	160.81	29	Teritip	3649.82
14	Seluk Pudak	374.54	30	Teritip Tengah	1061.29
15	Somber	8619.13	31	Saluran II	251.97
16	Tanjungbatu	236.02	32	Sepinggan Kecil	494.57

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2022

4. Topografi

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 26.090,57 ha atau 51,06 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 18.030,67 ha atau 35,28 % dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13,66 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian).

Tabel 1.3

Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian).

No	Ketinggian (mdpl)	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%)
1.	0-10	6.980,00	13,66
2.	>10-20	18.030,67	35,28
3.	>20-100	26.090,57	51,06
Jumlah		51.101,24	100

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2023

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 41,69% dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 1.4 berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan.

Tabel 1.4

Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan

No	Kelas Lereng	Luas Wilayah

	(%)	(Ha)	(%)
1	0-2	7.050,00	13,80
2	> 2-15	3.325,00	6.51
3	> 15-40	21.305,57	41,69
4	> 40	19.420,67	38
Jumlah		51.101,24	100

Sumber:DPPR Kota Balikpapan, 2023

c. Jumlah Penduduk

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2023 sebanyak 738.532 jiwa. Dari jumlah tersebut, 377.458 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 361.074 lainnya berjenis kelamin perempuan. Keseluruhan penduduk tersebar tidak merata di enam kecamatan dengan persebaran tertinggi di Balikpapan Utara, yakni mencapai 188.605 jiwa, sebaliknya, Balikpapan Kota merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni sebanyak 85.078 jiwa. Persebaran penduduk di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Jumlah penduduk Kota Balikpapan meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 yang sebesar 710.293 jiwa, pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Balikpapan sebanyak 727.665 jiwa, dan pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Balikpapan sebanyak 738.532 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan tahun 2022 adalah sebesar 2,45 persen dan tahun 2023 sebesar 1,49 persen.

Tabel 1. 5

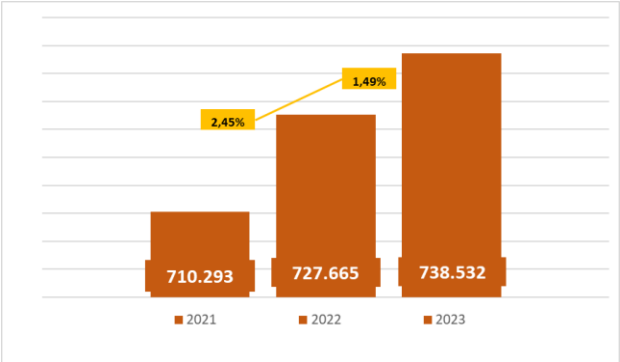
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin pada setiap Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	L	P	
Balikpapan Tengah	53.106	49.853	102.959
Balikpapan Kota	50.584	47.237	97.821
Balikpapan Timur	96.167	92.438	188.605
Balikpapan Utara	53.867	51.882	105.749

Kecamatan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	L	P	
Balikpapan Selatan	80.416	77.904	158.320
Balikpapan Barat	43.318	41.760	85.078

Sumber : disdukcapil Kota Balikpapan tahun 2024

Jika ditelusuri lebih lanjut Jumlah penduduk Kota Balikpapan meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 yang sebesar 710.293 jiwa, pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Balikpapan sebanyak 727.665 jiwa, dan pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Balikpapan sebanyak 738.532 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan tahun 2022 adalah sebesar 2,45 persen dan tahun 2023 sebesar 1,49 persen



gambar 1.7 pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 s.d 2023

d. Jumlah Kecamatan Dan Kelurahan

Secara administrativ sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiridari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Pada tahun 2012 terdapat pemekaran kecamatan dan kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah, Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, sehingga kecamatan dan kelurahan di Kota Balikpapan berubah menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tigapuluh empat) Kelurahan, sebagai berikut:

Tabel 1.6

Kecamatan Dan Kelurahan kota Balikpapan

No	Kelurahan
Kecamatan Balikpapan Selatan	
1	Damai Baru
2	Damai Bahagia
3	Sepinggan Baru
4	Sungai Nangka
5	Sepinggan Raya
6	Gunung Bahagia
7	Sepinggan
Kecamatan Balikpapan Kota	
1	Prapatan
2	Telaga Sari
3	Klandasan Ulu
4	Klandasan Ilir
5	Damai
Kecamatan Balikpapan Timur	
1	Manggar
2	Manggar Baru
3	Lamaru
4	Teritip
Kecamatan Balikpapan Tengah	
1	Gunung Sari Ilir
2	Gunung Sari Ulu
3	Mekar Sari
4	Karang Rejo
5	Sumber Rejo
6	Karang Jati
Kecamatan Balikpapan Barat	
1	Baru Ilir
2	Margo Mulyo
3	Marga Sari
4	Baru Tengah
5	Baru Ulu
6	Kariangau

No	Kelurahan
Kecamatan Balikpapan Utara	
1	Gunung Samarinda
2	Muara Rapak
3	Batu Ampar
4	Karang Joang
5	Gunung Samarinda Baru
6	Graha Indah

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Dalam rangka mendesain Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Kota Balikpapan menganut prinsip efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur dan ketersediaan pembiayaan untuk melaksanakan seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini terdiri dari pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan serta kecamatan. Untuk Kelurahan yang dulunya adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam Peraturan Daerah ini berubah menjadi Perangkat Kecamatan (bukan SKPD mandiri).

Berikut jumlah Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023.

Tabel 1.7

Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS		
		Laki-laki	perempuan	L+p
1	Sekretariat Daerah	71	56	127
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16	12	28
3	Inspektorat	19	28	47
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24	22	46
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	30	34	64

No	Perangkat Daerah	Jumlah PNS		
		Laki-laki	perempuan	L+p
6	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	54	19	73
7	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	15	18	33
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	7	21
9	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	146	13	159
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20	14	34
11	Dinas Ketenagakerjaan	12	17	29
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	11	24
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	12	14	26
14	Dinas Lingkungan Hidup	44	24	68
15	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	25	30	55
16	Dinas Pekerjaan Umum	38	19	57
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	7	27	34
18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	21	15	36
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21	23	44
20	Dinas Perhubungan	102	13	115
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	7	17	24
22	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	26	11	37
23	Dinas Perumahan dan Pemukiman	16	12	28
24	Dinas Sosial	12	14	26
25	Dinas Kesehatan	145	646	791
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	428	1327	1755
27	Dinas Perdagangan	34	25	59
28	Satuan Polisi Pamong Praja	149	14	163
29	Kecamatan Balikpapan Barat	42	19	61
30	Kecamatan Balikpapan Kota	29	26	55
31	Kecamatan Balikpapan Selatan	37	33	70
32	Kecamatan Balikpapan Tengah	30	30	60
33	Kecamatan Balikpapan Utara	42	18	60
34	Kecamatan Balikpapan Timur	32	12	44
JUMLAH		**1733**	**2620**	**4353**

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pemerintah kota Balikpapan dalam melaksanakan penganggaran mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Berikut Tabel Realisasi belanja APBD Kota Balikpapan tahun 2023;

Tabel 1.8

Realisasi Anggaran dan Belanja APBD Tahun 2023

	Tahun 2023	Alokasi Anggaran 2023	Realisasi 2023
Pendapatan Daerah		Rp. 3.732.305.262.770,00	Rp. 3.632.411.989.057,00
a	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 985.507.900.872,00	Rp. 966.621.225.704,00
b	Pendapatan Transfer	Rp. 2.740.214.230.298,00	Rp. 2.661.560.594.348,00
c	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 6.583.131.600,00	Rp. 4.230.169.005,00
Belanja Daerah		Rp. 4.280.175.478.317,00	Rp. 3.746.601.669.679,00
d	Belanja Operasi	Rp. 2.652.873.430.301,00	Rp. 2.331.395.721.553,00
e	Belanja Modal	Rp. 1.587.121.537.596,00	Rp. 1.391.241.283.554,00
f	Belanja Tidak Terduga	Rp. 38.680.510.420,00	Rp. 22.464.664.572,00
g	Belanja Transfer	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00

Sumber data:: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kota Balikpapan, 2024

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kondisi Anggaran dan Belanja daerah Tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp. 985.507.900.872,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp. 1.744.051.495.995,96;
b. Pendapatan Transfer Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp. 2.740.214.230.298,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp. 2.661.560.594.348,00;
c. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp. 6.583.131.600,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp. 4.230.169.005,00;
d. Belanja Operasi Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp. 2.652.873.430.301,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp. 2.331.395.721.553,00;

e. Belanja Modal Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp. 1.587.121.537.596,00 dengan kemampuan realisasi Sejumlah Rp. 1.391.241.283.554,00;

f. Belanja Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp. 38.680.510.420,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp. 22.464.664.572,00; dan

g. Belanja Belanja Transfer Tahun 2023 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp. 1.500.000.000,00

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 maka secara umum permasalahan pembangunan daerah dan prioritas lainnya di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9
Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Daerah	Permasalahan	Analisa
1	Birokrasi Pemerintahan	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	1) Perlunya Penguatan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Bebas Korupsi 2) Menumbuhkan "*trust*" yang tinggi dari masyarakat melalui: a. Inspirasi "*trust*" di lingkungan Pemerintah Kota b. Klarifikasi tentang tujuan organisasi. c. Penyelarasan sistem dan prosedur

No	Prioritas Daerah	Permasalahan	Analisa
			d. Penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat
2	Kesehatan dan Pendidikan	1) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar yang memadai; 2) Belum optimalnya pemenuhan kualitas dan kuantitas guru yang sesuai dengan standar/kebutuhan ; 3) Belum optimalnya IPM dari indikator Pendidikan;	1) Bidang Kesehatan: a. Subsidi iuran BPJS bagi peserta PBPU kelas 3. b. Pembangunan Rumah Sakit di wilayah yang membutuhkan
		4) Belum mamadainya alat Kesehatan di fasilitas Kesehatan; 5) Belum optimalnya SDM bidang Kesehatan; 6) Belum optimalnya promosi kesehatan masyarakat guna membangun pembangunan Kesehatan yang holistic; 7) Masih rendahnya penerapan pola hidup sehat di masyarakat.	a. Bantuan subsidi di SPP untuk sekolah swasta SD/MI dan SMP/MTs; b. Peningkatan Insentif Guru dari PAUD, TK, SD dan SMP; c. Pembangunan dan pengembangan sekolah sekolah nyaman dihuni (baik sarprasnya, kualitas gurunya dan kualitas proses belajar mengajar); b. Optimalisasi SKB (sanggar kegiatan belajar);
3	Pengentasan Kemiskinan	1) Masih rendahnya kualitas produk dari industri kecil dan menengah;	1) Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK); 2) Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK);

No	Prioritas Daerah	Permasalahan	Analisa
		2) Belum optimalnya pengembangan industri; 3) Belum optimalnya akses hunian layak terjangkau; 4) Masih terdapatnya permukiman kumuh dan warga yang tidak memiliki rumah.	3) Ketidaksinkronan data kemiskinan antar- OPD sehingga perlunya memilah data PPKS terkait dengan kebutuhannya masing-masing untuk memastikan penyaluraan bantuan tepat sasaran
4	Penyediaan Air Minum yang Sehat dan Merata	1) Terbatasnya ketersediaan air baku dikarenakan kurangnya sumber air dan permintaan air bersih meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, investasi usaha dan kegiatan yang membutuhkan air bersih; 2) Belum optimalnya layanan air bersih.	1) Akselarasi percepatan peningkatan air baku dan mempermudah akses masyarakat dalam pemasangan air minum; 2) Akselarasi percepatan peningkatan air baku dan mempermudah akses masyarakat dalam pemasangan air minum;
5	Pengendalian Banjir	1) Adanya pembukaan /pengupasan lahan yang tidak terpantau;	1) Percepatan penanganan DAS Sungai Ampal; 2) Percepatan pembangunan drainase di Balikpapan Timur;
		2) Masih adanya aktivitas pembangunan yang tidak mempertimbangkan DDTLH Kota Balikpapan; 3) Kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya;	3) Percepatan revitalisasi drainase di seluruh Kota Balikpapan; 4) Percepatan pembangunan Bendali/Bozem di Lingkungan Kawasan Perumahan.
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kondisi Sosial Yang Nyaman	1) Belum optimalnya pembangunan Kota yang aman, tertib dan ramah	1) Mewujudkan kota layak anak, layak difabel dan layak lansia; 2) Mewujudkan kota sehat, bebas narkoba;

No	Prioritas Daerah	Permasalahan	Analisa
		lingkungan; 2) Belum optimalnya penegakan regulasi daerah karena kondisi pandemi; 3) Kurangnya personil di dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	3) Menghidupkan ritual keagamaan di seluruh laporan masyarakat;
7	Pengembangan Balikpapan Sebagai Kota MICE dan Wisata		1) Pengembangan pusat perdagangan dan perekonomian; 2) Penguatan City Branding Balikpapan; 3) Pusat Forum Pertemuan Wilayah, Nasional dan International; 4) Kerjasama dengan seluruh organisasi profesi untuk bisnis untuk penyelenggaraan MICE; 5) Pengembangan objek wisata; 6) Pengembangan wisata behari di sepanjang pantai Balikpapan; 7) Pembangunan Kampung Budaya; 8) Penyediaan transportasi khusus ke daerah wisata; 9) Peningkatan kualitas hotel dan restoran
8	Pengembangan Balikpapan Sebagai Kota Kreatif		1) Penyelenggaran pekan ekonomi kreatif setiap tahun sebagai ajang promosi dan pemasaran produk-produk kreatif; 2) Pemuda-pemuda Balikpapan masuk ke pengembangan ekonomi kreatif melalui Pendidikan, pelatihan dan aksi-aksi kreatif;

No	Prioritas Daerah	Permasalahan	Analisa
			3) Balikpapan sebagai pusat Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku industry kretaif dan UMKM; 4) Event-event kreatif di luar daerah dan luar negeri;
9	Revitalisasi Perusda	1) Payung hukum eksistensi Perusda belum berjalan sebagaimana mestinya; 2) Belum optimalnya kontribusi terhadap PAD yang diberikan oleh Perusda	1) Dapat memberikan konstribusi PERUSDA yang besar terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Dapat Meningkatkan Kinerja Perusda

Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"

Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

1. Kota Balikpapan sebagai **Kota Terkemuka** dapat diartikan bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Balikpapan diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global dengan ditunjang oleh fasilitas penunjang perkotaan yang memadai. Kondisi kota juga semakin berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, dan udara). Rencana pengembangan pusat perekonomian baru dalam kawasan *Coastal Area*, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah, pengembangan objek wisata dan ekonomi kreatif masyarakat, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan dan pengembangan infrastruktur strategis lainnya, ditunjang dengan posisi

strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur dan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru diharapkan secara langsung berdampak pada perkembangan perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Kota Balikpapan Sebagai **Kota yang Nyaman Dihuni**, Kota Balikpapan akan terus memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan yang memadai serta berwawasan lingkungan agar Kota Balikpapan semakin nyaman dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat beraktifitas bagi warganya.
3. Kota Balikpapan sebagai Kota yang **Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman** adalah memiliki arti kota yang berperadaban tinggi, nyaman dihuni dengan spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas warga kota. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung kepemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan.

Untuk mewujudkan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 serta dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.



Gambar 1.8
Misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026
Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Selanjutnya misi tersebut dijabarkan menjadi beberapa tujuan dan sasaran pembangunan yang terdiri dari:

Tujuan 1: Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi

Salah satu prasyarat terwujudnya pembangunan daerah yang baik adalah dengan menguatkan tata kelola pemerintahan khususnya dari sisi profesionalitas dan transparansi. Sebagai respon dari isu strategis tersebut, maka proses perencanaan pembangunan Kota Balikpapan menetapkan tujuan yaitu "Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi". Untuk mendukung tujuan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.9
Tujuan dan Sasaran Misi 1
Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Tujuan ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan secara umum yang secara langsung akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Peningkatan kinerja profesionalitass dan transparansi birokrasi pemerintahan ini juga perlu didukung dengan perbaikan atau penyempurnaan dari sisi kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, sistem dan prosedur pelayanan umum sehingga menjadi lebih responsif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Tujuan Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi adalah hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indeks reformasi birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi.

Tujuan 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu isu strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan perekonomian daerah. Oleh karenanya, untuk merespon dan menindaklanjuti isu tersebut maka pembangunan Kota Balikpapan harus didorong dan diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing" dalam rentang waktu lima tahun mendatang. Pencapaian tujuan itu sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah Kota Balikpapan mampu memenuhi derajat kualitas "Indeks Pembangunan Manusia (IPM)".

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam penghitungan IPM, indikator yang digunakan adalah:

a. Dimensi Kesehatan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH);
b. Dimensi Pengetahuan diukur menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
c. Dimensi standar hidup layak diukur menggunakan Pengeluaran per Kapita disesuaikan.

Efektivitas pencapaian tujuan itu akan terjadi jika kinerja lintas OPD pemerintah Kota Balikpapan bisa tersinergikan dan terkonsolidasikan dengan baik. Pencapaian tujuan ini diukur dengan meningkatkan indeks kepuasan layanan infrastruktur. Untuk mendukung peningkatan IPM ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.10
Tujuan dan Sasaran Misi 2
Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

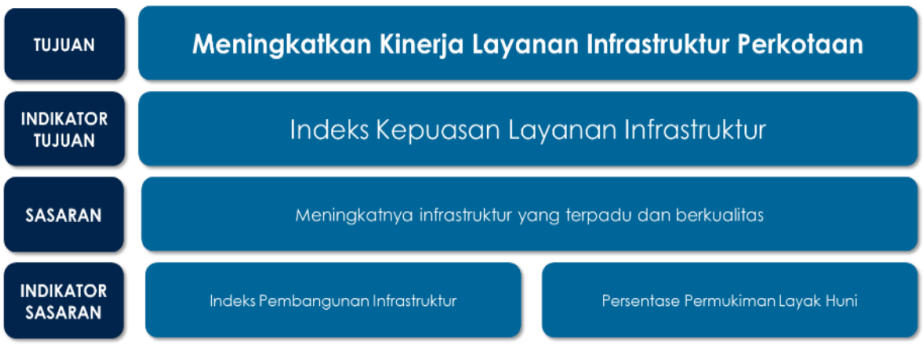
Tujuan 3: Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas dan meningkatkan layanan infrastruktur secara merata. Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastrukur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Selain mengukur kepuasan masyarakat juga akan diinvetarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Sektor infrastruktur yang dinilai dalam Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah:

a. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas
b. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut dan Udara)
c. Penyediaan infrastruktur air bersih
d. Penyediaan infrastruktur irigasi
e. Penyediaan infrastruktur perumahan

Untuk mendukung peningkatan indeks layanan infrastruktur ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.11
Tujuan dan Sasaran Misi 3
Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Tujuan 4: Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

Proses pembangunan di Kota Balikpapan diarahkan untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Paradigma pembangunan tersebut bertujuan agar proses pembangunan berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan dua isu strategis Kota Balikpapan yaitu Penyediaan Infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Untuk merespon isu strategis tersebut maka tujuan yang ditetapkan adalah Terwujudnya Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan. Untuk mendukung tujuan tersebut, satu indikator tujuan yang dijadikan target bersama oleh program lintas OPD Pemerintah Kota Balikpapan adalah "Indeks *Liveable City*". Indeks *Liveable City* atau Indeks Kota Layak Huni merupakan sebuah indeks tahunan yang menunjukkan tingkat kenyamanan warga kota untuk tinggal, menetap dan beraktivitas di suatu kota yang ditinjau dari berbagai aspek perkotaan. Prinsip-prinsip Kota Layak Huni adalah:

1. Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik);
2. Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan);
3. Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat;
4. Keamanan;
5. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota;
6. Sanitasi.

Upaya pencapaian tujuan ini didukung oleh sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.12
Tujuan dan Sasaran Misi 4
Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Tujuan 5: Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif

Upaya untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif diarahkan agar terjadi pertumbuhan ekonomi serta mengurangi dampak dari permasalahan kemiskinan. Inklusivitas dalam upaya pembangunan ekonomi menjadi kunci untuk mengejar pemerataan sehingga diharapkan pendapatan per kapita, kesejahteraan, dan daya beli masyarakat semakin membaik ke depannya. Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini, maka digunakan 1 indikator tujuan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah. Distribusi pendapatan semakin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai Koefisien Gini makin mendekati satu (1). Adapun upaya untuk memperbaiki indeks gini dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan UMKM, mengurangi tingkat pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan.

Tujuan 6: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah tidak terlepas dari perputaran roda ekonomi pada wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting untuk terus digerakkan demi menopang hajat hidup masyarakat. Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini maka digunakan 1 indikator yakni Pertumbuhan Ekonomi. Adapun upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mengintervensi berbagai sektor dan bidang mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, investasi, dan ketahanan pangan daerah. Upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.13

Tujuan dan Sasaran Misi 5 serta 6
Sumber: Bappedalitbang, diolah 2021

Selain itu, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Balikpapan tersebut, maka diperlukan strategi-strategi yang selanjutnya akan menjadi prioritas pembangunan Kota Balikpapan selama lima tahun ke depan. Berdasarkan hasil dari tahapan penyusunan Raperda RPJMD Kota Balikpapan yang dimulai dari konsultasi publik hingga Musrenbang RPJMD, maka dirumuskan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yakni:



Gambar 1.14
9 (Sembilan) prioritas pembangunan Kota Balikpapan
Tahun 2022-2026
Sumber: Bappeda Litbang, diolah 2021

1. Penguatan Birokrasi Pemerintahan;
   a. Penguatan tekad birokrasi yang profesional, transparan, dan bebas korupsi;
   b. Menumbuhkan "*trust*" yang tinggi dari masyarakat melalui:
      1) lnspirasi "*trust*" di lingkungan Pemerintah Kota;
      2) Klarifikasi tentang tujuan organisasi;
      3) Penyelarasan sistem dan prosedur;
      4) Penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan:

   Bidang Kesehatan:
   a. Subsidi iuran BPJS bagi peserta PBPU kelas 3;
   b. Pembangunan Rumah Sakit di wilayah yang membutuhkan

   Bidang Pendidikan:
   a. Bantuan subsidi SPP untuk sekolah swasta SD/Ml dan SMP/MTs;
   b. Peningkatan lnsentif Guru dari PAUD, TK, SD dan SMP;

c. Pembangunan dan pengembangan sekolah-sekolah nyaman dihuni (baik sarprasnya, kualitas gurunya dan kualitas proses belajar mengajar);
d. Optimalisasi SKB (Sanggar Kegiatan Belajar).

3. Pengentasan Kemisikinan;
   a. Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). dan;
   b. Bantuan Permodalan untuk UMKM.
4. Penyediaan Air Minum Yang Sehat Dan Merata;
   a. Akselerasi percepatan peningkatan penyediaan air baku dan mempermudah akses masyarakat dalam pemasangan air minum;
   b. Peningkatan ketersediaan air baku yang saat ini di-supply dari waduk Manggar dan Teritip +/- 1200 liter/detik, sedangkan total kebutuhan adalah 2200 liter/detik. Kekurangan tersebut akan dipenuhi dari pembangunan embung aji raden dan supply dengan pipanisasi dari waduk Sepaku Semoi sebesar 2000 liter/detik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan air baku Kota Balikpapan hingga beberapa tahun kedepan.
5. Pengendalian Banjir
   a. Percepatan penanganan DAS Sungai Ampal;
   b. Percepatan pembangunan drainase di Balikpapan Timur;
   c. Percepatan revitalisasi drainase di seluruh kota Balikpapan;
   d. Percepatan pembangunan Bendali/ Bozem di lingkungan kawasan perumahan.
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kondisi Sosial Yang Nyaman
   a. Mewujudkan Kota Layak Anak, Layak Difabel dan Layak Lansia;
   b. Mewujudkan Kota Sehat, bebas Narkoba dan HIV/AIDS.;
   c. Menghidupkan ritual keagamaan di seluruh lapisan masyarakat.
7. Pengembangan Balikpapan Sebagai Kota Mice Dan Wisata
   a. Pembangunan pusat perdagangan dan perekonomian;
   b. Penguatan City Branding Balikpapan;
   c. Pusat Forum Pertemuan Wilayah, Nasional dan lnternasional;
   d. Kerjasama dengan seluruh organisasi profesi dan bisnis untuk penyelenggaraan MICE;
   e. Pengembangan objek wisata;
   f. Pengembangan wisata bahari di sepanjang pantai Balikpapan;
   g. Pembangunan Kampung Budaya;
   h. Penyediaan transportasi khusus ke daerah wisata, dan;

i. Peningkatan kualitas hotel dan restoran.

8. Pengembangan Balikpapan Sebagai Kota Kreatif
   a. Penyelenggaraan Pekan Ekonomi Kreatif setiap tahun sebagai ajang promosi dan pemasaran produk-produk kreatif;
   b. Mendorong pemuda-pemuda Balikpapan masuk ke pengembangan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pelatihan dan aksi-aksi yang kreatif;
   c. Membentuk Rumah Kreatif di tiap kecamatan se Kota Balikpapan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi pelaku industri kreatif dan UMKM;
   d. Mengikuti event-event kreatif di luar daerah dan luar negeri.
9. Revitalisasi Perusda

   Restrukturisasi organisasi dan aktivitas Perusda, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah.

Memperhatikan tingkat urgensi/ kepentingannya serta berdasarkan tahapan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 maka tema dan prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan RPJMD Kota Balikpapan dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1.15
6 (enam) Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026
Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

Berdasarkan tema RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dengan Prioritas pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 maka fokus pembangunan daerah untuk Tahun 2023 merupakan Prioritas pembangunan Kota

Balikpapan Tahun 2023 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Balikpapan Tahun 2023.



Gambar 1.16
Fokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023
Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

Penerapan konsep holistik-tematik, integratif dan spasial terhadap Fokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus Pembangunan Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik

   Pada fokus pembangunan ini dokumen strategis yang dihasilkan antara lain Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.



Gambar 1.17
Fokus Pembangunan Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

Terdapat 5 program prioritas pembangunan daerah pada fokus pembangunan ini antara lain:

a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- Fokus pembangunan pada program ini adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Pemenuhan Kuantitas Aparatur Sipil Negara;
- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah BKPSM dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Fokus pembangunan pada program ini adalah Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Pemenuhan Kuantitas Aparatur Sipil negara;
- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Badan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Fokus pembangunan pada program ini adalah Peningkatan Layanan Kependudukan baik secara *Online* dan *Offline*, serta Kerjasama Pengiriman Dokumen kepada Masyarakat menggunakan Jasa Layanan *Online*;
- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kecamatan dan Kelurahan.

d) Program Penyelenggaraan Pengawasan

- Fokus pembangunan pada program ini adalah Pengendalian pelaporan penerimaan gratifikasi Pemantapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Penguatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Inspektorat dan Semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

e) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

- Fokus pembangunan pada program ini adalah Peningkatan Layanan Administrasi serta Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

2. Fokus Pembangunan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pada fokus pembangunan ini dokumen strategis yang dihasilkan antara lain:

- Dokumen Perencanaan SDK
- Dokumen Perencanaan Makro dan Mikro Ketenagakerjaan
- Dokumen Strategi Sanitasi Kota
- RAD Pangan dan Gizi
- Penyusunan RAPERDA Ketenagakerjaan



Gambar 1.18
Fokus Pembangunan Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

Adapun program prioritas pembangunan daerah pada fokus pembangunan ini antara lain:

a) Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Pemerataan Akses Layanan Pendidikan (Pembangunan unit sekolah baru, Penambahan ruang kelas baru, dan Sarana Utilitas Sekolah), Pemberian Subsidi SPP bagi siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama sederajat Swasta, Pemberian seragam sekolah bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama Negeri/swasta bagi kelas 1 dan 7, dan Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perumahan dan Permukiman, Bagian Organisasi Tata Laksana dan Pihak Swasta.

b) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Fokus pembangunan pada program ini adalah Pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Barat dan Rumah Sakit Balikpapan Timur, Peningkatan Frekuensi Diseminasi Program/Kegiatan Promotif dan Preventif Penyehatan Lingkungan (PHBS) kepada masyarakat, Bantuan Iuran BPJS (JKN) Kelas III bagi Masyarakat Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Masyarakat Tidak Mampu, Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan pada setiap layanan kesehatan (Dinkes, Rumah Sakit, dan PKM), dan Peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan;
- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Bagian Organisasi, BPJS Kesehatan dan Masyarakat.

c) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Fokus pembangunan pada program ini adalah Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kelurahan dan Masyarakat.

d) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Program Pembinaan Perpustakaan

- Fokus pembangunan pada program ini adalah memperbanyak koleksi buku bacaaan baik yang digital maupun konvensional, dan memperluas akses layanan perpustakaan di setiap kelurahan ataupun dengan layanan perpustakaan keliling;
- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kelurahan, Pihak Swasta dan Masyarakat.

3. Fokus Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Perkotaan

Pada fokus pembangunan ini dokumen strategis yang dihasilkan antara lain:

- *Masterplan Smart City* & SPBE
- MoU Pengendalian Banjir
- RPIJM
- SSK
- Rencana Pengembangan Citra Kota



Gambar 1.19
Fokus Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Perkotaan
Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

Terdapat 5 program prioritas pembangunan daerah pada fokus pembangunan ini antara lain:

a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Lanjutan Penanganan Banjir DAS Ampal (MYC), Peningkatan Jembatan di alur Sungai Ampal, Pembebasan Lahan Bendali Hulu Sungai Ampal, Drainase Depsos Atas, Malioboro, Agung Tunggal, Beler, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, dan Masyarakat.

b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Lanjutan Pembebasan Lahan dan Pembangunan Embung Aji Raden, Pembangunan IPA Teritip Tahap II, Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM Teritip dan Penyiapan SPAM Regional Sepaku Semoi;
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, dan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

c) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- Fokus pembangunan pada program ini adalah Penataan Taman Kota, Penataan Pedestrian dan Trotoar (Jend. Sudirman, A Yani), Pembangunan Landmark Kota, dan Sarana dan Prasarana Jalan (Jalur sepeda, marka, PJU, dan papan nama jalan);
- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup.

d) Program Pengelolaan Persampahan

- Fokus pembangunan pada program ini adalah Penanganan Sampah Pesisir, Penyiapan Pengembangan TPA Sampah Manggar, dan Peningkatan Manajemen Pengumpulan, Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan;
- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Pekerjaan umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat.

e) Program Penanggulangan Bencana

- Fokus pembangunan pada program ini adalah Peningkatan dan pengembangan kompetensi BPBD, Pemenuhan Kuantitas SDM BPBD, serta Pemenuhan Sarana dan Prasana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (baik terpusat pada kantor BPBD dan pada setiap UPTD di wilayah kecamatan);
- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan umum, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial, Bagian Organisasi, Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat.

4. Fokus Pembangunan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Pada fokus pembangunan ini dokumen strategis yang dihasilkan antara lain:

- *Masterplan Smart City* & SPBE
- Peta Jalan Pengendalian Inflasi
- Masterplan Pengembangan Ekonomi Kreatif
- *Roadmap* TP2DD



Gambar 1.20
Fokus Pembangunan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

Terdapat 4 program prioritas pembangunan daerah pada fokus pembangunan ini antara lain:

a) Program Pemberdayaan & Pengembangan UMKM (UMKM Tumbuh)
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah UMKM *Digital Academy*, *Capacity Building* UMKM, Publikasi dan *Branding* & Promosi Produk UMKM berbasis bahan lokal;
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Perindustrian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Perbankan, Dunia Usaha, Media, Dekranasda dan Forum EKRAF.

b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Kemitraan Tenaga Kerja dan Pasar Kerja, dan Kemitraan Tenaga Kerja dan UMKM;
   - Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Perindustrian.

c) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi & Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   - Fokus pembangunan pada program ini adalah Pengembangan Sarpras Pantai Manggar, Pengembangan 3 Desa Wisata Baru dan 3 Desa Wisata Prioritas, dan Peningkatan Kapasitas Pelaku Pariwisata & Perhotelan;

- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Perindustrian, Dunia Usaha, dan Forum EKRAF

d) Program Promosi Daerah

- Fokus pembangunan pada program ini adalah Promosi Investasi: ALKI II EXPO, Promosi Pariwisata: Balikpapan *Marathon* (Scalling Up Balikpapan 10K), dan Promosi Produk Unggulan: Balikpapan *Fest*;
- Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal terpadu, Dinas Perdagangan, Perbankan, Dunia Usaha, dan Media.

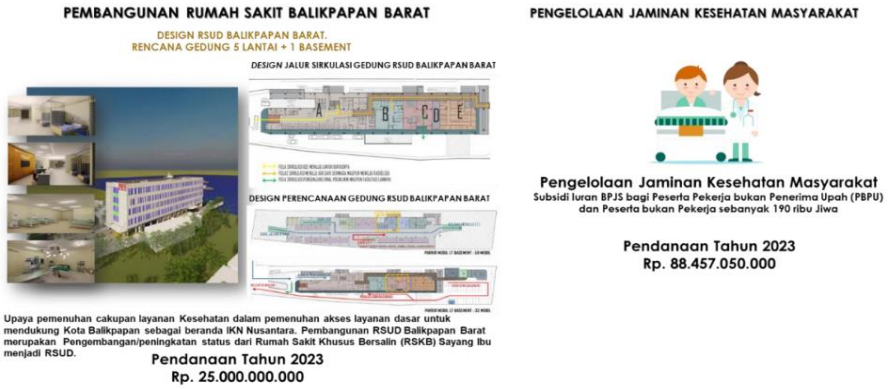
Di samping itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan program prioritas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Adapun Program Prioritas Kota Balikpapan pada Tahun 2023 yang di usulkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan timur adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan



Gambar 1.21
Bidang Pendidikan
Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

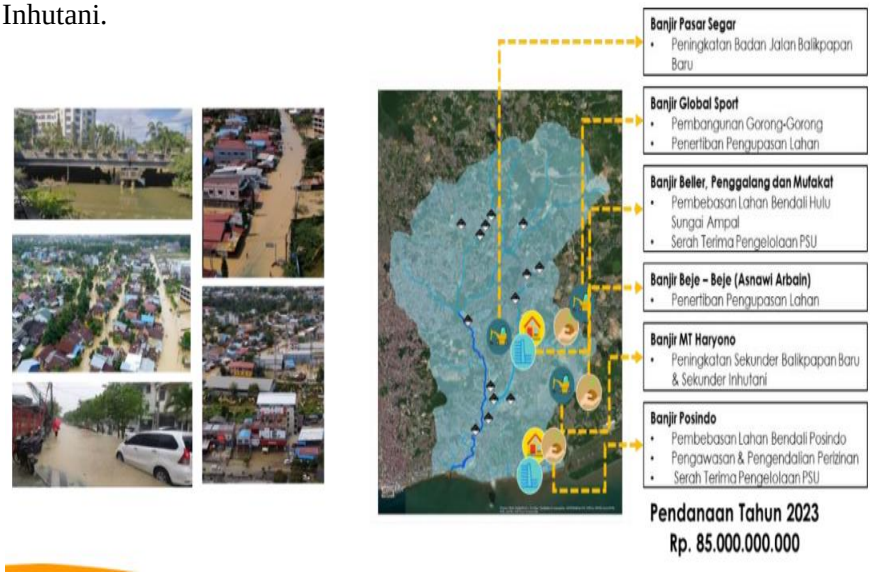
2. Bidang Kesehatan



Gambar 1.22
Bidang Kesehatan
Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

3. Penanggulangan Banjir (Das Ampal)

Sebagai komitmen Pemerintah Kota untuk Pengendalian Banjir DAS Ampal dan didukung oleh DPRD Kota Balikpapan, maka sejak Perubahan APBD TA 2021 hingga Perubahan APBD TA 2023 telah disepakati pelaksanaan kegiatan tahun jamak (*multiyears*) pengendalian banjir DAS Ampal sebesar Rp.150 Miliar yang difokuskan pada saluran sekunder Balikpapan Baru dan saluran sekunder Inhutani.



Gambar 1.23
Penanggulangan Banjir (Das Ampal)
Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

4. Penataan Jalan MT. Haryono

Dalam rangka penataan Jalan MT Haryono ini, Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2022 akan melaksanakan penyusunan RTBL DAS Ampal sebagai

konsep integrasi antara upaya pengendalian banjir dan penataan kawasan DAS Ampal karena ruas jalan MT Haryono ini termasuk dalam DAS Ampal.



Gambar 1.24
Penataan Jalan MT. Haryono
Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

5. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Teritip

Untuk memenuhi kebutuhan Kota Balikpapan hingga tahun 2024, penyediaan air minum direncanakan melalui pembangunan SPAM Teritip dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 400 liter/detik yang bersumber dari Waduk Teritip dengan kapasitas sebesar 250 liter/detik dan Embung Aji Raden sebesar 150 liter/detik.



Gambar 1.25
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Teritip
Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

6. Pengembangan Pariwisata

Kota Balikpapan memiliki posisi strategis karena berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan memiliki sarana prasarana transportasi Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Pelabuhan Semayang, dan Pelabuhan Kariangau. Kota Balikpapan berkembang menjadi sebuah kota jasa sebagaimana visi jangka panjang Kota Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi (Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan, dan Kebudayaan) sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara dan Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 1.26
Pengembangan Pariwisata
Sumber: RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 memiliki Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dan Target Kinerja yang menentukan program pembangunan daerah Kota Balikpapan.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.10
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Profesionalitas dan Transparasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	68,99	75,5	75,52	75,54	75,56	75,58	75,58
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	N/A	79	80	81	82	83	83
			Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	24,21%	36,88 %	41,42 %	44,17 %	44,74 %	44,40 %	44,40%
			Indeks SPBE	Poin	N/A	3.1	3.3	3.6	3.7	4.0	4.0
			Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
		Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0,62	0,69	0,73	0,76	0,80	0,84	0,84
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	N/A	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
MISI 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0,7487	0,7500	0,7506	0,7512	0,7518	0,7524	0,7524
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,8383	0,8385	0,8388	0,8391	0,8394	0,8397	0,8397
		Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	N/A	10,5	11	11,5	12	12,5	12,5
		Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,025
		Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,4920	0,4960	0,4962	0,4964	0,4965	0,4975	0,4975
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	14,43%	17%	25%	35%	45%	60%	60%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Berbasis Pengarustamaan Gender									
MISI 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.	Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	77,8	78,2	78,78	79,12	79,55	80,02	80,02
			Persentase Permukiman Layak Huni	%	98,59%	99,05 %	99,32 %	99,55 %	99,78 %	100%	100%
MISI 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,07	68,15	68,23	68,31	68,41	68,51	68,51
			Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89%	89,2%	89,4%	89,6%	89,8%	90%	90%
		Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	108	107	105	103	101	99	99
			Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,5601	0,8000	0,8267	0,8575	0,8675	0,8794	0,8794
MISI 5 : Mengembangk	Meningkatkan Pemerataan	Meningkatnya Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan	%	3,09%	3,14%	3,17%	3,19%	3,33%	3,45%	3,45%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
an Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.	Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	UMKM								
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9	9	8,46	8,22	7,98	7,74	7,74
			Tingkat Kemiskinan	%	2,57	2,42	2,39	2,38	2,37	2,36	2,36
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	3,018	3,330	3,530	3,780	4,080	4,440	4,440
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	8 7	87	88	89	90	90
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1,08	1,20	1,50	1,90	2,50	3,40	3,40
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	N/A	2,20%	2,42%	2,66%	2,93%	3,22%	3,22%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Kreatif									
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-0,56%	3,50%	3,97%	4,00%	4,25%	5,00%	5,00%

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.11
Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	69,50
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	28,93%
		Indeks SPBE	3,3
		Maturitas SPIP	Level 3
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	0,73
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,24
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,7620
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8440
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,71
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,089
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	0,4962
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,96
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	78,78
		Persentase Permukiman Layak Huni	99,32%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,70

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukan	89,40%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	105
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,8267
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah , Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Presentase Pertumbuhan UMKM	16.40%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,70
		Tingkat Kemiskinan	2,39
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	8,8
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	87
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,9
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	30%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,25%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Adapun program dan anggaran perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung capaian sasaran pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.12
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan
Kota Balikpapan Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
I	**PROGRAM PRIORITAS**		
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 56,249,166,250	Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	3,895,145,300	Sekretariat Daerah
3	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas I)	Rp	3,759,867,778	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (Prioritas I)	Rp	2,415,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	53,645,375,120	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	75,980,428,550	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	9,701,290,440	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
8	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	205,652,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	8,203,251,400	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	410,550,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	8,946,635,100	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Program Penyelenggaraan Pengawasan (Prioritas I)	Rp	1,730,023,400	Inspektorat
13	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Prioritas I)	Rp	2,841,751,200	Inspektorat
14	Program Kepegawaian Daerah (Prioritas I)	Rp	5,589,811,650	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Sumber Daya Manusia
15	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas I)	Rp 6,580,456,050	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16	Program Pendaftaran Penduduk (Prioritas I)	Rp 111,724,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Program Pencatatan Sipil (Prioritas I)	Rp 88,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Prioritas I)	Rp 996,903,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 51,329,136,548	Sekretariat DPRD
20	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 278,691,450	Kecamatan Balikpapan Barat
21	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 8,440,127,390	Kecamatan Balikpapan Barat
22	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 468,304,400	Kecamatan Balikpapan Barat
23	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 500,838,350	Kecamatan Balikpapan Selatan
24	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 10,369,548,150	Kecamatan Balikpapan Selatan
25	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 519,421,600	Kecamatan Balikpapan Selatan
26	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 287,810,625	Kecamatan Balikpapan Kota

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
27	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	8,067,824,500	Kecamatan Balikpapan Kota
28	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	414,788,200	Kecamatan Balikpapan Kota
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	707,931,450	Kecamatan Balikpapan Timur
30	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	9,112,218,900	Kecamatan Balikpapan Timur
31	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	602,115,800	Kecamatan Balikpapan Timur
32	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	502,828,150	Kecamatan Balikpapan Utara
33	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	10,143,330,650	Kecamatan Balikpapan Utara
34	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	438,624,400	Kecamatan Balikpapan Utara
35	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	580,843,400	Kecamatan Balikpapan Tengah
36	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	10,247,173,700	Kecamatan Balikpapan Tengah
37	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	898,351,700	Kecamatan Balikpapan Tengah
38	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	751,939,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
39	Program Pengelolaan Pendidikan (Prioritas II)	Rp	503,883,561,265	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
40	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	3,322,750,500	Dinas Pendidikan dan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Kebudayaan
41	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Prioritas II)	Rp 286,779,326,544	Dinas Kesehatan, RSIA, RSUD
42	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 2,482,797,000	Dinas Kesehatan
43	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 1,488,146,000	Dinas Kesehatan
44	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 12,121,162,000	Dinas Kesehatan
45	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1,236,802,400	Dinas Perpustakaan dan Arsip
46	Program Pengelolaan Arsip	Rp 283,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
47	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 90,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
48	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp 15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
49	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 7,555,914,050	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
50	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 1,676,815,000	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
51	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 27,193,282,000	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
52	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 1,600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 305,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
54	Program Pembinaan Sejarah	Rp 60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
55	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 990,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
56	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 675,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
57	Program Perlindungan Perempuan	Rp 939,204,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
58	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 700,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
59	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
60	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 2,327,140,750	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
61	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 1,586,197,300	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
62	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 589,289,479	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Berencana
63	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 6,569,050,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
64	Program Pengendalian Penduduk	Rp 878,600,300	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
65	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 3,022,479,433	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
66	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 3,996,265,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
67	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 44,790,295,000	Dinas Pekerjaan Umum
68	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 6,287,572,900	Dinas Pekerjaan Umum
69	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Prioritas IV)	Rp 15,288,459,000	Dinas Pekerjaan Umum
70	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (Prioritas V)	Rp 9,704,131,400	Dinas Pekerjaan Umum
71	Program Penyelenggaraan Jalan (Prioritas V)	Rp 242,883,796,550	Dinas Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
72	Program Pengembangan Permukiman (Prioritas V)	Rp	258,153,923,469	Dinas Pekerjaan Umum
73	Program Penataan Bangunan Gedung (Prioritas V)	Rp	173,920,334,600	Dinas Pekerjaan Umum
74	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	1,952,375,000	Dinas Pekerjaan Umum
75	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (Prioritas V)	Rp	262,701,455,000	Dinas Pekerjaan Umum
76	Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	130,345,437,265	Dinas Perhubungan
77	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp	1,831,000,000	Dinas Perhubungan
78	Program Pengembangan Perumahan (Prioritas VI)	Rp	7,904,553,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
79	Program Kawasan Permukiman (Prioritas VI)	Rp	4,165,648,800	Dinas Perumahan dan Permukiman
80	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Prioritas VI)	Rp	4,954,855,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
81	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	775,183,300	Dinas Sosial
82	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (Prioritas VI)	Rp	1,454,998,700	Dinas Lingkungan Hidup
83	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (Prioritas VI)	Rp	52,341,436,966	Dinas Lingkungan Hidup
84	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Prioritas VI)	Rp	124,602,950	Dinas Lingkungan Hidup
85	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Prioritas VI)	Rp	2,552,791,650	Dinas Lingkungan Hidup
86	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (Prioritas VI)	Rp	247,519,700	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
87	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (Prioritas VI)	Rp	580,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
88	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (Prioritas VI)	Rp	335,097,100	Dinas Lingkungan Hidup
89	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (Prioritas VI)	Rp	1,565,589,300	Dinas Lingkungan Hidup
90	Program Pengelolaan Persampahan (Prioritas VI)	Rp	80,359,644,841	Dinas Lingkungan Hidup
91	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	18,217,572,900	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
92	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	2,508,814,400	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
93	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp	541,573,500	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
94	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp	170,388,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
95	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp	50,864,577,634	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
96	Program Penanggulangan Bencana	Rp	4,136,090,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
97	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	38,919,964,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
98	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	9,005,292,450	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
99	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	3,842,397,700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
100	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	87,861,591,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
101	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	1,785,920,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
102	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp	1,485,481,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
103	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	9,887,155,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
104	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
105	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	149,999,998	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
106	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
107	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	268,117,350	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
108	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (Prioritas III)	Rp	1,705,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
109	Program Pengembangan UMKM (Prioritas III)	Rp	5,880,081,613	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
110	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	5,348,001,687	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
111	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
112	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
113	Program Perencanaan Tenaga Kerja (Prioritas III)	Rp	114,994,800	Dinas Ketenagakerjaan
114	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Prioritas III)	Rp	1,561,279,000	Dinas Ketenagakerjaan
115	Program Penempatan Tenaga Kerja (Prioritas III)	Rp	370,827,800	Dinas Ketenagakerjaan
116	Program Hubungan Industrial (Prioritas III)	Rp	460,818,120	Dinas Ketenagakerjaan
117	Program Pemberdayaan Sosial (Prioritas III)	Rp	1,522,999,850	Dinas Sosial
118	Program Rehabilitasi Sosial (Prioritas III)	Rp	3,020,000,300	Dinas Sosial
119	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Prioritas III)	Rp	1,865,249,950	Dinas Sosial
120	Program Penanganan Bencana (Prioritas III)	Rp	817,390,278	Dinas Sosial
121	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	167,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
122	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 4,101,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
123	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 575,260,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
124	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 374,320,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
125	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 238,112,000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
126	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 97,105,000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
127	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 196,000,000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
128	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 875,000,000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
129	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 1,149,982,375	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
130	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 947,928,000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
131	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1,500,700,000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
132	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 2,950,000,000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
133	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 744,575,000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
134	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Prioritas VII)	Rp	11,790,078,500	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
135	Program Pemasaran Pariwisata (Prioritas VI)	Rp	7,838,294,500	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
136	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Prioritas VIII)	Rp	567,256,000	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
137	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Prioritas VIII)	Rp	1,106,547,000	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
138	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	375,159,780	Dinas Perdagangan
139	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	27,128,566,326	Dinas Perdagangan
140	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	538,181,000	Dinas Perdagangan
141	Program Pengembangan Ekspor	Rp	221,439,788	Dinas Perdagangan
142	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	148,560,212	Dinas Perdagangan
143	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	513,356,332	Dinas Perdagangan
II	**PROGRAM PENUNJANG**			
144	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	413,774,613,773	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
145	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	246,753,854,756	Dinas Kesehatan, RSUD, RSIA
146	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	20,897,823,300	Dinas Pekerjaan Umum
147	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	10,998,758,868	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
148	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 36,305,428,100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
149	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30,113,834,746	Satuan Polisi Pamong Praja
150	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8,942,111,616	Dinas Sosial
151	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8,131,408,905	Dinas Ketenagakerjaan
152	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9,724,542,738	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
153	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13,566,827,700	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
154	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19,982,635,334	Dinas Lingkungan Hidup
155	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14,444,697,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
156	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 33,611,300,173	Dinas Perhubungan
157	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7,296,731,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
158	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9,658,098,900	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
159	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19,094,281,000	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
160	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9,397,350,050	Dinas Perpustakaan dan Arsip

NO	PROGRAM	ANGGARAN		PERANGKAT DAERAH
161	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	11,062,008,700	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
162	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	17,798,722,100	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
163	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	17,063,534,870	Dinas Perdagangan
164	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	16,729,311,610	Inspektorat
165	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	11,362,009,150	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
166	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	28,622,474,181	Badan Keuangan dan Aset Daerah
167	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	51,486,000,110	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
168	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	10,562,847,750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
169	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	143,717,363,416	Sekretariat Daerah
170	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	99,825,558,662	Sekretariat DPRD
171	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	7,558,132,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
172	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	16,637,726,993	Kecamatan Balikpapan Barat
173	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	16,497,138,086	Kecamatan Balikpapan Kota

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
174	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19,755,628,720	Kecamatan Balikpapan Selatan
175	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13,215,743,758	Kecamatan Balikpapan Timur
176	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17,389,492,556	Kecamatan Balikpapan Utara
177	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17,490,419,400	Kecamatan Balikpapan Tengah
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM		**Rp 4,280,175,478,317**	

Sumber: Bagian Organisasi, diolah 2023

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan dan anggaran pendukung program kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.13
Kegiatan dan Anggaran di Pemerintah Kota Balikpapan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450,000,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	399,198,855,038
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9,049,046,735
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,295,000,000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	3,781,712,000
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	226,861,559,515
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	205,200,551,450

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
8	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	42,231,982,000
9	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	29,589,468,300
10	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,322,750,500
11	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	125,000,000
12	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,200,000,000
13	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	275,000,000
14	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	305,000,000
15	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000
16	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	76,500,000
17	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	913,500,000
DINAS KESEHATAN		
18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117,538,600,000
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,022,086,134
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,945,000,000
21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,980,918,000
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,465,000,000
23	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	115,067,950,279
24	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	168,523,252,754
25	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	935,000,000
26	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	497,500,000
27	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di	300,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
	Wilayah Kabupaten/Kota	
28	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	294,298,000
29	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,888,499,000
30	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	513,730,000
31	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	555,450,000
32	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100,000,000
33	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	50,000,000
34	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	268,966,000
35	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9,971,450,000
36	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,070,038,000
37	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,070,774,000
38	Peningkatan Pelayanan BLUD	119,802,250,622
39	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1,755,623,511
40	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	8,900,000
DINAS PEKERJAAN UMUM		
41	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195,000,000
42	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,526,675,600
43	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,102,811,100
44	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,004,208,400

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
45	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,637,240,000
46	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6,287,572,900
47	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	262,701,455,000
48	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15,288,459,000
49	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44,790,295,000
50	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	9,704,131,400
51	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,431,888,200
52	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	173,920,334,600
53	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	258,153,923,469
54	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	242,883,796,550
55	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1,754,875,000
56	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	197,500,000
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
57	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	18,217,572,900
58	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	300,000,000
59	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	956,875,400
60	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	931,448,000
61	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	320,491,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
62	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,802,298,600
63	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	211,000,000
64	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,625,286,300
65	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,477,029,300
66	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	767,493,500
67	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683,720,000
68	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	541,573,500
69	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50,864,577,634
70	Penerbitan Izin Membuka Tanah	170,388,000
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
71	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,127,990,000
72	Administrasi Umum Perangkat Daerah	945,816,850
73	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,162,275,400
74	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	979,502,368
75	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	783,174,250
76	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	25,000,000
77	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	126,650,000
78	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	805,000,000
79	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	6,092,903,500
80	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	805,000,000
81	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	50,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
82	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	679,354,300
83	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3,486,294,500
84	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	4,954,855,500
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
85	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000
86	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24,114,243,000
87	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,050,681,100
88	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,550,244,300
89	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,932,200
90	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570,327,500
91	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	3,920,000,000
92	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	124,000,000
93	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2,888,500,000
94	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	195,000,000
95	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	928,590,000
96	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	34,641,684,900
97	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100,000,000
98	Investigasi Kejadian Kebakaran	50,000,000
99	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	4,028,280,000
100	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100,000,000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
101	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,657,358,000
102	Administrasi Umum Perangkat Daerah	897,232,954
103	Pengadaan Barang Milik Daerah	30,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
104	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651,918,715
105	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,877,325,077
106	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8,366,642,450
107	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	532,650,000
108	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	106,000,000
DINAS SOSIAL		
109	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,813,381,616
110	Administrasi Umum Perangkat Daerah	893,753,400
111	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32,044,100
112	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,062,086,000
113	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,140,846,500
114	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	649,999,950
115	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	872,999,900
116	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1,887,811,100
117	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1,132,189,200
118	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,865,249,950
119	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	572,586,178
120	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	244,804,100
121	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	775,183,300
DINAS KETENAGAKERJAAN		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
122	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,084,572,000
123	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	318,204,600
124	Administrasi Umum Perangkat Daerah	877,685,471
125	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299,442,500
126	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157,183,500
127	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394,320,834
128	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	114,994,800
129	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,457,804,000
130	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	51,775,000
131	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	51,700,000
132	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	190,234,800
133	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	138,610,500
134	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	41,982,500
135	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	460,818,120
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
136	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,466,350,675
137	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,056,486,763
138	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	244,454,500
139	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414,192,000
140	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543,058,800
141	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	270,000,000
142	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	405,000,000
143	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	609,700,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
144	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	254,504,000
145	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000
146	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	700,000,000
147	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000
148	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	487,747,000
149	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1,839,393,750
150	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	673,600,000
151	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	732,150,000
152	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180,447,300
153	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	589,289,479
154	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	6,569,050,000
155	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	107,600,000
156	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	771,000,300
157	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	519,550,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
158	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	278,065,900
159	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,568,863,533
160	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	656,000,000
161	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3,996,265,000
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
162	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,250,000,000
163	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,001,421,600
164	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199,955,900
165	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,032,344,600
166	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,315,000,000
167	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	204,862,000
168	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	33,250,000
169	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	97,105,000
170	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	196,000,000
171	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	675,000,000
172	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	200,000,000
173	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	150,000,000
174	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	999,982,375
175	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1,325,000,000
176	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	175,700,000
177	Pengembangan Prasarana Pertanian	450,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
178	Pembangunan Prasarana Pertanian	2,500,000,000
179	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	500,000,000
180	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150,575,000
181	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	94,000,000
182	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	947,928,000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
183	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,321,000
184	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,057,363,000
185	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,500,000,000
186	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000
187	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,591,509,800
188	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179,818,500
189	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,894,271,000
190	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,701,352,034
191	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	604,998,700
192	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	850,000,000
193	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,419,141,000
194	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	986,680,000
195	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	146,970,650
196	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	52,341,436,966
197	Penyimpanan sementara Limbah B3	55,000,000
198	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	525,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
199	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	335,097,100
200	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	1,565,589,300
201	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	247,519,700
202	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	124,602,950
203	Pengelolaan Sampah	80,359,644,841
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
204	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,201,452,000
205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,779,000
206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,093,833,500
207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	427,469,600
208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,184,136,600
209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515,026,800
210	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	111,724,500
211	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	88,000,000
212	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	656,175,000
213	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	340,728,000
DINAS PERHUBUNGAN		
214	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,059,640,800
215	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,014,000,000
216	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,971,602,800
217	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,781,404,200
218	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,654,331,000
219	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,130,321,373
220	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	20,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
221	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	113,146,597,465
222	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	950,000,000
223	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	4,226,756,400
224	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,068,390,600
225	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3,661,000,000
226	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2,690,192,800
227	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,480,000,000
228	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	52,500,000
229	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000
230	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1,831,000,000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
231	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,500,000,000
232	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40,000,000
233	Administrasi Umum Perangkat Daerah	980,231,000
234	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436,500,000
235	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340,000,000
236	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8,203,251,400
237	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,988,858,200
238	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,957,776,900
239	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	205,652,500
240	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	410,550,000
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
PERINDUSTRIAN		
241	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,518,703,400
242	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,041,700,000
243	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000
244	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1,705,200,000
245	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	812,395,500
246	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	268,117,350
247	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000
248	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000
249	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250,000,000
250	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	5,880,081,613
251	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	149,999,998
252	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000
253	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,035,300,000
254	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5,348,001,687
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
255	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,875,431,000
256	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,605,789,000
257	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	452,010,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
258	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,306,721,000
259	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	854,330,000
260	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	167,500,000
261	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4,101,000,000
262	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	751,939,000
263	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	575,260,000
264	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	374,320,000
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
265	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,676,217,392
266	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,229,316,400
267	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,236,100,408
268	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	920,374,500
269	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	3,489,618,400
270	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4,066,295,650
271	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000
272	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,527,072,000
273	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	12,390,390,000
274	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1,375,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
275	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	9,700,820,000
276	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1,676,815,000
277	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7,847,460,060
278	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3,767,618,440
279	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	175,000,000
280	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7,838,294,500
281	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	360,000,000
282	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	207,256,000
283	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1,106,547,000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
284	Administrasi KSeuangan Perangkat Daerah	4,657,487,200
285	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,522,216,750
286	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,487,222,000
287	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730,424,100
288	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	995,094,900
289	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	241,707,500
290	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	192,000,000
291	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000
292	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	61,000,000
293	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	14,500,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
294	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	10,500,000
295	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	35,000,000
296	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	30,000,000
297	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	15,000,000
DINAS PERDAGANGAN		
298	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,800,000,000
299	Administrasi Barang Milik Daerah pada	54,000,000
300	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93,500,000
301	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,512,084,000
302	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187,920,000
303	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,586,214,870
304	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,829,816,000
305	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	285,000,000
306	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	50,000,000
307	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	40,159,780
308	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21,511,938,326
309	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	5,616,628,000
310	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	195,200,000
311	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	342,981,000
312	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	221,439,788

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
313	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	513,356,332
314	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	148,560,212
SEKRETARIAT DAERAH		
315	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116,000,000
316	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28,630,368,775
317	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,460,000,000
318	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,640,329,800
319	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18,616,803,300
320	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,625,439,330
321	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,768,301,660
322	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,120,527,851
323	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2,678,000,000
324	Penataan Organisasi	789,945,300
325	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,271,647,400
326	Administrasi Tata Pemerintahan	16,673,830,450
327	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	31,297,965,400
328	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2,488,345,800
329	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	5,789,024,600
330	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	805,998,800
331	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,714,146,500
332	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,375,000,000
SEKRETARIAT DPRD		
333	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,678,249,935
334	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	601,700,000
335	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34,960,350,027
336	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,856,840,000
337	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,191,717,500

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
338	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,899,999,400
339	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	40,086,663,800
340	Layanan Administrasi DPRD	4,550,038,000
341	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	10,661,847,648
342	Pembahasan Kebijakan Anggaran	3,847,962,600
343	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2,794,297,500
344	Peningkatan Kapasitas DPRD	12,564,499,900
345	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	11,881,994,900
346	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	749,498,250
347	Pembahasan Kerja Sama Daerah	319,324,300
348	Fasilitasi Tugas DPRD	8,509,711,450
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
349	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,250,000,000
350	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	615,000,000
351	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,272,915,154
352	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512,774,900
353	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711,319,096
354	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,503,867,778
355	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,436,000,000
356	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	820,000,000
357	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	275,000,000
358	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100,000,000
359	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1,290,000,000
360	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	750,000,000
BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		
361	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47,488,991,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
362	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80,000,000
363	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,074,185,510
364	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940,758,600
365	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902,065,000
366	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9,701,290,440
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
367	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	373,000,000
368	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,357,259,803
369	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19,970,800
370	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	55,436,900
371	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	568,875,000
372	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,152,458,490
373	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	779,874,300
374	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	717,391,000
375	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,598,207,888
376	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5,728,219,500
377	Koordinasi dan Pengelolaan	2,200,000,000
378	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3,075,645,200
379	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	40,480,510,420
380	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	2,161,000,000
381	Pengelolaan Barang Milik Daerah	75,980,428,550
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
382	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,645,201,726
383	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,375,620,757

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
384	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175,397,000
385	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366,628,267
386	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2,402,978,950
387	Mutasi dan Promosi ASN	760,819,000
388	Pengembangan Kompetensi ASN	2,000,014,000
389	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	425,999,700
390	Pengembangan Kompetensi Teknis	3,516,304,850
391	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3,064,151,200
INSPEKTORAT DAERAH		
392	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,389,246,700
393	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,989,769,200
394	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,124,157,700
395	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159,046,600
396	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	805,647,400
397	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,261,444,010
398	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,209,823,400
399	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	520,200,000
400	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	83,820,000
401	Pendampingan dan Asistensi	2,757,931,200
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
402	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,042,600,000
403	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000
404	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,418,718,938
405	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	512,268,002
406	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651,552,300
407	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	882,993,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
408	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3,842,397,700
409	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	87,861,591,300
410	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,785,920,000
411	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1,485,481,000
412	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	9,887,155,100
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT		
413	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,224,282,345
414	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73,100,000
415	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,458,666,800
416	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73,340,000
417	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,038,396,348
418	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	769,941,500
419	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	188,704,000
420	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19,987,700
421	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	69,999,750
422	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4,392,583,900
423	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4,047,543,490
424	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	468,304,400
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH		
425	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,519,553,200

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
426	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,045,861,450
427	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233,000,000
428	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,134,397,000
429	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,557,607,750
430	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	455,809,400
431	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	58,950,000
432	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	66,084,000
433	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5,271,118,000
434	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4,976,055,700
435	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	898,351,700
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA		
436	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,998,300
437	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,044,374,186
438	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69,660,000
439	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,824,560,900
440	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170,000,000
441	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,191,821,900
442	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,176,722,800
443	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	172,810,625
444	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	25,000,000
445	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90,000,000
446	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,473,942,400
447	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5,593,882,100
448	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	414,788,200

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA		
449	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,995,000
450	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,896,490,325
451	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,914,996,691
452	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70,000,240
453	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,536,935,500
454	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	936,074,800
455	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	345,203,500
456	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	65,624,850
457	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	91,999,800
458	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4,429,375,750
459	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5,713,954,900
460	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	438,624,400
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN		
461	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
462	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,846,897,000
463	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,300,000
464	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,142,201,000
465	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205,950,000
466	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,150,524,000
467	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,387,756,720
468	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	289,754,450

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
469	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	147,838,600
470	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	63,245,300
471	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5,493,405,850
472	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4,876,142,300
473	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	519,421,600
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
474	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000
475	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,851,525,000
476	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84,410,000
477	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,333,205,000
478	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,903,540,600
479	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,013,063,158
480	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	491,700,210
481	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	64,318,440
482	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	151,912,800
483	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5,601,795,500
484	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3,510,423,400
485	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	602,115,800
Total Anggaran Kegiatan		**4,280,175,478,317**

Sumber: Bagian Organisasi, diolah 2023

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam memenuhi ketentutan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Balikpapan memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun

demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di kota Balikpapan mengacu pada Permendagri No.59 Tahu 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana hal tersebut telah dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan ditahun 2023.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 1.14

Program, kegiatan dan Sub kegiatan SPM Bidang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru
2			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
3			Pembangunan Perpustakaan Sekolah
4			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
6			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
7			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
8			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
9			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
10			Pengadaan Perlengkapan Siswa
11			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
12			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
13			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
14			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
15			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
16			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
17			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
18			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
19			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
20			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
21		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
22			Penambahan Ruang Kelas Baru
23			Pembangunan Laboratorium
24			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
25			*Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah*
26			*Pengadaan Mebel Sekolah*
27			Pengadaan Perlengkapan Siswa
28			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
29			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
30			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
31			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
32			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
33			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
34			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
35		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
36			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
37			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
38			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
39			Pengadaan Mebel PAUD
40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
41			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
42			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
43			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
44			Pengelolaan Dana BOP PAUD
45			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
46			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
47		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
48			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
49			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
50			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Tabel 1.15

Program, Kegiatandan Sub Kegiatan SPM Bidang Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Upaya Kesehatan Perorangan	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Tabel 1.16
Program kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

Tabel 1.17

Program, Kegaiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
2	Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
3	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
4	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan rumah bagi korban bencana
5	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

Tabel 1.18

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Trantibumlinmas

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
4			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
5			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
6			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
8			Penyusunan SOP Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
9			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penindakan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
10	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
11			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
12			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
13		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
14	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
15		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
16			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
17			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
18			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
19			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
20		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
21			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
22		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
23			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
25			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
26			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
27		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
28			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
29		Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
30		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
31			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
32		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

Tabel 1.19

Program Kegiatan dan Subkegiatan SPM Bidang sosial adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Dan Pengemis	Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial
2	Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Makro Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Indikator Kinerja Tahun 2022	Indikator Kinerja Tahun 2023	Perubahan%
1	Indeks Pembangunan Manusia	81.13	82.03	0.9%
2	Angja Kemiskinan	2.45	2.31	-0.14%
3	Angka Pengangguran	6.90	6.09	-0.81%
4	Pertumbuhan Ekonomi	4.94	6.49	1.55%
5	Pendapatan Perkapita	181.29	201.64	20.35%
6	Ketimpangan Pendapatan	0.334	0.323	-0.01%

Sumber data badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Kota Balikpapan.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan Kota Balikpapan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome)*

Pada indikator kinerja kunci hasil (*Outcome*) merupakan kinerja Kota Balikpapan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Kunci *Outcome*

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
- Pendidikan					
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = **14306** Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = **26890**	53.20%	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada menggunakan data kota balikpapan
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = **81840** Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = **81960**	99.85%	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = **37401**	93.96%	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan			
		= **39806**			
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	94.88%	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	
		= **5708**			
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan			
		= **6016**			
Kesehatan					
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	3.67%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
		= **2709**			
		Jumlah Penduduk di kabupaten/kota			
		= **738532**			
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
		= **15**			
		Jumlah RS di kabupaten/kota			
		= **15**			
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99.04%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
		= **10838**			
		Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota			
		= **10944**			

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = **10346** Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = **10446**	99.04%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = **10252** Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = **10252**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = **48157** Jumlah balita di kabupaten/kota = **49030**	98.22%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = **84632** Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = **84814**	99.79%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
1.b.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = **436686** Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = **440792**	99.07%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = **36927** Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = **37301**	98.99%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = **63709** Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = **64082**	99.42%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = **19279** Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = **19279**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = **691** Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = **698**	98.99%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = **15885** Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = **15885**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = **18775** Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = **18775**	100%	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = **0** Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = **1**	0%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Kota Balikpapan tidak memiliki kewenangan terhadap wilayah Sungai dibuktikand engan surat keterangan sekretaris Daerah

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = **0** Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = **1**	0%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Berdasarkan kriteria dan penetapan wilayah Sungai, Kota Balikpapan tidak memiliki kewenangan terhadap wilayah Sungai dibuktikand engan surat keterangan sekretaris Daerah
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting =**0** luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = **195**	100	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Tidak dilakukan karena tidak terdapat alokasi Anggaran
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = **171618**	93.60%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.			
		= **183349**			
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	75.67%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	
		= **138739**			
		Jumlah rumah di Kabupaten A			
		= **183349**			
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	100%	DPMPTSP Kota Balikpapan	
		= **370**			
		Jumlah IMB yang berlaku			
		= **370**			
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	80.38%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	
		= **355.935**			
		Jumlahtotal panjang jalan kabupaten/kota			
		= **442.793**			
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	4.13%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	
		= **259**			

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota = **6266**			
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = **2434** Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = **2434**	100%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = **0** Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = **5**	0%	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	Tidak terdapat unit rumah dan rencana unit rumah korban bencana yang ditangani tahun 2023 akrena tidak terjadibencana
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = **0** Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = **1**	0%	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	Tidak terdapat fsilitasi penyediaan rumah laya huni bagi Masyarakat terdapat relokasi program pemerintah kota

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = **5.4** Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = **29.92**	18.05%	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10.ha kelurahan damai kecamatan balikpapan Kota
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = **100** Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = **202539**	0.05%	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = **4963** Jumlah unit rumah kab/kota = **40755**	12.178%	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	
- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yangditangani = **193** Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = **193**	100%	satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan = **14**	100%	satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuatsanksi = **14**			
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana **=70000** Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan **=70000**	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana **= 22500** Jumlah warga negara yang berda di Kawasan rawan bencana **=70000**	32.14%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = **533** Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = **675**	78.96%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	
		= **123**			
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota			
		= **123**			
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	6 menit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	6 Menit
- Sosial					
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	91.21%	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
		=2044			
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis			
		=2241			

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran **=977** Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota **=977**	100%	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
- Tenaga Kerja					
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = **8** Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota =**8**	100	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = **5781** Jumlah tenaga kerja keseluruhan = **8058**	71.74%	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	1204.52%	Bapeddalitbang Kota Balikpapan	PDRB DALAM HARGA MILIAR

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		= **997060.15**			
		Jumlah tenaga kerja		Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	
		= **8058**			
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	52.22%	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	
		= **94**			
		Jumlah Perusahaan			
		= **180**			
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	37.87%	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	
		= **1687**			
		Jumlah pencaker yang terdaftar			
		= **4455**			
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	25.01%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungana anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	
		= **1060217287147.00**			
		Jumlah seluruh belanja langsung APBD		BPKD Kota Balikpapan	
		= **4239994967897.00**			
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungana anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	0
		= **138**			

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)			
		=**138**			
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	7.29%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungana anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	
		= **18**			
		Jumlah penduduk perempuan			
		= **246777**			
- Pangan					
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	81.20%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	
		= **39.789**			
		Jumlah kebutuhan pangan			
		= **49**			
- Pertanahan					
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	86.78%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	
		= **1623592**			
		seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi			
		= **1870913**			
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	20.58%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	
		= **823**			
		Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			
		= **4000**			

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	85.98%	DPMPTSP Kota Balikpapan	
		=**1440649**			
		Luas izin lokasi yang diterbitkan			
		=**1675514**			
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha;	0%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	Tidak terdapat penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha;
		= **0**			
		Jumlah penerima tanah obyek landreform			
		=**1**			
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	80.00%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	
		= **472546**			
		Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan			
		= **590683**			
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	100%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	
		= **15**			
		Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan			
		= **15**			

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
- Lingkungan Hidup					
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67.64	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = **192021.37** Jumlah seluruhTotal vol timbunan sampah tahun berjalankabupaten/kota = **193038.43**	99.47%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = **39** usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = **145**	26.90%	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman = **521688**	98.28%	Disdukcapil Kota Balikpapan	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		Jumlah penduduk wajib KTP-el			
		= **530837**			
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	80.17%	Disdukcapil Kota Balikpapan	
		= **172128**			
		Jumlah anak usia 0-17 tahun			
		= **214705**			
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	99.65%	Disdukcapil Kota Balikpapan	
		= **225068**			
		Jumlah anak usia 0-18 tahun			
		= **225857**			
2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	43.33%	Disdukcapil Kota Balikpapan	
		= **13**			
		Jumlah PD			
		= **30**			

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
- Pemberdayaan masyarakat dan desa					
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = **0** Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = **1**	0%	Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan Tidak Memiliki Desa Tertinggal dibuktikan dengan surat keterangan Sekretaris Daerah
2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = **0** Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = **1**	0%	Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan Tidak Memiliki Desa Mandiri dibuktikan dengan surat keterangan Sekretaris Daerah
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungana anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = **64530** Jumlas Pasangan Usia Subur = **106559**	60.56%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungana anak	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
				keluarga Bencana Kota Balikpapan	
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = **18749** Jumlas Pasangan Usia Subur = **106559**	17.59%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungana anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	
- Perhubungan					
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan)	0.50	Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP			
		- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu			
		IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)			
		- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil			
		- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu			
		Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:			

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)			
		2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)			
		3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)			
		4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)			
		Bobot Trayek atau Lintas:			
		a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1			

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8			
		c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5			
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0.50	Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	
- Komunikasi dan Informatika					
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo =**34**	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	
		Jumlah PD =**34**			
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	83.50%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	
		= **86**			
		Jumlah Layanan Publik		Bagian Organisasi Kota Balikpapan	
		= **103**			

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	69.00%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	
		= **509571**			
		Jumlah penduduk		Disdukcapil Kota Balikpapan	
		= **738532**			
- Koperasi, usaha kecil dan menengah					
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	33.10%	DKUMKMP Kota Balikpapan	
		= **146**			
		Jumlah seluruh koperasi			
		= **441**			
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	16.82%	DKUMKMP Kota Balikpapan	
		= **12323**			
		Jumlah usaha mikro keseluruhan			
		= **73282**			
- Penanaman Modal					
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota	56.39%	DPMPT Kota Balikpapan	
		= **8698853836735**			

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota			
		= **15426449543265**			
- Kepemudaan dan Olahraga					
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota	0.19%	DPOP Kota Balikpapan	
		= **339**			
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota			
		= **178460**			
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	8.19%	DPOP Kota Balikpapan	
		= **14619**			
		jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota			
		= **178460**			
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	50 medali	DPOP Kota Balikpapan	Nasional 38 Medali dam Internasional 12 medali
- Statistik					
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data Pembangun dalam Pembangu perencanaan Pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data Pembangun dalam Pembangu perencanaan Pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	
		= 34			

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		jumlah OPD **= 34**			
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = **34** jumlah PD = **34**	100%		
- Persandian					
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi =**244** Jumlah area penilaian =**645**	37.83%	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	
- Kebudayaan					
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = **50** Jumlah cagar budaya yang terdata = **147**	87.755	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	
- Perpustakaan					
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat	51.76%	Arperpus Kota Balikpapan	
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	68.71%	Arperpus Kota Balikpapan	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		- Kearsipan			
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	T = (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	67.00%	Arperpus Kota Balikpapan	
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	33.00%	Arperpus Kota Balikpapan	Kegiatan belum pernah dilaksanakan

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK			
		a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK			
		c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK			
		I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK			
3. Urusan Pilihan					
- Kelautan dan Perikanan					
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) =**4660.16**	101.37%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	
		Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) yang di teapkan =**4597**			
- Pariwisata					
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	109.42%	DPOP Kota Balikpapan	
		= **12807**			
		Jumlah wisatawan tahun n-1			

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		= **11704**			
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = **785930** Jumlah wisatawan tahun n-1 = **1748085**	44.96%	DPOP Kota Balikpapan	
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = **867212** Jumlah kamar yang tersedia = **19616250**	45.25%	DPOP Kota Balikpapan	
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku =**2382.36** Total PDRB harga berlaku =**143169**	1.67%	berdasarkan PDRB ADHB (dalam miliyar rupiah) sektor Transportasi dan Pegudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	berdasarkan PDRB ADHB (dalam miliyar rupiah) sektor Transportasi dan Pegudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realisasi dari sektor pariwisata =**269398698148.50** Jumlah total PAD =**966621225704**	27.87%		
- Pertanian					
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = **16956.84** luas panen	28.96%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
		= **585.45**			
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) =**-63** Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = **336**	-18.75%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	
- Energi dan Sumber Daya Mineral					
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = **0** Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = **1**	BUP	Kota Balikpapan belum memiliki potensi panas bumi baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan data umum potensi panas bumi dari badan geologi pusat sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi kementrian energi dan sumber daya mineral	Kota Balikpapan belum memiliki potensi panas bumi baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan data umum potensi panas bumi dari badan geologi pusat sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi kementrian energi dan sumber daya mineral
- Perdagangan					
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	100%	Dinas Perdagangan Kota Balikpapan	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
	ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	= **371** Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = **371**			
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = **61400** RDKK =**70595**	100%	Dinas Perdagangan Kota Balikpapan	
3.f.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = **3089** jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = **3500**	88.26%	Dinas Perdagangan Kota Balikpapan	
- Perindustrian					
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = **75** Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = **954**	7.86%	DKUMKMP Kota Balikpapan	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	DKUMKMP Kota Balikpapan	
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = **1072** Jumlah izin yang dikeluarkan = **1147**	93.46%	DKUMKMP Kota Balikpapan	
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = **0** Jumlah izin yang dikeluarkan = **1**	0%	DKUMKMP Kota Balikpapan	Sampai dengan tahun 2023 Kota Balikpapan tidak pernah menrbitkan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) sehingga tidak ada izin yang dipantau dan di analisi
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = **0** Jumlah izin yang dikeluarkan = **1**	0%	DKUMKMP Kota Balikpapan	Pada tahun 2023 tidak ada yang mengajukan permohonan Izin Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian (%)	Sumber Data	Ket
					kewenangan lokasinya berada di kota Balikpapan
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	100%	DKUMKMP Kota Balikpapan	
		- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan			
		- Informasi produksi dan kapasitas produksi			
		- Informasi bahan baku dan bahan penolong			
		- Informasi bahan bakar/ energy			
		- Informasi tenaga kerja			
- Transmigrasi					
3.h	1. Jumlah Kawasan trasnmigrasi yang difasilitasi penetapannya, 2. jumlah satuan pemukiman trasmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. jumlah satuan pemukiman yang di bina		0	BUP (Bukan kewenangan Kota Balikpapan)	BUP (Bukan kewenangan Kota Balikpapan)

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Ket
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
- Perencanaan dan Keuangan					
4.a.1	Rasio Belanja Pegawaidi luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = **358229022160** Jumlah APBD = **3746601696679**	9.56%	BPKD Kota Balikpapan	
4.a.2	Rasio PAD	Jumlah PAD = **966621225704** Jumlah pendapatan padaAPBD = **3632411989057**	26.61%	BPKD Kota Balikpapan Bapeddalitbang Kota Balikpapan	
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan	Level 3	Inspektorat Kota Balikpapan	LEVEL 3

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Ket
		Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP			
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Inspektorat Kota Balikpapan	LEVEL 3
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = **2066360305547.3** jumlah belanja APBD = **3746601669679.6**	55.15%	BPKD Kota Balikpapan	
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP 10 tahun berturut-turut	Inspektorat Kota Balikpapan	WTP 10 TAHUN TERAKHIR
- Pengadaan					
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = **0** jumlah kontrak keseluruhan tahun n	0%	Adbang Kota Balikpapan	Tidak ada kontrak infrakstruktur dengan nilai yang perlu pemabngunaan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Ket
		= **2988**			kuartal pertama tahun 2023
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = **13699** Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif = **17536**	78.12%	Adbang Kota Balikpapan	
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan = **1646690925513** total belanja langsung = **4239994967897**	38.84%		
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2022 = **639502430115** Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023 = **558701798628**	114.46%	Adbang Kota Balikpapan	
- Kepegawaian					
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = **1155**	55.08%	BKPSDM Kota Balikpapan	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Ket
		Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah = **2097**			
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = **517** seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = **2097**	24.65%	BKPSDM Kota Balikpapan	
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = **176** seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = **2097**	34.04%	BKPSDM Kota Balikpapan	
- Manajemen Keuangan					
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi = **3746601669679** total belanja APBD dikurangi satu	12.47%	BPKD Kota Balikpapan	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Ket
		= **428017548317**			
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi = **966621225704** dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu = **985507900872**	1.92%	BPKD Kota Balikpapan	
4.d.3	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	YA	BPKD Kota Balikpapan	LEVEL 3
		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	TIDAK		
		3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	YA		
		Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	YA		
4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = **536611587423** total belanja anggaran tahun sebelumnya = **27445398221616.50**	19.55%	BPKD Kota Balikpapan	
- Transparansi dan Partisipasi Publik					
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	84.99%	Diskominfo Kota Balikpapan	

No.IKK	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Ket
	pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	=**2018104902011.9** Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = **2374658342.066**			
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = **12** total jumlah dokumen yang telah dirinci = **12**	100%	Diskominfo Kota Balikpapan	

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun dari suatu instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Pada sub bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator kinerja sasaran strategis instansi pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023.

2.3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengukur capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023 maka dalam memberikan penilaian dilakukan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75 %	Sedang
4	50,01% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Adapun capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat diketahui bahwa perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun target kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023, telah disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 tahun berkenaan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 serta dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2022. Namun berdasarkan dari capaian kinerja tahun sebelumnya maka terdapat beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan target kinerja. Target kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	69.50
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	80
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	28.93%
		Indeks SPBE	Poin	3.3
		Maturitas SPIP	Level	Level 3
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0.73
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85.24
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.7620
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.8440
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	11.71
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.089
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.4962

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89.96
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	78.78
		Persentase Permukiman Layak Huni	**%**	99.32%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69.70
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89.40%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	105
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.8267
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	16.40%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6.70
		Tingkat Kemiskinan	%	2.39
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	8.8
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1.9
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	30%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5.25%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2023

b. Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2023

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Balikpapan selama lima tahun sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 diukur dengan merujuk pada indikator beserta target kinerja per tahun yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Gambaran kinerja daerah tercermin melalui pencapaian 18 sasaran strategis yang melibatkan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Adapun capaian kinerja indikator utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023 berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Indikator Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	69.50	68.75	98.92%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	80	81.25*	101.56%
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	28.93%	28.70%	99.20%
		Indeks SPBE	Poin	3.3	3.75	113.64%
		Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100%
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0.73	0.68	93.15%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85.24	83.23	97.64%
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.7620	0.7599	99.72%
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.8440	0.8315	98.52%
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	11.71	14.43	123.23%
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.089	0.079	88.76%
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.4962	0.4955	99.86%
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89.96	89.96*	100%
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	78.78	77.98	98.98%
		Persentase Permukiman Layak Huni	**%**	99.32%	99.11%	99.79%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69.70	67.64	97.04%
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89.40%	85.14%	95.23%
12	Meningkatnya Kapasitas	Indeks Resiko Bencana	Poin	105	118.21	88.82%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.8267	0.83	100.40%
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	16.40%	20.21%	123.23%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6.70	6.09	110.02%
		Tingkat Kemiskinan	%	2.39	2.31	103.46%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	8.8	24.125	274.15%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	88.60	101.84%
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1.9	2.558	134.63%
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	30%	33.53%	111.77%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5.25%	5.66%	107.81%

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis
Sumber : Bappeda Litbang Kota Balikpapan, diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 18 sasaran strategis yang mencakup 27 indikator kinerja utama (IKU), terdapat 14 indikator kinerja Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2023 yang memperoleh capaian 100% atau lebih dengan kriteria “Sangat Tinggi” yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks SPBE, Maturitas SPBE, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Ketentraman dan Ketertiban, Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah), Skor Pola Pangan Harapan, Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang), Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif, dan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan. Sementara itu, 13 indikator kinerja lainnya belum mencapai 100% antara lain Nilai SAKIP, Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah, Indeks Sistem Merit, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan, Indeks Warisan Budaya, Indeks Pembangunan Infrastruktur, Persentase Permukiman Layak Huni, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan, dan Indeks Resiko Bencana.

Adapun secara keseluruhan capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023 dari setiap indikator kinerja mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 109,68% dengan kriteria

"Sangat Tinggi". Dengan demikian maka secara umum Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Dalam mengevaluasi capaian kinerja, penting untuk membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Analisis perbandingan ini memberikan gambaran kemajuan dan perubahan yang terjadi, membantu mengidentifikasi area potensial untuk peningkatan, dan merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya juga menjadi dasar untuk menyusun rencana kerja yang lebih terarah dan strategis.

Adapun pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Perbandingan Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		2023		% PENINGKATAN/ PENURUNAN TAHUN 2023
				REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	69.50	92.05%	68.75	98.92%	-1.08%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	81.25	102.85%	81.25*	101.56%	0%
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	28.28%	76.68%	28.70%	99.20%	-0.80%
		Indeks SPBE	Poin	3.05	98.39%	3.75	113.64%	22.95%
		Maturitas SPIP	Level	Level 3	100%	Level 3	100%	0%
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0.65	94.20%	0.68	93.15%	4.62%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85.24	103.32%	83.23	97.64%	-2.36%
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.7593	101.24%	0.7599	99.72%	0.08%
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.843	100.54%	0.8315	98.52%	-1.36%
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	11.69	111.33%	14.43	123.23%	23.44%
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.064	304.76%	0.079	88.76%	23.44%
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.464	93.55%	0.4955	99.86%	6.79%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		2023		% PENINGKATAN/ PENURUNAN TAHUN 2023
				REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89.96	100.14%	89.96*	100%	0%
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	77.63	99.27%	77.98	98.98%	0.45%
		Persentase Permukiman Layak Huni	%	99.07%	100.02%	99.11%	99.79%	0.04%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63.96	93.85%	67.64	97.04%	5.75%
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	85.14%	95.45%	85.14%	95%	0%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	110	102.80%	118.21	88.82%	-6.95%
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.8	100.%	0.83	100.40%	3.75%
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	29.55%	941.08%	20.21%	123.23%	-31.61%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6.9	76.67%	6.09	110.02%	13.30%
		Tingkat Kemiskinan	%	2.45	101.24%	2.31	103.46%	6.06%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	15.426	463.26%	24.125	274.15%	56%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	85.20	97.93%	88.60	101.84%	3.99%
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1.729	120.07%	2.6	134.63%	47.95%
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	28.46%	1293.64%	33.53%	111.77%	17.81%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	8.42%	240.57%	5.66%	107.81%	-33%

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis
Sumber : Bagian Organisasi, diolah 2024

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Guna mendorong perwujudan visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang merupakan tolok ukur keberhasilan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun capaian indikator kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023 yang merupakan ukuran terhadap keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			TARGET AKHIR RPJMD (2026)	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD (%)
				TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	75.50	68.75	91.06%	75.58	90.96%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	80	81.25*	101.56%	83	97.89%
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	41.42%	28.70%	69.29%	44.40%	64.64%
		Indeks SPBE	Poin	3.3	3.75	113.64%	4.0	93.75%
		Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100%	Level 4	75%
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0.73	0.68	93.15%	0.84	80.95%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82.85	83.23	100.46%	85.05	97.86%
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.7506	0.7599	101.24%	0.7524	101%
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.8388	0.8315	99.13%	0.8397	99.02%
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	11	14.43	131.18%	12.5	115.44%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			TARGET AKHIR RPJMD (2026)	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD (%)
				TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN		
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.022	0.079	359.09%	0.025	316%
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.4962	0.4955	99.86%	0.4975	99.60%
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	n/a	89.96*	-	n/a	-
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	78.78	77.98	98.98%	80.02	97.45%
		Persentase Permukiman Layak Huni	%	99.32%	99.11%	99.79%	100%	99.11%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68.23	67.64	99.14%	68.51	98.73%
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89.40%	85.14%	95%	90%	94.60%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	105	118.21	88.82%	99	83.75%
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.8267	0.83	100%	0.8794	94.38%
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah. Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	3.17%	20.21%	637.54%	3.45%	585.80%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8.46	6.09	138.92%	7.74	127.09%
		Tingkat Kemiskinan	%	2.39	2.31	103.46%	2.36	102.16%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			TARGET AKHIR RPJMD (2026)	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD (%)
				TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN		
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	3.530	24.125	683.44%	4.440	543%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	88.60	101.84%	90	98.44%
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1.5	2.558	170.53%	3.4	75.24%
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2.42%	33.53%	1385.54%	3.22%	1041.30%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	3.97%	5.66%	142.57%	5%	113.20%

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis
Sumber : Bagian Organisasi, diolah 2024

e. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional

Terdapat sembilan (9) Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan pada Tahun 2023 yang dapat disandingkan dengan Capaian Tingkat Nasional yaitu Indeks SPBE, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Resiko Bencana, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kemiskinan.

Adapun pengukuran capaian kinerja Kota Balikpapan Tahun 2023 dibandingkan dengan standar nasional sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023		CAPAIAN TERHADAP CAPAIAN NASIONAL (%)
				KOTA BALIKPAPAN	NASIONAL	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Indeks SPBE	Poin	3.75	2.79	134.41%
2	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.7599	0.6576	115.55%
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.8315	0.8155	101.96%
4	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	14.43	14.58	98.97%
5	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89.96*	91.63*	98.18%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67.64	72.54	93.25%
7	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	118.21	132.25	111.88%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023		CAPAIAN TERHADAP CAPAIAN NASIONAL (%)
				KOTA BALIKPAPAN	NASIONAL	
8	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6.09	5.32	87.36%
		Tingkat Kemiskinan	%	2.31	9.36	405.19%

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis
Sumber : Bagian Organisasi, diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian Kinerja Utama Kota Balikpapan pada tahun 2023 menunjukkan terdapat 6 indikator memiliki tingkat capaian yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian pada Tingkat Nasional. Keenam indikator tersebut adalah Indeks SPBE dengan capaian 134.41%, Indeks Pendidikan sebesar 115.55%, Indeks Kesehatan sebesar 101.96%, Indeks Resiko Bencana sebesar 111.88%, Tingkat Kemiskinan 405.19%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 405.19%. Sedangkan 3 indikator memiliki capaian yang lebih rendah dari capaian Nasional yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan capaian 98.97%, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 98.18%, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 93.25%.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

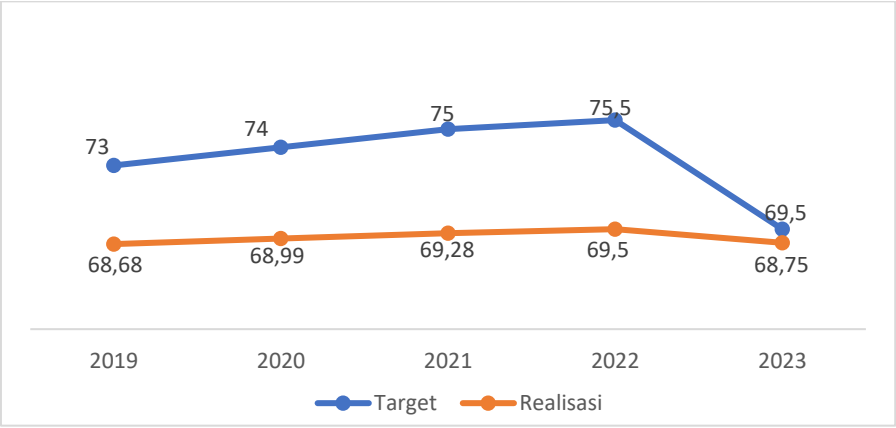
Di tengah dinamika pemerintahan yang terus berkembang, salah satu strategi yang semakin diutamakan adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Konsep ini menjadi landasan penting dalam mencapai profesionalitas dan transparansi di dalam struktur birokrasi. Dengan mengadopsi pendekatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan sumber daya dan pembuatan kebijakan dijalankan dengan jelas dan bertanggung jawab. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel mencerminkan keterbukaan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintah.

Guna mengukur sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang digunakan antara lain:

a) Nilai SAKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Indikator ini dihitung berdasarkan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil *(outcome)* terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil *(result oriented government)* serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan penyesuaian target kinerja Nilai SAKIP Kota Balikpapan yang semula 75,50 menjadi 69,50 sebagai bentuk reviu kinerja dengan memanfaatkan laporan kinerja sebelumnya mengingat beberapa tahun terakhir nilai SAKIP Kota Balikpapan belum pernah melampaui target yang ditetapkan sehingga menimbulkan kesenjangan/ gap terlalu jauh antara target dan realisasi.



Gambar 2.1
Target dan Realisasi Nilai SAKIP Kota Balikpapan
Tahun 2019-2023
Sumber: Kemenpan RB, Bappeda Litbang Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Nilai SAKIP Kota Balikpapan tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 68,75 poin atau predikat B dengan capaian kinerja

sebesar 98,92% predikat “sangat tinggi”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Namun demikian dapat diketahui bahwa terjadi penurunan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar 0,75 poin. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Balikpapan belum berhasil untuk mengimplementasikan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yang antara lain:

1) Belum semua rekomendasi atas perbaikan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya ditindaklanjuti sehingga belum dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi;
2) Reviu terhadap berbagai dokumen perencanaan kinerja belum diwujudkan dalam bentuk revisi dokumen perencanaan kinerja dan reviu pohon kinerja yang telah dilaksanakan belum tuntas seluruhnya sehingga belum terlihat *logical framework* mulai dari kinerja tingkat pemerintah kota Balikpapan sampai ke Perangkat Daerah bahkan ke individu;
3) Kepala Daerah belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kepala Perangkat Daerah mengenai capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja serta belum seluruh Perangkat Daerah melakukan pengisian data kinerja ke aplikasi pengukuran kinerja terintegrasi (REAKSI);
4) Masih perlunya perbaikan dalam penyusunan Laporan kinerja baik Pemerintah Kota Balikpapan maupun Perangkat Daerah dalam menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja baik dalam penyampaian informasi kinerja maupun perhitungan rumus hitung kinerja;
5) Hasil evaluasi SAKIP internal belum dapat memberikan rekomendasi perbaikan secara langsung terhadap akar permasalahan yang dialami oleh Perangkat Daerah dan belum ada kebijakan *reward and punishment* yang lebih signifikan terhadap hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dalam mendorong peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 secara kolaboratif antara Tim SAKIP Kota Balikpapan dengan Perangkat Daerah diantaranya sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

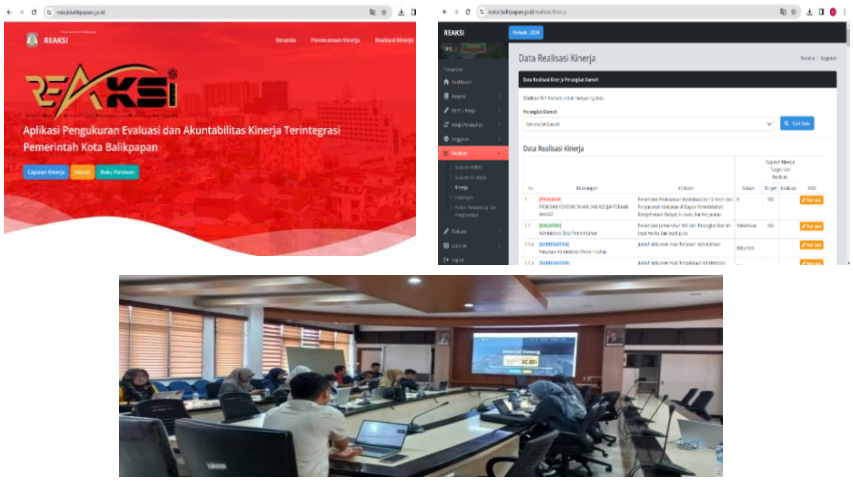
Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan reviu kinerja dengan memanfaatkan laporan kinerja sebelumnya sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja secara berkelanjutan. Diharapkan dari perubahan tersebut akan didapatkan kinerja yg lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja. Selain itu, terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang semula Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menjadi Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Hal tersebut dikarena perhitungan yang digunakan untuk menghitung Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Penilaian PMPRB) sudah tidak digunakan lagi sejak berlakunya Permenpanrb Nomor 3 tahun 2023;



Gambar 2.2
Rapat Koordinasi Reviu Kinerja
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

2) Pengukuran Kinerja

Pada komponen pengukuran kinerja, Bapedda Litbang berkolaborasi dengan Bagian Organisasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengembangkan aplikasi pengukuran kinerja terintegrasi (REAKSI) yang digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan serta kinerja pemerintah. Aplikasi ini diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai data sumber terkait perencanaan dan evaluasi Kota.



Gambar 2.3
Aplikasi REAKSI dan Rapat Koordinasi
Pengisian Data Kinerja
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengisian data kinerja dalam ke aplikasi pengukuran kinerja terintegrasi (REAKSI), maka melalui Bappeda Litbang dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengukuran, Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kota Balikpapan.

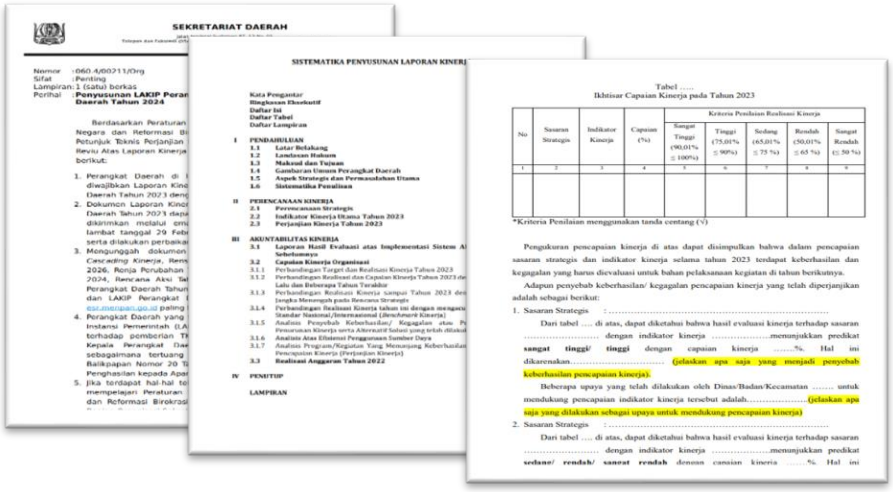


Gambar 2.4
Sosialisasi Pengukuran, Evaluasi dan
Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

3) Pelaporan Kinerja

Dalam pelaporan kinerja, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan melakukan penyeragaman template Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan melakukan verifikasi/ desk terhadap Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang telah disusun, serta berkoordinasi secara intens dengan Bappeda Litbang Kota Balikpapan maupun Perangkat Daerah dalam menyusun

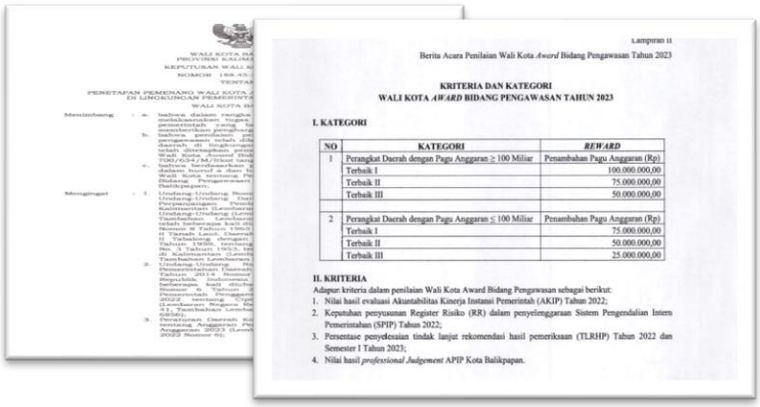
Laporan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan sehingga diharapkan Laporan kinerja yang telah disusun tersebut dapat menginformasikan analisis dan penjelasan yang lebih memadai. Selain itu, dilakukan juga reviu perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga efisiensi hanya diakui untuk indikator kinerja yang capaiannya 100 % atau lebih.



Gambar 2.5
Sistematikan Penyusunan Laporan Kinerja
Sumber: Bagian Organisasi (2023)

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan secara berkesinambungan, dimana hasil evaluasi menjadi umpan balik untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja yang akan datang. Sebagai langkah konkret, dilaksanakan pemberian *Walikota Award* bidang pengawasan, yang menggunakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai salah satu indikator penilaian.



Gambar 2.6
Keputusan Wali Kota Balikpapan tentang Penetapan Wali Kota *Award* Bidang Pengawasan
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan (2023)



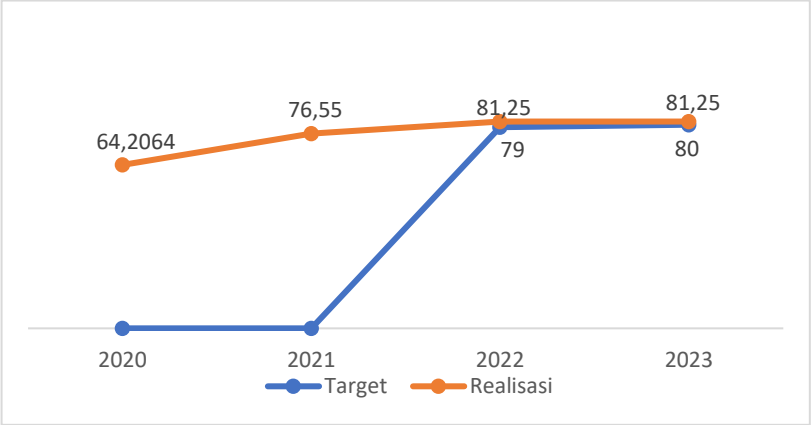
Gambar 2.7
Penyerahan Wali Kota *Award* Bidang Pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Balikpapan
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan (2023)

b) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, IPKD terdiri atas 6 (enam) dimensi yang merupakan suatu besaran yang terdiri dari atas: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD. Akumulasi atas keenam dimensi tersebut menghasilkan nilai IPKD yang menjadi salah satu indikator kinerja yang selaras dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 untuk indikator kinerja “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah” sehingga ditahun-tahun sebelumnya tidak ada target kinerja yang ditetapkan. Sesuai penilaian yang dirilis oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) IPKD Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Nomor 900.1.15.3/6602/BSKDN tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil

IPKD Tahun 2023, Kota Balikpapan memperoleh indeks total sebesar 81,25 dan memperoleh Nilai A dengan kategori Baik serta menduduki peringkat kedua Nasional untuk kategori Daerah Kemampuan Keuangan Tinggi. Dengan kata lain, capaian kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 tercapai sebesar 101,56% dan mendapat predikat "sangat tinggi".



Gambar 2.8
Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2020-2023
Sumber: BKAD, Bappeda Litbang Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Hasil tersebut melampaui perolehan Nilai IPKD tahun sebelumnya dengan capaian indeks total sebesar 76,5512, nilai B dengan kategori nilai Perlu Perbaikan. Peningkatan ini menjadi bukti nyata bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan serius dan berkomitmen untuk mencapai sasaran strategis dengan melakukan evaluasi dan langkah-langkah perbaikan sehingga indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja khususnya IPKD dapat terlampaui. Selain melakukan evaluasi internal organisasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga menjalin kerjasama yang baik dan saling bersinergi dengan Perangkat Daerah lain yang terlibat untuk mencapai target nilai IPKD.

Dilihat lebih rinci, untuk mencapai target nilai IPKD sesuai RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 terdapat 6 (enam) dimensi yang menjadi pembentuk indeks total IPKD, yaitu:

1) Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran;
2) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4) Penyerapan anggaran
5) Kondisi keuangan daerah;
6) Opini badan pemeriksa keuangan atas LKPD.

Masing-masing dimensi memiliki bobot untuk membentuk indeks total IPKD. Badan Keuangan dan Aset Daerah memperhatikan setiap dimensi untuk dikontrol dan dievaluasi secara berkala. Setiap dimensi telah dilakukan kontrol internal dengan kertas kerja berbentuk *spreadsheet* sebagai acuan dan bahan evaluasi organisasi. Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan untuk memantau dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Pada dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, pada indikator ini Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD menyusun RKPD dengan memperhatikan amanat RPJMD dan menjaga keselarasan program antara dokumen perencanaan tersebut. Selain itu Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku OPD yang berwenang dalam penyusunan KUA-PPAS menyusun dokumen penganggaran tersebut selaras dengan program-program dalam dokumen perencanaan RKPD yang mana telah selaras dengan RPJMD. Selanjutnya dalam proses penyusunan APBD, program dan pagu yang telah ditetapkan dalam KUA-PPAS akan diselaraskan semaksimal mungkin sebagai komitmen bahwa dalam proses penyusunan perencanaan anggaran telah dilakukan dengan matang sehingga perubahan pada saat penyusunan anggaran muncul seminimal mungkin bahkan tidak ada perbedaan.

Sementara itu, untuk dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Badan Keuangan dan Aset Daerah berhasil memperoleh nilai maksimal pada dimensi ini, hal ini menggambarkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah berkomitmen penuh dalam menjalankan amanat undang-undang terkait *mandatory spending* dalam penyusunan anggaran tahun 2023. Badan Keuangan dan Aset Daerah akan terus menjalankan amanat ini dan berpegang teguh pada prinsip dan peraturan perundang-undangan.

Pada dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah memegang teguh amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selaras dengan hal tersebut, indikator ini mensyaratkan organisasi untuk transparan dalam melakukan publikasi dokumen keuangan daerah termasuk keteraksesannya bagi publik. Nilai yang diperoleh dari indikator ini adalah 14,483 dari nilai maksimal sebesar 15. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan prinsip transparansi dan berkomitmen untuk meningkatkannya di tahun-tahun mendatang. Salah satu tindakan yang akan dilakukan adalah memperkuat

koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait atas dipublikasikannya 29 dokumen yang dipersyaratkan pada dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu koordinasi yang baik juga harus ditingkatan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan selaku Perangkat Daerah yang berwenang dalam mempublikasikan dokumen yang saling membantu dan melaksanakan tugas untuk memaksimalkan penilaian atas indikator tersebut.

Dimensi selanjutnya adalah dimensi penyerapan anggaran yang mengukur persentase antara anggaran belanja dan realisasinya, dalam ketentuan IPKD secara rinci menyebutkan minimal persentase yang dicapai adalah ≥ 80% agar dikategorikan sebagai "keberhasilan" dan diberi skor. Penyerapan anggaran yang dihitung adalah belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang diketahui bahwa Pemerintah Kota Balikpapan memperoleh nilai 13,333 dari nilai maksimal 20. Secara target nilai indikator yang diperoleh telah memenuhi target indikator kinerja utama. Namun kurang maksimalnya hasil ini disebabkan oleh satu jenis belanja, yaitu belanja tidak terduga. Berdasarkan LRA Kota Balikpapan Tahun 2022 (*audited*) realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp33.526.006.109,37 dari total anggaran sebesar Rp50.111.396.064 (66,903%). Perlu diketahui bahwa belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Jika ditinjau lebih lanjut, anggaran untuk belanja tidak terduga tahun 2022 telah disesuaikan dan dikurangi dibandingkan anggaran tahun 2021. Anggaran belanja tidak terduga tahun 2022 hanya sebesar 43,953% dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 (LRA 2021 *Audited*). Mengingat capaian tahun sebelumnya juga tidak mencapai 80% (capaian tahun 2021 sebesar 74,79%). Hal ini akan menjadi catatan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menentukan perencanaan belanja ini kedepannya tanpa mengurangi esensi dari belanja tidak terduga itu sendiri. Belanja tidak terduga hanya dapat digunakan untuk dua kriteria khusus, yaitu darurat (bencana) dan mendesak. Realisasi penyerapannya tidak berorientasi pada capaian tertentu seperti belanja lainnya.

Dimensi kondisi keuangan daerah secara khusus digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif. Dalam proses pengukuran, rasio-rasio keuangan akan digunakan sebagai cerminan kondisi keuangan daerah, rasio-rasio keuangan yang dimaksud, yaitu kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas

operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan. Apabila ditinjau secara capaian maka target maupun realisasi dimensi ini tergolong rendah (target 6,552 dan realisasi 4,8091 dari nilai maksimal 15). Namun, hal ini bukan tanpa alasan. Sesuai dengan kertas kerja mandiri yang dikelola BKAD dalam melakukan *self-assesment* terhadap target dan capaian Nilai IPKD, khusus dimensi ini terdapat faktor luar yang tidak dapat dikendalikan, yaitu komponen skor daerah lain dengan kategori keuangan yang sama. Sebagaimana diatur dalam teknis perhitungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang IPKD, dimensi ini diukur dengan menghitung indeks rasio suatu daerah kemundian membandingkannya dengan daerah lain dengan kategori keuangan yang sama. Dengan kata lain rasio keuangan daerah lain dapat mempengaruhi perolehan nilai daerah lain. Target yang dicantumkan BKAD dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 merupakan target yang berdasar setelah memperhitungkan banyak faktor seperti, kinerja LKPD Kota Balikpapan lima tahun terakhir, pertumbuhan rasio-rasio yang diperlukan serta membandingkannya dengan daerah lain sebagai sampling. Namun, target belum tercapai maka perbaikan akan terus dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala dan riset yang lebih akan dilakukan selain pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

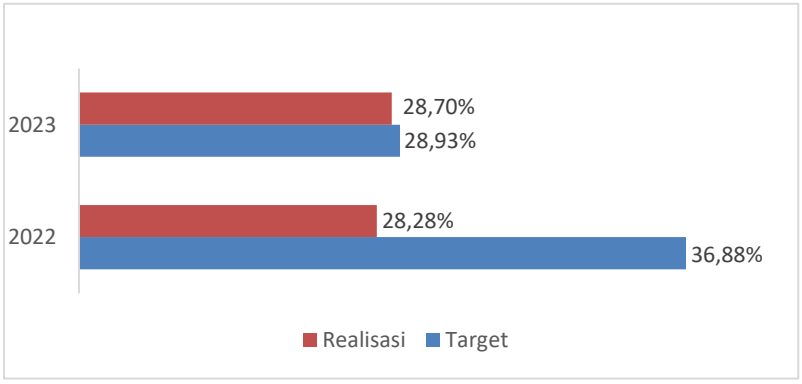
Yang terakhir adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023 belum mendapat penilaian oleh BPK hingga laporan ini dibuat maka data yang akan ditampilkan sesuai penilaian IPKD Tahun 2022 adalah LKPD Tahun 2022. Dimensi ini secara spesifik mensyaratkan opini yang diperoleh atas LKPD dan dikategorikan sesuai syarat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. Nilai yang diperoleh dari dimensi ini adalah nilai maksimal yaitu 15 mengingat Kota Balikpapan telah mendapat opini WTP pada LKPD Tahun 2022 serta 10 kali berturut-turut sedangkan dalam aturan Dimensi Opini BPK, hanya mensyaratkan 3 kali berturut-turut memperoleh opini WTP pada LKPD nya. BKAD berkomitmen penuh dan memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi BKAD sebagai pengelola keuangan dan barang milik daerah termasuk menyajikan LKPD yang akuntabel dan tepat waktu. Performa ini terus berlanjut dan dibuktikan dengan opini WTP yang diperoleh selama ini. Penyajian sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan manajemen barang milik daerah yang andal menjadi standar ditetapkan BKAD dalam penyusunan LKPD. Selain akuntabel, dalam

penyusunan LKPD, BKAD menerapkan *time line* kerja yang terstruktur, sehingga LKPD dapat tersusun tepat waktu dan diserahkan sesuai ketentuan. Dalam penyusunan LKPD Kota Balikpapan Tahun 2023, LKPD telah diserahkan kepada BPK per tanggal 4 Maret 2024 dan menjadi bukti keseriusan BKAD dalam menjaga komitmen atas tugas dan fungsinya yang telah dijelaskan sebelumnya.

c) Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah

Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah sehingga berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Variabel derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan penyesuaian target kinerja terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah yang semula 41,42% menjadi 28,93%. Hal ini dikarenakan penerimaan dari pendapatan transfer mengalami kenaikan di tahun 2021 dan 2022 sehingga memperkecil persentase PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan.



Gambar 2.9
Target dan Realisasi Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah
Kota Balikpapan Tahun 2022-2023
Sumber: BPPDRD Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 belum mampu mencapai target yang ditetapkan 28,93% atau dengan kata lain hanya tercapai 99,20% dengan predikat “sangat tinggi. Namun demikian, secara kinerja, PAD

mengalami peningkatan sebesar 10,05% dari 811.255.755.825,56 di tahun 2022 menjadi 892.824.394.215,84 di tahun 2023 dan Capaian Desentralisasi Fiskal Daerah meningkat dari 28,28% di tahun 2022 menjadi 28,70% di tahun 2023. Di sisi lain, pendapatan transfer (sebagai salah satu komponen pendapatan daerah) mengalami kenaikan di tahun 2023 (yang mana hal ini di luar kendali Pemerintah Kota) sehingga memperkecil capaian Desentralisasi Fiskal Daerah (persentase PAD terhadap total pendapatan daerah).

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka untuk mendukung perbaikan dan pencapaian target Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah antara lain:

1) Sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Direktoral Jenderal Pajak, BPN dan PERBANKAN;
2) Penguatan sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah termasuk penyusunan peraturan mengenai pengelolaan PAD (termasuk PDRD) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
3) Upaya Penegakan Hukum Pajak Daerah, melalui:
   - Pemberian surat tagihan pajak daerah dan sanksi administrasi apabila tunggakan pajak daerah wajib pajak yang belum melakukan pembayaran dan melewati tanggal jatuh tempo;
   - Pemberian teguran tertulis berupa surat pemanggilan 1 s.d 3 kepada pengusaha yang tidak/belum mendaftarkan sebagai Wajib Pajak;
   - Pemberian teguran tertulis kepada wajib pajak yang terdaftar dan belum lapor; dan
   - Pemasangan stiker terhadap wajib pajak yang tidak melapor dan tidak mendaftar.



Gambar 2.10
Pemasangan Stiker untuk Wajib Pajak yang Menunggak
Sumber: BPPDRD Kota Balikpapan, 2023

2) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sesuai ketentuan peraturan perundangan, termasuk menggali keunggulan budaya dan potensi asli daerah;
3) Modernisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM daerah, termasuk modernisasi proses pemungutan pajak (seperti penggunaan sistem teknologi informasi dan pembaruan data wajib pajak secara elektronik), seperti Digitalisasi pembayaran Pajak Daerah yang memudahkan wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak daerah mereka melalui *gadget* ataupun melalui *merchant-merchant* (Indomaret, dll) dan *e-wallet* yang miliki seperti gojek, qris, go pay, tokopedia melalui link pembayaran pajak daerah s.id/epayment.



Gambar 2.11
Pembayaran Online Pajak Daerah
Sumber: BPPDRD Kota Balikpapan (2023)

4) Sosialisasi kebijakan-kebijakan terbaru, terutama terkait kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah melalui media radio, instagram dan media *online* lainnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah daya minat wajib pajak dalam menunaikan pajaknya.



Gambar 2.12
Sosialisasi Pajak Daerah melalui Radio
Sumber: BPPDRD Kota Balikpapan (2023)





Gambar 2.13
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber: BPPDRD Kota Balikpapan (2023)

Selain itu, upaya lain yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti peningkatan Pendapatan Asli Daerah, antara lain:

1) Penyesuaian NJOP

   Akan dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak pada beberapa wilayah yang belum sesuai antara data yang ada dengan kondisi di lapangan, misalnya luas bangunan objek pajak.

2) Sinkronisasi Data Objek Pajak Daerah

   Sinkronisasi data dilaksanakan untuk mendapatkan keselarasan data, sehingga tidak terjadi selisih data.

3) Pemutakhiran Data Daerah

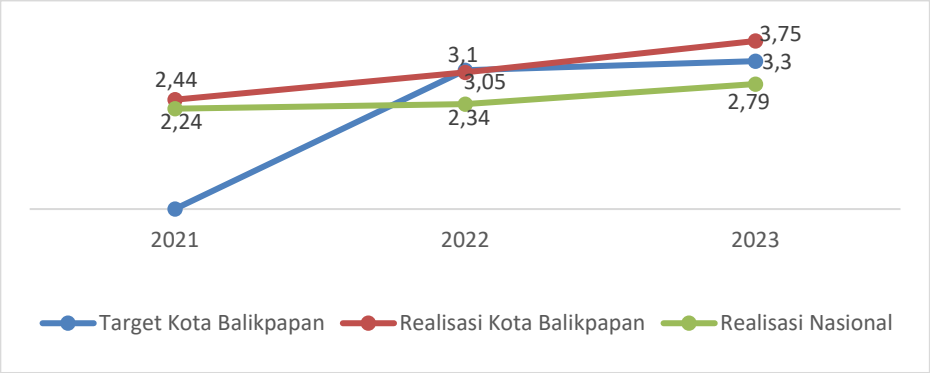
   Pemutakhiran ini untuk memisahkan antara Wajib Pajak Daerah yang aktif dan pasif sehingga untuk wajib pajak yang tidak aktif untuk tidak tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun berikutnya.

d) Indeks SPBE

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indeks ini dihitung dari penjumlahan perhitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.

Berdasarkan hasil *assessment* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, diperoleh indeks SPBE Kota Balikpapan Tahun 2023 sebesar 3,75 poin dengan capaian kinerja sebesar 113,64% atau mendapat predikat "sangat tinggi". Dengan kata lain telah melampaui dari target dalam perjanjian kinerja yang hanya sebesar 3,3 poin.



Gambar 2.14
Perbandingan Indeks SPBE Tahun 2021-2023
Sumber: DISKOMINFO Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, diketahui bahwa realisasi Indeks SPBE Kota Balikpapan Tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0.70 poin. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan Indeks SPBE Nasional, Indeks SPBE Kota Balikpapan selalu berada di atas Indeks SPBE Nasional selama 3 tahun terakhir.

Namun pencapaian dari Indeks SPBE ini tentunya juga menghadapi beberapa permasalahan saat dilaksanakan. Permasalahan yang ditemui pada tahun 2023 adalah hingga saat ini Perangkat Daerah belum menyusun atau melakukan pengisian enam domain pada SIA SPBE yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat di akhir tahun 2023 dikarenakan belum adanya dokumen proses bisnis Kota Balikpapan. Untuk itu, Pemerintah Pusat memberi kesempatan pada tahun 2024 untuk Pemerintah Kota Balikpapan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional yaitu penyusunan hingga penetapan Arsitektur SPBE dalam Peraturan Kepala Daerah. Kendala lain yang ditemui adalah adanya kesulitan dalam sinkronisasi peta rencana SPBE dengan kegiatan belanja TIK di Perangkat Daerah sehingga dilaksanakan asistensi

khusus Belanja TIK oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan terhadap Belanja TIK Perangkat Daerah. Dengan proses asistensi ini diharapkan seluruh belanja TIK di perangkat daerah dapat mengacu pada peta rencana SPBE yang telah disusun dan ditetapkan. Dari hasil asistensi ini juga ditemukan bahwa perlu adanya reviu kebijakan peta rencana SPBE yakni Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-291/2021 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Balikpapan karena perlu menyesuaikan dengan kebutuhan TIK perangkat daerah dan melakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Daerah. Selain itu, dari hasil monitoring dan evaluasi SPBE pada tahun 2023, dirasa masih perlu adanya peningkatan atau penguatan pada domain manajemen SPBE dimana domain ini memerlukan kolaborasi antara Diskominfo Kota Balikpapan dengan Perangkat Daerah terkait seperti Inspektorat Kota Balikpapan, Bappeda Litbang, BKPSDM, BKAD, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan guna meminimalisir permasalahan yang ada dan mendukung keberhasilan pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Daerah dan sosialisasi peta rencana SPBE.



Gambar 2.15
Sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Daerah dan Sosialisasi Peta Rencana SPBE
Sumber: DISKOMINFO Kota Balikpapan (2023)

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari tahun 2022 dimana ditahun tersebut telah dilaksanakan reviu dan revisi terhadap Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang masih berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kegiatan sosialisasi ini sebagai jembatan untuk memberikan kesepahaman pada setiap perangkat daerah dimana dalam melaksanakan kegiatan yang berbasis TIK harus sesuai dengan aturan dan peta rencana SPBE yang telah disusun bersama - sama sebagai pemenuhan indikator Indeks SPBE. Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan ini berperan besar dalam keberhasilan capaian indikator kinerja ini dikarenakan penilaian ini tidak terbatas pada penerapan arsitektur dan peta rencana SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan melainkan penilaian dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Selain itu, untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden No 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan melaksanakan bimbingan teknis sistem informasi arsitektur (SIA) SPBE dan manajemen layanan SPBE v1 yang diikuti oleh seluruh perangkat daerah.



Gambar 2.16
Bimbingan Teknis Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE dan Manajemen Layanan SPBE v1
Sumber: DISKOMINFO Kota Balikpapan (2023)

Tujuan dari pelaksanaan bimtek ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah untuk menyusun arsitektur SPBE dan pengelolaan manajemen layanan SPBE. Dalam arsitekstur SPBE terdapat 6 (enam) domain yakni:

- Domain Arsitektur Proses bisnis
- Domain Arsitektur Layanan
- Data dan Informasi
- Domain Arsitektur Aplikasi
- Domain Arsitektur Infrastruktur
- Domain Arsitektur Keamanan

Keenam domain ini dapat memberikan gambaran terkait implementasi SPBE pada setiap perangkat daerah yang nantinya akan menjadi bahan monitoring dan evaluasi oleh Tim Koordinasi SPBE Kota Balikpapan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pada tahun 2023 juga dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional tepatnya pada Desember 2023 secara daring. Kegiatan ini terlaksana atas hasil koordinasi dan arahan dari Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB dikarenakan adanya kesulitan yang dihadapi perangkat daerah dalam pengisian domain arsitektur proses bisnis dimana untuk pengisian domain ini dibutuhkan data proses bisnis Kota Balikpapan yang saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dan Bappeda Litbang Kota Balikpapan.

Keberhasilan dalam capaian Indikator kinerja ini juga tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menerapkan SPBE dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mengisi dan mengumpulkan eviden yang berkaitan dengan penilaian/evaluasi SPBE. Pada bulan Juli dan September tahun 2023 dilaksanakan rapat koordinasi pemenuhan bukti dukung dan pengisisan indikator SPBE pada aplikasi tauval dengan perangkat daerah Pemerintah Kota Balikpapan. Rapat Koordinasi ini dilakukan secara bertahap dalam rangka penilaian evaluasi SPBE Nasional.



Gambar 2.17
Rakor Pemenuhan Bukti Dukung SPBE, Rapat Persiapan Tauval SPBE, dan Tauval SPBE
Sumber: DISKOMINFO Kota Balikpapan (2023)

e) Maturitas SPIP

Dalam sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia, yang dianut adalah konsep SPI menurut kerangka COSO (*Comittee of Sponsoring Organization of The Treadway Commision*), yang dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Setiap pimpinan instansi diwajibkan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatannya, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Penerapan sistem ini dimaksudkan untuk memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengaturan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

BPKP kemudian mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Kualitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Balikpapan berada di level 3 dengan capaian kinerja sebesar 100% dan mendapat predikat "sangat tinggi". Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaran SPIP telah memenuhi karakteristik atau dengan kata lain terdefinisi.



Gambar 2.18
Target dan Realisasi Maturitas SPIP Kota Balikpapan
Tahun 2020-2023
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaran SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, yaitu:

1) Sesuai dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Nomor 090.1/382/Setdakot tanggal 12 September 2023, asesor keandalan pelaporan keuangan hanya berjumlah 2 orang, asesor ketaatan berjumlah 4 orang, dan asesor atas pengamanan aset berjumlah 6 orang. Sedangkan jumlah perangkat daerah yang melakukan penilaian mandiri sebanyak 28 perangkat daerah;
2) Belum seluruh tim PK pernah mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi SPIP dan pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP atau penugasan lain terkait SPIP;
3) Keterlambatan memulai penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang dilakukan pada bulan September 2023;

4) Penilaian penetapan tujuan yang terdiri atas penilaian sasaran strategis dan strategi pencapaian tidak dilakukan secara memadai, sehingga tidak dihasilkan rekomendasi atas evaluasi penetapan tujuan; dan
5) Penilaian struktur dan proses pada unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan belum dilakukan secara memadai sehingga belum mampu menghasilkan rekomendasi atas 4 unsur tersebut dan hanya terdapat rekomendasi atas unsur informasi dan komunikasi.

Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka meningkatkan penyelenggaran SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, antara lain:

1) Melaksanakan pendampingan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP;





Gambar 2.19
Pendampingan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan (2023)

2) Melaksanakan *Workshop* Internalisasi Memahami SPIP Melalui Manajemen Risiko bagi Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;





Gambar 2.20
***Workshop* Internalisasi Memahami SPIP melalui Manajemen Risiko**
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan (2023)

3) Melaksanakan pendampingan penyusunan register risiko kepada seluruh Perangkat Daerah;

4) Melaksanakan penugasan reviu register risiko oleh tim auditor.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
INSPEKTORAT
JL. RUHUI RAHAYU I Telp./Fax. (0542) 7218734 KOTAK POS 1111
BALIKPAPAN 76115
Email: inskot.balikpapan@yahoo.co.id

SURAT TUGAS
Nomor : 090.1/204/RISIKO/MITKOT

DASAR :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Balikpapan.
6. Keputusan Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 188.45-630/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2023.
7. Keputusan Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 020/894/ITKOT tanggal 25 Juni 2018 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Pemerintah Kota Balikpapan.
8. Keputusan Inspektur Kota Balikpapan Nomor 188.46/027/Itkot tanggal 23 Mei tentang Perubahan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis Risiko Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2023.
9. Keputusan Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 188.46/038/Itkot tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pembahan Tim Pemeriksa/Pengawas atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kota Balikpapan.
10. Penetapan Inspektur Kota Balikpapan atas Surat Permohonan Pelaksanaan Pemeriksaan Pemberi Penugasan Jawab Tim 1 Tanggal 31 Oktober 2023.

Maka dengan ini menugaskan :

KEPADA :
1. SILVIA RAHMADINA : Penanggung Jawab
2. MAHENDRA CANDRA : Pembantu Penanggung Jawab
3. HERAWATI : Pengendali Teknis
4. WAHYUNI : Ketua Tim
5. LILYANA : Anggota Tim
6. RIZKA SILVAERKARIANI DYANATA SARI : Anggota Tim

UNTUK :
- Melaksanakan Reviu Mengenai Risiko pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan.
- Selambat-lambatnya 15 hari setelah tanggal surat tugas berakhir Laporan Hasil Pemeriksaan harus sudah selesai

WAKTU :
Mulai tanggal : 01 November 2023
Sampai dengan tanggal : 17 November 2023
Selama : 10 (sepuluh) hari kerja

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Balikpapan, 31 Oktober 2023

INSPEKTUR
AMINUDIN

Tembusan di sampaikan kepada Yth :
1. Wali Kota Balikpapan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan

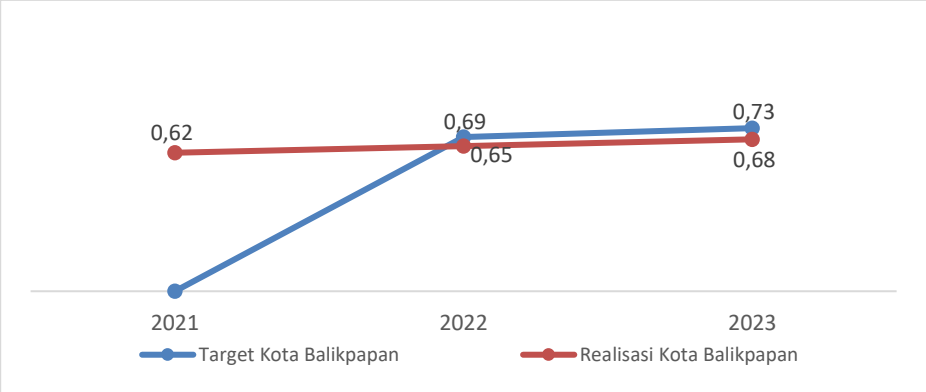
Gambar 2.21
Surat Tugas Reviu Register Risiko
Sumber: Inspektorat Kota Balikpapan (2023)

2. Sasaran Strategis 2 : Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel

Menurut Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 tahun 2019 terdapat 8 (delapan) aspek penilaian untuk mengukur indeks sistem merit yaitu ketersediaan perencanaan kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun, pelaksanaan pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif, pengembangan karier, pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi secara objektif dan transparan, manajemen kinerja melalui penetapan target kinerja yang terukur, evaluasi kinerja secara berkala, penggajian dan penghargaan, pelindungan dan pelayanan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas serta ketersediaan sistcm informasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN.

Adapun penilaian mandiri sistem merit dalam manajemen ASN bertujuan menjamin terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN di Instansi Pemerintah, mendorong terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, sejahtera, dan berperan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, terbuka, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Berdasarkan surat keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara No. 268/KEP.KASN/C/XI/2023 Tentang Penetapan Kategori Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Balikpapan meraih skor 280,5 dan indeks 0,68 dengan predikat "Baik". Target kinerja indeks sistem merit pada RPJMD Kota Balikpapan tahun 2023 adalah sebesar 0,73. Dengan demikian tingkat capaian kinerja tahun 2023 adalah 93,15 % dan mendapat predikat "sangat tinggi".



Gambar 2.22
Target dan Realisasi Indeks Sistem Merit Kota Balikpapan
Tahun 2021-2023
Sumber: BKPSDM Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Indeks sistem merit yang diraih kota Balikpapan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yaitu dari nilai 266 dengan indeks 0,65 menjadi mendapatkan nilai 280,5 dengan indeks 0,68 pada tahun 2023. Kenaikan indeks sistem merit Kota Balikpapan, diakibatkan perubahan nilai antara tahun 2022 dan 2023 pada aspek-aspek sebagai berikut:

1) Perencanaan kebutuhan.

   Kenaikan nilai pada aspek perencanaan kebutuhan terjadi pada indikator "Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun)" yang pada tahun 2022 mendapat nilai sebesar 7,5 menjadi 10 pada tahun 2023.

2) Pengadaan

Kenaikan nilai pada aspek pengadaan terjadi pada indikator "Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS" yang pada tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar 6 menjadi 8 pada tahun 2023.

3) Pengembangan karir.

- Kenaikan pada aspek pengembangan karir pada indikator "Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja" terjadi karena pada tahun 2022 mendapatkan nilai 0 mengalami kenaikan menjadi 7,5 pada tahun 2023;
- Perubahan nilai pada aspek pengembangan karir pada indikator "Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai". Indikator ini mengalami penurunan nilai yaitu dari 2,5 menjadi 0;
- Kenaikan aspek pengembangan karir pada indikator "Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui *coaching* dan mentoring" dari nilai 2,5 pada tahun 2022 menjadi 5 pada tahun 2023.

4) Promosi dan Mutasi.

Pada aspek promosi dan mutase tidak ada kenaikan nilai total pada semua indikator. Nilai total aspek promosi dan mutasi tahun 2022 dan 2023 masih dalam nilai total 17,5.

5) Manajemen kinerja

Perubahan nilai aspek manajemen kinerja pada indikator "Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja". Indikator ini mengalami penurunan dari nilai 7,5 menjadi 5.

6) Penggajian, penghargaan dan disiplin

- Aspek penggajian, penghargaan dan disiplin pada indikator "Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja" mengalami peningkatan nilai dari 7,5 menjadi 10.
- Aspek penggajian, penghargaan dan disiplin pada indikator "Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai" mengalami peningkatan nilai dari 7,5 menjadi 10.

7) Perlindungan dan pelayanan

Pada aspek perlindungan dan pelayanan tidak ada kenaikan nilai total pada semua indikator. Nilai total aspek perlindungan dan pelayanan tahun 2022 dan 2023 masih dalam nilai total 14.

8) Sistem informasi

Pada aspek Sistem Informasi tidak ada kenaikan nilai total pada semua indikator. Nilai total aspek sistem informasi tahun 2022 dan 2023 masih dalam nilai total 19.

Dalam rangka untuk mendukung perbaikan sistem merit tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja indeks sistem merit pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kota Balikpapan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK sesuai dengan program prioritas pembangunan dan/atau potensi daerah;



Gambar 2.23
Kegiatan Rapat Perencanaan Kebutuhan Pegawai
Sumber: BKPSDM Kota Balikpapan (2023)

2) Melanjutkan pelaksanaan penerimaan ASN yang dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif dengan konsisten serta menyusun laporan evaluasi pasca latsar CPNS secara berkala sesuai tahun pengadaan, dengan mengacu kepada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;



Gambar 2.24
Kegiatan Pemenuhan Kuantitas Aparatur Sipil Negara
Sumber: BKPSDM Kota Balikpapan (2023)

3) Menyusun SKJ yang sudah divalidasi Menpan dan sudah ditetapkan untuk Jabatan Administrator (JA), Jabatan Pengawas (JP) dan Pelaksana;
4) *Assesment* JPT, JA, JP dan pelaksana dilakukan secara berkala dan dikelola kedalam profil pegawai dalam SIMPEG;



Gambar 2.25
Kegiatan *Assessment* JPT, JA, JP dan Pelaksana
Sumber: BKPSDM Kota Balikpapan (2023)

5) Melaksanakan kebijakan internal tentang Manajemen Talenta;
6) Pengisian jabatan melalui rencana suksesi;
7) Menyusun analisis kesenjangan kualifikasi yang mengacu kepada Per LAN 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS;
8) Menyusun analisis kesenjangan kinerja yang mengacu kepada Per LAN 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS untuk semua level pegawai;
9) Melaksanakan diklat berdasarkan rekomendasi pengembangan gap kompetensi kinerja pegawai;



Gambar 2.26
Kegiatan Diklat Kepimpinan Nasional (PKN), Kepimpinan Administrator (PKA), Kepimpinan Pengawas (PKP) dan Diklat Latsar
Sumber: BKPSDM Kota Balikpapan (2023)





Gambar 2.27
Kegiatan Diklat Pengembangan Kompetensi
Sumber: BKPSDM Kota Balikpapan (2023)

10) Menyusun juknis tentang magang/praktik kerja *on the job training* dan membuat evaluasinya;
11) Menyusun kajian pola karir pegawai yang mengacu pada manajemen talenta dan menyusun aplikasi pola karir;
12) Menyusun kebijakan internal terkait pengisian JPT secara terbuka serta tata cara promosi dan mutasi yang mengacu pada *talent pool* dan manajemen talenta;



13) Melaksanakan pengisian JA dan JP dengan metode *assessment*;
14) Melaksanakan metode penilaian kinerja yang objektif seperti penilaian perilaku kerja 360;
15) Melaksanakan analisis permasalahan kinerja dan strategi penilaiannya;
16) Memanfaatkan penilaian kinerja sebagai salah satu sumbu dalam kebijakan manajemen talenta instansi;
17) Mewujudkan penilaian kinerja menjadi aspek dalam penetapan *talent pool*;
18) Melaksanakan perhitungan TPP berdasarkan realisasi capaian target SKP bulanan berdasarkan realisasi capaian target SKP tahunan pegawai;
19) Memberikan penghargaan PNS berprestasi secara berkala;
20) Evaluasi pelaksanaan penegakan pelanggaran disiplin dan KEKP pegawai dan sosialisasi peraturan disiplin dan kode etik secara berkala kepada pegawai;



Gambar 2.28
Sosialisasi Penyelenggaraan Disiplin ASN
Sumber: BKPSDM Kota Balikpapan (2023)

21) Mengelola data disiplin dalam SIMPEG yang terintegrasi dengan SAPK BKN;
22) Menyusun kebijakan internal (Perwal/SOP/Juklak/lainnya) terkait mekanisme pengajuan layanan;
23) Mengintegrasikan SIMPEG dengan sistem informasi pengembangan karir dan sistem informasi lainnya;

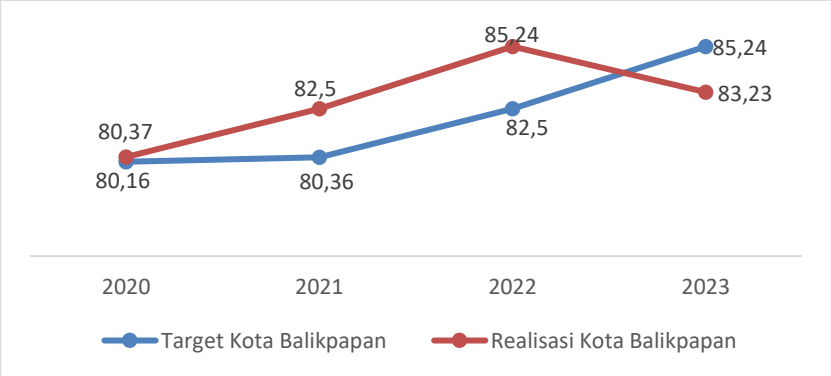
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya

keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah dan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Survey kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik meliputi 9 (Sembilan) unsur pelayanan. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Laporan hasil survei kepuasan masyarakat tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Balikpapan tahun 2023 dapat tercapai sebesar 83,23% dengan capaian kinerja 97,64% dan mendapat predikat “sangat tinggi”. Angka tersebut didapatkan dari 24 perangkat daerah, 92 UPP dan 103 jenis layanan yang dinilai. Walaupun demikian, indeks kepuasan masyarakat tersebut belum dapat melampaui target yang telah ditetapkan.



Gambar 2.29
Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2020-2023
Sumber: Bagian Organisasi, diolah Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2022, realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Balikpapan menurun sebesar 2,01 dari 85,24

menjadi 83,23 pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan kepada masyarakat masih memerlukan perbaikan.

Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2023 diketahui bahwa penurunan indeks kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh kualitas sarana dan prasarana penunjang, serta kesesuaian/ ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena masyarakat semakin kritis dan memiliki harapan yang tinggi terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan terus melakukan perbaikan melalui Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dengan melakukan inventarisasi terhadap keluhan dan harapan masyarakat untuk segera melakukan perbaikan. Adapun beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, diantaranya:

1) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik sebagai upaya perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta fasilitas yang mendukung penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, antara lain:
   - Pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruang pelayanan untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi;
   - Perbaikan dan pembangunan gedung-gedung pelayanan publik;



Gambar 2.30
Pembangunan Kantor Kelurahan Damai
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

- Peningkatan aksesibilitas fisik, seperti penambahan jalur pintu masuk, rampa, dan fasilitas akses untuk penyandang disabilitas;



Gambar 2.31
Fasilitas Akses untuk Penyandang Disabilitas
Sumber: Bagian Organisasi (2023)

- Perbaikan sarana penunjang, seperti ruang tunggu, area parkir, dan area publik lainnya;



Gambar 2.32
Pemenuhan Sarana Penunjang Pelayanan Publik
Sumber: Bagian Organisasi (2023)

- Peningkatan ketersediaan peralatan dan fasilitas pendukung, seperti mesin antrian, informasi, dan tempat pengaduan.



Gambar 2.33
Pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Pendukung Pelayanan Publik
Sumber: Bagian Organisasi (2023)

2) Optimalisasi penggunaan teknologi informasi, serta inovasi terus-menerus dalam pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas seperti digitalisasi proses pelayanan, pemanfaatan aplikasi dan platform *online*, dll;



Gambar 2.34
Peningkatan Layanan Administrasi serta Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Sumber: Bagian Organisasi (2023)



Gambar 2.35
Peningkatan Layanan Kependudukan secara *Online* dan *Offline*
Sumber: Bagian Organisasi (2023)

3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan secara berkala yang bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi kualitas serta keefektifan pelayanan publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;



Gambar 2.36
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik
Sumber: Bagian Organisasi (2023)

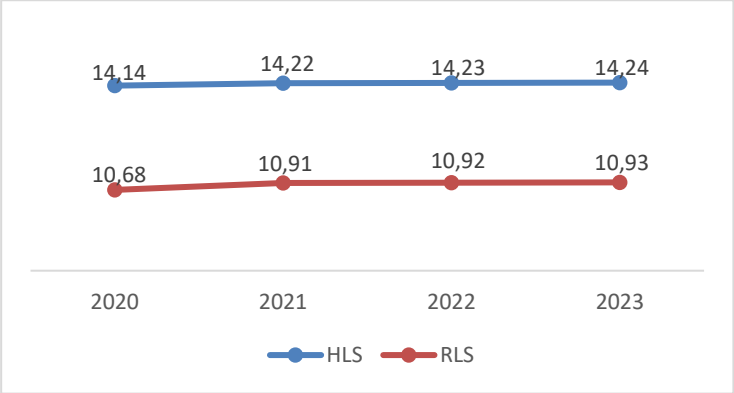
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan juga secara konsisten juga memberikan pendampingan dan pembinaan dalam hal pelayanan publik kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kota Balikpapan dalam rangka pembangunan budaya pelayanan prima.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Pendidikan bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

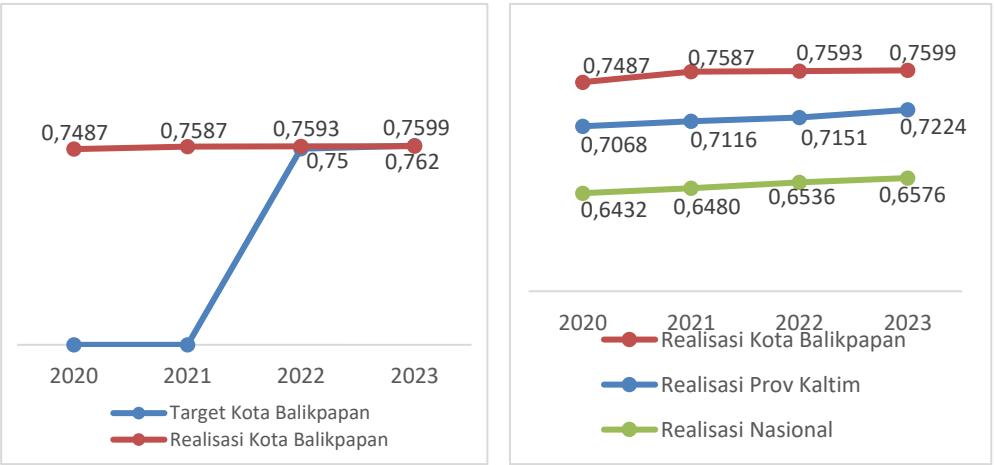
Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah Rata-Rata Lama Sekolah/ RLS (*mean years of schooling*), dan Harapan Lama Sekolah/ HLS (*expected years of schooling*). RLS menunjukan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan RLS berdasarkan penduduk yang berumur 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Sedangkan HLS mempresentasikan bahwa lama sekolah yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk usia tertentu dimasa mendatang. HLS dihitung berdasarkan penduduk usia 7 tahun ke atas agar konsisten dengan referensi umur pada program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah.

Diketahui bahwa RLS Kota Balikpapan tahun 2023 sebesar 10,93 tahun, artinya rata-rata penduduk Kota Balikpapan usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal selama 10 hingga 11 tahun atau setara dengan kelas 1 sampai 2 SMA. Sementara itu, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun Kota Balikpapan tahun 2023 sebesar 14,24 tahun atau setara dengan tingkat Diploma II. Selama periode 2020 hingga 2023, RLS meningkat 0,78% per tahun, sementara HLS Kota Balikpapan rata-rata meningkat 0,24% per tahun. RLS tahun 2023 meningkat meningkat 0,01 tahun (0,09%) dibandingkan tahun 2022, lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (1,12%). Sedangkan HLS tahun 2023 meningkat 0,01 tahun (0,07%) dibandingkan tahun 2022, lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,32%).



Gambar 2.37
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Balikpapan Tahun 2020-2023
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Berdasarkan RSL dan HLS tersebut maka dapat diketahui bahwa Indeks Pendidikan Kota Balikpapan terealisasi sebesar 0,7599 poin dengan capaian kinerja sebesar 99,72% dengan predikat "sangat tinggi". Realisasi indeks pendidikan tahun 2023 tersebut naik 0,0006 poin dari realisasi indeks pendidikan tahun 2022. Namun demikian, realisasi tahun 2023 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 0,762 poin.



Gambar 2.38
Perbandingan Indeks Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2020-2023
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, Indeks Pendidikan Kota Balikpapan dari tahun 2020-2023 senantiasa di atas angka Provinsi Kalimantan Timur,

bahkan tingkat nasional. Hal ini menunjukkan kualitas Pendidikan di Kota Balikpapan sudah cukup bagus dibandingkan daerah lainnya.

Berdasarkan capaian sasaran strategis tersebut, masih terdapat permasalahan dalam pencapaian target Indeks Pendidikan tahun 2023. Tidak tercapainya target Indeks Pendidikan dipengaruhi oleh kuantitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan/sekolah negeri yang tidak berbanding terhadap jumlah siswa di Kota Balikpapan, sehingga hal tersebut menurunkan pemerataan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat dasar, dan jenjang lanjutan menengah pertama. Selain itu, belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan, seperti terbatasnya lahan pemerintah untuk lokasi pembangunan unit sekolah baru (USB) dan terbatasnya lahan sekolah untuk direvitalisasi/ penambahan ruang kelas baru (RKB).

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan guna meningkatkan Indeks Pendidikan Kota Balikpapan adalah dengan melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Kelurahan Sepinggan (Regency) Balikpapan yang akan menampung 12 kelas atau 384 untuk SD yaitu 12 kelas atau 384 peserta didik SD dan 18 kelas atau 648 peserta didik SMP.



Gambar 2.39
Pembangunan Sekolah SD-SMP Terpadu Regency Balikpapan Selatan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan pembangunan untuk melengkapi infrastruktur penunjang seperti pembangunan ruang kelas baru sebanyak 8 unit, ruang guru, mushola, dan aula pada gedung SD – SMP Terpadu Graha Indah.



Gambar 2.40
Pembangunan Infrastuktur Penunjang SD-SMP Terpadu Graha Indah
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

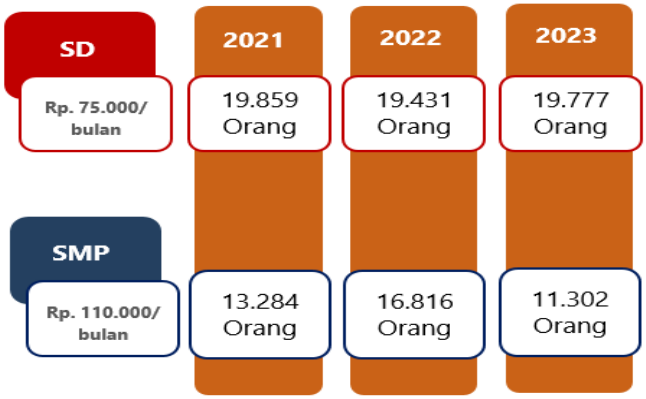
Selain itu, untuk mengantisipasi efek dari status Kota Balikpapan yang akan menjadi Kota Penunjang IKN maka Pemerintah Kota Balikpapan juga membangun ruang kelas baru (RKB) dan merehabilitasi ruang kelas yang sudah ada. Pada tahun 2023 dilakukan pembangunan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 6 RKB untuk SDN yang tersebar pada berbagai Kecamatan se Kota Balikpapan dan SMPN 023 Balikpapan. Sementara itu juga dilakukan rehabilitasi ruang kelas di 65 lokasi SDN dan 22 lokasi SMPN yang tersebar di Kota Balikpapan.



Gambar 2.41
Pembangunan dan Rehabilitasi Kelas
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Pemberian Subsidi SPP bagi Siswa sekolah SD dan SMP Swasta/ sederajat juga diberikan dengan maksud untuk meringankan beban masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya yang bersekolah di sekolah swasta jenjang SD/SMP sederajat. Besaran dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 75.000,-/siswa/bulan untuk SD Swasta/sederajat dan Rp. 110.000,-/siswa/bulan untuk SMP Swasta-Sederajat dan

diberikan selama 12 bulan penuh. Untuk tahun 2023 telah dialokasikan untuk sebanyak 19.777 siswa SD Negeri/ Swasta, dan 11.302 siswa SMP Negeri/Swasta;



Gambar 2.42
Pemberian Subsidi SPP bagi Siswa SD dan SMP/ Sederajat Swasta
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Seiring dengan itu, guna meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak maka Pemerintah Kota Balikpapan dengan memberikan seragam sekolah kepada kelas 1 dan 7. Siswa yang diberi seragam adalah siswa baru kelas 1 (SD) dan kelas 7 (SMP). Seragam yang diberikan sebanyak 3 stel/ siswa berupa seragam batik, OSIS dan pramuka dimana untuk tahun 2023 telah dialokasikan untuk 13.000 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas 1 (SD) dan 12.500 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas 7 (SMP);



Gambar 2.43
Pemberian Seragam Sekolah bagi Siswa SD dan SMP/ Sederajat Swasta Kelas 1 dan 7

Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Pemerintah Kota Balikpapan juga memberikan beasiswa terhadap Tenaga Pendidik Non PNS di sekolah SD/SMP Swasta/Sederajat yang diberikan sebagai stimulus agar para Tenaga Pendidik termotivasi meningkatkan kompetensi pendidikannya. Besaran dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 2.500.000,-/orang/tahun. Tahun 2023 telah dialokasikan untuk 40 orang tenaga pendidik PAUD, 50 orang tenaga pendidik SD, dan 20 orang tenaga pendidik SMP. Selain itu, beasiswa juga diberikan kepada siswa dari keluarga miskin dengan besaran Rp. 450.000,-/orang/tahun untuk siswa SD dan Rp. 750.000,-/orang/tahun untuk siswa SMP. Pada tahun 2023 telah dialokasikan untuk 220 orang siswa SD dan 400 orang siswa SMP.

BEASISWA

		2022	2023
PENDIDIK/ GURU	PAUD	0	40
	SD	46	50
	SMP	18	20

Jumlah Beasiswa untuk pendidik/ guru PAUD, SD & SMP sebesar **Rp. 2.500.000,-**

		2022	2023
SISWA KELUARGA MISKIN	SD	192	220
	SMP	350	400

Jumlah Beasiswa untuk siswa/siswi
- SD → **Rp. 450.000,-/Orang**
- SMP → **Rp. 750.000,-/Orang**

Gambar 2.44
Pemberian Beasiswa pada Tenaga Pendidik dan Siswa Keluarga Miskin
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Sejalan dengan itu, pemberian insentif tambahan penghasilan kepada ustad/ ustadzah sebagai bentuk apresiasi dalam menjalankan tugas keagamaan dan pendidikan dimana untuk tahun 2023 telah diberikan kepada 2.045 orang ustad/ ustadzah dengan besaran Rp. 420.000/ orang.



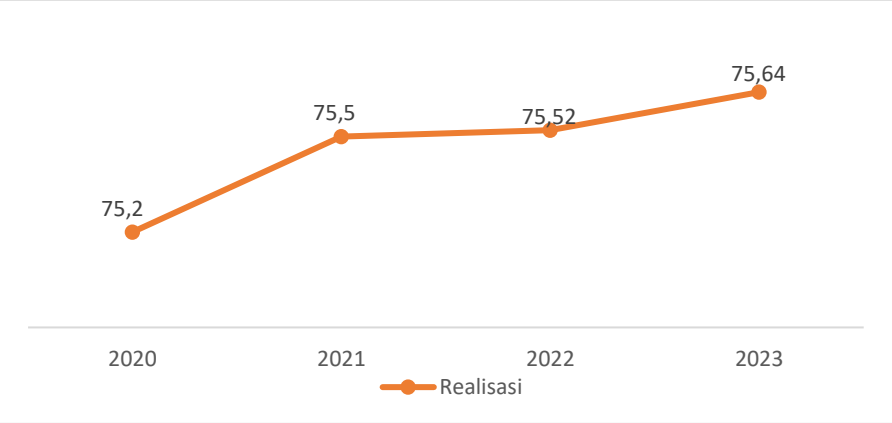
Gambar 2.45
Pemberian Insentif kepada Ustad/ Ustadzah
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan faktor yang penting di dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka menciptakan manusia yang sehat, mandiri, cerdas dan produktif serta mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat telah dilakukan pemerintah, diantaranya melalui pemerataan sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan kesehatan secara merata, mudah dan murah serta dapat menjangkau masyarakat luas.

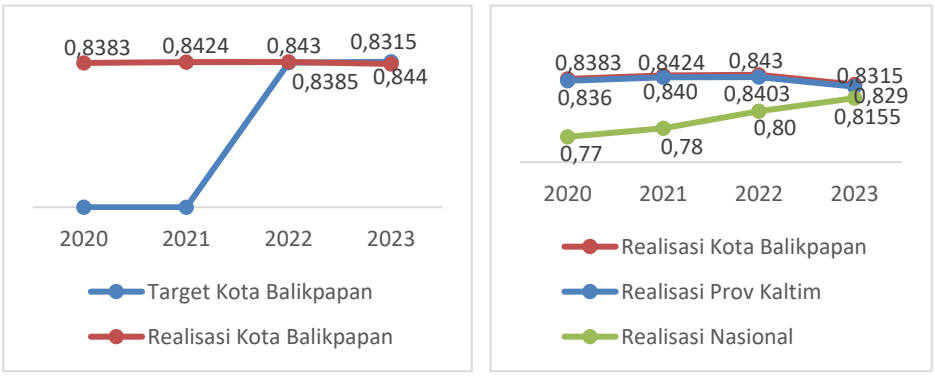
Untuk mengetahui kualitas kesehatan masyarakat adalah dengan mengukur Indeks kesehatan yang merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi kesehatan yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat. Indikatornya adalah Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, selama periode 2020 hingga 2023, Umur Harapan Hidup (UHH) telah meningkat sebesar 0,44 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,19 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Balikpapan adalah 75,20 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 75,64 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,12 tahun (0,16 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,21 persen per tahun). Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Balikpapan tahun 2023 sebesar 75,64 tahun menunjukkan bahwa penduduk Balikpapan yang lahir pada tahun 2022 memiliki peluang hidup hingga usia 75 tahun 9 bulan.



Gambar 2.46
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Balikpapan
Tahun 2020-2023
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Berdasarkan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) tersebut maka dapat diketahui bahwa Indeks Kesehatan Kota Balikpapan terealisasi sebesar 0,8315 poin dengan capaian kinerja sebesar 98,52% dengan predikat "sangat tinggi". Namun demikian, realisasi Indeks Kesehatan tahun 2023 tersebut turun 0,0115 poin dari realisasi indeks pendidikan tahun 2022. Hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan standar UNDP yang digunakan sebagai perhitungan. AHH minimum standar UNDP tahun 2020 sebesar 20 tahun, sedangkan AHH minimum standar UNDP tahun 2023 sebesar 25 tahun.



Gambar 2.47
Perbandingan Indeks Kesehatan Kota Balikpapan
Tahun 2020-2023
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, Indeks Pendidikan Kota Balikpapan dari tahun 2020-2023 senantiasa di atas angka Provinsi Kalimantan Timur, bahkan tingkat nasional. Hal ini menunjukkan kualitas kesehatan di Kota Balikpapan sudah cukup bagus dibandingkan daerah lainnya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa perilaku hidup sehat masyarakat Kota Balikpaapan telah dilaksanakan secara baik.

Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan perangkat daerah terkait guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Balikpapan antara lain penguatan sistem kesehatan melalui pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dengan pemberian subsidi iuran BPJS bagi PBI dan Peserta Kelas III Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar Rp. 37.800,- per jiwa per bulan. Pada

tahun 2023 pemberian subsidi diberikan kepada 196.842 jiwa, naik sebesar 7.015 jiwa dari jumlah penerima subsidi tahun 2022 hanya ada diberikan kepada 189.827 jiwa.



Gambar 2.48
Subsidi Iuran BPJS Kesehatan Kota Balikpapan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan pembangunan Puskemas Karang Rejo yang dibangun pada lahan eksisting puskesmas tersebut dengan *design* bangunan panggung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.



Gambar 2.49
Pembangunan Puskesmas Karang Rejo
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan juga melaksanakan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat melalui optimalisasi KIE Kesehatan, penyelenggaraan promosi kesehatan umum dan gerakan hidup bersih dan sehat melalui institusi kesehatan, sekolah, tempat ibadah, sarana prasarana serta Germas secara berkala dengan melibatkan masyarakat dan seluruh lintas sektor di wilayah

tersebut serta meningkatkan frekuensi diseminasi program/ kegiatan promotif dan preventif lingkungan (PHBS).



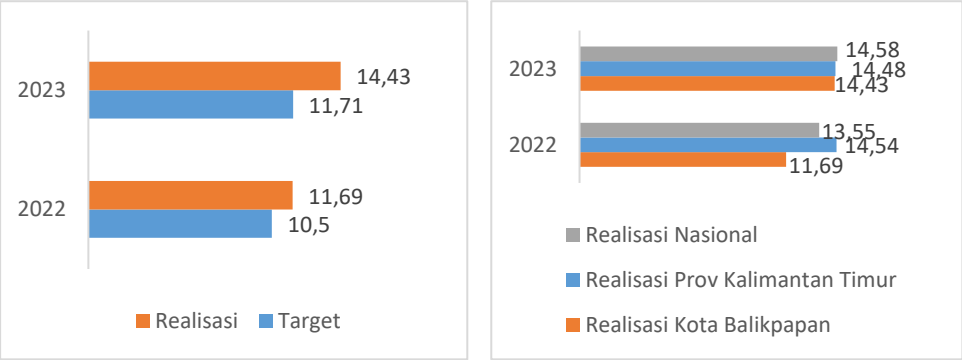
Gambar 2.50
Peningkatan Frekuensi Diseminasi Program/ Kegiatan Promotif dan Preventif Lingkungan (PHBS)
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. IPLM bertujuan untuk melihat mengidentifikasi permasalahan yang menghambat perkembangan perpustakaan di Kota Balikpapan dan mengetahui kebutuhan informasi seperti apa yang dibutuhkan masyarakat serta mewujudkan perpustakaan menjadi bagian dari kehidupan dan aktivitas masyarakat, sehingga tercapai nilai tambah dalam hal informasi, ilmu pengetahuan dan jasa perpustakaan yang lain dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) tersebut.

Berdasarkan Hasil Perhitungan Mandiri Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan diketahui bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah 68,71 dan masuk pada kategori sedang atau memperoleh nilai sebesar 14,43 poin (angka setelah dikonversi) dengan capaian kinerja sebesar 123,23% atau memperoleh predikat “sangat tinggi”. Unsur dengan nilai tertinggi adalah pada UPLM2 (Ketercukupan

koleksi), dan unsur dengan nilai terendah adalah UPLM2 (Tingkat pemerataan layanan perpustakaan).



Gambar 2.51
Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Tahun 2022-2023
Sumber: DISPUTAKAR Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Balikpapan dari tahun 2022-2023 masih berada di bawah realisasi angka Provinsi Kalimantan Timur, bahkan tingkat nasional.

Adapun hal - hal yang menunjang dan menghambat keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yaitu:

1) Berdasarkan hasil pendataan, di Kota Balikpapan terdapat 296 perpustakaan di Kota Balikpapan, yang terdiri dari: 1 perpustakaan umum tingkat kota, 4 perpustakaan kelurahan, 273 perpustakaan sekolah, 12 perpustakaan perguruan tinggi dan 6 perpustakaan khusus. Berdasarkan jumlah ini, diketahui bahwa jumlah perpustakaan di Kota Balikpapan maupun di masing-masing kecamatannya belum memenuhi kondisi ideal, yaitu kurang dari 2% jumlah penduduk Balikpapan;
2) Secara umum nilai UPLM1 (Tingkat pemerataan layanan perpustakaan) di Kota Balikpapan diperoleh sebesar 0,001920. Berdasarkan rasio pemerataan layanan perpustakaan, rasio pemerataan layanan perpustakaan sekolah adalah yang paling tinggi. Sedangkan bila berdasarkan kecamatannya, kecamatan Balikpapan Tengah adalah wilayah yang mendapatkan nilai UPLM1 tertinggi, sementara itu kecamatan Balikpapan Barat adalah wilayah yang mendapatkan nilai UPLM1 terendah;
3) Jumlah koleksi perpustakaan di Kota Balikpapan yaitu 403.967 koleksi. Berdasarkan IFLA/UNESCO, jumlah koleksi dikatakan mencukupi apabila setiap 1 (satu) orang penduduk membaca 2 (dua) koleksi. Sehingga rasio jumlah koleksi berdasarkan IFLA/ UNESCO, adalah jumlah koleksi dibagi 2 x (dua kali) jumlah, penduduk, dikatakan jumlah koleksi memenuhi jika diperoleh nilai rasio ≥ 2 (dua).

Mengacu pada formula IFLA/ UNESCO tersebut maka rasio ketercukupan koleksi di Kota Balikpapan adalah 0,2871. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio ketercukupan jumlah koleksi perpustakaan kurang mencukupi atau belum memenuhi standar IFLA/ UNESCO;

4) Berdasarkan nilai unsur pembangunan literasi masyarakatnya, rasio ketercukupan koleksi di Kota Balikpapan sebesar 2,650792. Rasio ketercukupan koleksi yang paling tinggi adalah pada koleksi perpustakaan sekolah, yaitu sebesar: 6,425409. Dan rasio ketercukupan koleksi yang paling rendah ada pada koleksi perpustakaan khusus sebesar 0,038257. Jika dilihat per kecamatan, secara umum nilai UPLM2 yang tertinggi ada pada kecamatan Balikpapan Kota, dan yang terendah ada pada Kecamatan Balikpapan Timur;
5) Terdapat 439 tenaga perpustakaan di Kota Balikpapan, artinya 1 tenaga perpustakaan melayani 1.602 penduduk. Angka ini sudah memenuhi standar IFLA dan sudah memenuhi standar renstra perpustakaan nasional. Berdasarkan hasil pengukuran UPLM3, rasio yang tertinggi ada pada perpustakaan sekolah yaitu sebesar 0,008019, sedangkan yang terkecil ada pada perpustakaan khusus, sebesar 0,0000042. Sedangkan jika dilihat per kecamatan, secara umum nilai UPLM3 yang tertinggi ada pada kecamatan Balikpapan Timur, dan yang terendah ada pada Kecamatan Balikpapan Utara;
6) Di Kota Balikpapan terdapat sebanyak 50.937 kunjungan pemustaka per hari atau sebesar 7,24% dari jumlah penduduk. Persentase kunjungan pemustaka ini sudah memenuhi kondisi ideal (yaitu lebih besar dari 2% jumlah penduduk di suatu wilayah). Berdasarkan nilai unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM4), tingkat kunjungan yang tertinggi ada pada perpustakaan sekolah, yaitu sebesar 0,851329, sedangkan tingkat kunjungan yang terendah adalah pada perustakaan khusus yaitu 0,000072. Sedangkan, jika dilihat per kecamatan, secara umum nilai UPLM4 yang tertinggi ada pada kecamatan Balikpapan Kota, dan yang terendah ada pada Kecamatan Balikpapan Timur;
7) Secara total terdapat 39 perpustakaan ber-SNP di Kota Balikpapan sampai dengan bulan November tahun 2023 yang terperinci atas: 1 perpustakaan (20%) pada perpustakaan umum, 35 (12,82%) pada perpustakaan sekolah, 2 (16,67%) pada perpustakaan perguruan tinggi dan 1 (16,67%) pada perpustakaan khusus. Target Renstra Perpusnas untuk indikator peningkatan perpustakaan sesuai standar SNP adalah 21,42% dan hasil kajian IPLM di Kota Balikpapan 12,84%, sehingga dapat diartikan bahwa jumlah perpustakaan sesuai standar SNP belum mencapai target

yang sudah ditetapkan oleh renstra perpustakaan nasional. Rasio perpustakaan yang dibina sesuai Standard Nasional Perpustakaan (SNP) (UPLM5) di Kota Balikpapan, yaitu: 0,974064. Jika dilihat per kecamatan, secara umum nilai UPLM5 yang tertinggi ada pada kecamatan Balikpapan Kota, dan yang terendah ada pada Kecamatan Balikpapan Selatan;

8) Secara total terdapat 14.121 masyarakat atau sekitar 2,01% masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan di Kota Balikpapan, atau dapat dihitung nilai UPLM6 adalah sebesar 0,038745. Rasio tertinggi adalah pada perpustakaan sekolah, sedangkan rasio terendah adalah pada perpustakaan khusus. Sedangkan, jika dilihat per kecamatan, secara umum nilai UPLM6 yang tertinggi ada pada kecamatan Balikpapan Kota, dan yang terendah ada pada Kecamatan Balikpapan Barat;
9) Jumlah pemustaka (anggota perpustakaan) mencerminkan tingkat *engagement* masyarakat terhadap perpustakaan di suatu wilayah. Di Kota Balikpapan terdapat terdapat 165.281 atau sejumlah 23,5% dari jumlah penduduknya. Angka Rasio Pemustaka yang Terdaftar di Perpustakaan (UPLM7) di Kota Balikpapan, yaitu: 0,868360. Adapun rasio anggota perpustakaan yang tertinggi adalah pada perpustakaan sekolah yaitu sebesar 2,467928. Sedangkan, jika dilihat per kecamatan, secara umum nilai UPLM7 yang tertinggi ada pada kecamatan Balikpapan Kota, dan yang terendah ada pada Kecamatan Balikpapan Timur.

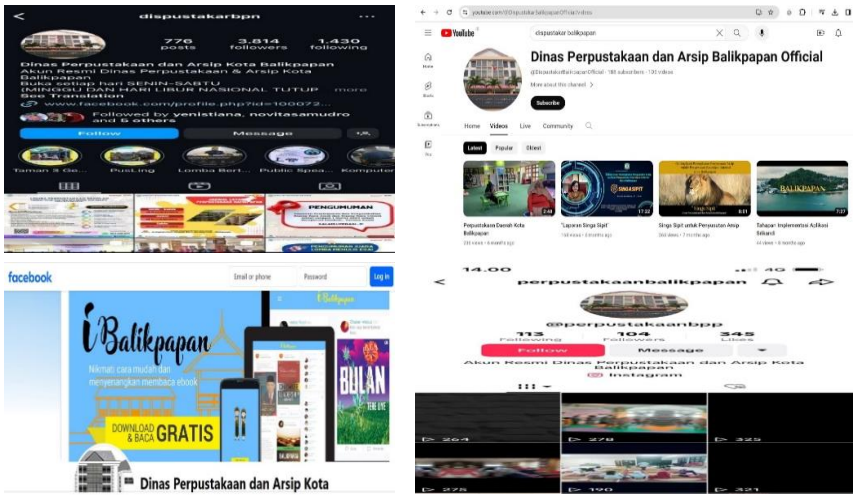
Berdasarkan data di atas maka diketahui bahwa Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dapat dikatakan cukup. Namun perlu ditingkatkan dalam indikator ketercukupan perpustakaan, koleksi, pemerataan layanan, keterlibatan masyarakat maupun tenaga perpustakaan yang masih bisa ditingkatkan, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk melanjutkan program yang meningkatkan literasi masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), antara lain:

1) Melakukan perluasan akses layanan perpustakaan dengan memperbanyak koleksi buku bacaaan baik yang konvensional maupun koleksi digital yang berasal dari Perpusnas RI maupun yang dimiliki Perpustakaan Kota Balikpapan, dan memperluas akses layanan perpustakaan di setiap kelurahan ataupun dengan layanan perpustakaan keliling.



Gambar 2.52
Layanan Perpustakaan Keliling
Sumber: DISPUTAKAR Kota Balikpapan (2023)

2) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan terus menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan ilmu keperpustakaan serta kegiatan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan yang profesional dalam rangka meningkatkan jumlah tenaga perpustakaan yang berkualitas;
3) Melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia yang potensial di lingkungan perpustakaan untuk mendukung/ membantu pustakawan dalam memberikan layanan kepada masyarakat;
4) Mengadakan berbagai kegiatan di perpustakaan untuk menarik minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan, antara lain:
    - Kegiatan sosialisasi dan promosi secara online dengan memanfaatkan platform media sosial seperti youtube, facebook, instagram, dan lainnya.



Gambar 2.53
Media promosi secara *online* dengan memanfaatkan *platform* media sosial seperti youtube, facebook, instagram, dan Tiktok
Sumber: DISPUTAKAR Kota Balikpapan (2023)

- Kegiatan lomba-lomba, sosialisasi, edukasi, event yang bekerjasama dengan organisasi lain ataupun pihak swasta;



Gambar 2.54
Kunjungan Sekolah sebagai Wisata Edukasi Dispustakar
Sumber: DISPUTAKAR Kota Balikpapan (2023)



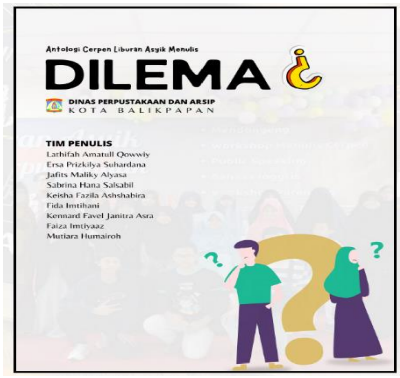
Gambar 2.55
Berbagai Kegiatan Workshop
Sumber: DISPUTAKAR Kota Balikpapan (2023)




Gambar 2.56
Kelas Pendidikan (*Service Excellent* dan Komputer Dasar)
Sumber: DISPUTAKAR Kota Balikpapan (2023)

- Kegiatan yang mendukung budaya membaca dan memperkenalkan/ pemasyarakatan perpustakaan melalui berbagai event sebagai bagian dari aktivitas masyarakat



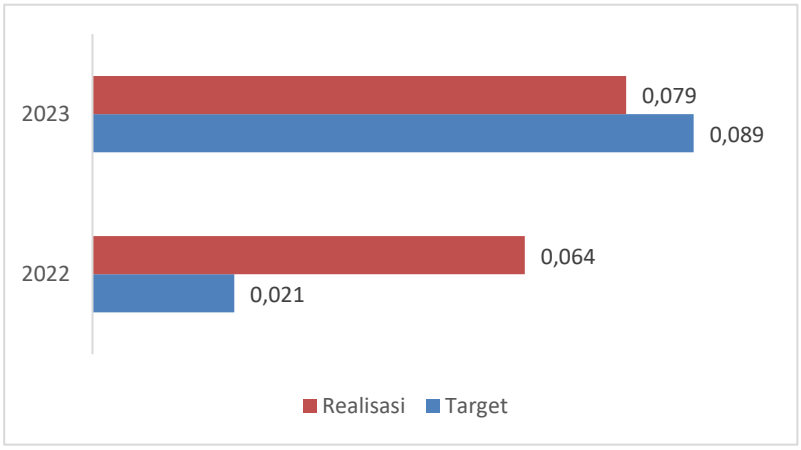


Gambar 2.57
Kegiatan Liburan Asyik Perpustakaan Daerah Kota Balikpapan (*Public Speaking*, Workshop Menulis Cerpen, dan Hasil Buku Workshop Menulis Kegiatan Libur Asyik)
Sumber: DISPUTAKAR Kota Balikpapan (2023)

7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kualitas Pemuda

Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan indeks yang menilai daya saing kepemudaan dan keolahragaan dari sisi prestasi pemuda non keolahragaan dan keolahragaan dari seluruh pemuda dan atlet yang dibina. Hasil indeks ini adalah perhitungan mandiri yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan.

Pada tahun 2023 dapat diketahui bahwa Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan berhasil memperoleh realisasi sebesar 0,079 poin dengan capaian kinerja sebesar 88,76% atau berpredikat “tinggi”, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.



Gambar 2.58
Target dan Realisasi Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Balikpapan Tahun 2022-2023
Sumber: DPOP Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Adapun capaian indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan di Kota Balikpapan tahun 2023 disebabkan karena jumlah pemuda berprestasi tahun 2023 hanya sebanyak 98 orang dan jumlah pemuda yang dibina kota Balikpapan usia 16-30 tahun sebanyak 14.526. Sementara itu, jumlah peserta bidang keolahragaan yang mengikuti kejuaraan tahun 2023 (olahraga rekreasi dan prestasi) sebanyak 1.320 dan jumlah atlet yang dibina 3.369. Hal tersebut mempengaruhi 4 komponen nilai indeks terutama jumlah pemuda yang dibina oleh Kota Balikpapan yang mengalami peningkatan setiap tahun sedangkan yang berprestasi dan dibiayai oleh DPA DPOP Kota Balikpapan hanya 98 orang dengan prestasi olahraga yang diraih dari event tingkat daerah (Pepaprov IV Kaltim 2023), Nasional (Panjat tebing nasional, Peparnas X, dll) dan internasional (*Sea Games* dan *Asean Para Games*).

Selain itu, dalam pencapaian Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan juga ditemukan beberapa kendala antara lain:

1) Masih belum maksimalnya partisipasi pemuda Kota Balikpapan ditandai kurangnya minat pemuda Balikpapan untuk mengikuti program dan kegiatan kepemudaan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan;
2) Sifat individualisme dan komersialisme di kalangan pemuda melunturkan sifat sosial dan kesukarelawanan sehingga diperlukan pelatihan karakter dan kesukarelawanan;
3) Masih banyak pemuda yang berfikir untuk bekerja secara formal karena itu diperlukan sosialisasi menumbuhkan minat berwirausaha di kalangan pemuda;
4) Data validasi *updating* Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) masih belum maksimal;
5) Masih banyak organisasi dan komunitas pemuda yang belum melaporkan kegiatannya sehingga data belun terintegrasi;
6) Belum terintegrasi secara maksimal program kegiatan kepemudaan yang melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai domain dan indikator IPP.

Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan untuk meminimalisir dan mengatasi kendala dalam pencapaian Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan yaitu:

1) Bertambahnya anggaran hibah Kwarcab Gerakan Pramuka dan KNPI pada tahun 2023;



Gambar 2.59
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2023)

2) Adanya program pemberdayaan pemuda dimana alumni kegiatan reguler yang berjenjang yang dilakukan DPOP reguler tiap tahunnya yang menjadi program pusat Kemenpora RI yang melibatkan alumni kegiatan sebagai suatu organisasi atau forum diberdayakan sebagai panitia pelaksana seperti pemilihan pemuda pelopor, jambore pemuda daerah/seleksi duta pemuda, TOT dan pemilihan Duta Pepelingasih, Pelatihan Bela Negara, dsb sehingga antusias dan berdaya;



Gambar 2.60
Berbagai Program Pemberdayaan Pemuda
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2023)

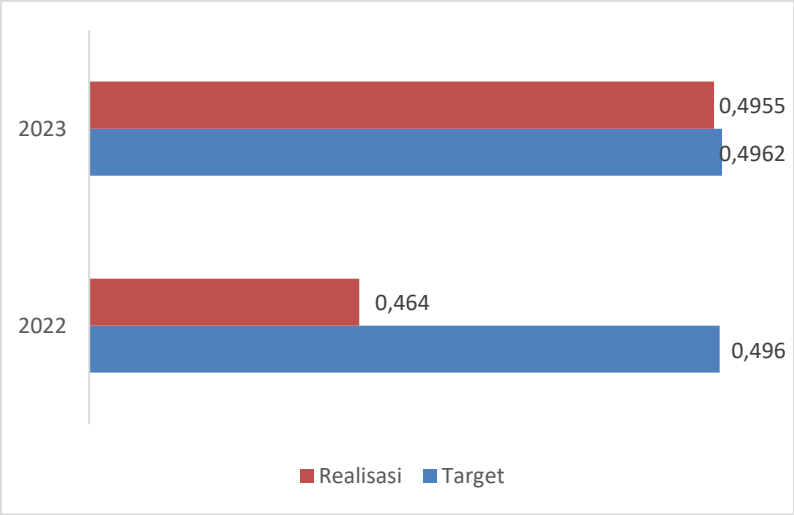
3) Adanya pendampingan anggaran untuk memberikan ruang kreativitas OKK melalui fasilitasi kegiatan berupa barang dan jasa serta peminjaman ruangan dan fasilitasnya sehingga Organisasi dan Komunitas kepemudaan dapat berkegiatan;
4) Diberikannya pendampingan dan pembinaan serta penghargaan bagi pemuda maupun organisasi kepemudaan yang berprestasi atau berjasa di Kota Balikpapan pada saat peringatan hari sumpah pemuda;
5) Berusaha berkoordinasi melibatkan *pentahelix* meliputi akademisi Bem se Kota Balikpapan. Pemerintah melalui Perangkat Daerah terkait sesuai domain IPP, Masyarakat komunitas Organisasi Kepemudaan, Media elektronik, cetak online, sosial dan radio meliputi sosialisasi dan publikasi, swasta melalui csr kepemudaan;

6) Adanya regulasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kepemudaan serta pedoman *Grand Desain* Pembangunan Kepemudaan Kota Balikpapan 2022-2035;
7) Komitmen Wali Kota Balikpapan dalam RPJMD dan RPJP terkait peningkatan SDM termasuk kepemudaan serta program rutin beasiswa Kota Balikpapan;
8) Dengan adanya pembangunan IKN sehingga terdapat banyak kunjungan dan event di Provinsi Kaltim dan juga Kota Balikpapan serta banyaknya Event atau Kegiatan yang berskala provinsi atau nasional yang dilaksanakan oleh Dispora Prov Kaltim dan Kemenpora RI di Kota Balikpapan seperti event OCCIA HUT Pramuka dan lain-lain.

8. Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Namun, jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan pemerintah, serta partisipasi dan kesadaran masyakarat terhadap pelestarian budaya bukanlah indikator penentu kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam rangka menyusun data dan informasi dalam pembangunan kebudayaan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Badan Pusat Statistik meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada 2018. IPK disusun berdasarkan konsep *Culture Development Indicators* (CDIs) UNESCO. Konsep tersebut memuat serangkaian dimensi dan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan. IPK dibuat sebagai instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan sehingga IPK memuat tujuh dimensi.

Salah satu dari 7 (tujuh) dimensi itu adalah dimensi warisan budaya yang menggambarkan upaya yang dilakukan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat terhadap produk budaya, baik warisan budaya benda dan tak benda, dalam pemajuan kebudayaan. Selain itu dalam ditentukan beberapa indikator komponen penyusun yang sederhana namun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aspek pemajuan kebudayaan seperti persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku seni.



Gambar 2.61
Target dan Realisasi Indeks Warisan Budaya Kota Balikpapan
Tahun 2022-2023
Sumber: DISDIKBUD Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Indeks Warisan Budaya Kota Balikpapan pada Tahun 2023 memperoleh indeks sebesar 0,4955 poin dengan capaian sebesar 99,86% atau mendapat predikat "sangat tinggi" melebihi 0,0007 poin dari realisasi tahun 2022. Namun indeks tersebut belum dapat melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,4962 poin, sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut. Salah satunya disebabkan karena terbatasnya kuota sertifikasi SDM Seni Budaya yang disediakan oleh pihak LSP P2 Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi sertifikasi untuk SDM. Selain itu, Sanggar Seni pada satuan pendidikan pada jenjang PAUD/ SD/ SMP/ SPNF yang ada di Kota Balikpapan masih kurang berkembang, baik dari aspek manajemen, maupun SDM pendukungnya.

Adapun berbagai upaya juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendorong pencapaian Indeks Warisan Budaya, antara lain:

1) Penyelenggaraan pengembangan kebudayaan melalui pengadaan festival/ pekan budaya, pelaksanaan kemah budaya untuk anggota pramuka Saka Widya Budaya Bhakti, fasilitasi HUT Kota, HUT RI, APEKSI, pembinaan kepada lembaga/ yayasan yang bergerak di bidang seni budaya;



Gambar 2.62
Pelaksanaan kegiatan festival dan pekan budaya
Sumber: DISDIKBUD Kota Balikpapan (2023)

2) Pengembangan kesenian tradisional melalui Pemilihan Duta Budaya, peningkatan kapasitas SDM Seni Budaya (Sertifikasi Seni Tari);



Gambar 2.63
Pemilihan Putra Putri Duta Kebudayaan
Sumber: DISDIKBUD Kota Balikpapan (2023)

3) Pembinaan sejarah melalui Pembuatan film sejarah balikpapan dengan melibatkan siswa/pendidik jenjang SD, dan tokoh budayawan Kota Balikpapan; serta
4) Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya melalui pemeliharaan struktur/ bangunan/ benda Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) maupun Cagar Budaya (CB); registrasi ODCB, kajian ODCB, dan penetapan ODCB menjadi CB

peringkat Kab/ Kota, peningkatan kapasitas SDM (bimtek inventarisasi dan pendaftaran ODCB, lawatan Cagar Budaya)

5) Kolaborasi dan sinergi dengan komunitas, tokoh budayawan/ sejarawan Balikpapan, dan stakeholder lainnya (Dewan Kesenian Kota Balikpapan, Forum Paguyuban Kota Balikpapan, Komite Seni Budaya Nusantara/ KSBN).



Gambar 2.64
Kegiatan Pemberian Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) 2023 Kategori Pelestari
Sumber: DISDIKBUD Kota Balikpapan (2023)

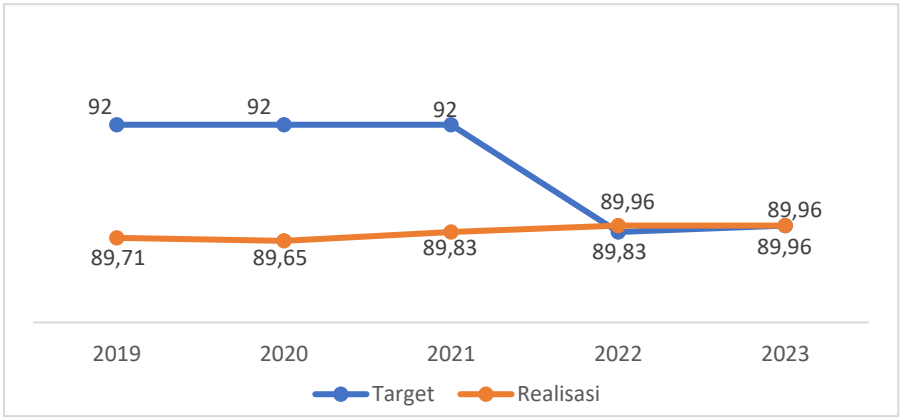
9. Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjaid akibat dari keadaan sosial dan budaya masyarakat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) muncul sebagai indikator dalam mengkaji perbandingan pencapaian kesetaraan pembangunan manusia yang berwawasan gender dan merepresentasikan pembangunan gender secara berkelanjutan.

Indikator ini digunakan untuk memonitor peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan secara lintas bidang dan lintas daerah. Indikator ini pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1995. Data yang digunakan untuk penghitungan

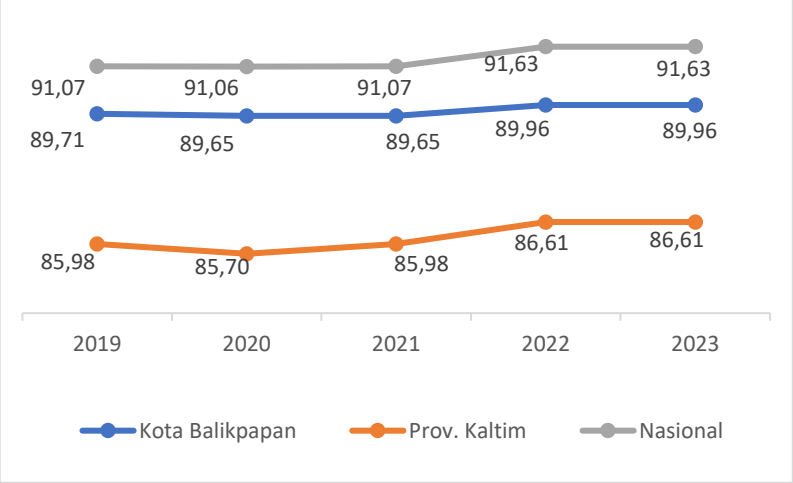
IPG berasal dari sumber yang sama dengan data yang digunakan untuk penghitungan IPM, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) lebih mengacu pada data terpilah antara laki-laki dan perempuan. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan Tahun 2023 terealisasi sebesar 89,96 poin, yang mana nilai ini masih menggunakan nilai tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 100% dan mendapat predikat “sangat tinggi”.



Gambar 2.65
Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kota Balikpapan Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Gambar 2.63 menunjukkan perkembangan IPG Kota Balikpapan selama periode 2019- 2023. Secara umum terlihat bahwa IPG Kota Balikpapan pada periode 2019-2023 mengalami fluktuasi. Fluktuasi angka IPG dalam beberapa tahun terakhir dapat diartikan bahwa pembangunan yang berwawasan gender mulai menunjukkan gejala tidak merata. Penurunan ini disebabkan karena IPM perempuan tumbuh lebih lambat dibandingkan IPM laki-laki, walaupun keduanya tumbuh. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah, utamanya dalam redistribusi peran dengan memperhatikan pembangunan yang berbasis gender.



Gambar 2.66
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Jika dilihat dari gambar 2.64 capaian IPG Kota Balikpapan tahun 2023 jauh diatas IPG Provinsi Kalimantan Timur dengan selisih sebesar 3,35 poin. Namun capaian IPG Kota Balikpapan masih berada dibawah IPG Nasional dengan selisih sebesar 1,67 poin.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan pembangunan gender telah didukung dengan adanya kebijakan tentang pelaksanaan Pengarustamaan Gender melalui Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 27 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan Program dan kegiatan pembangunan. Diharapkan dengan Perangkat Daerah menerapkan strategi Pengarustamaan Gender maka pelaksanaan Anggaran yang responsif Gender bisa menghapus hambatan struktural dan kultual dalam mencapai kesetaraan gender dan mengungkit nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi dan penyelesaiaan permasalahan laki-laki dan perempuan demi terciptanya kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di samping itu, Pemerintah Kota Balikpapan melalui DP3AKB Kota Balikpapan melaksanakan penguatan SDM perencana bagi Perangkat Daerag melalui kegiatan pelaksanaan PPRG dan kegiatan PPRG direview oleh Inspektorat sehingga mendorong Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA menerapkan mekanisme PPRG.

Guna mempertahankan capaian yang sudah memenuhi target diperlukan upaya/ rencana kedepannya agar capaian yang sudah terpenuhi ditahun-tahun mendatang dapat tetap dipertahankan. Beberapa upaya/ rencana kedepan untuk mempertahankan pencapaian indeks pembangunan gender (IPG) diantaranya:

1) Mengusulkan kebijakan pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam bentuk Peraturan Daerah. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu melalui penyusunan buku IPG Tahun 2023. Buku IPG dapat digunakan sebagai kajian objektif untuk penyusunan arah dan prioritas kebijakan pembangunan manusia berwawasan gender di Kota Balikpapan serta sebagai media informasi untuk penyusunan kebijakan mengenai pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender.



Gambar 2.67
Kegiatan Ekspose Buku Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2023)

2) Penguatan peran Perangkat Daerah *Driver* (Penggerak PUG) dalam mensosialisasikan PPRG agar Perangkat Daerah memahami pentingnya penyusunan PPRG;



Gambar 2.68
Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG)
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2023)

3) Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan PPRG melalui pendampingan langsung ke Perangkat Daerah;
4) Meningkatkan kualitas SDM pengelola data gender;
5) Meningkatkan peran koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam pengarusutamaan gender;



Gambar 2.69
Kegiatan Sosialisasi Regulasi Terkait Penyediaan Data Terpilah dan Pengenalan Aplikasi SIGA
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2023)

6) Optimalisasi peran Perangkat Daerah, LSOM (Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat) dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, antara lain:
   - DP3AKB Kota Balikpapan melalui Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Keluarga 2P (Pelopor dan Pelapor) pada tanggal 07 dan 08 Maret 2023;



Gambar 2.70
Sosialisasi Keluarga 2P (Pelopor dan Pelapor)
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2023)

- Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan pada tanggal 4 sampai dengan 5 April 2023;



Gambar 2.71
Kegiatan Penggerakan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2023)

- Koordinasi dan kerjasama sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan tanggal 11 April 2023 bersama Renakta Polda Kaltim dan Yayasan Psikologi Daeng Mapaccing Balikpapan;



Gambar 2.72
Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Sektor Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2023)

- Pemberian edukasi terkait pengasuhan dan pencegahan kekerasan terhadap anak;



Gambar 2.73
Sosialisasi LAUTAN RT
(Pola Penguatan Pengasuhan dari RT ke RT)
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2023)

- Koordinasi dengan Bapas Kota Balikpapan dalam melaksanakan sinergi dan kolaborasi dalam melaksanakan program-progrm terkait perlindungan khusus anak;

1



Gambar 2.74
Kegiatan koordinasi dengan BAPAS Kota Balikpapan
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2023)

- Pelaksanaan rapat koordinasi perlindungan perempuan dan anak terpadu;



Gambar 2.75
Rapat koordinasi PPATBM tingkat kecamatan
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2023)

- Pelatihan pendataan dan pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui aplikasi simfoni PPA.



Gambar 2.76
Pelatihan Aplikasi Simfoni
Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan (2023)

7) Penguatan dan pengembangan layanan konseling keluarga dan anak;
8) Penguatan kelembagaan yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai ketentuan;
9) Meningkatkan fungsi koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan rpeningkatan kesadaran perempuan untuk terlibat dalam kegiatan publik (ekonomi dan politik) serta melibatkan institusi pendidikan sehingga mengarah pada pembentukan paradigma adanya kesetaraan dalam tanggungjawab dan pemanfaatan waktu antara laki-laki dan perempuan regulasi perlindungan perempuan dan anak;
10) Sosialisasi pola pengasuhan anak secara bersama antara laki-laki dan perempuan.

10. Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas

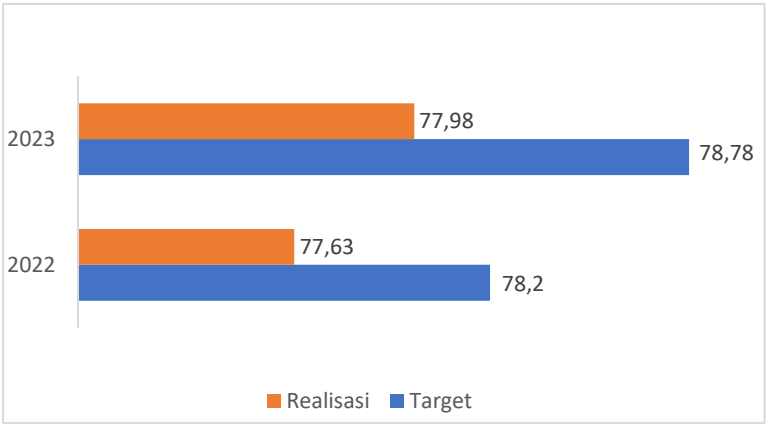
Dalam era perkembangan global yang terus berlangsung, peningkatan infrastruktur yang terpadu dan berkualitas telah menjadi pilar utama dalam mendorong kemajuan suatu negara atau wilayah. Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas adalah suatu perkembangan positif dalam suatu wilayah atau negara. Infrastruktur yang baik dapat memberikan dampak positif pada berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Untuk mengukur sasaran meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan antara lain:

a) Indeks Pembangunan Infrastruktur

Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan infrastruktur secara keseluruhan. Indeks ini berfokus pada penilaian dari berbagai aspek infrastruktur, termasuk jaringan jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan kualitas lingkungan dengan menunjukkan tingkat ketersediaan infrastruktur, kualitas infrastruktur, dan tingkat pemanfaatan infrastruktur. Indeks ini juga mengukur tingkat efisiensi dalam pengelolaan infrastruktur dan tingkat pengungkapan yang diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas. Indeks Pembangunan Infrastruktur menjadi alat yang berguna untuk mengevaluasi pembangunan infrastruktur dalam suatu wilayah atau negara.

Berdasarkan Hasil Perhitungan Mandiri Daerah, Indeks Pembangunan Infrastruktur Kota Balikpapan tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 77,98 poin dengan capaian kinerja sebesar 98.98% atau memperoleh predikat “sangat tinggi”.



Gambar 2.77
Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur
Kota Balikpapan Tahun 2022-2023
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Meskipun capaian kinerja indeks pembangunan infrastuktur sudah tinggi, indeks tersebut belum berhasil melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat peningkatan sebesar 0,35 poin dari capaian tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga masih menghadapi kendala di lapangan dalam upaya pembangunan infrastuktur tersebut, antara lain pada aspek infrastruktur layanan air minum terdapat kendala terkait keterbatasan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum layak, pada aspek kualitas lingkungan diketahui masih ada daerah yang masih kekurangan fasilitas sanitasi

yang memadai, sedangkan pada aspek infrastruktur drainase masih belum terlaksana secara maksimal karena pembangunan bangunan air dengan spesifikasi Pengendali Banjir DAS Ampal (MYC) dilaksanakan secara *multiyear*.

Di samping kendala tersebut, terdapat beberapa pencapaian yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan secara kolaborasi guna mendukung meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas, antara lain:

1) Pada aspek infrastruktur layanan air minum, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan guna meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas, antara lain:
   - Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong inisiasi dan persiapan SPAM Regional Kaltim (Balikpapan – Kukar – PPU) khususnya yang bersumber dari waduk sepaku Semoi dengan penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dengan badan Usaha (KPBU) Pembangunan SPAM Sepaku Semoi Balikpapan guna mengatasi keterbatasan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum layak;



Gambar 2.78
Penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan SPAM Sepaku Semoi Balikpapan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

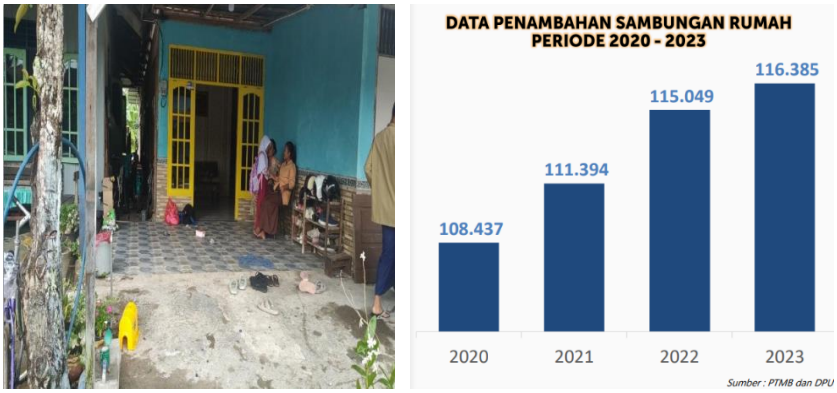
   - Melaksanakan perluasan SPAM jaringan perpipaan di Jalan Daksa Raya – Jalan Joko Tole – Jalan Manggar Sari/Baitul Makmur – Jalan Pemuda – Jalan Perumahan Bukit Batuah KM 6 dan melaksanakan supervisi

perluasan SPAM jaringan perpipaan di Jalan Daksa Raya – Jalan Joko Tole – Jalan Manggar Sari/Baitul Makmur – Jalan Pemuda – Jalan Perumahan Bukit Batuah KM 6;



Gambar 2.79
Perluasan SPAM Jalan Daksa Raya, Baitul Makmur Manggar Sari, dan Bukit Batuah
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

- Melaksanakan pemasangan sambungan air SR bagi MBR.



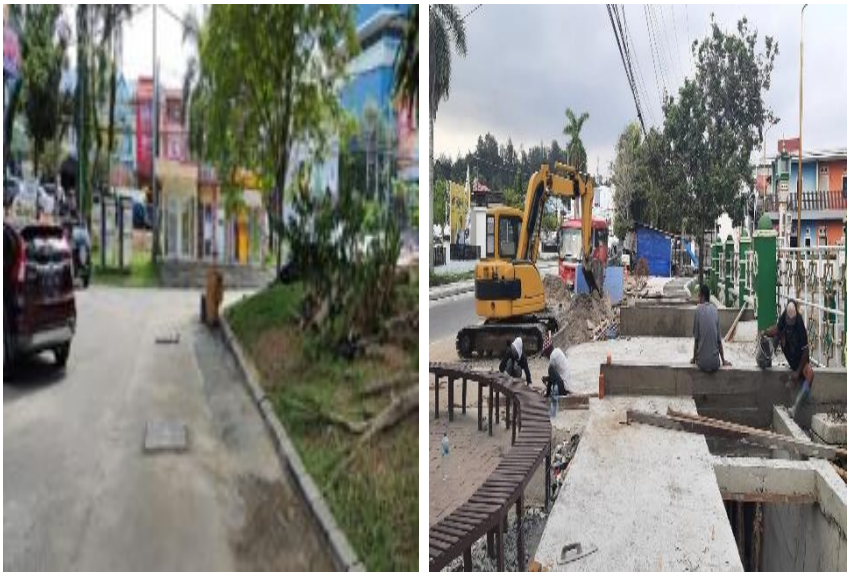
Gambar 2.80
Pemasangan 150 SR MBR
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

2) Pada aspek infrastruktur drainase, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan guna meningkatnya infrastruktur drainase, antara lain:
   - Melaksanakan proyek lanjutan pembangunan bangunan air pengendali banjir DAS Ampal;



Gambar 2.81
DAS Ampal
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

- Melaksanakan rehabilitasi saluran drainase di Kota Balikpapan. seperti pembangunan gorong-gorong Balikpapan Baru dan Puspoyudo, pembangunan saluran primer Jl. Perintis dan Somber, saluran tersier Ampar Lestari II dan Malioboro, serta saluran drainase RT 34 Karang Joang dan Jl. Ruhui Rahayu;



Gambar 2.82
Pembangunan Gorong-Gorong Balikpapan Baru dan Puspoyudo
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)



Gambar 2.83
Pembangunan Saluran Primer Perintis dan Normalisasi Karya Bakti (Saluran Drainase Primer Somber)
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)



Gambar 2.84
Pembangunan Saluran Tersier Ampar Lestari II dan Malioboro
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)



Gambar 2.85
Pembangunan Saluran Drainase RT 34 Karang Joang dan Jl. Ruhui Rahayu
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

- Pemerintah Kota (PEMKOT) Balikpapan dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Timur melakukan pembangunan dan rehabilitasi Bendungan Pengendali (Bendali) antara lain Pembangunan Bendali Wonorejo dan Bendali Ampal Hulu, Rehabilitasi Bendali Telaga Sari, Normalisasi Bendali Blok 1 dan 2 Perumahan KORPRI.

3) Pada aspek kualitas lingkungan, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan guna meningkatnya infrastruktur drainase, antara lain:

- Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan melaksanakan program Hibah Air Limbah Setempat (HALS) dan pembangunan 90 Unit Tangki Septik.



Gambar 2.86
Program Hibah Air Limbah Setempat (HALS) dan Pembangunan 90 Unit Tangki Septik
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melaksanakan pengelolaan persampahan melalui peningkatan TPST Pandan Sari, peningkatan landasan *container*, pembangunan pool kendaraan operasional persampahan di TPAS Manggar, dan pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga.



Gambar 2.87
Pengelolaan Persampahan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

4) Pada aspek infrastruktur jalan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan juga telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

- Melaksanakan rehabilitasi median jalan;



Gambar 2.88
Rehabilitasi Median Jalan Jendral Sudirman, MT. Haryono dan Jalan Soeprapto
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

- Peningkatan jalan AMD Gunung Empat Perumahan BTN RT. 38 – Jalan A.W. Syahrani – Jalan Berlian – Jalan Bukit Permata Sakinah RT. 64 – Jalan Hutan Kota 5 RT. 17 – Jalan Indrakilla RT. 28 – Jalan Kenangan RT. 07 – Jalan Letjend Suprapto Gunung Traktor RT. 27; Perbaikan jalan

Daksa Barat Rata RT. 06 dan RT. 07 Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan; Perbaikan jalan menuju Wisata Hutan Bambu Wana Desa KM. 15 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara; Perbaikan jembatan dan jalan RT. 25, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan; Pembangunan jembatan taman bermain anak – anak permukiman atas air di wilayah Kel. Baru Tengah – Kel. Baru Ulu; Semenisasi jembatan Jalan Safir RT. 37, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, peningkatan siring/turap RT. 39 Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat dan pemasangan siring RT. 34 dan RT. 37 Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat



Gambar 2.89
Peningkatan Konektivitas Jalan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

5) Pada aspek tingkat pelayanan jalan, pengelolaan dan penyediaan transportasi serta layanan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dengan melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

- Pengadaan penerangan jalan umum;



Gambar 2.90
Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Jalan Mulawarman, KM 13 Karang Joang, Pekerjaan Lampu Sorot 540 Watt Tiang Himast, dan Pekerjaan Lampu 200 Watt Smart System Tiang Artistik)
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

- Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan umum;



Gambar 2.91
Beautifikasi Jembatan (Jembatan Manggar dan Jalan Mulawarman dan Jembatan Zurich Jl. Jend. Sudirman) dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas (*Zebra Cross, Rumble Strip,* dan *Zoss*)
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

- Penyediaan perlengkapan manajemen rekayasa lalu lintas;



Gambar 2.92
Jalan Tembus KM 5,5 – KM 13 Rambu *Portable*
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

- Penyediaan perlengkapan jalan, jalur sepeda dan zona selamat sekolah



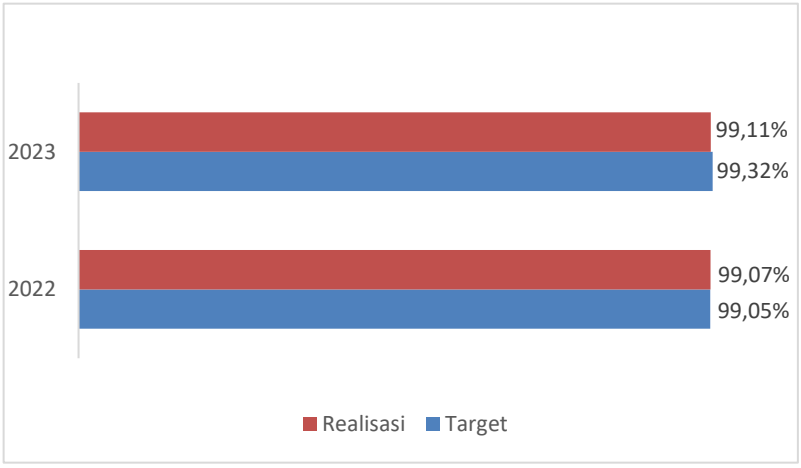
Gambar 2.93
Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dan Jalur Sepeda
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

b) Persentase Permukiman Layak Huni

Infrastruktur yang terpadu dan berkualitas adalah rangkaian fasilitas dan sistem yang saling terkait dan menyatu dengan baik untuk memberikan dukungan yang optimal bagi kebutuhan masyarakat dan ekonomi suatu negara atau wilayah. Infrastruktur yang terpadu berarti adanya keterkaitan dan keterpaduan antara berbagai jenis infrastruktur, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien. Sedangkan infrastruktur yang berkualitas berarti memenuhi

standar dan spesifikasi yang baik, memiliki kapasitas yang cukup, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas, salah satunya diindikasikan oleh persentase permukiman layak huni. Pemukiman layak huni adalah lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan penataan sesuai dengan standar dan tata ruang yang berlaku serta menjamin kesehatan masyarakat.



Gambar 2.94
Target dan Realisasi Persentase Permukiman Layak Huni
Kota Balikpapan Tahun 2022-2023
Sumber: DISPERKIM Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Diketahui bahwa persentase permukiman layak huni di Kota Balikpapan tahun 2023 telah mencapai 99,11 % dari target kinerja 99,32% dengan tingkat capaian kinerja 99,79% dan mendapat predikat “sangat tinggi”. Walaupun capaian persentase permukiman layak huni di Kota Balikpapan tahun 2023 belum melampaui target yang telah ditetapkan, capaian tersebut dapat melampaui realisasi tahun sebelumnya sebesar 0,04%.

Adapun beberapa penyebab belum tercapainya target persentase permukiman layak huni di Kota Balikpapan tahun 2023, antara lain:

1) Belum terdapat proses bisnis, SOP dan Proses penyusunan SK Bencana;
2) Belum dibangunnya sistem informasi data perumahan dan permukiman;
3) Belum terdapat bantuan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah Kabupaten/ Kota;

4) Adanya Surat Keputusan mengenai kawasan kumuh baru sehingga menambah luasan kumuh baru yang harus ditangani sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-203/2023 Tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan dengan luas 104,69 Ha;
5) Tidak adanya intervensi dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk luasan lebih dari 10 - 15 Ha dan Pemerintah Pusat untuk diatas 15 Ha, sedangkan penanganan kumuh yang didanai oleh APBD hanya untuk luasan kumuh dibawah 10 Ha berupa Pekerjan Penanganan Sistem Sanitasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan berupa Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman, Perbaikan saluran Drainase, dan Jalan Lingkungan.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan guna meningkatkan persentase permukiman layak huni adalah dengan dilaksanakannya pemberian bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari dana APBD Tahun 2023 Kota Balikpapan sebanyak 100 unit rumah penerima bantuan untuk perbaikan/ peningkatan kualitas berupa bantuan sosial barang seperti material/ bahan bangunan sebagai stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menerima bantuan untuk berswadaya secara berkelompok gotong-royong melaksanakan perbaikan masing-masing rumah secara bergantian. Terdapat 11 Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BSPKRTLH) Tahun 2023 yaitu:

1) Kelurahan Karang Rejo;
2) Kelurahan Karang Jati;
3) Kelurahan Gunung Sari Ulu;
4) Kelurahan Sumber Rejo;
5) Kelurahan Sungai Nangka;
6) Kelurahan Baru Ilir;
7) Kelurahan Manggar Baru;
8) Kelurahan Karang Joang;
9) Kelurahan Damai;
10) Kelurahan Prapatan; dan
11) Kelurahan Klandasan Ilir.

Selain itu, terdapat 40.755 unit rumah dalam perumahan yang telah dibangun namun baru 4963 yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan.

Tumbuhnya perumahan di Kota Balikpapan tersebut didukung oleh peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang berpengaruh terhadap bertumbuhnya sektor perumahan dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap rumah yang terfasilitasi PSU. Laju pertumbuhan penduduk memicu *backlog* perumahan di kota besar termasuk di Balikpapan sehingga dibutuhkan hunian untuk masyarakat dan pegawai yang cukup banyak. Sektor perumahan merupakan sektor yang bertumbuh positif karena memiliki efek berganda *multiplier effect* yang dapat menghidupkan 174 sub sektor industri lain seperti pabrik material bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan seperti Bank, Koperasi, *financial*, teknologi, dan perdagangan. Bertumbuhnya sektor perumahan selain karena peningkatan iklim investasi sebagai dukungan terhadap IKN di Kalimantan Timur, juga didukung oleh adanya program sejuta rumah Kementrian PUPR yang menjadikan terfasilitasinya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah yang terfasilitasi PSU dengan baik. Peningkatan rumah yang terfasilitasi PSU tidak serta merta lepas dari pengawasan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam pemenuhan kualitas dan kewajiban PSU. Ketercapaian target kinerja ini tetap memerlukan konsistensi dan komitmen antara pengembang perumahan dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai *leading sector* bidang perumahan rakyat untuk mendukung ketersediaan PSU perumahan yang memadai. Hal ini ditandai oleh komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan terus dilakukannya pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyedia perumahan dalam penyediaan PSU yang memadai.

11. Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam era yang semakin modern ini, tantangan terhadap kualitas lingkungan hidup semakin mendesak untuk diatasi. Untuk mencapai perubahan positif, perlu adanya kesadaran dan upaya bersama dalam melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan memahami pentingnya pelestarian alam, kita dapat merintis langkah-langkah strategis yang berkelanjutan demi mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Guna mengukur sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan antara lain:

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

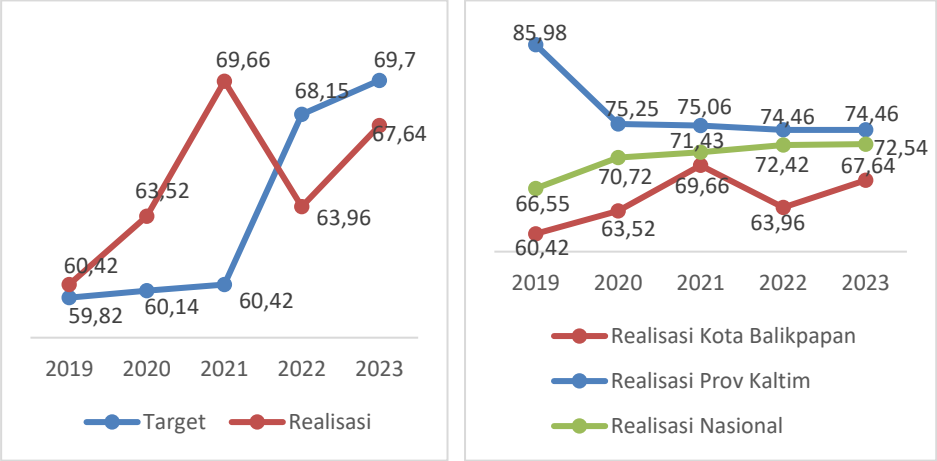
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran digunakan sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH adalah gambaran atas hasil

pengukuran kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metodologi evaluasi indikator kualitas lingkungan hidup terbagi empat yaitu hasil dari pemantau kualitas air, sungai dan danau (Indeks Kualitas Air –IKA), hasil pemantauan kualitas udara (Indeks Kualitas Udara –IKU), hasil pemantauan tutupan lahan (Indeks Kualitas Lahan –IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Dapat diketahui bahwa target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 sebesar 69,70 poin dan tercapai realisasi sebesar 67,64 poin dengan capaian kinerja 97,04% atau mendapat predikat “sangat tinggi”. Namun indeks tersebut belum dapat melampau target kinerja yang telah ditetapkan sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Balikpapan dari tahun 2017-2021 masih berada di bawah realisasi angka Provinsi Kalimantan Timur, bahkan tingkat nasional.



Gambar 2.95
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: DLH Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Perhitungan IKLH berasal dari perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Secara detail Persentase Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Kota Balikpapan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Kota Balikpapan

Indikator	2023		Capaian
	Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Air (IKA)	47,42	54,50	114,93%
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,12	89,98	100,96%
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65.33	48,91	74,87%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 indikator yang belum dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu indeks kualitas lahan (IKL) sehingga berpengaruh pada pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan data yang digunakan dalam perhitungan nilai IKL yang ada di sistem IKLH. Hal ini mengacu hasil verifikasi input data ITL pada sistem IKLH oleh Ditjen PPKL KLHK, dimana pada tahun 2023 data yang diverifikasi oleh KLHK sebesar 18.365,38 Ha. Sedangkan pada tahun 2023 ini, data yang diverifikasi oleh KLHK sebesar 502,404 Ha, atau terdapat 11 data input ITL yang tidak diakui menjadi ITL Kota Balikpapan. Lebih lanjut, indikasi penurunan signifikan berasal dari perubahan luasan pada RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN) yang semula pada aplikasi IKL seluas 2811,8928 Ha menjadi 618, 3247 Ha. Data RHL pada aplikasi IKL ini diperoleh dari hasil kegiatan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) sehingga Kabupaten/Kota tidak memiliki wewenang dalam penginputan pada aplikasi. Indikasi lain penurunan disebabkan perubahan kualitas lahan, misalnya rehabilitasi di hutan kemasyarakatan, setelah beberapa tahun tanaman dimanfaatkan sehingga kualitas dan tutupan lahannya berkurang.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup antara lain:

1) Melakukan sanggahan melalui melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Nomor 522/1746/DLH perihal Klarifikasi/Sanggah Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2023 tanggal 05 Desember 2023 dan berkoordinasi langsung ke Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pusat Pengendalian Ekoregion Kalimantan). Melalui koordinasi sementara dengan tim verifikasi data ITL KLHK disampaikan alasan bahwa data yang tidak terverifikasi tersebut sudah masuk dalam tutupan hutan dan/atau belukar;
2) Melaksanakan konsultasi ke Direktorat PPKL oleh Kepala DLH Kota Balikpapan dan bidang teknis yang menangani pada tanggal 8 Desember 2023 bertujuan untuk koordinasi dan konsultasi terkait Evaluasi Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH);
3) Penambahan luasan IKL dari luas lapangan hanya untuk yang ada vegetasinya dan untuk taman kecil dari Tingkat RT dengan luasan 250 m;
4) Rencana peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terintegrasi (IKA IKU dan IKL) berbasis spasial, memerlukan penentuan lokasi yang tepat. Salah satu alternatif yang dapat dijajaki adalah kerjasama dengan perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Misalnya, melibatkan beberapa perusahaan dalam kegiatan penanaman pohon di kawasan industri serta pembuatan lahan basah buatan di aliran sungai untuk mengurangi pencemaran pada badan air penerima (sungai).

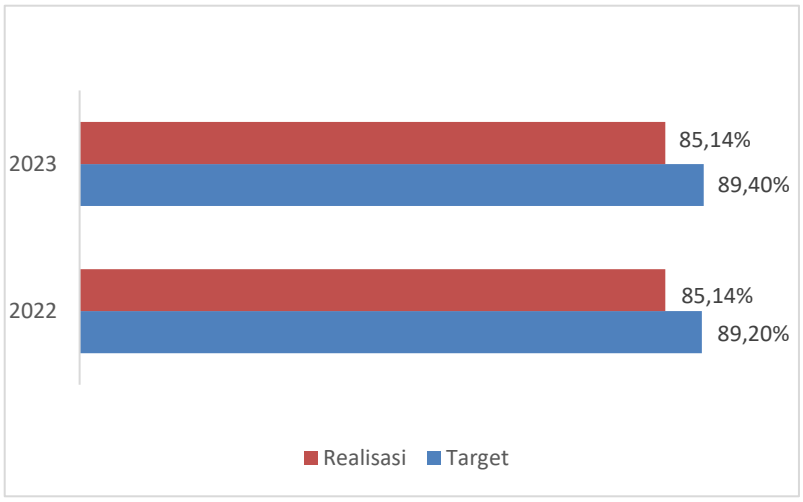
b) Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan

Implementasi Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah mengandung ketentuan 3R yakni Right, Restriction and Responsibility. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) untuk melakukan simplifikasi regulasi dan perizinan demi mendorong iklim investasi. Pemerintah memberikan kemudahan pada beberapa detail kebijakan Hak Pengelolaan, Satuan Rumah Susun, Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah namun tetap memberikan pengawasan dan evaluasi yang ketat.

Berdasarkan Kementerian ATR/BPN dapat diketahui bahwa Peraturan Pemerintah ini adalah ketentuan lebih lanjut dari pasal 136-142 tentang Penguatan Hak Pengelolaan, Pasal 143-145 tentang Satuan Rumah Susun, Pasal 146 tentang Hak Pengelolaan/Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah

Tanah serta Pasal 147 dan Pasal 175 tentang Penggunaan Dokumen Elektronik. Dalam konteks Hak Pengelolaan, diharapkan negara dapat berperan untuk mengatur lahan demi mengendalikan permasalahan keterbatasan tanah dan ruang. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang memastikan bahwa lahan dimanfaatkan secara efisien dan sesuai dengan peruntukkannya, serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan lahan yang tidak tepat.

Berdasarkan perhitungan mandiri Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan diketahui bahwa bahwa target persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukkan pada tahun 2023 sebesar 89,40% dan tercapai realisasi sebesar 85,14% poin, yang mana nilai ini masih menggunakan nilai tahun 2022 dengan capaian kinerja 95,23% atau mendapat predikat “sangat tinggi”.



Gambar 2.96
Target dan Realisasi Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Peruntukkan Kota Balikpapan Tahun 2022-2023
Sumber: DPPR Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Pencapaian persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukkan Kota Balikpapan pada tahun 2023 yang belum melampaui target disebabkan oleh ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukkannya seperti:

1) Peruntukan di tata ruang adalah sebagai badan air dan hutan kota akan tetapi dilakukan pembukaan lahan untuk dijadikan kawasan perumahan;
2) Peruntukan di tata ruang sebagai perumahan akan tetapi pemanfaatan diatas lahan sebagai peternakan;

3) Peruntukkan di tata ruang sebagai kawasan sempadan akan tetapi pemanfaatan ruang eksisting sebagai kawasan pergudangan industri;
4) Peruntukkan di tata ruang sebagai kawasan sempadan akan tetapi pemanfaatan ruang eksisting sebagai kawasan perumahan;
5) Peruntukkan di tata ruang sebagai kawasan sempadan sungai dan bangunan yang telah eksisting berbatasan langsung dengan kawasan sempadan tersebut;
6) Peruntukkan di tata ruang sebagai kawasan sempadan akan tetapi pemanfaatan ruang eksisting sebagai perdagangan dan jasa dengan bangunan permanen; dan
7) Peruntukkan di tata ruang sebagai kawasan mangrove akan tetapi terdapat bangunan diatasnya yang seharusnya tidak diperbolehkan.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengantisipasi/ meminimalisir permasalahan tersebut, antara lain:

1) Memberikan surat pemberitahuan terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap tujuh pelanggaran peruntukan;
2) Melakukan kunjungan lapangan terhadap terhadap tujuh pelanggaran peruntukan;
3) Melaksanakan FGD bersama Dirjen Pengendalian Tata Ruang dan Perangkat Daerah terkait; dan
4) Memberikan surat pemberitahuan kepada pihak terkait agar:
    - Melakukan reboisasi dan menjaga kawasan badan air dan hutan Kota yang telah dibuka lahannya;
    - Melakukan monitoring kegiatan pemanfaatan lahan sebagai peternakan ke Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan;
    - Menjaga dan memprioritaskan fungsi kawasan sempadan;
    - Melengkapi perizinan yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku;
    - Melaksanakan pembongkaran bangunan di atas lahan mangrove dan penanaman pohon kembali.

Di samping itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan penataan bangunan dan lingkungan seperti penataan trotoar dalam rangka penataan pedestrian sepanjang 500 m dari Jl. Jend A Yani Simpang APT Pranoto sampai dengan Masjid Al Ihsan dan revitalisasi lanjutan kawasan Sudirman dalam rangka penataan pusat aktivitas masyarakat pada kawasan taman bekapai dan gedung parkir klandasan.



Gambar 2.97
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan juga melakukan pembangunan Taman Kawasan Olahraga Terpadu (KOT) dan pembangunan taman kawasan 3 generasi yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan beraktivitas bagi masyarakat dengan ruang terbuka serta menambah ruang terbuka ramah anak-anak.



Gambar 2.98
Pembangunan Taman KOT dan Taman 3 Generasi
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga membangun Gerbang Kota Utara Kota Balikpapan yang bertujuan sebagai ikon Pintu Gerbang Masuk Kota Balikpapan melalui wilayah utara Balikpapan serta mempercantik kawasan Kota Balikpapan.



Gambar 2.99
Pembangunan Gerbang Kota Utara Kota Balikpapan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

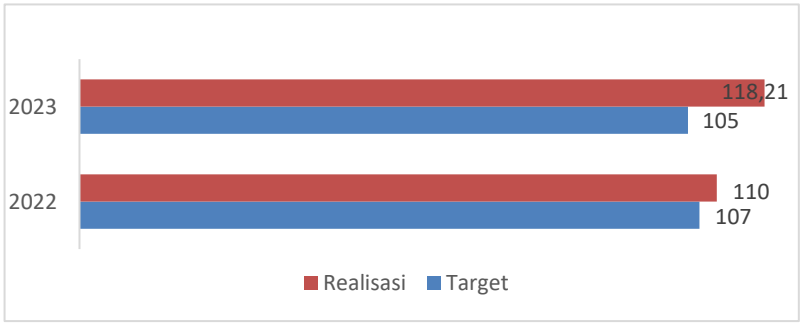
12. Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota

Di tengah kompleksitas perkembangan perkotaan dan potensi risiko bencana yang semakin meningkat, penting bagi kita untuk fokus pada peningkatan kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota. Keberlanjutan dan keamanan lingkungan perkotaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga mewajibkan partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi tantangan tersebut. Untuk mengukur sasaran meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban Kota Balikpapan terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan antara lain:

a) Indeks Resiko Bencana

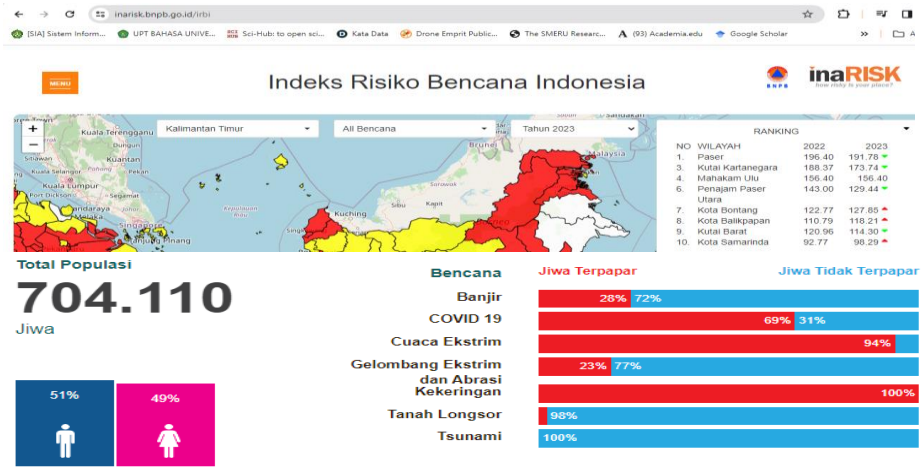
Indeks resiko bencana adalah nilai yang menunjukkan tingkat risiko bencana suatu daerah didasarkan atas variabel ancaman, kerentanan dan kapasitas. Indeks resiko bencana mengukur tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap risiko bencana, serta kemungkinan terjadinya bencana di wilayah tersebut. Indeks resiko bencana biasanya mencakup faktor-faktor seperti geografi, topografi, jenis tanah, curah hujan, ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur, kepadatan penduduk, dan faktor manusia lainnya. Berdasarkan faktor-faktor ini, Indeks resiko bencana menghasilkan skor resiko yang dapat membantu dalam menentukan prioritas tindakan mitigasi risiko dan alokasi sumber daya.

Indeks resiko bencana dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menentukan langkah-langkah mitigasi dan persiapan untuk mengurangi risiko bencana. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi resiko bencana, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan efektif untuk mengurangi dampak bencana yang potensial terjadi.



Gambar 2.100
Target dan Realisasi Indeks Resiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022-2023
Sumber: BPBD Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Berdasarkan hasil *assessment* atau penilaian yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, indeks resiko bencana Kota Balikpapan pada Tahun 2023 memperoleh indeks sebesar 118,21 poin dengan capaian sebesar 88,82% atau mendapat predikat " tinggi". Namun indeks tersebut belum dapat melampau target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 105 poin, bahkan turun dari capaian tahun lalu sebesar 8.21 poin sehingga memerlukan perbaikan lebih lanjut.

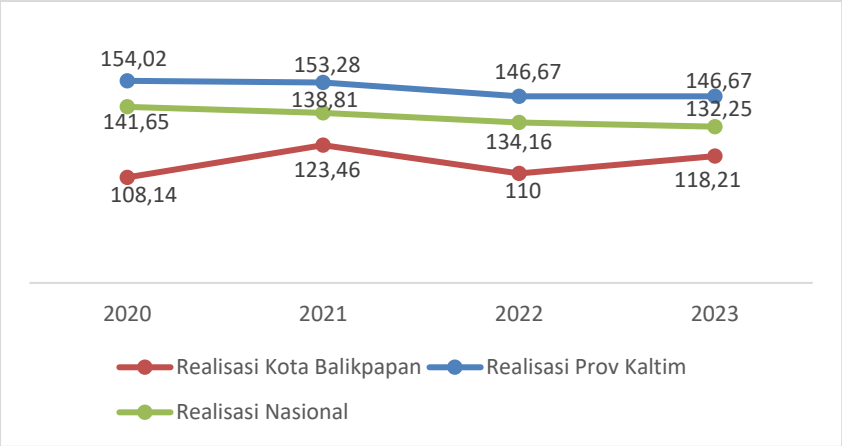


Gambar 2.101
Analisis Indeks Resiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2023
Sumber: https://inarisk.bnpb.go.id/ (2023)

Merujuk pada gambar di atas, diketahui bahwa abrasi kekeringan menjadi faktor utama penyebab kenaikan indeks resiko bencana dimana 100% dari total populasi penduduk di Kota Balikpapan terdampak bencana tersebut. Sementara itu,

661.863 jiwa terpapar cuaca ekstrim disusul oleh 69% atau 485.836 jiwa terpapar covid-19.

Namu apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, Indeks Resiko Bencana Kota Balikpapan dari tahun 2020-2023 masih berada di atas realisasi angka Provinsi Kalimantan Timur, bahkan tingkat nasional.



Gambar 2.102
Perbandingan Indeks Resiko Bencana Tahun 2022-2023
Sumber: BPBD Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Adapun penurunan Indeks Resiko Bencana dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

1) Adanya perubahan sistem perhitungan terhadap 71 indikator yang digunakan untuk mengukur dimana pada tahap ini penilaian dilakukan dengan dilengkapi bukti dukung. Hal ini juga menyebabkan terjadinya penurunan nilai di seluruh Kabupaten/ Kota Balikpapan;
2) Dokumen Kajian Resiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang ada belum dapat diakui sebagai dokumen yang legal atau sah di aplikasi IKD karena belum legalkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
3) Belum menyusun dokumen Rencana kontijensi Banjir;
4) Kurangnya bukti dukung yang digunakan untuk menjawab pertanyaan pada Indikator 43: Konservasi vegetatif DAS rawan longsor;
5) Belum lengkapnya bukti dukung terkait perhitungan berapa besaran dana total dalam penanggulangan bencana baik yang ada di BPBD Kota Balikpapan langsung maupun dana yang bersifat penanggulangan bencana yang ada di Perangkat Daerah lain

Selain itu terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam mencapai Indeks Resiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2023 antara lain:

1) Kesulitan dalam mengumpulkan data dan bukti dukung secara menyeluruh, yang tidak hanya berasal dari BPBD, tetapi juga dari Perangkat Daerah lain. Data dan bukti dukung tersebut diperlukan untuk melengkapi 71 indikator dari 284 pertanyaan;
2) Kesulitan pengumpulan bukti dukung dari instansi vertikal seperti data dari BWS dan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
3) Dalam menjawab 284 pertanyaan dalam dokumen IKD harus mencantumkan besaran dana untuk penanggulangan bencana baik yang ada langsung di BPBD ataupun yang ada di Perangkat Daerah lain, sehingga ada kesulitan untuk mengidentifikasi dana yang berada baik yang ada langsung di BPBD ataupun yang ada di Perangkat Daerah lain yang berhubungan dengan penangggulangan bencana seperti DPU, Disperkim, Dinsos, DLH, DKK, dan DPPP, dll.
4) Masih banyak Perangkat terkait yang apabilaka diminta data terkait untuk pengisian IKD masih kurang lengkap dalam memberikan data.

Untuk itu, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan melakukan berbagai upaya perbaikan guna mendorong pencapaian indeks resiko bencana. Adapun upaya perbaikan yang dilakukan antara lain:

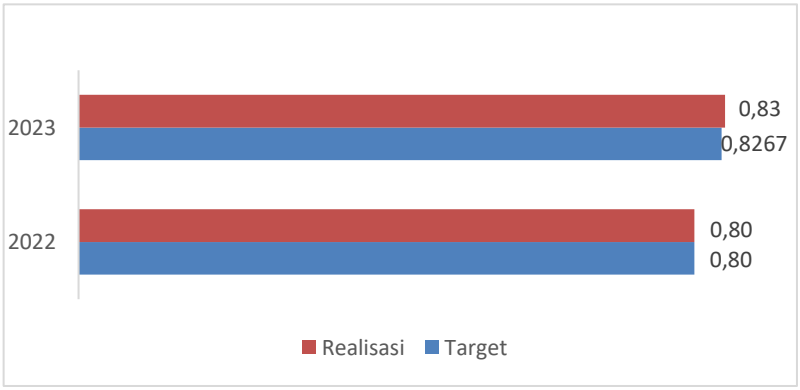
1) Melakukan penyusunan dokumen Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana;
2) Melaksanakan penganggaran untuk penyusunan dokumen rencana kontijensi banjir yang dilaksanakan pada tahun 2024;
3) Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kota Balikpapan yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait (BPBD, DPU, DISPERKIM, DLH, Bagian Pemerintahan, DINSOS, DKK, dan DP3) sekaligus tim ini juga dapat melaporkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang berada di Perangkat Daerah tersebut.

b) Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur

sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Indeks ketentraman dan ketertiban digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam memelihara keamanan dan ketertiban di negara atau wilayah tersebut. Indeks ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan tingkat stabilitas dan keamanan antara negara atau wilayah yang berbeda, serta sebagai acuan untuk menentukan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban di suatu wilayah. Selain itu, dalam hal ini indeks ketentraman dan ketertiban juga mencakup keamanan dan ketertiban dalam rangka pembangunan demokrasi dan politik di daerah yang dapat memberikan dampak positif pada pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta pencegahan konflik sosial sebagai upaya untuk mencegah terjadinya benturan atau perselisihan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda di masyarakat, yang dapat menimbulkan kekerasan, kerusuhan, dan ketidakstabilan sosial.



Gambar 2.103
Target dan Realisasi Indeks Ketentraman dan Ketertiban
Kota Balikpapan Tahun 2022-2023
Sumber: DPPR Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Berdasarkan Hasil Perhitungan Mandiri Daerah, Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Balikpapan tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 0,83 poin dengan capaian kinerja sebesar 100,40% atau memperoleh predikat “sangat tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah mampu mewujudkan dan meningkatkan ketertiban Kota Balikpapan tahun 2023, walaupun masih ditemui beberapa kendala dilapangan seperti masih kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan dilapangan dan

kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan guna mendukung pencapaian indeks ketentraman dan ketertiban. Salah satunya dengan terbentuknya Regu SC (*Service Center*) dan URC (Unit Reaksi Cepat) selama 24 jam yang dikhususkan untuk menangani adanya aduan masyarakat terkait adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan. Regu tersebut mampu merespon secara cepat aduan dari masyarakat sehingga masalah dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan efisien.



Gambar 2.104
***Hotline* Satpol PP Layanan Pengaduan per Kecamatan**
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga melaksanakan pengawasan, penertiban dan pemantauan berkala pasca penertiban, seperti penertiban pelanggaran tertib sosial anak-anak jalanan yang selama ini sulit dilakukan karena anak-anak jalanan yang sering “kucing-kucingan” dengan petugas. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam mengakses (*mirroring*) CCTV milik Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tersebut untuk memantau anak-anak jalanan yang beraktifitas di persimpangan lampu merah. Dengan pemantauan 24 jam ini, maka jumlah pelanggaran di persimpangan dapat diturunkan. Contoh pengawasan, penertiban dan pemantauan berkala lainnya adalah penertiban maraknya penjualan BBM dengan mesin dispenser/ pom mini. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan

pembahasan mendalam bersama Perangkat Daerah teknis terkait dan seluruh *stakeholder*, untuk membentuk kebijakan yang dapat membatasi pertumbuhan pom mini yang dituangkan dalam Surat Edaran Wali Kota Balikpapan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan juga memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan ketentraman terkait pembangunan demokrasi dan politik dan pencegahan konflik sosial di Kota Balikpapan. Dalam hal ini berbagai upaya telah dilakukan seperti meningkatkan partisipasi publik melalui pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui dialog publik, konsultasi, atau forum-forum partisipatif lainnya. Dialog antar kelompok juga dilakukan untuk membantu mengurangi polarisasi dan mencegah terjadinya konflik sosial dengan memfasilitasi dialog antar kelompok atau pertemuan antar kelompok masyarakat yang berbeda. Di samping itu, meningkatkan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya juga dapat membantu mencegah terjadinya konflik sosial melalui program-program pendidikan dan budaya yang mempromosikan keragaman dan toleransi.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara terintegrasi, diharapkan dapat meningkatkan ketentraman dan ketertiban di Kota Balikpapan agar terwujud keamanan dan stabilitas kota yang diinginkan.

13. Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan

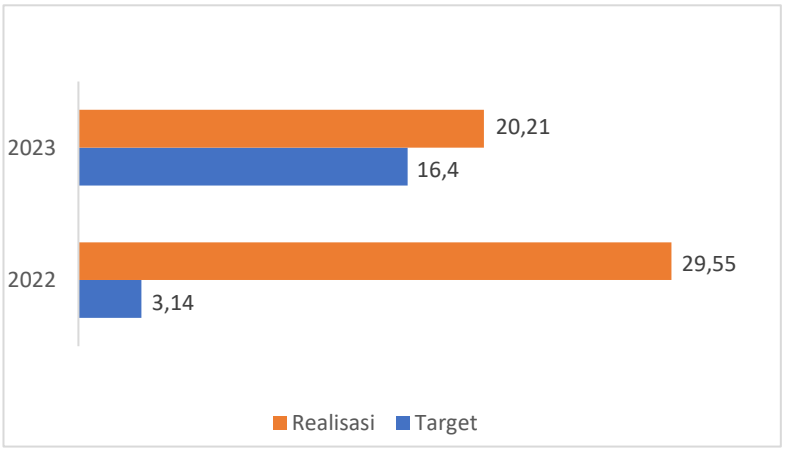
Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro di daerah, disertai penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, merujuk pada situasi di mana usaha mikro mengalami perkembangan yang pesat dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Fenomena ini diiringi oleh dampak positif, seperti peningkatan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran menurun, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan turut berkurang. Pertumbuhan usaha mikro yang berdampak positif terhadap pengangguran dan kemiskinan memerlukan kebijakan dan strategi yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Untuk mengukur sasaran meningkatnya pertumbuhan usaha mikro daerah, penurunan tingkat pengangguran, dan penurunan tingkat kemiskinan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan yaitu:

a) Persentase Pertumbuhan UMKM

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian lokal. Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mengacu pada peningkatan ukuran, produktivitas, keuntungan, dan kontribusi ekonomi dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertumbuhan UMKM juga dapat diartikan sebagai peningkatan jumlah dan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh UMKM serta kemampuan mereka untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi lokal, serta memberikan dampak positif pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait di berbagai negara berupaya untuk mendorong pertumbuhan UMKM dengan berbagai kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan UMKM di masing-masing wilayah.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan penyesuaian target kinerja persentase pertumbuhan UMKM yang semula 3,14% menjadi 16,4% sebagai bentuk reviu kinerja dengan memanfaatkan laporan kinerja sebelumnya dan menyesuaikan dengan pertumbuhan UMKM yang mulai kembali normal dan stabil pasca pandemi covid-19.



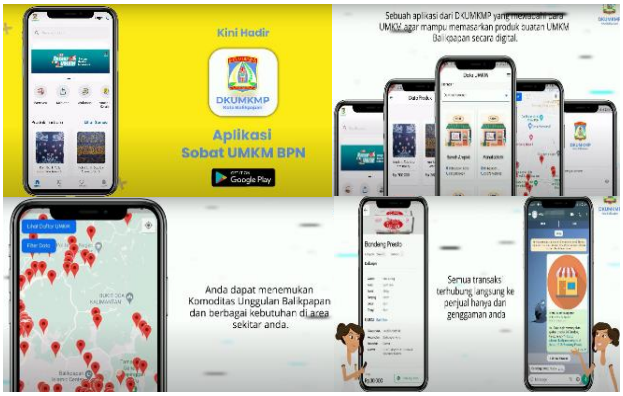
Gambar 2.105
Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan UMKM
Kota Balikpapan Tahun 2022-2023
Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan dan hasil perhitungan mandiri Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan UMKM Kota Balikpapan mencapai realisasi sebesar 20,21% dengan capaian sebesar 123,23% atau memiliki predikat “sangat tinggi. Namun apabila persentase pertumbuhan UMKM Kota Balikpapan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 diketahui bahwa capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 9,34%.

Pencapaian persentase pertumbuhan UMKM Kota Balikpapan tahun 2023 didukung oleh kerjasama yang baik dengan instansi terkait/ pihak ketiga dalam memaksimalkan pendataan UMKM dan menambah kemampuan daya saing UMKM. Transparansi pada *Good Public Governance* yang telah diterapkan DKUMKMP Kota Balikpapan sehingga informasi cepat sampai pada sasaran juga mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Selain itu, sosialisasi secara berkesinambungan kepada pelaku usaha dan pelaku dagang mampu mendorong penumbuhan wirausaha baru. Kegiatan tersebut juga mampu mengembangkan daya saing produk-produk UMKM yang diminati pasar agar memenuhi ketentuan untuk dapat dijalin kemitraan dengan BUMN atau perusahaan atau ritel modern. Sejalan dengan hal tersebut, pengurusan perijinan saat ini sangat mudah di akses oleh seluruh pelaku usaha melalui sistem *online single submission* (OSS) yang kemudian juga didukung dengan banyaknya sumber pembiayaan permodalan yang memberikan nilai suku bunga sangat rendah.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan

1) Berperan aktif dalam UMKM *Care Center* sebagai wadah fasilitasi UMKM dengan Lembaga keuangan terkait permodalan sekaligus partner dan advisor UMKM dalam menjaga daya saing usaha serta membantu pelaksanaan pendataan program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM);
2) Mengembangkan promosi UMKM melalui aplikasi Sobat UMKM BPN yang dapat digunakan untuk seluruh pelaku UMKM dan masyarakat Kota Balikpapan. Pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya secara mudah dan gratis sekaligus memasarkan produknya dan konsumen dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk berbelanja produk UMKM pilihannya;



Gambar 2.106
Aplikasi Sobat UMKM BPN
Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan (2023)

3) Memfasilitasi akses pasar melalui promosi dan pemasaran produk UMKM yang didukung oleh APBD Kota Balikpapan dan APBD Provinsi Kalimantan Timur seperti mensosialisasikan Gerakan "Beli Produk UMKM" untuk mempertahankan eksistensi UMKM Kota Balikpapan termasuk di media sosial resmi milik DKUMKMP dan mempromosikan daftar berbagai varian produk dan jasa UMKM Kota Balikpapan beserta akun media sosial milik UMKM dengan harapan masyarakat dapat mengakses untuk melakukan pemesanan/ pembelian. Selain itu, melalui program pengembangan UMKM juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan pameran sebagai bentuk promosi terhadap produk UMKM;



Gambar 2.107
Promosi Produk UMKM melalui Beragam Kegiatan Pameran
Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan (2023)

4) Membuat inovasi FITS (From Idea to Startup) Balikpapan yang bertujuan untuk mendukung UMKM berkembang dan memperkuat SDM Wirausaha dan UMKM di Kota Balikpapan. Program FITS terbuka untuk Warga balikpapan yang memiliki ide usaha atau yang baru memulai usaha atau yang sudah mempunyai usaha dan mau berkembang;



Gambar 2.108
FITS (*From Idea to Startup*) Balikpapan
Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan (2023)

5) Melaksanakan berbagai pelatihan dan pendidikan bagi pelaku UMKM yang bertujuan untuk tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM antara lain:

- Program pelatihan *e-learning* bagi koperasi dan UMKM Kota Balikpapan melalui edukukm.id (pelatihan berbasis *online*) yang diinisiasi oleh KEMENKOP dan UKM RI;
- Pelatihan pengembangan produk UMKM (pelatihan olahan pangan, pelatihan sulam tumpar, pelatihan manik mani, pelatihan batik dan pelatihan kemasan)



Gambar 2.109
Pelatihan Pengembangan Produk UMKM (Pelatihan Design Kemasan, Pelatihan Sulam Tumpar, Pelatihan Batik, Dan Pelatihan Olahan Pangan)
Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan (2023)

- Pelatihan manajemen usaha, perseroan perorangan, dan pelatihan digitalisasi bagi UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kompetensinya agar dapat mengelola usaha atau bisnis secara efektif dan efesien serta mengubah pengelolaan bisnisnya dari praktik konvensional ke modern beradaptasi (secara digitalisasi). Selain itu, melalui program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) juga telah dilaksanakan pelatihan sistem jaminan produk halal (SJPH) *batch* I dan II yang bertujuan untuk mengakomodir pelaku usaha yang ingin mendaftarkan halalnya secara regular dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi HKI bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya perlindungan HKI bagi produk yang dihasilkan para pelaku industri kecil menengah.



Gambar 2.110
Pelatihan Digitalisasi UMKM, Pelatihan Manajemen Usaha, Pelatihan Perseroan Perorangan, Dan Pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) *Batch* I Dan II
Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan (2023)

b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

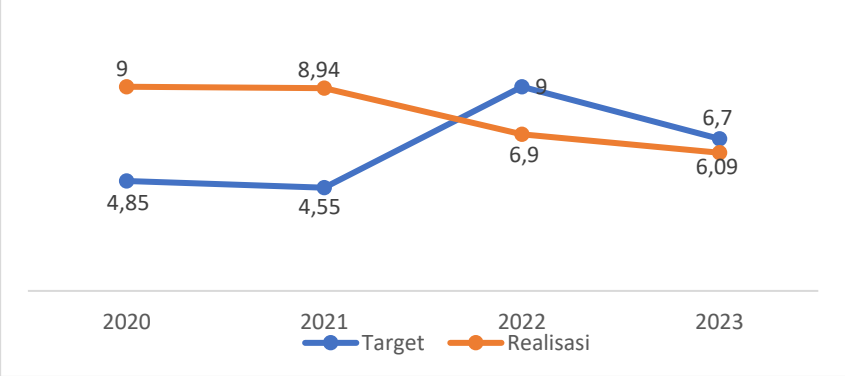
Ketenagakerjaan merupakan penggerak roda produksi perekonomian dalam proses produksi barang dan jasa. Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru

dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Peningkatan dalam jumlah angkatan kerja, bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembangunan.

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada perluasan kesempatan kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas produktif, efisien, efektif dan berjiwa wiraswasta sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

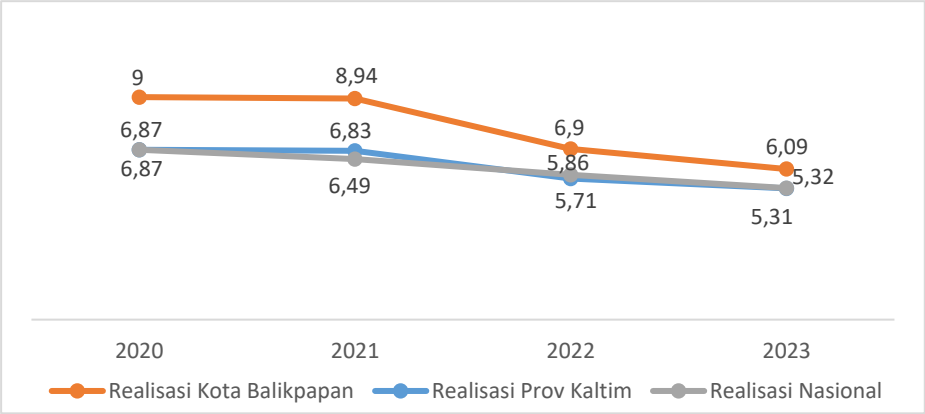
Guna mengukur jumlah pengangguran yang ada suatu wilayah dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dihitung dengan membuat perbandingan antara jumlah pencari kerja yang sedang mempersiapkan usaha dengan jumlah angkatan kerja. TPT merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan pemerintah dari tahun ke tahun. Selain itu, dapat dijadikan acuan untuk program pembukaan lapangan usaha baru. Tingginya angka TPT dapat berdampak negatif pada meningkatnya potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan seperti kriminalitas.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Balikpapan Agustus 2023 mencapai 6,09% mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2022 yakni sebesar 6,90%. Dengan kata lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Balikpapan telah berhasil melampui target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 110,02%, memperoleh predikat “sangat tinggi”. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan komitmen untuk melaksanakan program ketenagakerjaan.



Gambar 2.111
Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Balikpapan Tahun 2020-2023
Sumber: BPS dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan,
diolah Tahun 2024

Namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan dari tahun 2020-2023 masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur, bahkan tingkat nasional. Hal ini menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Balikpapan masih sudah cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya.



Gambar 2.112
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Balikpapan Tahun 2020-2023
Sumber: BPS dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan,
diolah Tahun 2024

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan Tahun 2023 antara lain:

1) Meningkatnya Partisipasi Perusahaan dalam menginformasikan lowongan tenaga kerja ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan;
2) Meningkatnya Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di kota Balikpapan;
3) Terlaksananya Program Prioritas Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan;
4) Peran serta aktif dari para lulusan pelatihan untuk mencari peluang pekerjaan;
5) Komunikasi yang baik antara dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dengan perusahaan;
6) Peran Aktif dari LPK untuk mencarikan peluang bekerja / Magang bagi para lulusan pelatihan;
7) Peran serta para lulusan yang sudah mendapat pekerjaan untuk memberi informasi lowongan kepada sesama alumni pelatihan kerja;

8) Partisipasi Perusahaan dalam menginformasikan lowongan tenaga kerja ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

Selain itu. beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2023 yaitu:

1) Meningkatkan komunikasi yang baik antara Dinas Ketenagakerjaan dengan perusahaan maupun pencari kerja yang terdapat di Kota Balikpapan terkait informasi atau lowongan kebutuhan tenaga kerja;
2) Mengoptimalkan kegiatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan pencari kerja dalam bidang yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja seperti dengan membangun kerjasama dengan BLK pemerintah dan melakukan program pemagangan Lembaga Pelatihan Kerja;



Gambar 2.113
Pemagangan, Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

3) Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait ketenagakerjaan secara rutin;
4) Meningkatkan pembuatan konten edukasi terkait layanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melalui media sosial;
5) Membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan di Kota Balikpapan untuk penyerapan SDM yang telah dilatih;

6) Memberikan motivasi kepada lulusan pelatihan untuk mendapatkan kerja dan membangun solidaritas sesama alumni pelatihan;
7) Melakukan penyuluhan bimbingan dan jabatan kepada pencari kerja khususnya siswa sekolah menengah kejuruan dan mahasiswa perguruan tinggi yang ada di kota Balikpapan ditujukan bagi para calon pencari kerja dan diikuti oleh 480 peserta.



Gambar 2.114
Penyuluhan Bimbingan Dan Jabatan Kepada Pencari Kerja
Sumber: DISNAKER Kota Balikpapan (2023)

8) Melaksanakan perluasan kesempatan kerja melalui pelaksanaan *job fair* atau bursa kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan diselenggarakan sebanyak 3 kali dengan biaya anggaran APBD sebanyak 1 kali dan 2 kali bekerja sama/berkolaborasi dan sinergi sebanyak 2 kali yaitu bekerja sama dengan pengelola gedung Balikpapan Trade Center dan Disnaker Tran Provinsi Kaltim.

TAHUN 2023	JOB FAIR I	JOB FAIR II	JOB FAIR III
Pelaksanaan	15 – 16 Maret	11 – 12 Juli	1 – 3 Desember
Peserta Pencaker	2.171 orang	2.115 orang	1.950 orang
Jumlah Perusahaan	45 Perusahaan	101 Perusahaan	70 Perusahaan
Penempatan	229 orang	600 orang	26* *perhitungan sementara



Gambar 2.115
Jadwal Pelaksanaan *Job Fair* dan Penempatan Tenaga Kerja
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

9) Melakukan monitoring ke perusahaan terkait penempatan tenaga kerja;
10) Meningkatkan peran pengantar kerja dan petugas antar kerja;
11) Melaksanakan kerjasama *tripartite* daerah untuk perlindungan tenaga kerja melalui serta melaksanakan pembinaan hubungan industrial perusahaan.



Gambar 2.116
Kerjasama *Tripartite* Daerah
Sumber: DISNAKER Kota Balikpapan (2023)

c) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan terhadap keseluruhan penduduk Kota Balikpapan. Garis kemiskinan sendiri merupakan batas nilai rupiah pengeluaran konsumsi (makanan dan non makanan) perkapita perbulan. Untuk Tahun 2023, BPS menetapkan garis kemiskinan kota Balikpapan Rp 743.084,- perkapita perbulan. Nilai tersebut kemudian dijadikan *baseline* untuk menentukan persentase penduduk miskin, dimana semua individu yang memiliki tingkat konsumsi dibawah nilai tersebut digolongkan sebagai penduduk miskin.

Dengan nilai garis kemiskinan Balikpapan pada tahun 2023 sebesar Rp 743.084,-/orang/bulan dapat diartikan jika satu keluarga memiliki empat orang

Anggota Rumah Tangga, keluarga tersebut harus memiliki pendapatan minimal Rp. 2.972.336,- (4 orang x Rp. Rp 743.084,-) agar dikatakan tidak miskin. Saat pendapatannya dibawah angka tersebut artinya keempat anggota rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jika dilihat dari tabel di bawah, garis kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang juga dipengaruhi oleh inflasi.

Tabel 2.11
Angka Kemiskinan di Kota Balikpapan Tahun 2020-2023

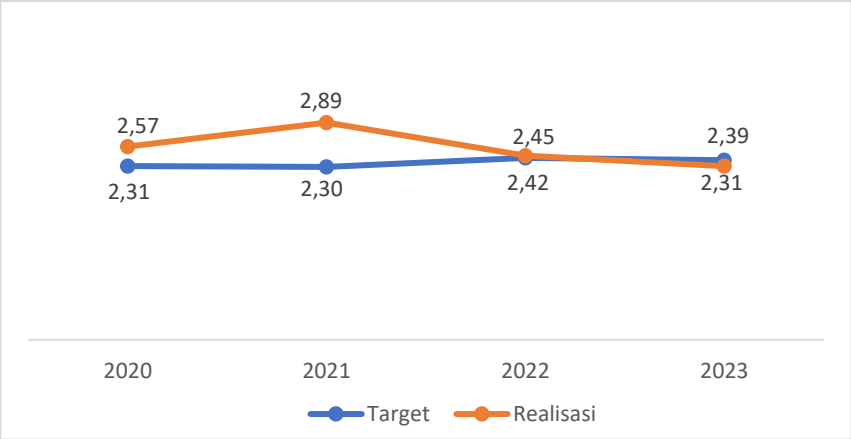
Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	Orang	655,178	662,257	641,453	702,600	710,035
Garis Kemiskinan (Rp)	Rupiah /Org/ Bln	572,108	613,622	657,521	680,499	743,084
Jumlah Penduduk miskin	Jiwa	15,780	17,020	18,530	15,830	14,990
Persentase Penduduk miskin (%) (Po)	%	2.42	2.57	2.89	2.45	2.31
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	-	0.26	0.38	0.50	0.17	0.25
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	-	0.06	0.12	0.15	0.02	0.04

Sumber: BPS Kota Balikpapan (2023)

Merujuk pada tabel 2.12 diketahui bahwa jumlah penduduk miskin Kota Balikpapan tahun 2023 turun menjadi 14.990 jiwa atau menurun 840 orang dibandingkan tahun 2022 sehingga persentase penduduk miskin Kota Balikpapan pada 2023 sebesar 2,31%, menurun 0,14% terhadap 2022. Sementara itu, Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Balikpapan mengalami peningkatan. P1 Balikpapan naik dari 0,17 di tahun 2022 menjadi 0,25 di tahun 2023. Hal ini menunjukan adanya peningkatan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Artinya, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan,

maka semakin banyak usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan penduduk tersebut dari jurang kemiskinan. Sedangkan P2 Balikpapan naik dari 0,02 di tahun 2022 menjadi 0,04 di tahun 2023. Hal ini menunjukan semakin tidak meratanya pengeluaran di antara penduduk miskin di Balikpapan, atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ketimpangan pengeluaran yang terjadi di antara penduduk miskin di Balikpapan.

Berdasarkan tolak ukur di atas dapat diketahui bahwa Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2023 mencapai 2,31% mengalami penurunan 0,14% dibanding Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2022. Dengan kata lain, Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan telah berhasil melampui target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 103,46%, memperoleh predikat “sangat tinggi”.



Gambar 2.117
Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan
Tahun 2020-2023
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Secara umum, kondisi tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase. Secara persentase, penduduk miskin di Kota Balikpapan mengalami penurunan meskipun terjadi kenaikan pada 2021 dimana pada saat itu terjadi kasus pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Penurunan tertinggi persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0,44 persen. Hal ini ditengarai pasca terjadinya pandemi Covid-19 sehingga kondisi perekonomian di Indonesia perlahan mulai pulih.

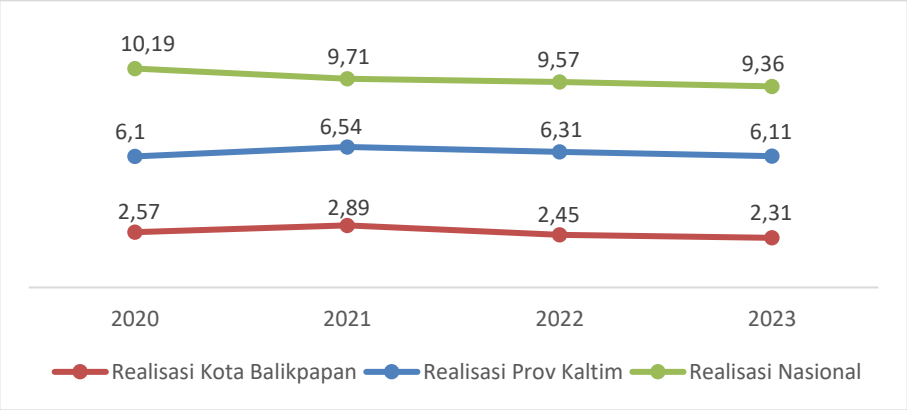
Tabel 2.12
Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk miskin (%) (Po)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp)
Paser	26.39	9.11	1.04	0.19	600,332
Kutai Barat	14.69	9.72	1.29	0.23	679,660
Kutai Kartanegara	60.86	7.61	0.91	0.17	644,570
Kutai Timur	37.04	9.06	1.20	0.28	714,241
Berau	13.26	5.54	0.16	0.01	677,819
Penajam Paser Utara	11.19	6.97	0.75	0.14	583,239
Mahakam Ulu	3.06	11.38	1.02	0.14	740,683
Kota Balikpapan	14.99	2.31	0.25	0.04	743,084
Kota Samarinda	41.89	4.81	0.75	0.16	850,842
Kota Bontang	7.71	4.11	0.39	0.05	763,661
Prov. Kalimantan Timur	**231.08**	**6.11**	**0.77**	**0.14**	**790,186**

Sumber: BPS Kota Balikpapan (2023)

Jika ditinjau berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, seluruh Kabupaten/Kota mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menjadi

daerah dengan tingkat kemiskinan terendah, disusul Kota Bontang (4,11%) dan Kota Samarinda (4,81%).



Gambar 2.118
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan
Tahun 2020-2023
Sumber: BPS Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Sementara itu, tingkat kemiskinan Kota Balikpapan masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur dan secara nasional menduduki posisi ke-3 setelah Kota Sawah Lunto sebesar 2,27% dan Kabupaten Badung sebesar 2,30%.

Ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.

Namun tentunya dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan tersebut ditemukan kendala dalam pelaksanaannya seperti data P3KE yang digunakan tidak merujuk pada DTKS milik Kementerian Sosial sehingga menyebabkan ketidakakuratan informasi terkait jumlah penerima bantuan atau program sosial sehingga dapat mengganggu perencanaan dan alokasi sumber daya yang efektif. Di samping itu, penetapan DTKS merupakan otoritas tunggal dari Kementerian Sosial RI sehingga penyaluran bantuan seringkali tidak tepat sasaran dimana sejumlah individu atau kelompok yang seharusnya memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial atau program tertentu justru terabaikan atau tidak menerima bantuan. Jumlah sasaran penerima masih kurang karena keterbatasan anggaran dan nilai bantuan yang masih sangat kecil serta jadwal penyaluran bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah sering kali mendadak sehingga realisasi penyaluran bantuan rendah juga kendala untuk pencapaian tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan.

Oleh karena itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatasi/ meminimalisir kendala yang ada antara lain:

1) Melakukan verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem secara mandiri serta melakukan sinkronisasi dengan DTKS. Pada tahun 2023, data P3KE yang berhasil diverifikasi adalah sebanyak 2.269 kk (desil 1) dan 6.191 KK (desil 2);



Gambar 2.119
Verifikasi Dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
Sumber: DINSOS Kota Balikpapan (2023)

2) Melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam aplikasi data SIKS - NG sebagai referensi penetapan sasaran penyaluran bantuan sosial Program PKH maupun bantuan sosial lainnya. Pada tahun 2023 berhasil diverifikasi dan validasi sebanyak 114.305 jiwa;
3) Membangun aplikasi internal di Dinas Sosial untuk mendata jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berhak menerima bantuan namun tidak terdata di DTKS;



Gambar 2.120
Pendataan Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memenuhi Syarat namun Tidak Tercatat dalam DTKS
Sumber: DINSOS Kota Balikpapan (2023)

4) Mengajukan usulan penambahan anggaran sehingga sasaran penerima dan nilai bantuan bisa ditambah;



Gambar 2.121
Penyaluran Bantuan Sosial
Sumber: DINSOS Kota Balikpapan (2023)

5) Meningkatkan koordinasi antar pendamping PKH di Kota Balikpapan sehingga penyaluran bantuan bisa semakin efektif;



Gambar 2.122
Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial KPM PKH oleh Penyalur Langsung Kementerian Sosial RI
Sumber: DINSOS Kota Balikpapan (2023)

6) Mengajukan usulan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ke Provinsi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang mandiri secara ekonomi. Pada tahun 2023 jumlah bantuan yang diterima dari Provinsi Kaltim adalah kepada 15 kelompok KUBE (1 kelompok terdiri dari 5 orang) dengan nilai barang sebesar Rp. 5.000.000,00 / kelompok.



Gambar 2.123
Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Sumber: DINSOS Kota Balikpapan (2023)

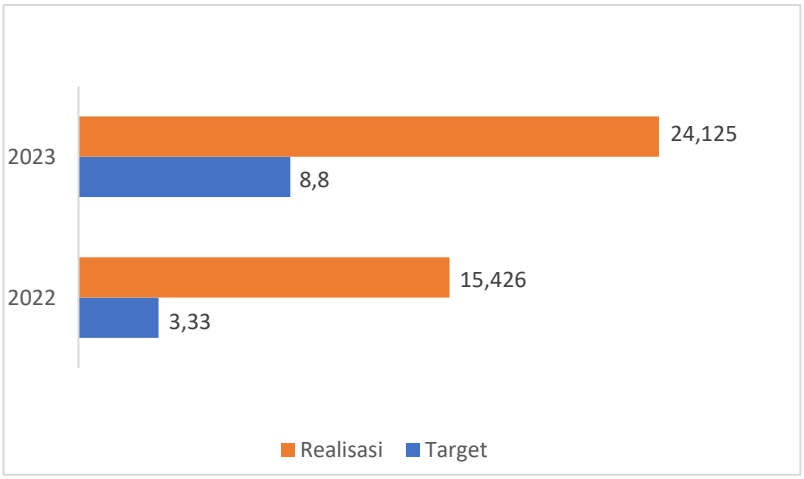
Selain itu, Dinas Sosial Kota Balikpapan juga menjalankan berbagai program kerja penanggulangan kemiskinan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait. Program-program ini melibatkan berbagai aspek, termasuk bantuan modal untuk usaha ekonomi kecil dan rumah tangga, Program Indonesia Pintar, dan Program Perlindungan Sosial, serta program-program lainnya. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga lebih tinggi dibanding dengan kenaikan garis kemiskinan di Kota Balikpapan. Seluruh upaya ini didukung oleh stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Kota Balikpapan.

14. Sasaran Strategis 14 : Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah

Nilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Dalam konteks investasi, nilai realisasi adalah ukuran penting untuk

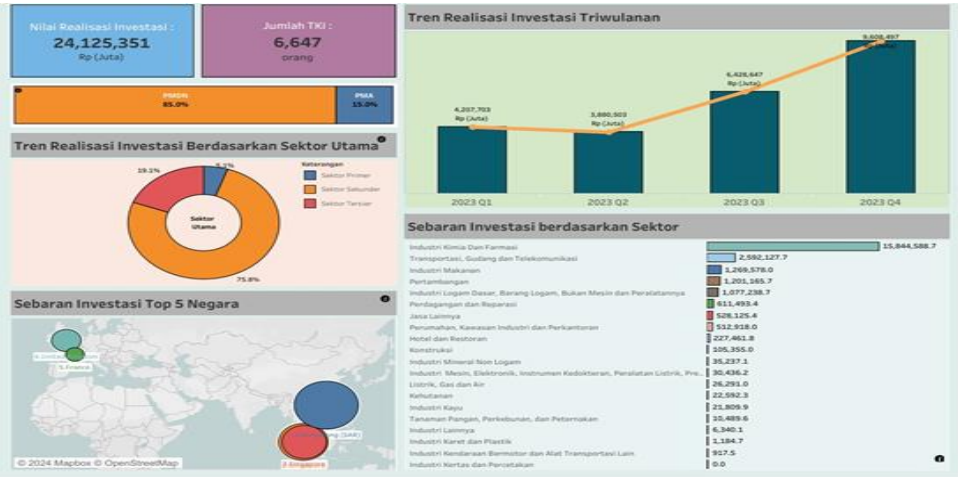
mengevaluasi keberhasilan investasi. Investasi yang menghasilkan nilai realisasi yang positif menunjukkan bahwa investor telah memperoleh keuntungan, sedangkan nilai realisasi yang negatif menunjukkan bahwa investor menderita kerugian. Nilai realisasi investasi ini juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program investasi pemerintah, serta memberikan informasi penting tentang pengelolaan aset publik dan pemanfaatan dana publik. Selain itu, nilai realisasi investasi juga dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih baik di masa depan.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM RI yang diperoleh dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang disampaikan Pelaku Usaha lewat sistem OSS (*Online Single Submission*), nilai realisasi investasi Kota Balikpapan Tahun 2023 mencapai Rp 24.125.353.380.000,- dengan capaian realisasi sebesar 274.15% atau mendapat predikat "sangat tinggi". Realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman modal Dalam Negeri atau PMDN sebesar Rp 20.501.290.700.000,- atau sebesar 84,98%. Sementara realisasi PMA mencapai Rp 3.624.062.680.000,- atau sebesar 15,02%. Investasi tersebut mampu menyerap 6.647 juta orang TKI dan 11 orang TKA.



Gambar 2.124
Target dan Realisasi Nilai Realisasi Investasi Kota Balikpapan
Tahun 2022-2023 (dalam juta)
Sumber: DPMPTSP Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Adapun sektor usaha yang memberikan sumbangsih terbesar bagi realisasi investasi di Kota Balikpapan pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.125
Dashboard Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kota Balikpapan Tahun 2023
Sumber: DPMPTSP Kota Balikpapan (2023)

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa sektor Industri Kimia dan Farmasi masih merupakan sektor terbesar yang menyumbang realisasi investasi tahun 2023 di Kota Balikpapan disusul dengan sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi serta diurutan ketiga realisasi investasi disumbangkan oleh sektor industri makanan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

1) Makin kondusifnya iklim investasi di Indonesia pada umumnya dan Kota Balikpapan pada khususnya serta terdapat Proyek Strategis Nasional di Kota Balikpapan yaitu Perluasan Kilang Minyak RDMP Pertamina (PMDN);
2) Terlaksananya kegiatan LKPM *Hunter* berupa kegiatan mengejar realisasi investasi langsung di lapangan yang ditujukan kepada Pelaku Usaha yang sedang dalam tahap persiapan/ pembangunan/ berkonstruksi guna mendapatkan nilai realisasi investasi dengan modal tetap yang angkanya signifikan dan bisa mendongkrak pencapaian target nilai realisasi investasi, dengan melakukan pembinaan mengenai kewajiban LKPM secara langsung di lokasi kegiatan usaha kepada petugas yang ditunjuk oleh Direksi/ penanggung jawab perusahaan yang kompeten untuk menangani penyampaian LKPM Pelaku Usaha;
3) Meningkatnya kepatuhan teknis dan administratif pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan adanya kegiatan pengawasan/inspeksi lapangan secara terkoordinasi dan terintegrasi oleh DPMPTSP Kota Balikpapan selaku Koordinator Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Perangkat Daerah Teknis

Pengampu Izin di Kota Balikpapan terhadap kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan

4) Terselesaikannya permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dengan adanya kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sehingga kegiatan investasi dapat berjalan dengan lancar;
5) Terlaksananya promosi investasi penanaman modal yang dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung kegiatan pameran penanaman modal maupun dengan mengikuti kegiatan seminar bisnis, forum, *one on one meeting* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat mempromosikan potensi usaha yang ada di Kota Balikpapan;
6) Makin mudahnya pengurusan perizinan berusaha melalui laman oss.go.id sehingga mendukung proses kemudahan berinvestasi di Kota Balikpapan.

Beberapa solusi/ upaya telah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman Pelaku Usaha akan kewajiban penyampaian nilai realisasi investasi melalui LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dengan diadakannya kegiatan pembinaan kepada Pelaku Usaha Kota Balikpapan berupa kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan kegiatan Sosialisasi Kemudahan Berusaha secara rutin kepada Pelaku Usaha;





Gambar 2.126
Sosialisasi Kemudahan Berusahan dan Sosialisasi/ Bimbingan Teknik Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sumber: DPMPTSP Kota Balikpapan (2023)

2) Melakukan kolaborasi dengan Perangkat Daerah teknis dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap penerbitan perizinan dan non perizinan dalm bentuk rapat-rapat teknis dengan Perangkat Daerah Teknis serta visitasi dan monitoring ke lapangan baik secara rutin (terjadwal) maupun yang bersifat insidentil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.



Gambar 2.127
Kegiatan Pengawasan/ Inspeksi Lapangan
Sumber: DPMPTSP Kota Balikpapan (2023)

Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan telah memiliki Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota sehingga peluang usaha berdasarkan KBLI dapat diakses secara cepat dan mudah oleh seluruh pihak terutama investor yang akan berinvestasi di Kota Balikpapan. Untuk mewujudkan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan mengadakan rapat-rapat penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kota Balikpapan bersama dengan pihak terkait, FGD Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Balikpapan serta mengikuti *Workshop* Pemetaan Potensi dan peluang Investasi yang diadakan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2.128
Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Dan Peluang Usaha
Kota Balikpapan
Sumber: DPMPTSP Kota Balikpapan (2023)

Pemerintah Kota Balikpapan juga telah menginisiasi ALKI II *Zone Investment* Forum 2023 sebagai upaya promosi investasi penanaman modal dimana dalam *international investment* seminar tersebut berisi tentang pemaparan terkait perspektif pemerintah dalam dan luar negeri, potensi investasi di kawasan ALKI II dan potensi investasi sejak adanya perpindahan IKN bagi daerah yang berada di kawasan zona ALKI II. *Business Matching* ALKI II *Zone Investment Forum* 2023 ini terdiri dari 15 proyek investasi dari daerah di kawasan ALKI II yang terbagi dalam 5 ruang kecil dan 3 sesi paparan. Untuk *One on One Meeting* ALKI II *Zone Investment Forum* 2023 dihadiri oleh calon investor yang berminat dalam upaya tindak lanjut dari *business matching* yang telah diadakan.



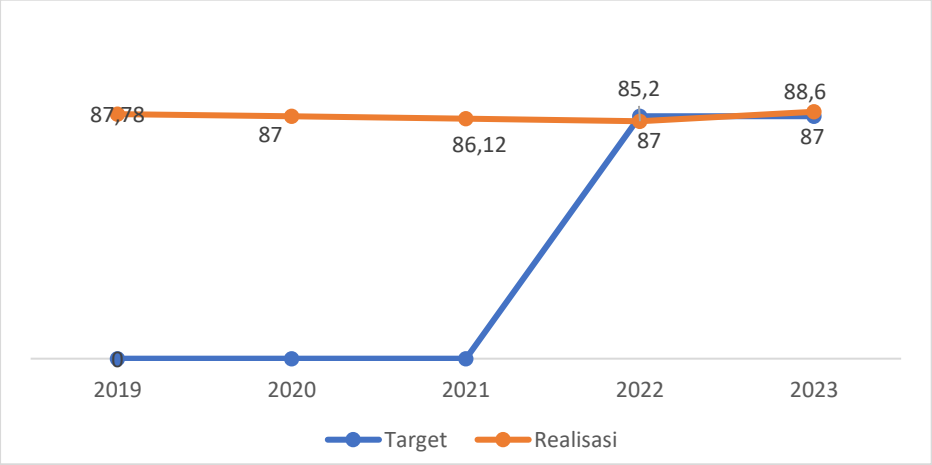
Gambar 2.129
Kegiatan ALKI II *Zone Investment* Forum 2023
Sumber: DPMPTSP Kota Balikpapan (2023)

15. Sasaran Strategis 15 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Meningkatnya ketahanan pangan mengacu pada upaya untuk meningkatkan kemampuan suatu negara untuk memproduksi dan memasok makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Tujuan utama dari meningkatkan ketahanan pangan adalah untuk mengurangi kelaparan dan malnutrisi, serta memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan berkualitas.

Salah satu cara untuk mengukur tingkat ketahanan pangan adalah melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Sementara itu, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah metode penilaian kualitas pola makan yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Skor PPH dapat digunakan sebagai alat untuk memantau pola makan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan pola makan yang lebih sehat. Skor PPH juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk menentukan program dan kebijakan terkait kesehatan masyarakat dan gizi.

Berdasarkan perhitungan mandiri yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan diketahui bahwa pada tahun 2023, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) memiliki realisasi sebesar 88,60 poin dengan capaian realisasi sebesar 101,84% atau mendapat predikat “sangat tinggi”.



Gambar 2.130
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Balikpapan Tahun 2019-2023
Sumber: DPPP Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Skor PPH pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan skor PPH yang terus mengalami penurunan selama 4 tahun sejak tahun 2019 sebesar 87,78 poin sampai yang terendah pada tahun 2022 sebesar 85,20 poin. Hal ini menggambarkan perbaikan dalam gizi dan pola konsumsi di masyarakat Kota Balikpapan setelah mengalami dampak krisis akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, terlihat bahwa konsumsi pangan di Kota Balikpapan menjadi lebih beragam dan seimbang, sebagaimana tercermin dari skor PPH yang melebihi 88%. Skor tersebut menunjukkan pencapaian kriteria segi tiga emas, yang menandakan terciptanya Ketahanan Pangan di Kota Balikpapan.

Dari data konsumsi Susenas, dapat dilihat bahwa sumbangan energi terbesar berasal dari tiga kelompok pangan utama, yaitu padi-padian sebesar 25,90 poin, pangan hewani sebesar 30,8 poin, dan minyak/lemak sebesar 6,1 poin. Data ini mencerminkan masih perlu adanya beberapa peningkatan konsumsi di beberapa kelompok pangan, seperti buah dan sayur yang seharusnya 30 poin namun saat ini hanya mencapai 25,8 poin saja, umbi-umbian yang hanya 1 poin padahal seharusnya 2,5 poin, kacang-kacangan yang hanya 6,2 poin padahal seharunsya 10 poin, biji-bijian yang seharusnya 1 poin namun saat ini hanya mencapai 0,2 saja dan gula yang hanya 1,5 poin padahal seharusnya 2,5 poin.

Meskipun Kota Balikpapan telah mencapai Skor Pola Pangan Harapan (PPH), namun pencapaian tersebut tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang perlu diatasi. Keterbatasan daya beli masyarakat, kurangnya pengetahuan tentang pangan dan gizi, serta kecenderungan penurunan konsumsi pangan lokal karena dominasi pangan siap saji dan adanya kebiasaan makan yang tidak sejalan dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) menjadi faktor-faktor yang perlu diatasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan baik dari penguatan cadangan pangan, meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan aman maupun meningkatkan produksi sumber daya pangan yang dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

1) Melaksanakan Sosialisasi B2SA dengan penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal;



Gambar 2.131
Sosialisasi B2SA dengan Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal
Sumber: DPPP Kota Balikpapan (2023)

2) Meningkatkan kolaborasi yang intensif dengan unsur masyarakat dan instansi pemerintahan untuk memajukan promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA);



Gambar 2.132
Bersama TP PKK Kota Balikpapan Selalu Berkreasi Menciptakan Menu Olahan Baru dan Mengikuti Event-event Cipta Menu B2SA
Sumber: DPPP Kota Balikpapan (2023)

3) Melaksanakan koordinasi dengan melibatkan beberapa stakeholder dari beberapa Perangkat Daerah lain yang menangani ketersediaan 9 bahan kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain);

4) Diversifikasi usaha tani dan perikanan dalam peningkatan produksi serta ketersediaan benih tanaman, bibit ikan dan ternak;
5) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pangan lokal melalui UMKM Pangan Lokal dengan memfasilitasi pengembangan teknologi dalam peningkatan usaha;
6) Melaksanakan pengawasan keamanan pangan melalui pengujian sampel pangan;
7) Menumbuhkan minat masyarakat untuk menanam sayuran di pekarangan rumah / Pekarangan Pangan Lestari (P2L).



Gambar 2.133
Penanaman Sayur di Pekarangan Rumah Masyarakat
Sumber: DPPP Kota Balikpapan (2023)

Upaya terus dilakukan untuk mempromosikan keragaman konsumsi pangan dan mengoptimalkan pemanfaatan produk pangan lokal melalui kerjasama dan koordinasi antara berbagai unsur masyarakat dan instansi pemerintah terkait . Tujuannya adalah agar dalam beberapa tahun ke depan, skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Kota Balikpapan selalu dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud pola konsumsi yang ideal menuju ketahanan pangan Kota Balikpapan.

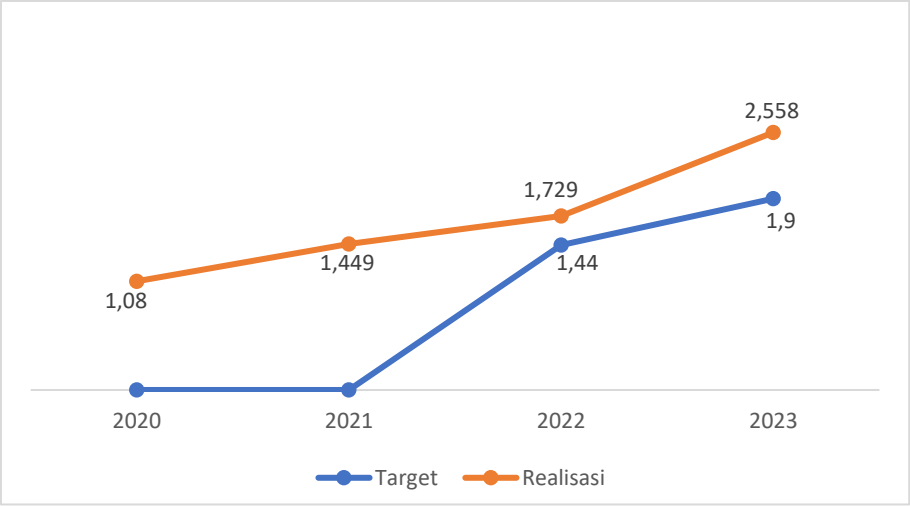
16. Sasaran Strategis 16 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional

Kunjungan wisata adalah banyaknya jumlah kunjungan wisata yang dilakukan. Kunjungan wisatawan bisa dilakukan secara domestik atau internasional, tergantung dari asal negara wisatawan tersebut. Kunjungan wisatawan membawa dampak ekonomi

yang besar bagi suatu destinasi wisata, karena turut berkontribusi pada penghasilan pendapatan dan lapangan kerja di sektor pariwisata.

Untuk mengukur kunjungan wisata yang dilakukan maka dapat dilihat dari angka kunjungan wisata. Angka kunjungan wisatawan adalah jumlah orang yang mengunjungi suatu destinasi wisata dalam periode waktu tertentu. Angka ini biasanya dihitung dalam skala harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Angka Kunjungan Wisatawan menjadi indikator penting dalam industri pariwisata karena dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu destinasi wisata dalam menarik pengunjung dan memberikan kontribusi ekonomi bagi wilayah tersebut. Selain itu, data angka kunjungan wisatawan dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan dan perencanaan pariwisata di suatu daerah.

Menurut perhitungan mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa angka kunjungan wisata di Kota Balikpapan tahun 2023 adalah 2.558.526 orang atau dengan kata lain memiliki capaian kinerja sebesar 134.63% atau mendapat predikat “sangat tinggi”.



Gambar 2.134
Target dan Realisasi Angka Kunjungan Wisatawan Kota Balikpapan Tahun 2020-2023 (dalam juta)
Sumber: DPOP Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa angka kunjungan wisatawan Kota Balikpapan sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 571.000 orang dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara itu, kenaikan juga terjadi di tahun 2022 yang naik sebesar 280.000 orang dari tahun 2021. Kenaikan angka kunjungan wisatwan juga

terjadi sebesar 369.000 orang dari tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, walaupun saat itu sedang terjadi pandemi covid-19.

Peningkatan angka kunjungan wisata yang terjadi setiap tahun tentunya dipengaruhi berbagai seperti Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN sehingga menjadi magnet daya tarik wisata baik wisata lokal maupun non lokal maupun pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu akses promosi kepariwisataan Kota Balikpapan. Selain itu, tercapainya target angka kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh Kota Balikpapan yang merupakan Kota Transit bagi Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan sehingga memiliki letak yang strategis sebagai daerah perlintasan yang memiliki bandara udara Internasional dan Pelabuhan.

Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam upaya peningkatan bahwa angka kunjungan wisatawan Kota Balikpapan, antara lain:

1) Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi sebagai sarana promosi dan informasi pariwisata;
2) Belum optimal kualitas sarana dan prasarana di tempat pariwisata;
3) Belum berkembangnya Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) andalan Kota Balikpapan yang mampu menarik minat pengunjung wisata setidaknya dari berbagai daerah di sekeliling Kota Balikpapan;
4) Belum adanya event seni dan budaya unik yang mampu menjadi magnet wisata Kota Balikpapan;
5) Masih rendahnya kesadaran warga kota dalam menciptakan kota ramah wisata yang dapat menarik minat kunjungan wisata;
6) Terdapat banyak faktor yang menyebabkan objek wisata di Kota Balikpapan kurang menarik, di antaranya atraksi yang monoton, kurangnya daya tarik, tidak adanya fasilitas pendukung, dan infrastruktur yang belum memadai.

Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan serta Perangkat Daerah terkait guna meningkatkan angka kunjungan wisata, antara lain:

1) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan promosi Pariwisata dengan adanya videotron pada 4 titik (Kantor DPOP, Venue Tenis, Dome BSCC dan Pantai Manggar Segara Sari);
2) Pengembangan infrastruktur pariwisata dan inovasi dalam penyediaan layanan wisata dapat meningkatkan daya tarik destinasi dengan melibatkan seluruh stakeholders.



Gambar 2.135
Pembangunan *Revetment* dan *Groin* sebagai Pengendalian Abrasi Pantai Manggar Segara Sari
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)



Gambar 2.136
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pantai Manggar Segara Sari (Wisma dan *Resort*, Toilet, dan *Amphitheater*, dll)
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

3) Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama dengan seluruh organisasi profesi dan bisnis untuk penyelenggaraan MICE serta pembangunan objek wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata, seperti mengikuti Pameran Gebyar Wisata Nusantara Expo 2023 Smesco Exhibition Hall, Jakarta Tgl 08 s/d 11 Juni 2023 dan kegiatan sosialisasi pengelolaan destinasi pariwisata dengan tema "Kolaborasi dan sinergitas dalam memajukan pariwisata Balikpapan".



Gambar 2.137
Sosialisasi Pariwisata ke Stakeholder
(POKDARWIS, PHRI, ASITA, dll)
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

4) Melaksanakan peningkatan kualitas hotel dan restoran melalui pengembangan, pendidikan, dan pelatihan;



ambar 2.138
Pelatihan Pelayanan Prima bagi Hotel Non Bintang, Villa, *Homestay* dan *Guest House*
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

5) Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk edukasi, promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata, seperti melalui wisata keliling kota dengan wisata bus *city tour* untuk masyarakat umum serta anak sekolah;
6) Mengikuti kegiatan pameran/ kegiatan pemasaran pariwisata baik didalam dan luar negeri, seperti mengikuti pameran/ promosi pariwisata di luar daerah (*Table Top* BTB Semarang, Tgl 28 sd. 30 Juli 2023, *Table Top* BTB Bandung Tgl 14 sd. 16 November 2023) dan pelaksanaan Jambore Pokdarwis Balikpapan dengan stakeholder Pariwisata dalam pengembangan dan promosi Pariwisata Balikpapan.

Pokdarwis merupakan salah satu elemen yang terpenting dalam peningkatan partisipasi SDM agar dapat membantu pembangunan pariwisata di masing - masing Pokdarwis di Balikpapan. Jambore Pokdarwis bukan ajang untuk menjadi juara melainkan ajang untuk bersilahturahmi dan saling memberikan informasi. Jambore Pokdarwis selain menjadi ajang lomba juga menjadi wadah untuk bersilahturahmi, berbagi ilmu dan pengalaman antar Pokdarwis serta saling mengetahui potensi - potensi kelompok wisata yang lain, sehingga mampu meningkatkan pembangunan pariwisata di Balikpapan.



Gambar 2.139
Jambore dan Gelar Produk POKDARWIS
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2023)

7) Melaksanakan event-event pariwisata yang menarik;







Gambar 2.140
Kegiatan Event Pariwisata
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2023)

8) Menyusun *Road Map* masing-masing objek wisata agar setiap Objek wisata Kota Balikpapan memiliki program dan konsep pengembangan yang baik dan terarah. Sehingga jumlah kunjungan semakin meningkat dan secara tidak langsung menggerakkan sektor ekonomi masyarakat di kota Balikpapan;



Gambar 2.141
Kajian Road Map Pengembangan Obyek Wisata Kota Balikpapan
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2023)

9) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi bagi jasa transportasi sebagai upaya penyediaan transportasi ke daerah wisata;



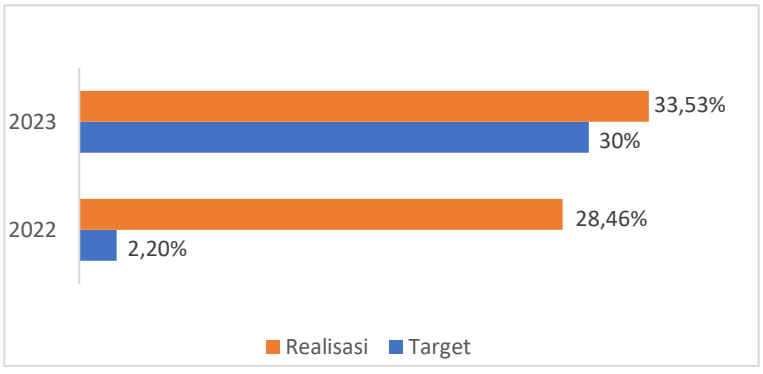
Gambar 2.142
Sosialisasi dan Edukasi pada Jasa Transportasi Online terkait Informasi Pariwisata
Sumber: Bappeda Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

17. Sasaran Strategis 17 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif adalah dua hal yang saling terkait dalam industri kreatif. Ekonomi kreatif mencakup berbagai sektor industri kreatif, seperti seni, desain, film, musik, penerbitan, dan sebagainya. Sementara itu, pelaku ekonomi kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif seperti seniman, desainer, musisi, penulis, dan sebagainya.

Kedua hal tersebut saling mempengaruhi dalam industri kreatif. Pertumbuhan ekonomi kreatif sangat tergantung pada kreativitas dan inovasi dari pelaku ekonomi kreatif dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan menarik perhatian konsumen. Sebaliknya, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif juga sangat tergantung pada kondisi industri kreatif yang sehat dan berkelanjutan. Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif dapat memberikan dampak positif pada perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan, seperti peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan ekonomi.

Berdasarkan perhitungan mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa pelaku ekonomi kreatif tahun 2023 mencapai 446 orang dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 334 orang. Dengan kata lain pada tahun 2023 pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Balikpapan telah bertambah sebanyak 112 orang, sehingga diperoleh persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif mencapai 33,53% dengan capaian kinerja sebesar 111,77% serta mendapat predikat “sangat tinggi”.



Gambar 2.143
Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2022-2023
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Balikpapan, diolah Tahun 2024

Dapat diketahui bahwa pencapaian persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif Kota Balikpapan setiap tahun mengalami peningkatan pelaku ekonomi kreatif.

Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang kondusif dan aktifnya perputaran roda ekonomi yang merupakan dampak dari Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala upaya mencapai pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif seperti belum adanya arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dan masih banyak pelaku ekraf dan pelaku pariwisata yang belum tersertifikasi.

Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan melakukan penyusunan kebijakan dengan terbitnya SK Walikota tentang area Taman Bekapai sebagai wadah kreatif masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kota Balikpapan



Gambar 2.144
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Ruang Kreatif serta Taman Bekapai sebagai wadah kreatif masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kota Balikpapan
Sumber: DPOP Kota Balikpapan (2023)

Pemerintah Kota Balikpapan juga memberikan dukungan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi serta aksi-aksi yang kreatif guna mendorong pemuda-pemuda Balikpapan masuk ke pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Balikpapan dan pelaku industri memiliki peran sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif.



Gambar 2.145
Pelaksanaan Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi untuk Meningkatkan Kompetensi SDM Pelaku Ekonomi Kreatif
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga mendukung infrastruktur untuk memperkuat kemampuan dan kompetensi pelaku ekonomi kreatif, serta meningkatkan daya saing industri kreatif secara keseluruhan melalui pembentukan Ruang Kreatif setiap kecamatan se Kota Balikpapan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi pelaku industri kreatif dan UMKM.



Gambar 2.146
Ruang Kreatif di 6 Kecamatan Se Kota Balikpapan dengan berbagai Tema
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

Penyelenggaraan pekan ekonomi kreatif juga senantiasa digelar setiap tahun sebagai ajang promosi dan pemasaran produk-produk kreatif. Penyelenggaraan pekan ekonomi kreatif ini diharapkan agar pelaku industri kreatif dapat berperan dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan inovatif, serta memasarkannya dengan cara yang tepat agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.



Gambar 2.147
Pekan Ekonomi Kreatif dan Penguatan Ekonomi Kreatif Berbagai Sub Sektor
Sumber: Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2023)

18. Sasaran Strategis 18 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

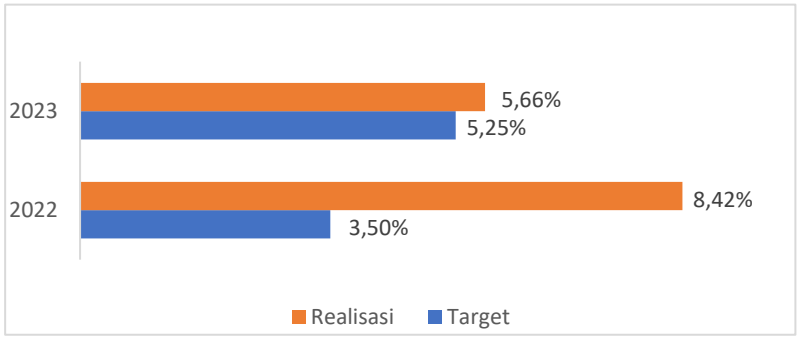
Pertumbuhan sektor unggulan daerah adalah pertumbuhan yang terjadi pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dan keunggulan komparatif di suatu daerah. Suatu daerah biasanya memiliki sektor unggulan yang berbeda-beda, tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan faktor-faktor lainnya. Pertumbuhan sektor unggulan daerah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena sektor unggulan memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Salah satu sektor unggulan daerah yang dapat ditemukan di Kota Balikpapan adalah sektor perdagangan. Pertumbuhan sektor unggulan daerah dan sektor perdagangan ini saling mempengaruhi dan saling terkait dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mengukur pertumbuhan sektor perdagangan dapat dilakukan dengan melihat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan mengacu pada nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dalam suatu wilayah atau negara pada periode waktu tertentu. Sektor perdagangan

sendiri mencakup berbagai macam kegiatan perdagangan seperti perdagangan grosir, perdagangan eceran, perdagangan otomotif, dan sebagainya. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang tinggi dapat menunjukkan adanya peningkatan dalam aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. PDRB sektor perdagangan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah terkait perdagangan dan pengembangan sektor perdagangan. Dengan memantau kinerja PDRB sektor perdagangan, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sektor perdagangan.

Untuk menghitung nilai PDRB sektor perdagangan, perlu dilakukan pengumpulan data mengenai nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dalam wilayah atau negara tertentu pada periode waktu tertentu. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga ekonomi, dan organisasi perdagangan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan diketahui persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2023 terealisasi sebesar 5,66%, dengan capaian kinerja sebesar 107,81% dan mendapat predikat “sangat tinggi”. Data yang digunakan tersebut adalah laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen) kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2023.



Gambar 2.148
Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2022-2023
Sumber: BPS, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan,
diolah Tahun 2024

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan realisasi persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2023 sebesar 2,76% dimana pada tahun 2022 terealisasi sebesar 8,42%. Hal tersebut disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu atau ekstrem yang dapat mempengaruhi harga pangan dan menyebabkan fluktuasi pada harga pangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1) Produksi pertanian: Cuaca yang buruk, seperti kekeringan atau banjir, dapat mempengaruhi produksi pertanian. Jika produksi pertanian menurun, pasokan pangan akan berkurang dan hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga pangan.
2) Transportasi: Cuaca yang buruk juga dapat mempengaruhi transportasi dan distribusi pangan. Misalnya, banjir dapat menyebabkan jalan raya terendam sehingga kendaraan yang mengangkut pangan sulit untuk melewati. Hal ini dapat menghambat pasokan pangan ke pasar dan menyebabkan kenaikan harga pangan.
3) Persediaan: Cuaca yang buruk juga dapat mempengaruhi persediaan pangan. Jika cuaca yang buruk terjadi pada waktu panen, produksi pangan akan menurun dan pasokan pangan akan berkurang. Hal ini dapat memicu kenaikan harga pangan.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perdagangan Kota Balikpapan yang berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk meningkatkan persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, antara lain:

1) Pengadaan pasar murah dan operasi pasar
    - Pelaksanaan pasar murah Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H serta Natal dan Tahun Baru. Kegiatan Pasar Murah Ramadhan dan Idul Fitri merupakan Program Kerja Dinas Perdagangan untuk menjaga stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pasar Murah ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah lonjakan harga bahan pokok menjelang hari raya idul fitri dengan 19 (sembilan belas) peserta yang turut berpartisipasi dalam kegiatan Pasar Murah Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H terdiri dari BUMN, OPD terkait,

Retail, Distributor, Distributor Lokal, BUMN, Agen, Produsen Telur Ayam Ras Lokal, Perumda dan Mitra Dinas Perdagangan



Gambar 2.149
Pelaksanaan pasar murah Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H serta Natal dan Tahun Baru
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan (2023)

- Operasi Pasar Gas Subsidi LPG 3 Kg, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perdagangan berkoordinasi dengan Pertamina dan Hiswana untuk melakukan operasi pasar Gas LPG 3 Kg, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengurangi lonjakan kenaikan harga dan kelangkaan Gas LPG 3 Kg. Operasi Pasar yang bekerjasama dengan 9 agen dan pangkalan Gas LPG dilakukan selama empat hari dari tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 13 Juli 2023, pendistribusian Gas LPG 3 Kg dilakukan dengan menunjukan KTP Domisili Kota Balikpapan.



Gambar 2.150
Operasi Pasar Gas Subsidi LPG 3 Kg
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan (2023)

2) Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Harga dan Stok Kebutuhan Pokok dan Penting. Dinas Perdagangan melakukan pemantauan dengan berkolaborasi dengan instansi terkait, dan mengikuti kebijakan yang berlaku serta terlibat dalam dialog dengan otoritas terkait untuk memahami dampak kebijakan terhadap harga dan pasokan barang. kemudian pengumpulan dan pelaporan harga dan stok barang kebutuhan pokok dilakukan secara rutin dengan membuat laporan harga bahan pokok harian, laporan harga bahan pokok mingguan dan laporan harga dan stok bahan pokok bulanan. Selanjutnya untuk membantu dalam memastikan pasokan yang stabil dan harga yang lebih terjangkau Dinas Perdagangan bekerjasama dengan Pemasok serta untuk mengurangi risiko ketidakstabilan pasokan Dinas Perdagangan melakukan Diversifikasi sumber pasokan dengan mencari sumber pasokan yang beragam, sehingga jika satu pemasok mengalami masalah masih ada opsi lain, hal tersebut dilakukan untuk mencegah kelangkaan stok.



Gambar 2.151
Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Harga dan Stok Kebutuhan Pokok dan Penting
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan (2023)

3) Koordinasi antara sektor perdagangan dengan sektor-sektor lain seperti Perwakilan dari BUMN Pangan di daerah, Bank Indonesia dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan sinergi dan membuka peluang baru bagi sektor perdagangan, seperti kerjasama antara sektor perdagangan dengan sektor pariwisata, perikanan, atau pertanian. Koordinasi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan yang akan diambil, menjaga stabilitas pasar, memperkuat pengawasan perdagangan, dan meningkatkan

pemahaman masyarakat tentang inflasi., pemantauan harga dan stok barang pokok dan barang penting.

Selain itu, beberapa upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, yaitu:

1) Meningkatkan sarana prasarana pasar melalui revitalisasi pasar, perluasan jaringan distribusi dan penjualan produk, baik melalui peningkatan kualitas infrastruktur jalan, transportasi, dan logistik, maupun melalui pengembangan jaringan perdagangan online dan *e-commerce*;



Gambar 2.152
Revitalisasi Pasar Blok A dan B Pasar Klandasan
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan (2023)



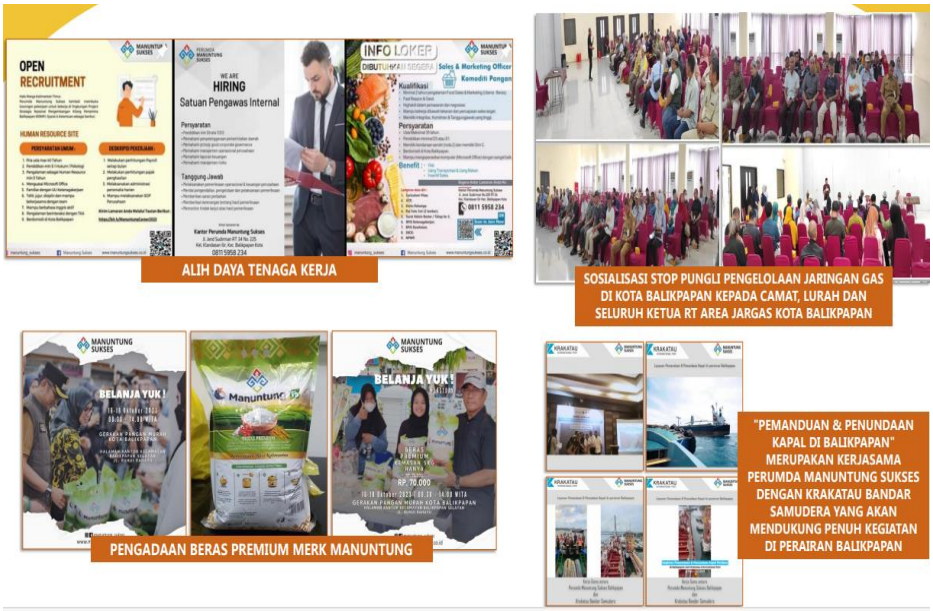
Gambar 2.153
Fasilitasi Penggunaan Digital di Pasar Rakyat untuk Mendukung Pelaksanaan SNI Pasar Rakyat
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan (2023)

2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan di sektor perdagangan dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperkenalkan teknologi baru, dan meningkatkan kualitas manajemen usaha;



Gambar 2.154
Sosialisasi dan Edukasi Penggunaan QRIS untuk Pelayanan Pembayaran e-retribusi Pelayanan Pasar kepada Pedagang Inpres Kebun Sayur
Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan (2023)

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perdagangan melalui pemberian pelatihan dan pendidikan baik untuk pengusaha maupun tenaga kerja sehingga mampu memenuhi tuntutan pasar dan meningkatkan kinerja sektor perdagangan;
4) Revitalisasi Perusda yang merupakan restrukturisasi organisasi dan aktivitas Perusda, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah.



Berbagai Kegiatan Revitalisasi PERUSDA
Sumber: Bappeda Libtang Kota Balikpapan (2023)

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Balikpapan telah melalui perencanaan yang cukup komprehensif dimana penentuan sasaran strategis telah disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kemampuan anggaran yang dimiliki. Program dan kegiatan juga telah direncanakan secara terperinci untuk mendukung tercapainya target sasaran strategis. Pada tahun 2023, jumlah keseluruhan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis mencapai 178 program sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.13
Jumlah Program per IKU Sasaran Strategis Kota Balikpapan Tahun 2023 yang Mendukung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	JUMLAH PROGRAM
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	6
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	JUMLAH PROGRAM
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	2
		Indeks SPBE	6
		Maturitas SPIP	3
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	3
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	31
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	3
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	5
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	5
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	4
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	4
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	12
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	13
		Persentase Permukiman Layak Huni	5
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	10
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	6
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	3
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	8
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	10
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5
		Tingkat Kemiskinan	5
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	5
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	10
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	2
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	JUMLAH PROGRAM
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7
Jumlah			**178**

Sumber: Bagian Organisasi, diolah 2024

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran strategis kedepannya maka diperlukan strategi yang melibatkan perencanaan sistemik melalui penerapan alat ukur yang dapat mengukur semua aspek, sehingga dapat mendorong interaksi antar berbagai bidang. Selain itu, kunci keberhasilan dalam akuntabilitas kinerja adalah optimalisasi keterlibatan dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan, sehingga program yang kompleks dan ekstensif dapat berjalan secara seimbang dan selaras. Apabila langkah-langkah ini dapat dilaksanakan, maka visi misi yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat dapat tercapai.

Adapun berbagai program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	98.92%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	79	76.34	96.63%	Sekretariat Daerah
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32.769	20.26	61.83%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Daerah					
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85.55	78.61	91.89%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	101.56%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, PAPBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	100	100	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	100	90	90%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	76	80	105.26%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	99.20%	Program Pengelolaan	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	852.37	767.89	90.09%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Pendapatan Daerah					
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83	89.53	107.87%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Indeks SPBE	113.64%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	80%	100%	125%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	89%	111.25%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;	80%	80%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	80	100	125%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	80	96.5	120.63%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85	86.91	102.25%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Maturitas SPIP	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	85.33	86.5	101.37%	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	63	63	100%	Inspektorat
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	85	101.19%	Inspektorat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	93.15%	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	88.80%	89.44%	100.72%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	40%	40%	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	97.99%	99.70%	101.75%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	97.99%	79.09%	80.71%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	14.91%	9.24%	61.97%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81	83.83	103.49%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	97.64%	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	89.78%	91.63%	102.06%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	Atas Layanan Pemerintahan			Program Pencatatan Sipil	Peresentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	96.53%	97.38%	100.88%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79	84.16	106.53%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	83	83%	Sekretariat DPRD
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	72	85.47	118.71%	Sekretariat DPRD
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	0	0%	Kecamatan Balikpapan Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16%	15.90%	99.38%	Kecamatan Balikpapan Barat
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan trantibum di keamatan yang optimal	100	0	0%	Kecamatan Balikpapan Barat
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70	85.92	122.74%	Kecamatan Balikpapan Barat
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Selatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8.00%	19.33%	241.63%	Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase sinergitas perangkat kecamatan terhadap instansi vertikal maupun tokoh agama maupun tokoh masyarakat	100%	100%	100%	Kecamatan Balikpapan Selatan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	72	81	112.50%	Kecamatan Balikpapan Selatan
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Kota
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	10	51	510%	Kecamatan Balikpapan Kota
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Kota
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.5	78.59	98.86%	Kecamatan Balikpapan Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	71.58	71.58%	Kecamatan Balikpapan Timur
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.45	16.52	100.43%	Kecamatan Balikpapan Timur
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Timur
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.5	69.14	86.97%	Kecamatan Balikpapan Timur
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Utara
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16%	15.90%	99.38%	Kecamatan Balikpapan Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100	98	98%	Kecamatan Balikpapan Utara
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	72	81.98	113.86%	Kecamatan Balikpapan Utara
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Tengah
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	23.37	23.7	101.41%	Kecamatan Balikpapan Tengah
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordiansi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan trantibum di keamatan yang optimal	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Tengah
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70.15	77.31	110.21%	Kecamatan Balikpapan Tengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	68	88.17	129.66%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	99.72%	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87.03	90.81	104.34%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	91.45	95.16	104.06%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86.18	85.89	99.66%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	98.52%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	83	102.47%	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin	84	100	119.05%	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Ijin Usaha Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan minum yang diterbitkan	100	100	100%	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	84	100	119.05%	Dinas Kesehatan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	82	97.62%	Dinas Kesehatan
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	123.23%	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional	5	6.6	132%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip yang dikelola	70	70	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	65	55	84.62%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase perizinan penggunaan arsip	0	0	0%	Dinas Perpustakaan dan Arsip

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79	92.16	116.66%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	8.99%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Pemuda yang kreatif, Inovatif dan Mandiri	2.4	2.7	112.50%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Organisasi Kepramukaan Aktif	100	100	100%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi	7	7	100%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	72	86	119.44%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	99.86%	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	45	22.9	50.89%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	27.36	24.87	90.90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pembinaan Sejarah	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	33.33	26.66	79.99%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	95.59	85.63	89.58%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase OPD yang telah menyusun anggaran yang Responsif Gender (jumlah OPD yg telah menyusun PPRG/jumlah seluruh OPD x100%)	88.24	91.18	103.33%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan (Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dibagi Jumlah Perempuan dikali 100.000)	8.5	31.85	374.71%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Ketersediaan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di tingkat Kecamatan	100	100	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah (jumlah OPD memiliki data terpilah dibagi Jumlah OPD dikali 100)	33.33	33	99.01%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase tindak lanjut rekomendasi Gugus Tugas KLA	32	70.05	218.91%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA (jumlah klien UPTD PPA yang sudah tuntas penanganannya dibagi jumlah klien yang ditangani UPTD PPA kalikan 100)	67	98.08	146.39%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai Dengan Regulasi	100	100	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	83,950,000,000	85,377,255,459	101.70%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Pengendalian Penduduk	Prosentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	64	68	106.25%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%)	13.4	17.59	131.27%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan (Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan dibagi jumlah keluarga versi DALLAP BKKBN dikalikan 100)	12.75	8.4	65.88%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	76	83.37	109.70%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	98.98%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	61.76%	73.33%	118.73%	Dinas Pekerjaan Umum
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	53.09%	53.16%	100.13%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	98.54%	98.54%	100%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	97.82%	104.55%	106.88%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	87.36%	87.36%	100%	Dinas Pekerjaan Umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pengembangan Permukiman	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	76.36%	76.36%	100%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang memiliki ijin	93.39	93.59	100.21%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100.00%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	53.09%	53.16%	100.13%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	82	100%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Penyelenggara An Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi	87	1.64	1.89%	Dinas Perhubungan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	62	1.19	1.92%	Dinas Perhubungan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77	86.49	112.32%	Dinas Perhubungan
		Persentase Permukiman Layak Huni	99.79%	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0.59	0	0%	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Kawasan Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	74.4	3.99	5.36%	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	2.14	0.04	1.87%	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	75	72.55	96.73%	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	80	80	100%	Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	97.04%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	50	50	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Rimba Kota, Taman Kota, TPU dan Pembibitan dikelola	10.59	11	103.87%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan	100	100	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100	100	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	100	100	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya	Persentase limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola	44.74	44.8	100.13%	Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				dan Beracun (Limbah B3)					
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	29.27	29	99.08%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	100	100	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	99	100	101.01%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77.66	77.66	100%	Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	95.23%	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	22	27.27	123.95%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.15	0.195	130%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi	40	44	110%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase luas tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	69.49	80.2	115.41%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan	89	80	89.89%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81	81	100%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan	Indeks Resiko Bencana	88.82%	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	87.5	93.24	106.56%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	Bencana dan Ketertiban Kota			Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	88	93.8	106.59%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70	91.45	130.64%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	100.40%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	13.5	28	207.41%	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78	81.09	103.96%	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat terhadap 4 Konsensus Nasional	60%	75%	125%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	100	100	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan yang Telah Melaporan pada Pemerintah Kota Balikpapan	83	80	96.39%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN	80	75	93.75%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Monitoring Potensi Konflik	80	46	57.50%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	0	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	123.23%	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	5.65	5.44	96.28%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	20.92	15.69	75%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	51.85	44.44	85.71%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi sehat	5.02	2.51	50%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	83.32	78.33	94.01%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	5.25	8	152.38%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	1.31	7.86	600%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	12.96	12.74	98.30%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	58.33	29.02	49.75%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85	86.91	102.25%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	110.02%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun	3.3	3	90.91%	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja dan	Persentase pencari Kerja Yang Mendapat	55	51.52	93.67%	Dinas Ketenagakerjaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Produktivitas Tenaga Kerja	Palatihan yang Tersalur				
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	23.5	38.1	162.13%	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	70	60.53	86.47%	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83.5	84	100.6%	Dinas Ketenagakerjaan
		Tingkat Kemiskinan	103.46%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapat pembinaan	86.66	80	92.31%	Dinas Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase layanan rehabilitasi sosial PMKS yang terpenuhi	78.94	83	105.14%	Dinas Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	85.36	73.92	86.60%	Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	82	100	121.95%	Dinas Sosial
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	71	92	129.58%	Dinas Sosial
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	274.15%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal	5	0	0%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	85	0	0%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100	100	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berlaku efektif	85	94.77	111.49%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79	92.77	117.43%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	101.84%	Program Penanganan Kerawanan Pangan		55	100	181.82%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0.053	0.17	320.75%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	89	100	112.36%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4.3	4.308	100.19%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	297	357	120.20%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	45	47	104.44%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia	20.00%	44.00%	220%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	75%	75%	100%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	70%	339%	484.29%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	72	75	104.17%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	134.63%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	3	4	133.33%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	Lokal dan Internasional			Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	20	25	125%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	111.77%	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	18	0	0%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	10	0	0%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	107.81%	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang telah diverifikasi dan memperoleh rekomendasi	60	38.1	63.50%	Dinas Perdagangan
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	80	80	100%	Dinas Perdagangan
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu	5.6	6.22	111.07%	Dinas Perdagangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor bersih non migas	1,350	4,422.09	327.56%	Dinas Perdagangan
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang meningkat omsetnya	60	70.91	118.18%	Dinas Perdagangan
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	71	88.26	124.31%	Dinas Perdagangan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78	80.35	103.01%	Dinas Perdagangan

Sumber: Bagian Organisasi dan Bappeda Litbang Kota Balikpapan, diolah tahun 2024

h. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Pada tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Balikpapan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan sebesar Rp 4.280.175.478.317,-. Adapun alokasi anggaran belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	227,984,137,038	5%
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	12,170,267,700	0.28%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	115,858,475,863	2.71%
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	507,206,311,765	11.85%
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	302,871,431,544	7.08%
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	1,624,802,400	0.04%
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	36,426,011,050	0.85%
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	2,955,000,000	0.07%
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	21,483,226,262	0.50%
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	1,165,659,021,284	27.23%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	211,864,607,641	4.95%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	156,923,892,450	3.67%
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	23,534,960,746	0.55%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	5,218,080,000	0.12%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	8,699,402,375	0.20%
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	19,628,373,000	0.46%
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	1,673,803,000	0.04%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	28,925,263,438	0.68%

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
Jumlah		**2,850,707,067,556**	**66.6%**
Program/ kegiatan penunjang		**1,429,468,410,761**	**33.4%**
Total Belanja		**4,280,175,478,317**	**100%**

Sumber: Bagian Organisasi dan BKAD Kota Balikpapan, diolah tahun 2024

Alokasi anggaran belanja tersebut dibagi 2 kategori yaitu anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program/kegiatan prioritas dan anggaran yang diperuntukkan bagi program/kegiatan penunjang. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan prioritas mencapai Rp. 2.850.707.067.556,- atau setara dengan 66,6% dari total belanja. Sementara itu, anggaran untuk program/kegiatan penunjang mencapai Rp. 1.429.468.410.761,- atau sebesar 33,4% dari total belanja. Dalam anggaran untuk program/kegiatan penunjang ini juga termasuk anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai.

Pada alokasi anggaran untuk program/kegiatan prioritas, sasaran strategis dengan anggaran terbesar adalah Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas sebesar 27,23% dari total belanja. Disusul oleh Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dengan 11,85%, serta Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan 7,08% dari total belanja. Di sisi lain, sasaran seperti Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat dan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif memiliki alokasi anggaran yang relatif kecil sebesar 0,04% dari total anggaran belanja.

Adapun realisasi belanja Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2023 mencapai Rp 3.746.620.744.625,- atau sebesar 87,53% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan prioritas sebesar 88,47%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan penunjang sebesar 85,67%.

Tabel 2.16
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	227,984,137,038	189,371,002,661	83.06%
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	12,170,267,700	9,342,064,087	76.76%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	115,858,475,863	9868456162600%	85.18%

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	507,206,311,765	470,019,777,732	92.67%
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	302,871,431,544	214,332,213,625	70.77%
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	1,624,802,400	1,461,682,863	89.96%
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	36,426,011,050	31,714,486,638	87.07%
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	2,955,000,000	2,860,580,318	96.80%
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	21,483,226,262	19,154,462,904	89.16%
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Tepadu dan Berkualitas	1,165,659,021,284	1,069,229,074,437	91.73%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	211,864,607,641	179,821,593,961	84.88%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	156,923,892,450	153,631,448,997	97.90%
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	23,534,960,746	21,509,753,926	91.39%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	5,218,080,000	4,652,605,934	89.16%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	8,699,402,375	7,758,989,750	89.19%
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	19,628,373,000	19,118,316,990	97.40%
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	1,673,803,000	1,587,696,997	94.86%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	28,925,263,438	27,759,935,480	95.97%
Jumlah		**2,850,707,067,556**	**2,522,010,248,926**	**88.47%**
Program/ kegiatan penunjang		**1,429,468,410,761**	**1,224,610,495,699**	**85.67%**
Total Belanja		**4,280,175,478,317**	**3,746,620,744,625**	**87.53%**

Sumber: Bagian Organisasi dan BKAD Kota Balikpapan, diolah tahun 2024

Selanjutnya untuk mengukur sejauh mana tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi

Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. Sedangkan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i.

Berdasarkan rumus di atas diketahui bahwa dari 27 indikator kinerja terdapat 14 indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lebih sehingga dapat dikatakan efisiensi. Sementara itu, 13 indikator kinerja lainnya memiliki capaian di bawah 100% sehingga tidak dapat diakui efisiensi. Adapun indikator kinerja yang memiliki efisiensi paling tinggi adalah Nilai Realisasi Investasi sebesar 67,48%, diikuti dengan Angka Kunjungan Wisatawan sebesar 27,65%, dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 27%, sedangkan Indeks Ketentraman dan Ketertiban memiliki efisiensi relatif kecil sebesar 2,59%. Namun demikian, efisiensi tersebut tidak hanya efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan capaian kinerja tetapi juga karena efisiensi yang disebabkan oleh beberapa kegiatan yang tidak terlaksana.

Oleh karena itu, efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Balikpapan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.17
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	69.50	68.75	98.92%	66,319,179,328	58,419,186,383	88.09%	10.95%	-
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	80	81.25*	101.56%	129,625,803,670	102,970,396,164	79.44%	21.79%	Efisien
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	28.93%	28.70%	99.20%	9,701,290,440	7,787,269,757	80.27%	19.09%	-
		Indeks SPBE	Poin	3.3	3.75	113.64%	17,766,089,000	16,791,352,128	94.51%	16.83%	Efisien
		Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100%	4,571,774,600	3,402,798,229	74%	25.57%	Efisien
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0.73	0.68	93.15%	12,170,267,700	9,342,064,087	76.76%	17.59%	-
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85.24	83.23	97.64%	115,858,475,863	98,684,561,626	85.18%	12.77%	-
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0.7620	0.7599	99.72%	507,206,311,765	470,019,777,732	92.67%	7.08%	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.8440	0.8315	98.52%	302,871,431,544	214,332,213,625	70.77%	28.17%	-
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	11.71	14.43	123.23%	1,624,802,400	1,461,682,863	89.96%	27%	Efisien
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0.089	0.079	88.76%	36,426,011,050	31,714,486,638	87.07%	1.20%	-
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0.4962	0.4955	99.86%	2,955,000,000	2,860,580,318	96.80%	3.06%	-
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89.96	89.96	100%	21,483,226,262	19,154,462,904	89.16%	10.84%	Efisien
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Teadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	78.78	77.98	98.98%	1,147,858,780,184	1,053,741,959,308	91.80%	7.26%	-
		Persentase Permukiman Layak Huni	%	99.32%	99.11%	99.79%	17,800,241,100	15,487,115,129	87.01%	12.81%	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69.70	67.64	97.04%	139,561,681,207	130,167,359,063	93.27%	3.89%	-
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89.40%	85.14%	95.23%	72,302,926,434	49,654,234,898	68.68%	27.89%	-
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	105	118.21	88.82%	43,056,054,900	42,272,361,712	98.18%	-10.53%	-
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0.8267	0.83	100.40%	113,867,837,550	111,359,087,285	97.80%	2.59%	Efisien
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	16.40%	20.21%	123.23%	13,801,400,648	12,786,426,764	92.65%	24.82%	Efisien
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6.70	6.09	110.02%	2,507,919,720	2,305,396,640	91.92%	16.44%	Efisien
		Tingkat Kemiskinan	%	2.39	2.31	103.46%	7,225,640,378	6,417,930,522	89%	14.15%	Efisien
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	8.8	24.13	274.15%	5,218,080,000	4,652,605,934	89.16%	67.48%	Efisien

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	88.60	101.84%	8,699,402,375	7,758,989,750	89.19%	12.42%	Efisien
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1.9	2.6	134.63%	19,628,373,000	19,118,316,990	97.40%	27.65%	Efisien
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	30%	33.53%	111.77%	1,673,803,000	1,587,696,997	94.86%	15.13%	Efisien
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5.25%	5.66%	107.81%	28,925,263,438	27,759,935,480	95.97%	10.98%	Efisien

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis
Sumber : Bagian Organisasi dan BKAD Kota Balikpapan, diolah 2024

2.3.2 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Selama tahun 2023, Pemerintah Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Secara keseluruhan, penghargaan yang berhasil diraih berjumlah 53 penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari lembaga pemerintah maun non pemerintah (swasta). Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Prestasi dan Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan
Tahun 2023

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA
1	Panji Terbaik Bidang Keagamaan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan
2	Panji Terbaik Bidang Kepariwisataan Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DPOP
3	Panji Terbaik Bidang Sektor Industri	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DKUMKMP
4	Panji Terbaik Bidang Perhubungan Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DISHUB
5	Panji Terbaik Bidang Kebudayaan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DISDIKBUD
6	Panji Terbaik Bidang Pembangunan Kesehatan Tingkat Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DINKES
7	Panji Terbaik Bidang Kesejahteraan Sosial	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Bagian Kesra Sekretariat Daerah dan DINSOS
8	Panji Terbaik Bidang Lingkungan Hidup	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DLH
9	Panji Terbaik Bidang Pelayanan Teadu Satu Pintu	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DPMPTSP
10	Panji Terbaik Bidang Daya Saing Daerah	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DPMPTSP
11	Panji Terbaik Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	BPBD
12	Panji Terbaik Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Terintegrasi di Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	BKPSDM

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA
13	Panji Terbaik Bidang Pelayanan Administrasi Teadu Kecamatan (Paten)	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
14	Panji Terbaik Bidang Panji Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Trantibun dan Linmas) Tingkat Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
15	Panji Terbaik Bidang Tim Penggerak PKK Berestasi Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	TP-PKK
16	Panji Terbaik Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
17	Terbaik II Bidang Pembangunan dan HAM	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan
18	Terbaik II Bidang Hubungan Antar Umat Beragama	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan
19	Terbaik II Bidang Pencegahaan Korupsi (PK) Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Inspektorat
20	Terbaik II Bidang Hilirisasi Peternakan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DPPP
21	Terbaik II Bidang Sektor Perdagangan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DISDAG
22	Terbaik II Bidang Apresiasi Bunda PAUD	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	TP-PKK
23	Terbaik II Bidang Ketenagakerjaan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DISNAKER
24	Terbaik II Bidang Keolahragaan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DPOP
25	Terbaik II Bidang Penyelanggaraan Perumahan dan Pemukiman	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DISPERKIM
26	Terbaik II Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DISDUKCAPIL
27	Terbaik II Bidang Kondufisitas Daerah	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan
28	Terbaik II Bidang Pengembangan IPTEK dan Inovasi	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA
29	Terbaik II Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kategori Kota	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DP3AKB
30	Terbaik II Bidang Pencegahan dan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tingkat Kabupaten	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan
31	Terbaik II Bidang Penilaian Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tergiat Tahun 2021	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan
32	Terbaik III Bidang Stastiktik Sektoral	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan
33	Terbaik III Bidang Koperasi dan UMKM	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DKUMKMP
34	Terbaik III Bidang Kepemudaan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DPOP
35	Terbaik III Bidang Penyenggaraan Air Minum	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan
36	*Top Digital Government Collaboration*	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan
37	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022	Nasional	Ombudsman Republik Indonesia	Pemerintah Kota Balikpapan
38	Sertifikat Kota Bebas Penyakit Frambusia	Nasional	Kementerian Kesehatan	Pemerintah Kota Balikpapan
39	Adipura Kencana	Nasional	Kementerian LH	Pemerintah Kota Balikpapan
40	*Universal Health Care Award*	Nasional	BPJS	Pemerintah Kota Balikpapan
41	*Public Relation Indonesia Award*	Nasional		Pemerintah Kota Balikpapan
42	PPPKM Award 2023 Untuk Puskesmas Gunung Bahagia	Nasional	KEMENKES	DINKES
43	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Nasional	BPK RI Perwakilan Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan
44	Sosok Inspiratif Kategori Guru	Nasional	Kemendikbudristek	Abdul Rahmat
45	Penghargaan Investasi Tertinggi Di Provinsi Kaltim	Provinsi	DPMPTSP Provinsi Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA
46	Kategori Utama Kota Layak Anak Tahun 2023	Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemerintah Kota Balikpapan
47	Upakarya Wanua Nugraha	Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Kota Balikpapan
48	*Green Leadership* Nirwasita Tantra Tahun 2023 Kategori Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah	Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemerintah Kota Balikpapan
49	Daerah Inovasi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Nasional	Kompas TV	Pemerintah Kota Balikpapan
50	Inovasi Layanan Digital Terbaik 2023	Nasional	Peustakan Nasional RI	Pemerintah Kota Balikpapan
51	Penghargaan Kota Sehat	Nasional	Kemenlh, Kemendagri, Kemenkes	Pemerintah Kota Balikpapan
52	Penghargaan Anugerah Parahita Ekaparya Untuk Kota Balikpapan	Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AKB
53	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Nasional	Komisi Informasi Provinsi Kaltim	DISKOMINFO

Sumber: Bagian Organisasi, diolah 2024

Adapun beberapa dokumentasi Kegiatan Penerimaan Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2023 sebagai berikut ini:

Tabel 2.19
Beberapa Dokumentasi Penerimaan Penghargaan

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN		KETERANGAN
1		1.	Panji Terbaik Bidang Keagamaan	Kota Balikpapan menjadi terbaik pertama peraih panji keberhasilan pembangunan terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur pada Upacara Peringatan HUT Ke-66. Sebanyak 16 panji keberhasilan berhasil diraih. Selain 16 Panji keberhasilan, Balikpapan juga menerima 15 trofi dan 5 Piagam Penghargaan
		2.	Panji Terbaik Bidang Kepariwisataan Kategori Kota	
		3.	Panji Terbaik Bidang Sektor Industri	
		4.	Panji Terbaik Bidang Perhubungan Kategori Kota	

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN		KETERANGAN
	 	5.	Panji Terbaik Bidang Kebudayaan	Pembangunan. Walikota Balikpapan Mas'ud secara langsung menerima secara simbolis penghargaan panji-panji keberhasilan dari Gubernur Isran Noor di Gedung Plenary, Convention Hall Samarinda.
		6.	Panji Terbaik Bidang Pembangunan Kesehatan Tingkat Kota	
		7.	Panji Terbaik Bidang Kesejahteraan Sosial	
		8.	Panji Terbaik Bidang Lingkungan Hidup	
		9.	Panji Terbaik Bidang Pelayanan Teadu Satu Pintu	
		10.	Panji Terbaik Bidang Daya Saing Daerah	
		11.	Panji Terbaik Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	
		12.	Panji Terbaik Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Terintegrasi di Provinsi Kalimantan Timur	
		13.	Panji Terbaik Bidang Pelayanan Administrasi Teadu Kecamatan (Paten)	
		14.	Panji Terbaik Bidang Panji Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Trantibun dan Linmas) Tingkat Kota	
		15.	Panji Terbaik Bidang Tim Penggerak PKK Berestasi Kategori Kota	
		16.	Panji Terbaik Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	
		17.	Terbaik II Bidang Pembangunan dan HAM	

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN		KETERANGAN
		18.	Terbaik II Bidang Hubungan Antar Umat Beragama	
		19.	Terbaik II Bidang Pencegahaan Korupsi (PK) Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota	
		20.	Terbaik II Bidang Hilirisasi Peternakan	
		21.	Terbaik II Bidang Sektor Perdagangan	
		22.	Terbaik II Bidang Apresiasi Bunda PAUD	
		23.	Terbaik II Bidang Ketenagakerjaan	
		24.	Terbaik II Bidang Keolahragaan	
		25.	Terbaik II Bidang Penyelanggaraan Perumahan dan Pemukiman	
		26.	Terbaik II Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kategori Kota	
		27.	Terbaik II Bidang Kondufisitas Daerah	
		28.	Terbaik II Bidang Pengembangan IPTEK dan Inovasi	
		29.	Terbaik II Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kategori Kota	
		30.	Terbaik II Bidang Pencegahan dan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tingkat Kabupaten	

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
		31. Terbaik II Bidang Penilaian Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tergiat Tahun 2021	
		32. Terbaik III Bidang Stastiktik Sektoral	
		33. Terbaik III Bidang Koperasi dan UMKM	
		34 Terbaik III Bidang Kepemudaan	
		35. s III Bidang Penyenggaraan Air Minum	
2		*Top Digital Government Collaboration*	Sekretaris Daerah Kota Balikpapan menerima Penghargaan *2nd Top Digital Government Collaboration* dan penyerahan 1 (satu) unit Alat Perekaman KTP-EL dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk Disdukcapil Kota Balikpapan.
3		Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022	Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur, Kusharyanto bersama Tim Keasistenan Pencegahan dan Pemeriksa Ombudsman RI menyerahkan Piagam hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diterima langsung oleh Walikota Balikpapan, Rahmad Mas'ud dan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin. Pemerintah Kota Balikpapan meraih peringkat 22 dengan nilai kepatuhan 87,12 (Zona Hijau).

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
4		Sertifikat Kota Bebas Penyakit Frambusia	Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, mewakili Pemerintah Kota Balikpapan menerima sertifikat Kota Bebas Penyakit Frambusia dari Kementerian Kesehatan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Muhaimin secara simbolis menerima sertifikat dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Penyerahan sertifikat ini berkaitan dengan peringatan Hari *Neglected Tropical Diseases* (NTD) sedunia tahun 2023.
5		Adipura Kencana	Kota Balikpapan berhasil meraih Penghargaan Adipura Kencana Kategori Kota Besar 2022. Kota Balikpapan menjadi satu-satunya daerah yang berhasil masuk kategori Kota Besar. Penghargaan tersebut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
6		*Universal Health Care Award*	Pemerintah Kota Balikpapan meraih penghargaan *Universal Health Care Award* (UHC). Penghargaan ini diperoleh lantaran 99,58 persen penduduk Kota Balikpapan telah memiliki jaminan BPJS kesehatan. Tercatat 190.449 jiwa untuk peserta PBI yang anggarannya berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sampai dengan bulan Maret Tahun 2023. Peserta tersebut mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan kelas III gratis karena ditanggung oleh Pemerintah Kota Balikpapan
9		Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Pemerintah Kota Balikpapan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Opini WTP ini adalah yang ke-10 kalinya diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
10		Sosok Inspiratif Kategori Guru	Guru SDN 011 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Abdul Rahmat meraih Sosok Inspiratif Kategori Guru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI. Penghargaan ini diraih atas dedikasinya dalam implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) selama proses pembelajaran di kelas. Rahmat juga menjadi inspirasi para guru dalam memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Di PMM, Rahmat juga terlibat dalam beberapa konten pengembangan, yaitu Teman Belajar, Validator Aksi Nyata Pelatihan Mandiri, Penulis Naskah Video Permodelan, Penulis Cerita Praktik, Penulis Artikel Webinar, Kontributor Perangkat Ajar, Penggerak Komunitas Belajar dan sebagainya.
11		Penghargaan Investasi Tertinggi di Provinsi KALTIM	Kota Balikpapan Mendapatkan Penghargaan Investasi Tertinggi Di Provinsi Kalimantan Timur 2023

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
12		Kategori Utama Kota Layak Anak Tahun 2023	Kota Balikpapan meraih penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama, sebelumnya selama tiga tahun. Kota Balikpapan meraih penghargaan kategori Nindya.Prestasi ini dapat diraih karena komitmen dari seluruh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, media massa, forum anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
13		Upakarya Wanua Nugraha	Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang dinilai berhasil melakukan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan menjadi Desa dan Kelurahan berestasi. Wali Kota Balikpapan berhasil teilih dari 98 Wali Kota di seluruh Indonesia, atas prestasi dan komitmen dalam memajukan Kelurahan di Kota Balikpapan. Kota Balikpapan menjadi salah satu Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang menerima penghargaan Upakarya Wanua Nugraha.

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
14		*Green Leadership Nirwasita Tantra* Tahun 2023 kategori Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah	Nirwasita Tantra adalah penghargaan pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD atas kepemimpinannya yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup didaerahnya. Kota Balikpapan meraih penghargaan *Green Leadership* "Nirwasita Tantra" untuk kategori Kota Besar dan kategori Kepala Daerah tingkat Kota.
15		Daerah Inovasi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	Kota Balikpapan meraih penghargaan sebagai Daerah Inovasi Ekonomi Kratif dan Pariwisata pada acara HUT ke 12 Kompas TV

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
17		Penghargaan Kota Sehat	Kota Balikpapan berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Kesehatan RI atas keberhasilan dari penilaian sembilan tantanan. Untuk menjaga Kota Balikpapan tetap menyandang gelar Kota Sehat, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dengan bersinergi bersama Forum Kota Sehat. Forum ini akan membantu untuk mengawasi, menjaga, mencari solusi terkait sembilan tatanan yang menjadi penilaian.
18		Penghargaan Anugerah Parahita Ekaparya Untuk Kota Balikpapan	Kota Balikpapan kembali menerima penghargaan Parahita Ekapraya pada tahun 2023 ini. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI bagi untuk pemerintah daerah yang berkomitmen terhadap pengarusutamaan gender. Penghargaan ini diberikan per dua tahun sekali. Pada tahun ini Balikpapan memperoleh penghargaan kategori Madya, naik satu tingkat dibandingkan pada 2021 lalu yakni kategori Pratama.

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
19		Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Pemerintah Kota Balikpapan berhasil meraih peringkat ketiga kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur digelaran Anugerah Keterbukaan Informasi pada Selasa, 19 Desember 2023 lalu yang berlangsung di Kota Samarinda. Balikpapan berhasil memperoleh predikat informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. Predikat ini naik satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya, menuju informatif.

Sumber: Bagian Organisasi, diolah 2023

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan Kota. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah atau desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah atau desa meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif serta berkewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pada Tahun Anggaran 2023, **Pemerintah Kota Balikpapan tidak mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.**

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 JENIS PELAYANAN DASAR

4.1.1 Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa SPM Bidang Pendidikan meliputi:

a. Pendidikan Usian Dini;
b. Pendidikan Dasar;
c. Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2 Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berikut adalah jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
d. Pelayanan Kesehatan Balita;
e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
j. Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat;
k. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis;
l. Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV.

4.1.3 Pekerjaan Umum

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan

Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan terdiri dari :

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

4.1.4 Perumahan Rakyat

Pelayanan dasar bidang perumahan rakyat merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar agar masyarakat mampu menghuni rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Maka jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan terdiri dari;

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.5 Trantibumlinmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari:

a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Di Kota Balikpapan pengampu SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Sedangkan pengampu SPM Sub Urusan Kebakaran dan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

4.1.6 Sosial

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1) Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;

2) Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti;
3) Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
4) Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
5) Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

4.2 TARGET PENCAPAIAN

4.2.1 Pendidikan

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Dasar Usian Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisip asi dalam pendidikan PAUD	100%	2023	Angka partisipasi sekolah	100%	2023
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100%	2023
					Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	100%	2023
					Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	100%	2023
					Kecukupan formasi guru ASN	100%	2023
					Indeks distribusi guru	100%	2023
					Proporsi PTK bersertifikat	100%	2023
					Proporsi PTK penggerak	100%	2023
					Pengalaman pelatihan guru	100%	2023
2.	Pendidikan Dasar						

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
	SD	Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan sekolah dasar	100%	2023	Angka partisipasi kasar	100%	2023
					Angka partisipasi sekolah	100%	2023
					Angka partisipasi murni	100%	2023
					Kemampuan literasi	100%	2023
					Kemampuan numerasi	100%	2023
					Perbedaan Skor Literasi	100%	2023
					Perbedaan Skor numerasi	100%	2023
					Indeks iklim keamanan	100%	2023
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100%	2023
					Kecukupan formasi guru ASN	100%	2023
					Indeks distribusi guru	100%	2023
					Proporsi PTK bersertifikat	100%	2023
					Proporsi PTK penggerak	100%	2023
					Pengalaman pelatihan guru	100%	2023
	SMP	Persentase anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan sekolah menengah pertama	100%	2023	Angka partisipasi kasar	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Angka partisipasi sekolah	100%	2023
					Angka partisipasi murni	100%	2023
					Kemampuan literasi	100%	2023
					Kemampuan numerasi	100%	2023
					Perbedaan Skor Literasi	100%	2023
					Perbedaan Skor numerasi	100%	2023
					Indeks iklim keamanan	100%	2023
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100%	2023
					Kecukupan formasi guru ASN	100%	2023
					Indeks distribusi guru	100%	2023
					Proporsi PTK bersertifikat	100%	2023
					Proporsi PTK penggerak	100%	2023
					Pengalaman pelatihan guru	100%	2023

4.2.2 Kesehatan

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	100%	2023	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	100%	2023
					Tablet tambah darah	100%	2023
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	100%	2023
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	100%	2023
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	100%	2023
					Kartu ibu/rekam medis ibu	100%	2023
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Bidan	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Perawat	100%	2023
					Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	100%	2023
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir Bayi	100%	2023	Formulir	100%	2023
					Kartu ibu (rekam medis)	100%	2023
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Bidan	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Perawat	100%	2023
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	sesuai standar pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	100%	2023	Vaksin Hepatitis B0	100%	2023
					Vitamin K1 injeksi	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Salep/tetes mata antibiotik	100%	2023
					Formulir bayi baru lahir	100%	2023
					Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	100%	2023
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Bidan	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Perawat	100%	2023
4	Pelayanan Kesehatan Balita	sesuai standar pelayanan kesehatan balita	100%	2023	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	100%	2023
					Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	100%	2023
					Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	100%	2023
					Vitamin A Biru	100%	2023
					Vitamin A Merah	100%	2023
					Vaksin imunisasi dasar: HBO	100%	2023
					Vaksin imunisasi dasar: BCG	100%	2023
					Vaksin imunisasi dasar: Polio	100%	2023
					Vaksin imunisasi dasar: IPV	100%	2023
					Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	100%	2023
					Vaksin imunisasi dasar: Campak	100%	2023
					Vaksin imunisasi dasar: Rubella	100%	2023
					Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	100%	2023
					Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	100%	2023
					Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	100%	2023
					Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					17 . Peralatan Anafilaktik	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Dokter	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Bidan	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Perawat	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	100%	2023
					Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	100%	2023
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	100%	2023	Buku raport kesehatanku	100%	2023
					Buku pemantauan kesehatan	100%	2023
					Kuesioner skrining kesehatan	100%	2023
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	100%	2023
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Bidan	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Perawat	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	100%	2023
					Tenaga Kesehatan : Masyarakat	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	100%	2023
					Tenaga Non kesehatan : Guru	100%	2023
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Sesuai standar skrining	100%	2023	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		kesehatan usia produktif			(KIE)		
					Alat ukur berat badan	100%	2023
					Alat : Alat ukur tinggi badan	100%	2023
					Alat : Alat ukur lingkar perut	100%	2023
					Alat : Tensimeter	100%	2023
					Alat : Glukometer	100%	2023
					Alat : Tes strip gula darah	100%	2023
					Alat : Lancet	100%	2023
					Alat : Kapas alkohol	100%	2023
					Alat : KIT IVA Tes	100%	2023
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	100%	2023
					12 . Tenaga kesehatan : Dokter	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Bidan	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Perawat	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	100%	2023
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2023
					Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	100%	2023
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	100%	2023	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	100%	2023
					Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	100%	2023
					Buku kesehatan lansia	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Dokter	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Tenaga kesehatan : Bidan	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Perawat	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	100%	2023
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2023
					Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	100%	2023
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sesuai standar pelayanan penderita Hipertensi	100%	2023	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100%	2023
					Tensimeter	100%	2023
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Dokter	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Bidan	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Perawat	100%	2023
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2023
					Obat Hipertensi	100%	2023
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	2023	Alat : Glukometer	100%	2023
					Alat : Strip Tes Gula Darah	100%	2023
					Alat : Kapas Alkohol	100%	2023
					Alat : Lancet	100%	2023
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	100%	2023
					Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					(KIE)		
					Tenaga kesehatan : Dokter	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Bidan	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Perawat	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	100%	2023
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2023
					Obat Diabetes Melitus	100%	2023
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	100%	2023	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	100%	2023
					Kit berisi 2 Alat Fiksasi	100%	2023
					Penyediaan 345esehata pencatatan dan pelaporan	100%	2023
					Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100%	2023
					Tenaga 345esehatan : Dokter	100%	2023
					Tenaga 345esehatan : Perawat Terlatih Jiwa	100%	2023
					Tenaga 345esehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	100%	2023
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Sesuai standar pelayanan kesehatan tuberkolosis	100%	2023	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	100%	2023
					Reagen Zn TB	100%	2023
					Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	100%	2023
					Catridge tes cepat molekuler	100%	2023
					Formulir pencatatan dan pelaporan	100%	2023
					Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	2023
					Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Perawat	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	100%	2023
					Tenaga kesehatan masyarakat	100%	2023
					Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	100%	2023
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	100%	2023	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	100%	2023
					Tes cepat HIV (RDT) pertama	100%	2023
					Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	100%	2023
					Alat tulis, Rekam	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK		
					Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Perawat	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Bidan	100%	2023
					Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	100%	2023
					Tenaga kesehatan masyarakat	100%	2023
					Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	100%	2023

4.2.3 Pekerjaan Umum

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Pencapaian Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	2023	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	100%	2023
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	100%	2023
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	100%	2023
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolaha n air limbah	100%	2023	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	100%	2023
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	100%	2023
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	100%	2023
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	100%	2023

4.2.4 Perumahan Rakyat

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana	100%	2023	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
	Kabupaten/Kota	yang memperoleh rumah layak huni			dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)		
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2023	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	100%	2023
					Subsidi uang sewa	100%	2023
					Penyediaan rumah layak huni	100%	2023

4.2.5 Trantibumlinmas

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Pencapaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2023

No	jenis pelayanan dasar	penerima layanan dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		indikator	target	batas waktu capaian	indikator	target	batas waktu capaian
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum perda dan perkada Kota	100%	2023	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. 350asyar kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	100%	2023

No	jenis pelayanan dasar	penerima layanan dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		indikator	target	batas waktu capaian	indikator	target	batas waktu capaian
					Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional 351asyar)	100%	2023
					Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan 351asyarakat (jumlah dan kualitas 351asyarak/SDM)	100%	2023
					Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	100%	2023
					Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	100%	2023

No	jenis pelayanan dasar	penerima layanan dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		indikator	target	batas waktu capaian	indikator	target	batas waktu capaian
					Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat 352asyaraka 352asyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	100%	2023
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2023	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	100%	2023
					Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100%	2023
					Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	100%	2023
					Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	100%	2023
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	2023	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll)	100%	2023

No	jenis pelayanan dasar	penerima layanan dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		indikator	target	batas waktu capaian	indikator	target	batas waktu capaian
		bencana					
					Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	100%	2023
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2023	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	100%	2023
					Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100%	2023
					Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	100%	2023
					Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	100%	2023
					Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	100%	2023

No	jenis pelayanan dasar	penerima layanan dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		indikator	target	batas waktu capaian	indikator	target	batas waktu capaian
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	2023	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	100%	2023
					Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.)	100%	2023
					Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.)	100%	2023
					Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	100%	2023
					Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	100%	2023

No	jenis pelayanan dasar	penerima layanan dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		indikator	target	batas waktu capaian	indikator	target	batas waktu capaian
					Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	100%	2023

4.2.6 Sosial

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Pencapaian SPM Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100%	2023	Layanan data dan pengaduan	100%	2023
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	100%	2023
					Penyediaan permakanan	100%	2023
					Penyediaan sandang	100%	2023
					Penyediaan alat bantu	100%	2023
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	100%	2023
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	100%	2023
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	100%	2023
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	100%	2023
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%	2023
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	2023
					Layanan rujukan	100%	2023
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100%	2023	Layanan data dan pengaduan	100%	2023
					Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	100%	2023
					Penyediaan permakanan	100%	2023
					Penyediaan sandang	100%	2023
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100%	2023
					Penyediaan perbekalan 356endidika (Penyediaan P3K)	100%	2023
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					anak terlantar		
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	100%	2023
					Akses ke layanan 357endidikan dan 357endidika dasar / fasilitasi layanan 357endidikan dan kesehatan	100%	2023
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%	2023
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	2023
					Layanan rujukan	100%	2023
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100%	2023	Layanan data dan pengaduan	100%	2023
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	100%	2023
					Penyediaan permakanan	100%	2023
					Penyediaan sandang	100%	2023
					Penyediaan alat bantu	100%	2023
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	100%	2023
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	100%	2023
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	100%	2023
					Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	100%	2023
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%	2023
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	2023
					Layanan rujukan	100%	2023
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social di luar panti	100%	2023	Layanan data dan pengaduan	100%	2023
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	100%	2023
					Penyediaan permakanan	100%	2023
					Penyediaan sandang	100%	2023
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	100%	2023
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	100%	2023
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	100%	2023
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	100%	2023
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%	2023
						100%	2023
					Layanan rujukan	100%	2023
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota	100%	Penyediaan permakanan	Penyediaan permakanan	100%	2023
					Penyediaan sandang	100%	2023
					Penyediaan tempat penampungan pengungsi	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
					Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100%	2023
					Pelayanan dukungan Psikososial	100%	2023

4.3 ANGGARAN

4.3.1 Pendidikan

Tabel 4.7

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perancanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BALIKPAPAN				**203,661,849,411**	**191,929,404,525**	**94.24 %**
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				25,362,634,000	20,335,247,831	80.18 %
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD K2023542			9,246,648,000	8,220,678,629	88.90 %
		1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	0	0	0%
		2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik	8,846,648,000	7,838,615,529	88.61 %
		4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik	0	0	0%
		5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	400,000,000	382,063,100	95.52 %
		6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perancanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	JUMLAH INDIKATOR				9,246,648,000	8,220,678,629	88.90 %
	2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan K2023532			1,374,392,300	1,299,542,522	94.55 %
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	110,000,000	106,507,500	96.83 %
		2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	632,196,150	596,517,511	94.36 %
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	632,196,150	596,517,511	94.36 %
		4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
		5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,374,392,300	1,299,542,522	94.55 %
	3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K2023543			0	0	0.00 %
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perancanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K2023541			14,741,593,700	10,815,026,680	73.36 %
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	14,741,593,700	10,815,026,680	73.36 %
		2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				14,741,593,700	10,815,026,680	73.36 %
	JUMLAH PROGRAM				25,362,634,000	20,335,247,831	80.18 %
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR				155,189,263,575	149,746,642,150	96.49 %
	5	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023533			50,690,000,000	50,517,660,535	99.66 %
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0%
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	390,000,000	388,933,100	99.73 %
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	50,300,000,000	50,128,727,435	99.66 %
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai	Peserta didik	0	0	0%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perancanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
			daerah terdepan, terluar, dan tertinggal				
	JUMLAH INDIKATOR				50,690,000,000	50,517,660,535	99.66 %
	6	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023534			7,200,000,000	4,896,605,550	68.01 %
		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	3,600,000,000	2,448,302,775	68.01 %
		2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	3,600,000,000	2,448,302,775	68.01 %
	JUMLAH INDIKATOR				7,200,000,000	4,896,605,550	68.01 %
	7	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023535			81,231,282,615	80,606,472,370	99.23 %
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	27,993,071,150	27,647,094,513	98.76 %
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	53,238,211,465	52,959,377,857	99.48 %
	JUMLAH INDIKATOR				81,231,282,615	80,606,472,370	99.23 %
	8	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K2023519			1,277,980,960	1,203,711,900	94.19 %
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	255,596,192	240,742,380	94.19 %
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan	Guru	0	0	0%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perancanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
			tenaga kependidikan				
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	255,596,192	240,742,380	94.19 %
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	255,596,192	240,742,380	94.19 %
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	255,596,192	240,742,380	94.19 %
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		255,596,192	240,742,380	94.19 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,277,980,960	1,203,711,900	94.19 %
	9	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K2023536			14,790,000,000	12,522,191,795	84.67 %
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	14,790,000,000	12,522,191,795	84.67 %
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				14,790,000,000	12,522,191,795	84.67 %
	JUMLAH PROGRAM				155,189,263,575	149,746,642,150	96.49 %
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN				23,109,951,836	21,847,514,544	94.54 %
	10	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan) K2023564			6,803,460,000	6,346,375,824	93.28 %
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perancanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	6,803,460,000	6,346,375,824	93.28 %
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				6,803,460,000	6,346,375,824	93.28 %
	11	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan) K2023563			14,057,318,492	13,359,019,060	95.03 %
		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0%
		2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	14,057,318,492	13,359,019,060	95.03 %
	JUMLAH INDIKATOR				14,057,318,492	13,359,019,060	95.03 %
	12	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan) K2023562			460,000,000	456,923,000	99.33 %
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	460,000,000	456,923,000	99.33 %
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				460,000,000	456,923,000	99.33 %
	13	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K2023561			1,533,577,152	1,444,454,280	94.19 %

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perancanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	255,596,192	240,742,380	94.19 %
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	255,596,192	240,742,380	94.19 %
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	255,596,192	240,742,380	94.19 %
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	255,596,192	240,742,380	94.19 %
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	255,596,192	240,742,380	94.19 %
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		255,596,192	240,742,380	94.19 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,533,577,152	1,444,454,280	94.19 %
	14	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K2023560			255,596,192	240,742,380	94.19 %
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	255,596,192	240,742,380	94.19 %
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				**255,596,192**	**240,742,380**	**94.19 %**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perancanaan Dan Pelaksanaan		Serapan
	JUMLAH PROGRAM				23,109,951,836	21,847,514,544	94.54 %

4.3.2 Kesehatan

Tabel 4.8

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BALIKPAPAN				**7,801,351,950**	**6,003,140,033**	**76.95 %**
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				7,801,351,950	6,003,140,033	76.95 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			7,801,351,950	6,003,140,033	76.95 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,463,474,000	1,170,186,350	79.96 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	279,110,000	258,368,000	92.57 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	265,308,000	259,620,000	97.86 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	531,170,000	479,338,500	90.24 %
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	753,132,000	670,764,250	89.06 %
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	1,072,998,000	965,083,044	89.94 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	729,659,950	667,425,938	91.47 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	155,000,000	132,505,550	85.49 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita	Orang	155,000,000	134,695,511	86.90 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Diabetes Melitus				
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	189,350,000	167,624,800	88.53 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1,589,250,000	542,848,000	34.16 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	617,900,000	554,680,090	89.77 %
		13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	0	0	0%
		14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				**7,801,351,950**	**6,003,140,033**	**76.95 %**
	JUMLAH PROGRAM				**7,801,351,950**	**6,003,140,033**	**76.95 %**

4.3.3 Pekerjaan Umum

Tabel 4.9

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BALIKPAPAN				**20,641,024,434**	**19,774,247,441**	**95.80 %**
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				14,714,883,000	14,189,944,392	96.43 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			14,714,883,000	14,189,944,392	96.43 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	318,437,000	284,659,078	89.39 %
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	584,750,000	582,218,575	99.57 %
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	13,811,696,000	13,323,066,739	96.46 %
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0	0	0%
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	0%
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				14,714,883,000	14,189,944,392	96.43 %
	JUMLAH PROGRAM				14,714,883,000	14,189,944,392	96.43 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5,926,141,434	5,584,303,049	94.23 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023639			5,926,141,434	5,584,303,049	94.23 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,390,671,350	1,303,582,300	93.74 %
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	3,362,550,084	3,232,676,713	96.14 %
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	1,030,100,000	906,000,000	87.95 %
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0%
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		142,820,000	142,044,036	99.46 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	0	0	0%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0	0	0%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				**5,926,141,434**	**5,584,303,049**	**94.23 %**
	JUMLAH PROGRAM				**5,926,141,434**	**5,584,303,049**	**94.23 %**

4.3.4 Perumahan Rakyat

Tabel 4.10

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BALIKPAPAN				**864,700,000**	**252,176,268**	**29.16 %**
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				805,000,000	196,792,668	24.45 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			0	0	0.00 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0.00 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			805,000,000	196,792,668	24.45 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	250,000,000	27,081,900	10.83 %
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000	98,354,880	98.35 %
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	455,000,000	71,355,888	15.68 %
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				**805,000,000**	**196,792,668**	**24.45 %**
	JUMLAH PROGRAM				**805,000,000**	**196,792,668**	**24.45 %**
KEGIATAN LAINNYA							
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA**						
		01.00	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		59,700,000	55,383,600	92.77

4.3.5 TrantibumLinmas

Tabel 4.11

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BALIKPAPAN				**52,066,347,350**	**50,775,352,611**	**97.52 %**
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				9,005,292,450	8,502,990,899	94.42 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			8,366,642,450	8,072,003,737	96.48 %
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	953,021,000	883,585,500	92.71 %
		2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	2,784,275,000	2,570,540,337	92.32 %
		3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	4,490,630,800	4,480,416,500	99.77 %
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	138,715,650	137,461,400	99.10 %
		6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			ketentraman dan ketertiban umum				
		7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
		8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				8,366,642,450	8,072,003,737	96.48 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			532,650,000	335,480,800	62.98 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	94,000,000	93,719,000	99.70 %
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	363,650,000	167,286,000	46.00 %
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	75,000,000	74,475,800	99.30 %
	JUMLAH INDIKATOR				532,650,000	335,480,800	62.98 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			106,000,000	95,506,362	90.10 %
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	106,000,000	95,506,362	90.10 %
	JUMLAH INDIKATOR				106,000,000	95,506,362	90.10 %
	JUMLAH PROGRAM				9,005,292,450	8,502,990,899	94.42 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				4,091,090,000	3,955,352,749	96.68 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			124,000,000	120,682,800	97.32 %
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	124,000,000	120,682,800	97.32 %
	JUMLAH INDIKATOR				124,000,000	120,682,800	97.32 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K2023447			2,838,500,000	2,803,980,000	98.78 %
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	275,000,000	249,361,500	90.68 %
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	80,000,000	78,594,000	98.24 %
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	2,391,000,000	2,384,700,500	99.74 %
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	92,500,000	91,324,000	98.73 %
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				2,838,500,000	2,803,980,000	98.78 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			200,000,000	193,003,650	96.50 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	100,000,000	98,953,650	98.95 %
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	100,000,000	94,050,000	94.05 %
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				200,000,000	193,003,650	96.50 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			928,590,000	837,686,299	90.21 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	100,000,000	97,639,000	97.64 %
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	828,590,000	740,047,299	89.31 %
	JUMLAH INDIKATOR				928,590,000	837,686,299	90.21 %
	JUMLAH PROGRAM				4,091,090,000	3,955,352,749	96.68 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				38,919,964,900	38,267,533,263	98.32 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			34,641,684,900	34,012,256,846	98.18 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,000,000,000	4,731,792,956	94.64 %
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	300,000,000	299,436,750	99.81 %
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
		6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	29,341,684,900	28,981,027,140	98.77 %
		7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%
		9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%
		10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				34,641,684,900	34,012,256,846	98.18 %

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			100,000,000	97,934,600	97.93 %
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	50,000,000	49,079,600	98.16 %
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	50,000,000	48,855,000	97.71 %
	JUMLAH INDIKATOR				100,000,000	97,934,600	97.93 %
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451			50,000,000	49,502,212	99.00 %
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	50,000,000	49,502,212	99.00 %
	JUMLAH INDIKATOR				50,000,000	49,502,212	99.00 %
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			4,028,280,000	4,009,153,765	99.53 %
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	469,440,000	459,568,500	97.90 %
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		0	0	0%
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	3,558,840,000	3,549,585,265	99.74 %
	JUMLAH INDIKATOR				4,028,280,000	4,009,153,765	99.53 %
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			100,000,000	98,685,840	98.69 %
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	100,000,000	98,685,840	98.69 %
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
		4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				**100,000,000**	**98,685,840**	**98.69 %**
	JUMLAH PROGRAM				**38,919,964,900**	**38,267,533,263**	**98.32 %**

4.3.5 Sosial

Tabel 4.12

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA BALIKPAPAN				**2,460,397,278**	**1,853,697,344**	**75.34 %**
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2,460,397,278	1,853,697,344	75.34 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			1,887,811,100	1,619,290,044	85.78 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	1,536,922,900	1,277,655,150	83.13 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	134,258,200	126,714,358	94.38 %
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	168,630,000	167,760,918	99.48 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan	Orang	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			pengemis dan masyarakat				
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	48,000,000	47,159,618	98.25 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,887,811,100	1,619,290,044	85.78 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			572,586,178	234,407,300	40.94 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	383,599,778	46,983,800	12.25 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	144,682,400	143,323,500	99.06 %
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	44,304,000	44,100,000	99.54 %
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				**572,586,178**	**234,407,300**	**40.94 %**
	JUMLAH PROGRAM				**2,460,397,278**	**1,853,697,344**	**75.34**

4.4 DUKUNGAN PERSONIL

4.4.1 Pendidikan

Tabel 4.13

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	1
2	Strata 2	14
3	strata 1/ Diploma IV	76
4	Diploma III	10
5	Diploma II	-
6	Diploma I	-
7	SMA/MA/SMK	79
8	SMP/MTs	6
9	SD/MI	-

4.4.2 Kesehatan

Tabel 4.14

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	8
3	strata 1/ Diploma IV	210
4	Diploma III	330
5	Diploma II	-
6	Diploma I	2
7	SMA/MA/SMK	30
8	SMP/MTs	-
9	SD/MI	-

4.4.3 Pekerjaan Umum

Tabel 4.15

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	6
3	strata 1/ Diploma IV	40

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
4	Diploma III	8
5	Diploma II	-
6	Diploma I	-
7	SMA/MA/SMK	35
8	SMP/MTs	2
9	SD/MI	5

4.4.4 Perumahan Rakyat

Tabel 4.16

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	1
2	Strata 2	3
3	strata 1/ Diploma IV	21
4	Diploma III	2
5	Diploma II	-
6	Diploma I	-
7	SMA/MA/SMK	14
8	SMP/MTs	-
9	SD/MI	1

4.4.5 Trantibumlinmas

Tabel 4.17

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang TrantibumLinmas Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	9
3	strata 1/ Diploma IV	47
4	Diploma III	9
5	Diploma II	1
6	Diploma I	1
7	SMA/MA/SMK	418
8	SMP/MTs	13
9	SD/MI	4

4.4.6 Sosial

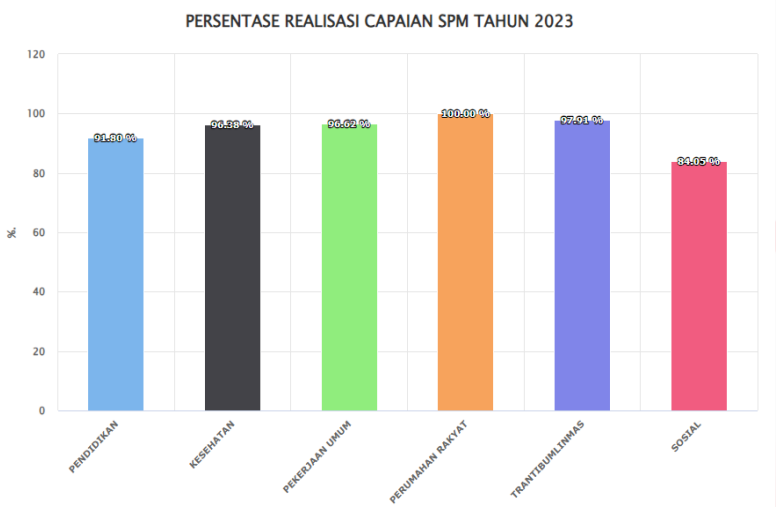
Tabel 4.18

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	3
3	strata 1/ Diploma IV	16
4	Diploma III	1
5	Diploma II	-
6	Diploma I	-
7	SMA/MA/SMK	63
8	SMP/MTs	9
9	SD/MI	9

4.5 HASIL CAPAIAN

Capaian SPM Kota Balikpapan Tahun 2023 sebagai berikut;



Gambar 4.1 Persentase capaian SPM Tahun 2023

Sumber data Aplikasi Pelaporan SPM : *https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/home*

4.5.1 PENDIDIKAN

Capaian Penerapan SPM urusan Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2023 sebagai berikut;

Tabel 4.19

Realisasi Capaian SPM Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	11021	11613	105%	25.362.634.000	20.335.247.831	80%
2	Pendidikan Dasar	118785	107293	90%	155.189.263.575	149.746.642.150	96%
3	Pendidikan Kesetaraan	4958	4054	82%	23.109.951.83	21.847.514.544	95%

Tabel 4.20

Indeks Pencapaian (IP) SPM Pendidikan

No	Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM TUNTAS UTAMA					91.80 %
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini					99.92 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		11021	11613	-592	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.92 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.61 %
1	Angka Partisipasi Sekolah	%	42.50.00	57.27.00	-14.77	100.00 %
2	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan Paud Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	55	63.01.00	-8.1	100.00 %
3	Pertumbuhan Pendidik Paud Di S1/Div	%	50	49.65	00.35	99.30 %
4	Rasio Pengawas Sekolah Untuk Paud	%	02.50	0,126388889	-0.12	100.00 %
5	Kecukupan Formasi Guru Asn	%	01.05	01.02	-0.15	100.00 %
6	Indeks Distribusi Guru	%	03.50	04.11	-0.61	100.00 %

No	Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
7	Proporsi Ptk Bersertifikat	%	13.50	13.12	00.38	97.19 %
8	Proporsi Ptk Penggerak	%	01.20	01.22	-0.02	100.00 %
9	Pengalaman Pelatihan Guru	%	40	49	-9	100.00 %
Jumlah		209	241	-32	896.49 %	
2.	Pendidikan Dasar					91.83 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	72.26 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		118785	107293	11492	90.33 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.57 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.83 %
	SD					
1	Angka Partisipasi Kasar	%	100	105.17.00	-5.17	100.00 %
2	Angka Partisipasi Sekolah	%	100	99.74	0.26000000000001	99.74 %
3	Angka Partisipasi Murni	%	100	98.84	01.16	98.84 %
4	Kemampuan Literasi	Nilai	02.02	77.165	-75.145	100.00 %
5	Kemampuan Numerasi	Nilai	0,094444444	57.575	-55.815	100.00 %
6	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	03.02	3.000	00.02	93.75 %
7	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	03.01	1.375	1.725	44.35 %
8	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	01.49	68.215	-66.725	100.00 %
9	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	%	80	67.875	12.125	84.84 %
10	Kecukupan Formasi Guru Asn	%	65.06.00	34	31.06.00	52.26 %
11	Indeks Distribusi Guru	%	106.59.00	00.35	106.24.00	0.33 %
12	Proporsi Ptk Bersertifikat	%	42.15.00	90.04.00	-48.25	100.00 %
13	Proporsi Ptk	%	02.44	00.11	02.33	4.51 %

No	Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Penggerak					
14	Pengalaman Pelatihan Guru	%	0,595833333	83.02.00	-69.42	100.00 %
	SMP					
1	Angka Partisipasi Kasar	%	123.50.00	110.56.00	0,565277778	89.52 %
2	Angka Partisipasi Sekolah	%	110.50.00	99.04.00	11.01	89.95 %
3	Angka Partisipasi Murni	%	82.75	85.77	-3.02	100.00 %
4	Kemampuan Literasi	Nilai	02.32	84.28.00	-81.96	100.00 %
5	Kemampuan Numerasi	Nilai	02.01	60.38.00	-58.28	100.00 %
6	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	0,128472222	03.30	-0.65	100.00 %
7	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	03.04	00.59	0,139583333	17.35 %
8	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	02.08	71.43.00	-68.63	100.00 %
9	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	%	02.07	68.91	-66.21	100.00 %
10	Kecukupan Formasi Guru Asn	%	77.11.00	25	52.11.00	32.42 %
11	Indeks Distribusi Guru	%	103.94	00.29	103.65	0.28 %
12	Proporsi Ptk Bersertifikat	%	55.07.00	90.25.00	-35.18	100.00 %
13	Proporsi Ptk Penggerak	%	0,128472222	00.11	02.54	4.15 %
14	Pengalaman Pelatihan Guru	%	15.18	77.04.00	-62.22	100.00 %
Jumlah		1,208	1,565	-356	1,956.65 %	
3.	Pendidikan Kesetaraan					83.66 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.41 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		4958	4054	904	81.77 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					18.24 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	91.22 %

No	Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	Angka Partisipasi Kasar	%	8	0	8	0.00 %
2	Angka Partisipasi Sekolah	%	4	0,174305556	00.29	92.75 %
3	Angka Partisipasi Murni	%	4	0,174305556	00.29	92.75 %
4	Kemampuan Literasi	Nilai	60	58.07.00	01.03	97.83 %
5	Kemampuan Numerasi	Nilai	60	44.16.00	0,683333333	73.60 %
6	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	3	0,188888889	-0.92	100.00 %
7	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	3	0,15	00.04	98.67 %
8	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	60	66.95	-6.95	100.00 %
9	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai	60	58.96	01.04	98.27 %
10	Kecukupan Formasi Guru Asn	%	12.50	10.23	02.27	81.84 %
11	Indeks Distribusi Guru	%	15	11.48	03.52	76.53 %
12	Proporsi Ptk Bersertifikat	%	1	0	1	0.00 %
13	Proporsi Ptk Penggerak	%	1	0	1	0.00 %
14	Pengalaman Pelatihan Guru	%	1	0	1	0.00 %
Jumlah		**293**	**265**	**28**	**912.24 %**	

Tabel 4.21

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Katergori Indeks SPM
1.	Pendidikan Dasar	(72.26% + 19.57%) = 96.52 %	Tuntas Utama
2.	Pendidikan Kesetaraan	(65.41% + 18.24%) = 83.66%	Tuntas Madya
3.	Pendidikan Anak Usia Dini;	(80.00% + 19.92%) = 96.52 %	Tuntas Paripurna

4.5.2 Kesehatan

Capaian Penerapan SPM urusan Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2023 sebagai berikut;

Tabel 4.22

Realisasi Capaian SPM Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10944	10838	99%	1.463.474.00,00	1.170.186.350,00	79,96%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10446	10346	99%	279.110.000,00	258.368.000,00	92,57%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9949	10252	103%	265.308.000,00	259.620.000,00	97,86%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	49030	48157	98%	531.170.000,00	479.338.500,00	90,24%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	84814	84632	100%	753.132.000,00	670.764.250,00	89,06%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	440792	391273	89%	1.072.998.000,00	965.083.044,00	89,94%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	37301	35812	96%	729.659.950,00	667.425.938,00	91,47%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	64082	63242	99%	155.000.000,00	132.505.550,00	85,49%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	17412	19279	111%	155.000.000,00	134.695.511,00	86,90%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	698	668	96%	189.350.000,00	167.624.800,00	88,53%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14580	15885	109%	1.589.250.000,00	542.848.000,00	34,16%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	18246	18775	103%	617.900.000,00	554.680.090,00	89,77%

Tabel 4.23

Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	Kategori Indeks Pencapaian SPM		TUNTAS UTAMA			96.61 %
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					96.52 %
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.23 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*10,944*	*10,838*	106	99%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					17.29 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	86.46 %
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	10,944	215	10,729	1.96 %
2	Tablet Tambah Darah	Tablet	10,944	10,838	106	99.03 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	10,944	10,838	106	99.03 %
4	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Hb	Paket	10,944	10,944	0	100.00 %
5	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	10,944	8,246	2,698	75.35 %
6	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	10,944	6,902	4,042	63.07 %
7	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket	10,944	10,944	0	100.00 %
8	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	Buku	10,944	10,944	0	100.00 %
9	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	Orang	27	27	0	100.00 %
10	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100.00 %
11	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100.00 %
12	Kunjungan 4 Kali Ibu Hamil Selama Periode Kehamilan (K4) (Satu Kali Pada Trimester Pertama, Satu Kali Pada Trimester Kedua, Dua Kali Pada Trimester Ketiga)	Orang	10,944	10,838	106	99.03 %
	Jumlah	98,577	80,79	17,787	1,037.47 %	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					99.14 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.23 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*10,446*	*10,346*	100	99%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.90 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	99.52 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Formulir Partograf	Formulir	10,446	10,346	100	99.04 %
	Kartu Ibu (Rekam Medis)	Paket	10,446	10,346	100	99.04 %
	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	Buku	10,446	10,346	100	99.04 %
	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan	Orang	27	27	0	100.00 %
	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100.00 %
	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100.00 %
	Jumlah	31,419	31,119	300	597.12 %	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*9,949*	*10,252*	-303	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
			Jumlah Yang	Jumlah Yang	Jumlah Yang	100.00 %
1	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	9,949	10,252	-303	103.05 %
2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	9,949	10,252	-303	103.05 %
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang	9,949	10,252	-303	103.05 %
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir	9,949	10,252	-303	103.05 %
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (Mtbm)	Orang	9,949	10,252	-303	103.05 %
6	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	Buku	9,949	10,252	-303	103.05 %
7	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	27	27	0	100.00 %
8	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100.00 %
9	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100.00 %
	Jumlah	59,775	61,593	-1,818	918.30 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
04.00	Pelayanan Kesehatan Balita					89.99 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.58 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*49,03*	*48,157*	873	98%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					11.41 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	57.06 %
1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (Kpsp) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	Dokumen	49,03	48,157	873	98.22 %
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (Ddtk)	Formulir	49,03	48,157	873	98.22 %
3	Buku Kartu Ibu Dan Anak (Kia)	Buku	49,03	48,157	873	98.22 %
4	Vitamin A Biru	Kapsul	49,03	15,498	33,532	31.61 %
5	Vitamin A Merah	Kapsul	49,03	47,41	1,62	96.70 %
6	Vaksin Imunisasi Dasar: Hbo	Vaksin	9,949	2,273	7,676	22.85 %
7	Vaksin Imunisasi Dasar: Bcg	Vaksin	9,949	3,089	6,86	31.05 %
8	Vaksin Imunisasi Dasar: Polio	Orang	10,086	3,033	7,053	30.07 %
9	Vaksin Imunisasi Dasar: Ipv	Vaksin	10,086	2,87	7,216	28.46 %
10	Vaksin Imunisasi Dasar: Dpt -Hb -Hib	Vaksin	10,086	3,025	7,061	29.99 %
11	Vaksin Imunisasi Dasar: Campak	Vaksin	10,086	2,915	7,171	28.90 %
12	Vaksin Imunisasi Dasar: Rubella	Vaksin	10,086	2,915	7,171	28.90 %
13	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Dpt -Hb -Hib	Vaksin	20,018	2,605	17,413	13.01 %
14	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak	Vaksin	20,018	2,467	17,551	12.32 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
15	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Rubella	Vaksin	20,018	2,467	17,551	12.32 %
16	Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (Bhp)	Unit	49,03	23,17	25,86	47.26 %
17	17 . Peralatan Anafilaktik	Paket	49,03	23,17	25,86	47.26 %
18	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	27	27	0	100.00 %
19	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100.00 %
20	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100.00 %
21	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	27	27	0	100.00 %
22	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %
23	Tenaga Non Kesehatan : Guru Paud	Orang	1	0	1	0%
	Jumlah	473,702	281,487	192,215	1,255.36 %	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					97.21 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.83 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*84,814*	*84,632*	182	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					17.38 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	86.90 %
1	Buku Raport Kesehatanku	Buku	84,814	60,374	24,44	71.18 %
2	Buku Pemantauan Kesehatan	Buku	84,814	60,374	24,44	71.18 %
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen	84,814	60,374	24,44	71.18 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	Dokumen	84,814	60,374	24,44	71.18 %
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah	Formulir	84,814	60,374	24,44	71.18 %
6	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Gigi	Orang	27	27	0	100.00 %
7	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100.00 %
8	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100.00 %
9	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	29	29	0	100.00 %
10	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	27	27	0	100.00 %
11	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %
	Tenaga Non Kesehatan : Guru	Orang	1	1	0	100.00 %
	Jumlah	424,209	302,009	122,2	1,055.90 %	
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					90.10 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	71.01 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*440,792*	*391,273*	49,519	89%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.08 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	95.42 %
1	Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (Kie)	Pedoman	27	27	0	100.00 %
2	Alat Ukur Berat	Unit	13	13	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Badan					
3	Alat : Alat Ukur Tinggi Badan	Unit	13	13	0	100.00 %
4	Alat : Alat Ukur Lingkar Perut	Unit	13	13	0	100.00 %
5	Alat : Tensimeter	Unit	13	13	0	100.00 %
6	Alat : Glukometer	Unit	39	39	0	100.00 %
7	Alat : Tes Strip Gula Darah	Unit	1,3	1,3	0	100.00 %
8	Alat : Lancet	Unit	2,6	2,6	0	100.00 %
9	Alat : Kapas Alkohol	Unit	2,6	2,6	0	100.00 %
10	Alat : Kit Iva Tes	Unit	27	6	21	22.22 %
11	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (Siptm)	Dokumen	108	108	0	100.00 %
12	12 . Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	27	27	0	100.00 %
13	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100.00 %
14	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100.00 %
15	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	29	29	0	100.00 %
16	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100.00 %
17	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang	27	27	0	100.00 %
	Jumlah	6,917	6,896	21	1,622.22 %	
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					96.54 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.81 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*37,301*	*35,812*	1,489	96%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.73 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	98.67 %
1	Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol	Paket	37,301	35,812	1,489	96.01 %
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (Gds), Intrumen Abbreviated Mental Test (Amt) Dan Instrumen Activity Daily Living (Adl) Dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3g)	Paket	37,301	35,812	1,489	96.01 %
3	Buku Kesehatan Lansia	Buku	37,301	35,812	1,489	96.01 %
4	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	27	27	0	100.00 %
5	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100.00 %
6	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100.00 %
7	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	29	29	0	100.00 %
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100.00 %
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang	27	27	0	100.00 %
	Jumlah	112,067	107,6	4,467	888.03 %	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					98.45 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.95 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*64,082*	*63,242*	840	99%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.50 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	97.48 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	Pedoman Pengendalian Hipertensi Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (Kie)	Pedoman	27	27	0	100.00 %
2	Tensimeter	Unit	27	27	0	100.00 %
3	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (Siptm)	Dokumen	108	108	0	100.00 %
4	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	27	27	0	100.00 %
5	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100.00 %
6	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100.00 %
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100.00 %
8	Obat Hipertensi	Paket	64,082	51,184	12,898	79.87 %
	Jumlah	64,352	51,454	12,898	779.87 %	
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*17,412*	*19,279*	-1,867	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Alat : Glukometer	Unit	81	81	0	100.00 %
2	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	17,412	19,279	-1,867	110.72 %
3	Alat : Kapas Alkohol	Unit	17,412	19,279	-1,867	110.72 %
4	Alat : Lancet	Unit	17,412	19,279	-1,867	110.72 %
5	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (Siptm)	Orang	108	108	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
6	Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (Kie)	Pedoman	27	27	0	100.00 %
7	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	27	27	0	100.00 %
8	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100.00 %
9	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100.00 %
10	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	27	27	0	100.00 %
11	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100.00 %
12	Obat Diabetes Melitus	Paket	17,412	15,119	2,293	86.83 %
	Jumlah	69,999	73,307	-3,308	1,218.99 %	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat					93.07 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.56 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*698*	*668*	30	96%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					16.51 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	82.55 %
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (Ppdgj Iii) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia)	Buku	27	27	0	100.00 %
2	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	54	54	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3	Penyediaan Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Orang	27	27	0	100.00 %
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (Kie)	Media	1,002	1	1,001	0.10 %
5	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	27	25	2	92.59 %
6	Tenaga Kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	27	23	4	85.19 %
7	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	1	1	0	100.00 %
	Jumlah	1,165	158	1,007	577.88 %	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*14,58*	*15,885*	-1,305	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Media Kie (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	250	2,15	-1,9	860.00 %
2	Reagen Zn Tb	Paket	150	70	80	46.67 %
3	Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95	Paket	2	2	0	100.00 %
4	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	Paket	15	15	0	100.00 %
5	Catridge Tes Cepat Molekuler	Paket	15	8,7	6,3	58.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
6	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen	8	2,65	5,35	33.13 %
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (Sop)	Dokumen	35	45	-10	128.57 %
8	Dokter/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru	Orang	15	15	0	100.00 %
9	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	15	15	0	100.00 %
10	Tenaga Kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (Atlm)	Orang	30	30	0	100.00 %
11	Tenaga Kesehatan : Penata Rontgen	Orang	5	5	0	100.00 %
12	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	30	30	0	100.00 %
13	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang	340	340	0	100.00 %
	Jumlah	40,87	31,05	9,82	1,926.37 %	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					98.32 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*18,246*	*18,775*	-529	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					18.32 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	91.60 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	Media Kie (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	500	80	420	16.00 %
2	Tes Cepat Hiv (Rdt) Pertama	Paket	17	17	0	100.00 %
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit Yang Sesuai/Vacutainer Dan Jarum Sesuai	Paket	17	17	0	100.00 %
4	Alat Tulis, Rekam Medis Yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor Ktp/Nik	Paket	1,679	1,679	0	100.00 %
5	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin	Orang	5	5	0	100.00 %
6	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	5	5	0	100.00 %
7	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	5	5	0	100.00 %
8	Tenaga Kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (Atlm)	Orang	5	5	0	100.00 %
9	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	5	5	0	100.00 %
10	Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang	40	40	0	100.00 %
	Jumlah	36,244	35,824	420	916.00 %	

Tabel 4.24

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Katergori Indeks SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Katergori Indeks SPM
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	(79.23% + 17.29%) = 96.52 %	Tuntas Utama
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	(79.23% + 19.90%) = 99.14%	Tuntas Utama
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	(80.00% + 20.00%) = 100 %	Tuntas Paripurna
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	(78.58% + 11.41%) = 89.99 %	Tuntas Madya
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	(79.83% + 17.38%) = 97.21 %	Tuntas Utama
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	(71.01% + 19.08%) = 90.10 %	Tuntas Utama
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	(96.54% + 19.73%) = 96.54 %	Tuntas Utama
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertens	(78.95% + 19.50%) = 98.45 %	Tuntas Utama
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	(80.00% + 20.00%) = 100 %	Tuntas Paripurna
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	(76.56% + 16.51%) = 93.07 %	Tuntas Utama
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	(80.00% + 20.00%) = 100 %	Tuntas Paripurna
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	(80.00% + 18.32%) = 98.32 %	Tuntas Utama

4.5.3 Pekerjaan Umum

Tabel 4.25

Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	718423	714890	99,51%	4.714.883.000,00	14.189.944.392,00	96,43 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	718423	693693	96,56%	5.926.141.434,00	5.584.303.049,00	94,23 %

Tabel 4.26

Indeks Pencapaian (IP) SPM Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
	Kategori Indeks Pencapaian SPM		TUNTAS UTAMA			96.62 %
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari					98.96 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.61 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*718,423*	*714,89*	3,533	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.36 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	96.79 %
1	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Terhadap Kuantitas (Kebutuhan Pokok Minimal 60 Liter/Orang/Hari)	Sambungan Rumah/Sr	620,155	618,275	1,88	99.70 %
2	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Terhadap Kualitas Air (Tidak Keruh, Tidak Berwarna, Tidak Berasa, Tidak Berbusa, Tidak Berbau)	Sambungan Rumah/Sr	620,155	609,193	10,962	98.23 %
3	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Bukan Jaringan Perpipaan Terhadap Kuantitas (Kebutuhan Pokok Minimal 60 Liter/Orang/Hari)	Rumah Tangga	98,268	96,615	1,653	98.32 %
4	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Bukan Jaringan Perpipaan Terhadap Kualitas Air (Tidak Keruh, Tidak Berwarna, Tidak Berasa, Tidak Berbusa, Tidak Berbau)	Rumah Tangga	98,268	89,332	8,936	90.91 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Jumlah	1,436,846	1,413,415	23,431	387.16 %	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					94.27 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	77.25 %
	• Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	*718,423*	*693,693*	24,73	97%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					17.03 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	96.79 %
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/Spald-S Terhadap Kuantitas Akses Pengolahan Air Limbah Domestik (Minimal 1 Akses Pengolahan Air Limbah Domestik)	Rumah Tangga	689,733	587,238	102,495	85.14 %
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/Spald-S Terhadap Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik (Akses Dasar Bagi Masyarakat Wilayah Pedesaan Dengan Kepadatan Penduduk <25 Jiwa / Hektar)	Rumah Tangga	689,733	587,238	102,495	85.14 %
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / Spald-S Terhadap Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik (Akses Aman Bagi Masyarakat Yang Bermukim Di Wilayah Pengembangan Spald-S Dengan Kondisi Wilayah Perdesaan Yang Memiliki Kepadatan Penduduk >25 Jiwa / Hektar Dan Seluruh Wilayah Perkotaan)	Rumah Tangga	179,331	83,175	96,156	46.38 %
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/Spald-T Terhadap Kuantitas Akses Pengolahan Air Limbah Domestik (Minimal 1 Akses Pengolahan Air Limbah Domestik)	Rumah Tangga	28,69	23,28	5,41	81.14 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/Spald-T Terhadap Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik (Akses Aman Bagi Masyarakat Wilayah Pedesaan Dengan Kepadatan Penduduk >25 Jiwa / Hektar Dan Seluruh Wilayah Perkotaan)	Rumah Tangga	26,13	23,28	2,85	89.09 %
	Jumlah	1,613,617	1,304,211	309,406	386.89 %	

Tabel 4.27

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Katergori Indeks SPM
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	(79.61% + 19.36%) = 98.96 %	Tuntas Utama
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	(77.25% + 17.03%) = 94.28%	Tuntas Utama

4.5.4 Perumahan Rakyat

Tabel 4.28

Realisasi Capaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	60	60	100,00%	59.700.000,00	55.383.600,00	92,77%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	120	120	100,00%	805.000.000,00	196.792.668,00	24,45%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
	Daerah Kabupaten/Kota						

Tabel 4.29

Indeks Pencapaian (IP) SPM Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Kategori Indeks Pencapaian SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
01.00	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)						
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Totalyang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		60	60	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
1	Melakukan Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan, Dan Perencanaan Kebutuhan Sesuai Dengan Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Dilakukan Dengan Mengunggah Dokumen Form Dan/Atau Dokumen Pendukung Lainnya)	Jumlah Kab/Kota	1	1	0	100.00 % 100.00
02.00	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Totalyang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		120	120	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan	Rumah	1	0	1	0.00 % 0
2	Subsidi Uang Sewa	Rumah	1	0	1	0.00 % 0
3	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	1	0	1	0.00 % 0

Tabel 4.30

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Katergori Indeks SPM
1.	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	(80.00% + 20.00%) = 100 %	Tuntas Paripurna
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(80.00% + 20.00%) =100 %	Tuntas Paripurna

4.5.5 Trantibumlinmas

Tabel 4.31

Realisasi Capaian SPM TrantibumLinmas Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	3308	3308	100,%	9.005.292.450,00	8.502.990.899,00	94,42%
2	Pelayanan Informasi Rawan	99500	99500	100,%	124.000.000,00	120.682.800,00	97,32%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
	Bencana (KEBENCANAAN)						
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	300	300	100,00 %	2.838.500.000,00	2.803.980.000,00	98,78%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	1700	1700	100,00 %	200.000.000,00	193.003.650,00	96,50%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	50	50	100,00 %	38.919.964.900,00	38.267.533.263,00	98,32%

Tabel 4.32

Indeks Pencapaian (IP) SPM TrantibumLinmas

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
Kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibum			**TUNTAS UTAMA**			94.14 %
1.	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)					94.14 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		3,308	3,308	0	100.00 %
		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				14.14 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	70.71 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	Standar Sarana Prasarana Satpol Pp (Jumlah Dan Kualitas Barang Dan Jasa : A. Gedung Kantor, B. Kendaraan Operasional, C. Perlengkapan Operasional)	Unit	338	280	58	82.84 %
2	Standar Operasional Prosedur (Sop) Satpol Pp (Sop Penegakan Perda, Tibumtranmas, Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa, Pelaksanaan Pengawalan Pejabat/Orang-Orang Penting, Pelaksanaan Tempat-Tempat Penting, Pelaksanaan Operasional Patroli)	Dokumen	20	10	10	50.00 %
3	Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol Pp Dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Jumlah Dan Kualitas Personil/Sdm)	Orang	20	10	10	50.00 %
4	Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada (Pelayanan Kerugian Material Dan Pelayanan Pengobatan)	Dokumen	15	15	0	100.00 %
5	Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materil (Kerusakan Akibat Penegakan Pelanggaran Perda Dan Perkada, Rusak	Orang	0	1	-1	0%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Ringan, Rusak Sedang, Rusak Berat)					
6	Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan (Pertolongan Pertama Yang Terkena Cidera Fisik Ringan Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dan Ditindaklanjuti Dengan Membawa Ke Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat Bila Terkena Cidera Fisik Sedang Dan/Atau Berat)	Orang	0	1	-1	0%
Kategori Indeks Pencapaian SPM Kebencanaan			TUNTAS UTAMA			99.59 %
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		99,5	99,5	0	100.00 %
		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	100.00 %
1	Pemetaan Terhadap Lokasi/Daerah Rawan Bencana Melalui Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (Tersedianya Krb Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah/Legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
2	Identifikasi Dan Pemetaan Terhadap Warga Negara Di Kawasan Rawan Bencana	Orang	70	70	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3	Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana (Tatap Muka Dengan Penduduk Di Daerah Rawan Bencana, Melalui Media Sosial Dan Wahana Multimedia)	Orang	22,5	22,5	0	100.00 %
4	Penyediaan Dan Pemasangan Rambu Evakuasi Dan Papan Informasi Publik Kie Per Jenis Bencana	Unit	150	150	0	100.00 %
2.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)					98.77 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		300	300	0	100.00 %
		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				18.77 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	93.84 %
1	Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana (Seperti : Tenda Komando, Mobil Rescue, Dapur Umum, Tenda Posko Kesehatan, Air Sanitasi, …. Dll)	Unit	20	20	0	100.00 %
2	Peningkatan Kapasitas Personil/Sumber Daya Manusia (Sdm) (Terlatihnya Aparatur Yang Menangani Sub-Urusan Bencana Dan Warga Negara Yang Berada Di Kawasan Rawan Bencana)	Orang	300	263	37	87.67 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)					100.00 %
	Ya	Ya Terjadi Bencana				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		1,7	1,7	0	100.00 %
		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
1	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Terlaksananya Koordinasi Sistem Komando Oleh Pusdalops Penanggulangan Bencana Dalam Penyiapan Petugas Penanganan Darurat Bencana)	Posko	2	2	0	100.00 %
2	Pendataan Terhadap Warga Yang Terkena/Menjadi Korban Bencana	Orang	1,7	1,7	0	100.00 %
3	Melakukan Respon Cepat Darurat Bencana (Penyediaan Dokumen Kaji Cepat Dan Penetapan Status Darurat Bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
4	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (Klb) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas (Terespon Secara Cepat Setiap Hasil Penetapan Status Klb Kurang Dari 24 Jam)	Layanan	1	1	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
5	Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana	Layanan	12	12	0	100.00 %
Kategori Indeks Pencapaian Spm Damkar			TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		50	50	0	100.00 %
		Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
1	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak Diterimanya Informasi/Laporan Sampai Tiba Di Lokasi Dan Siap Memberikan Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi Oleh Dinas Damkar Dan Penyelamatan, Kelompok Relawan Pemadam Kebakaran/Redkar)	Layanan	50	50	0	100.00 %
2	Prosedur Operasional Penanganan Kebakaran, Penyelamatan Dan Evakuasi (Seperti Sop Mkkg, Pemadaman Di Pemukiman, … Dst.)	Dokumen	12	12	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3	Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran (Pos Damkar Dan Mobil Damkar Sebagai Contoh : Mobil Damkar, Kapal Damkar, Mobil Penyelamatan, Mobil Tangki Air, Mobil Komando, ... Dll.), Penyelamatan Dan Evakuasi (Helm Petugas Penyelamatan, Jaket, … Dll.)	Uinit	326	326	0	100.00 %
4	Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan/Sumber Daya Manusia (Jumlah Aparatur Sdm Damkar Yang Telah Mengikuti Pelatihan, Minimal Pemadam I)	Orang	250	250	0	100.00 %
5	Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi Bagi Warga Negara Yang Menjadi Korban Kebakaran (Korban Jiwa Langsung)	Layanan	50	50	0	100.00 %
6	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Bagi Warga Negara Yang Terdampak Kebakaran (Korban Jiwa Yang Mengalami Luka Fisik, Hilangnya Nyawa, Mengalami Trauma, Serta Dampak Sosial Akibat Kebakaran)	Layanan	15	15	0	100.00 %

Tabel 4.33

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang TrantibumLinmas Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Katergori Indeks SPM
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	(80.00% + 14.14%) = 94.14%	Tuntas Utama
2.	Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	(80.00% + 19.59%) =99.59%	Tuntas Utama

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Katergori Indeks SPM
3.	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	(80.00% + 18.77%) = 98.77%	Tuntas Utama
4.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	(80.00% + 20.00%) = 100%	Tuntas Paripurna
5.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	(80.00% + 20.00%) = 100%	Tuntas Paripurna

4.5.6 Sosial

Tabel 4.34

Realisasi Capaian SPM Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	230	230	100,00%	1.887.811.100,00	1.619.290.044,00	85,78%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	62	62	100,00%	1.887.811.100,00	1.619.290.044,00	85,78%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	163	163	100,00%	1.887.811.100,00	1.619.290.044,00	85,78%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	15	15	100,00%	1.887.811.100,00	1.619.290.044,00	85,78%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12230	1634	13,36%	572.586.178,00	234.407.300,00	40,94%

Tabel 4.35

Indeks Pencapaian (IP) SPM Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Kategori Indeks Pencapaian SPM		TUNTAS MADYA			84.05 %
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti					99.46 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		230	230	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.46 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.31 %
1	Layanan Data Dan Pengaduan	Orang	150	150	0	100.00 %
2	Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat	Orang	15	15	0	100.00 %
3	Penyediaan Permakanan	Orang	230	230	0	100.00 %
4	Penyediaan Sandang	Orang	17	17	0	100.00 %
5	Penyediaan Alat Bantu	Orang	20	13	7	65.00 %
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3k)	Orang	1	1	0	100.00 %
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	Orang	150	150	0	100.00 %
8	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	177	177	0	100.00 %
9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak / Bukti Dokumen Kependudukan	Orang	15	15	0	100.00 %
10	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar/ Fasilitasi Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Orang	40	40	0	100.00 %
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	88	88	0	100.00 %
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	41	41	0	100.00 %
	Layanan Rujukan	Orang	79	79	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		62	62	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
1	Layanan Data Dan Pengaduan	Orang	30	30	0	100.00 %
2	Penyediaan Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	Orang	4	4	0	100.00 %
3	Penyediaan Permakanan	Orang	62	62	0	100.00 %
4	Penyediaan Sandang	Orang	1	1	0	100.00 %
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	Orang	1	1	0	100.00 %
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3k)	Orang	1	1	0	100.00 %
7	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	Orang	10	10	0	100.00 %
8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak / Bukti Dokumen Kependudukan	Orang	8	8	0	100.00 %
9	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar / Fasilitasi Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	60	60	0	100.00 %
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	6	6	0	100.00 %
12	Layanan Rujukan	Orang	1	1	0	100.00 %
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti					99.08 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		163	163	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.08 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	95.38 %
1	Layanan Data Dan Pengaduan	Orang	80	80	0	100.00 %
2	Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat	Orang	8	8	0	100.00 %
3	Penyediaan Permakanan	Orang	163	163	0	100.00 %
4	Penyediaan Sandang	Orang	15	15	0	100.00 %
5	Penyediaan Alat Bantu	Orang	10	4	6	40.00 %
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3k)	Orang	1	1	0	100.00 %
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	Orang	80	80	0	100.00 %
8	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Orang	80	80	0	100.00 %
9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti Dokumen Kependudukan	Orang	10	10	0	100.00 %
10	Akses Ke Layanan Kesehatan Dasar / Fasilitasi Layanan Kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	60	60	0	100.00 %
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	5	5	0	100.00 %
13	Layanan Rujukan	Orang	6	6	0	100.00 %
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti					99.64 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		15	15	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.64 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	98.18 %
1	Layanan Data Dan Pengaduan	Orang	9	9	0	100.00 %
2	Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat	Orang	2	2	0	100.00 %
3	Penyediaan Permakanan	Orang	15	15	0	100.00 %
4	Penyediaan Sandang	Orang	15	15	0	100.00 %
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3k)	Orang	2	2	0	100.00 %
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	Orang	15	15	0	100.00 %
7	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Gelandangan Dan Pengemis	Orang	15	15	0	100.00 %
8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak / Bukti Dokumen Kependudukan	Orang	5	4	1	80.00 %
9	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar / Fasilitasi Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Orang	4	4	0	100.00 %
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	5	5	0	100.00 %
11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	5	2	3	40.00 %
12	Layanan Rujukan	Orang	5	5	0	100.00 %
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					22.07 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	10.69 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		12230	1634	10596	13.36 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					11.38 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	56.91 %
1	Penyediaan Permakanan	Orang	12230	1634	10596	13.36 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2	Penyediaan Sandang	Orang	407	407	0	100.00 %
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	57	57	0	100.00 %
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang	50	0	50	0.00 %
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	7	1	6	14.29 %

Tabel 4.36

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Katergori Indeks SPM
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	(80.00% + 19.46%) = 99.46%	Tuntas Utama
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	(80.00% + 20.00%) =100%	Tuntas Utama
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	(80.00% + 19.08%) = 99.08%	Tuntas Utama
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	(80.00% + 19.64%) = 99.64%	Tuntas Utama
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	(10.69% + 11.38%) = 22.07%	Belum Tuntas, tidak terjadi bencana

4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.6.1 Pendidikan

Tabel 4.37

Permasalahan dan solusi SPM Urusan Pendidikan

a. Pengumpulan data

NO	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
	Belum optimalnya pengelolaan data pendidikan • . Beberapa data perlu koordinasi antar bidang sehingga tidak bisa langsung dikerjakan. Beberapa data berdasarkan rapor pendidikan sedangkan rapor pendidikan PAUD dan Kesetaraan baru mulai TA 2023/2024 • . belum tersedianya data terpilah gender pada rapor pendidikan sebagai sumber referensi data	mengoptimalkan pengelolaan data pendidikan melalui : (a) kolaborasi dan sinergi dengan instansi/lembaga terkait dan para pemangku kepentingan; (b) mengoptimalkan monev evaluasi capaian SPM	Belum optimalnya pemenuhan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan • . Belum optimalnya pemenuhan daya tampung peserta didik (masih terdapat kesenjangan antara jumlah ruang kelas dan jumlah peserta didik)	melaksanakan pemetaan dan perhitungan kebutuhan SDM (pendidik dan tenaga kependikaan); menyusun formasi dan mengusulkan kebutuhan pendidik	Belum optimalnya pengelolaan pembiayaan pendidikan pendidikan untuk mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah • . Belum optimalnya implementasi perencanaan berbasis data (PBD) • . Belum teralokasinya anggaran SPM	melakukan sosialisasi kepada sekolah dan pendampingan implementasi perencanaan berbasis data (PBD)	Pelaksanaan capaian SPM walaupun belum maksimal tetapi sudah diupayakan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian SPM	melakukan penyesuaian nomenklatur sub kegiatan dengan rekomendasi hasil rapor pendidikan pada penganggaran tahun 2025

NO	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
	capaian (contoh : rata-rata skor literasi dan numerasi, skor literasi numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah)-Form 1.A.9 Belum optimalnya monitoring evaluasi kinerja pencapaian SPM • . Masih diperlukan penyesuaian/ penyamaan persepsi dalam memahami indikator SPM dan cara membaca data pada rapor pendidikan				pada nomenklatur sub kegiatan SPM berdasar kepmendikbud • . Belum terdapat sinkronisasi penetapan target yang ditetapkan PD dengan Kemendikbud			

4.6.2 Kesehatan

Tabel 4.38

Permasalahan dan solusi SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
		Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kepatuhan faskes dalam mengisi kohort ibu hamil belum maksimal terutama dari faskes jejaring dan data manual tidak rutin dikirimkan ke puskesmas, selain itu integrasi pelayanan antar program belum maksimal	Pembinaan dan penguatan jejaring, koordinasi lintas program	Logistik dan alat kesehatan pendukung tersedia sesuai kebutuhan	Menganggarkan logistik dan alkes penunjang pelayanan sesuai sasaran kebutuhan	Perencanaan belanja anggaran program terbagi dengan program lain/sub kegiatan lain	Membuat pemetaan anggaran sesuai program	Masih ada ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar	Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan pada ibu hamil termasuk media promosi dan SDM yang berkualitas
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pencatatan dan pelaporan baik kohort dan manual belum tertib dilaksanakan oleh semua faskes sehingga ada mis data	Pembinaan dan penguatan jejaring	Logistik dan alat kesehatan pendukung tersedia sesuai kebutuhan	Menganggarkan logistik dan alkes penunjang pelayanan sesuai sasaran kebutuhan	Perencanaan anggaran telah ditetapkan oleh program	Membuat pemetaan anggaran sesuai program	Pelayanan pada ibu bersalin yang berasal dari luar wilayah/lintas batas menjadi salah satu masalah terkait logistik dan	koordinasi lintas OPD terkait masalah kependudukan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
		Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
								sebagainya	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pencatatan dan pelaporan baik aplikasi e-kohort dan manual belum optimal dilaksanakan di Fasyankes	Pembinaan dan penguatan jejaring	Logistik dan alat kesehatan pendukung tersedia sesuai kebutuhan	Menganggarkan logistik dan alkes penunjang pelayanan sesuai sasaran kebutuhan	Perencanaan anggaran telah ditetapkan oleh program	Membuat pemetaan anggaran sesuai program	Setiap Bayi Baru Lahir diberikan pelayanan sesuai dengan standar minimal, hanya pelayanan SHK pada bayi baru lahir masih belum dilaksanakan di seluruh Faskes	Peningkatan pelayanan SHK di Faskes dengan Sosialisasi SHK di masyarakat dan fasyankes
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Integrasi dan kolaborasi antar program terkait belum optimal sehingga pengisian kohort baik manual maupun pengisian melalui aplikasi juga belum optimal	Koordinasi lintas program terkait serta pembinaan dan penguatan jejaring	Logistik dan alat kesehatan pendukung tersedia sesuai kebutuhan	Menganggarkan logistik dan alkes penunjang pelayanan sesuai sasaran kebutuhan	Perencanaan anggaran telah ditetapkan oleh program	Membuat pemetaan anggaran sesuai program		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar								

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
		Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Berjalan sesuai dengan kegiatan puskesmas hanya sistem Pelaporan masih kurang	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor untuk capaian SPM USPRO		Menyusuaikan dengan Anggaran yang tersedia	Perencanaan dikoordinasikan dengan Program untuk alokasi anggaran	Menyusun RKA menyesuaikan anggaran	Kurang Kesadaran Masyarakat untuk memeriksakan kesehatan, Pencatatan laporan yg belum maksimal	Mendorong Pengelola Program untuk lebih memberikan pelayanan sesuai standar
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Berjalan sesuai dengan pelayanan di Puskesmas namun pelaporan masih manual dan pemanfaatan kohort belum berjalan	Peningkatan dan penguatan pada masing-masing Faskes terkait kepatuhan penginputan data dan pemanfaatan kohort lansia	Logistik dan alat kesehatan pendukung tersedia sesuai kebutuhan dengan berkoordinasi dengan farmasi	Menganggarkan logistik dan alkes penunjang pelayanan sesuai sasaran kebutuhan	Perencanaan anggaran telah ditetapkan oleh program	Membuat pemetaan anggaran sesuai program	pelayanan kesehatan lansia sesuai standar memiliki indikator yang banyak sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak juga, keterbatasan SDM menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan	Pemetaan SDM dan mengembalikan tupoksi nakes dan evaluasi beban kerja nya
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Berjalan sesuai dengan kegiatan puskesmas hanya kurang kesadaran	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor untuk capaian SPM Hipertensi		Menyusuaikan dengan Anggaran yang tersedia	Perencanaan dikoordinasikan dengan Program untuk alokasi anggaran	Menyusun RKA menyesuaikan anggaran	Kurang Kesadaran Masyarakat untuk memeriksakan kesehatan	Mendorong Pengelola Program untuk lebih memberikan pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
		Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
		Penderita untuk berobat							sesuai standar
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Berjalan sesuai dengan kegiatan puskesmas hanya kurang kesadaraan Penderita untuk berobat	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor untuk capaian SPM DM		Menyusuaikan dengan Anggaran yang tersedia	Perencanaan dikoordinasikan dengan Program untuk alokasi anggaran	Menyusun RKA menyesuaikan anggaran	Kurang Kesadaran Masyarakat untuk memeriksakan kesehatan	Mendorong Pengelola Program untuk lebih memberikan pelayanan sesuai standar
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pada laporan manual berjalan baik tetapi pada aplikasi Simkeswa selalu mengalami kendala dikarenakan penginputan sering mengalami masalah seperti error pada sistem sehingga data yang diinput tidak muncul dan kepatuhan Faskes dalam pengisisan Aplikasi masih	Peningkatan dan penguatan pada masing-masing Faskes terkait kepatuhan penginputan data pada aplikasi Simkeswa					Masyarakat masih menganggap masalah kejiwaan sebagai aib bagi keluarga sehingga bila ada salah satu anggota keluarga yang mengalami masalah Kejiwaan tidak segera dikonsultasikan ke Faskes sehingga berpengaruh pada cakupan Faskes	penguatan KIE Keswa dari Faskes dan pembuatan video edukasi Keswa yang dapat di tampilkan di medsos Dinkes dan masing-masing faskes serta kolaborasi lintas sektor untuk membantu dalam identifikasi pasien ODGJ

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
		Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
		kurang							
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kepatuhan layanan swasta terkait pelaporan program di SITB masih kurang	Meningkatkan peran Technical Officer TB dengan dukungan Global Fund dalam melakukan monev mingguan terutama pada layanan swasta	Stok obat TB anak dan mantoux test sempat stok out	Adanya pembagian yang jelas dalam bentuk edaran atau surat pemberitahuan, mengenai pembagian kewenangan pengadaan logistik program antara pusat dan daerah	Perencanaan belanja anggaran program tersebar dibeberapa sub kegiatan	Menyusun RKA P2 TB pada sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis TA 2024	Masih ada layanan kesehatan yang belum mengikuti program TB DOTS	Tahun 2024, fokus MOU TB dengan layanan Dokter Praktek Mandiri
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Perubahan sistem informasi dari SIHA 1.7 menjadi SIHA 2.1	Meningkatkan kapasitas petugas baik melalui pertemuan offline maupun melalui zoom meeting	Distribusi Logistik ARV yang tidak sesuai kebutuhan layanan	Meningkatkan koordinasi dengan Dinkesprov Kaltim dan mengirimkan usulan kebutuhan ARV tepat waktu	Perencanaan belanja anggaran program tersebar dibeberapa sub kegiatan	Menyusun RKA P2 HIV AIDS pada sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV TA 2024	Belum optimalnya skrining SPM HIV pada layanan faskes swasta	Mengadakan pertemuan dan sosialisasi P2 HIV AIDS pada Bidan Praktek Mandiri dan Klinik Swasta

4.6.3 Pekerjaan Umum

Tabel 4.39

Permasalahan dan solusi SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
	Pengumpulan Data sampai saat ini menggunakan Data dari Tahun sebelumnya ditambahkan data dari Dispekim dan PTMB selaku pengampu Air Minum dan Sanitasi, sedangkan data update belum dapat dilakukan karena keterbatasan Personil dan Anggaran untuk mendapatkan data BNBA (By Name By Addres) yang lebih tepat.	Penambahan SDM dan Anggaran	Perhitungan Kebutuhan Data yang ada terhadap seluruh penduduk tidak dapat diasumsikan dengan perhitungan capaian • . Perhitungan SPM Air Minum dilakukan pendekatan dengan jumlah kemampuan sumber air bersih yang dikelola PDAM (PTMB Tirta Manuntung Kota Balikpapan) dan WTP dilokasi Perumahan yang tersedia saat ini. • . Perhitungan SPM Air Limbah dilakukan pendekatan dengan jumlah pembangunan SPALD-T sampai dengan TA. 2024 dan kapasitas IPAL	Penambahan SDM dan Anggaran	Tidak tersedianya Sumber Air Bersih dan Kondisi Topografi Lahan/Kontur di Kota Balikpapan yang sebagain besar di pesisir laut, daerah rawan banjir dan kondisi perbukitan/lereng	Perlunya adanya Sumber Air Bersih baru dan Teknologi Tepat Guna yang mendukung tercapainya Pembangunan Sanitasi Aman.	Perhitungan Total Capaian tidak dapat memperlihatkan kondisi eksisting dilapangan, karena perhitungan prosentase dijumlah dan dibagi rata-rata dengan pembanding sehingga tidak relevan dengan hasil yang ada. • . Perlu adanya koordinasi bersama dengan pengampu SPM Air Minum dan Air Limbah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur, untuk membawa permasalahan perhitungan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Biro Bangda) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi disesuaikan dengan target baik untuk SPM Air Minum dan SPM Air Limbah. Karena seharusnya tidak semua Masyarakat harus terlayani SPAM JP + SPAM BJP dan SPALD-T + SPALD-S, karena rumusan dalam Aplikasi tidak dapat menggambarkan kondisi eksisting.

NO	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
			di Kota Balikpapan yang tersedia saat ini.				Jakarta, untuk mendapatkan pemecahan permasalahan perhitungan pada Aplikasi tersebut.	

4.6.4 Perumahan Rakyat

Tabel 4.40

Permasalahan dan solusi SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
	Pengumpulan data telah dilakukan, berbasis pada dokumen identifikasi data rumah dampak bencana 2022	Perlu dilakukan updating untuk 2024,	Untuk penghitungan kebutuhan masih menunggu kepastian penerima yang bersedia melaksanakang bantuan secara swadaya dan mandiri oleh penerima bantuan		Belum ada kesediaan calon penerima untuk menerima bantuan pembangunan akibat dilaksanakan secara swadaya		Masyarakat berharap dibantu secara tenaga kerja karena mereka sudah mendapat bencana, berat jikaemgeluarkan biaya buat rehab meski ada bantuan material	
	Banyak calon penerima belum memenuhi kriteria dikarenakan status		Adanya keinginan calon penerima agar juga dapat bantuan tenaga pelaksana tukang (tidak ada		belum adanya DED untuk pembnagunan rumah baru sebagai dasar pembangunan untuk		Proses pelaksanaan dan identifikasi data terlalu jauh waktu selisih waktu sehingga diwaktu pelaksanaan terkesan lambat penanganan, saran	

NO	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
	lahan dan bangunan.		regulasinya)		pembangunan baru		pelaksanaan spm dari identidikasi sampai pelaksanaan harus 1 periode anggaran.	
					nggaran yang ada memang tidak ada Biaya Tukang		Problema dilapangan dari proses verifikasi oleh tim satgas opd dan TFL, bahwa masyarakat calon penerima belum mampu melaksanakan dikarenakan a. Tidak memiliki biaya untuk tukang b. Tidak ada anggota keluarga yg bisa bertukang c. Tidak ada upaya untuk gotong royong warga	
					SK Penerima Hibah sedang dibuat, dengan kondisi yg ada (beresiko tidak dapat dilaksanakan) apakah tetap diajukan untuk SK Hibah dengann resiko tidak dapat terlaksana.		Mekanisme pelaksanaan SPM Perumahan secara latar belakang program memang diarahkan bantuan secara material saja	
					Sejauh ini untuk biaya tukang "diharapkan CSR" namun sampai hari ini belum ada bantuan dengan asumsi diperlukan anggaran biaya tukang rata2 Rp 5juta/rumah			

4.6.5 Trantibumlinmas

Tabel 4.41

Permasalahan dan solusi SPM Urusan Trantibumlinmas

NO	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	**Solusi**	**Permasalahan**	**Solusi**	**Permasalahan**	**Solusi**	**Permasalahan**	**Solusi**
	Kesulitan mendapatkan data warga negara di wilayah rawan bencana (*by name by address*), tidak bisa menarik data kependudukan.	Keterlibatan peran dan fungsi dari Disdukcapil dan didukung penuh oleh Kemendagri	Data selalu berubah karena tidak semua penduduk yang tinggal dikawasan rawan bencana ber KTP Balikpapan dari segi lokasi bisa mengalami perubahan setiap tahun.	Update data tiap tahun berdasarkan data kependudukan	Alokasi anggaran yang tersedia tidak mampu untuk menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat rutin setiap tahun untuk semua orang yang berada di lokasi rawan bencana, tidak ada dukungan dana dari Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait SPM Trantibumlinmas	Dukungan dana dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat terkait SPM Trantibumlinmas	Keahlian petugas terkait SPM perlu ditingkatkan.	Bimtek dan Diklat yang difasilitasi oleh BKPSDM

4.6.6 Sosial

Tabel 4.42

Permasalahan dan solusi SPM Urusan Sosial

NO	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	**Solusi**	**Permasalahan**	**Solusi**	**Permasalahan**	**Solusi**	**Permasalahan**	**Solusi**

NO	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	**Solusi**	**Permasalahan**	**Solusi**	**Permasalahan**	**Solusi**	**Permasalahan**	**Solusi**
	Belum tersedia aplikasi yang menunjang pengelolaan data PMKS secara maksimal, jumlah gelandangan dan pengemis tidak menentu/fluktuatif dan berasal dari luar daerah	Mengoptimalkan peran serta mitra-mitra Dinas Sosial Kota Balikpapan di lapangan yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana untuk membantu melaksanakan tahap pengumpulan data dan updating data	Kesulitan melakukan penghitungan kebutuhan karena keterbatasan sumber data	Melakukan pendataan secara sistematis	Anggaran yang tersedia relatif belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh PMKS dalam rangka mendukung penerapan SPM di Dinas Sosial Kota Balikpapan	Melakukan pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan sebagai dasar pengajuan penambahan anggaran	Kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan untuk mendirikan rumah penampungan yang memiliki standar pelayanan minimal maksimal selama 7 (tujuh) hari, sedangkan kapasitas panti sosial milik Pemerintah Provinsi sebagai layanan rujukan memiliki kapasitas yang terbatas	Meningkatkan intensitas koordinasi serta pengajuan usulan PMKS yang telah menjadi penerima layanan di Dinas Sosial Kota Balikpapan dan telah melebihi batas waktu maksimal pelayanan kabupaten/kota kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Balikpapan Menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial milik Kementerian Sosial dan pihak swasta non pemerintah

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dalam rangka wujud pertanggung jawaban Kepala Daerah terhadap tugas pokok, kewenangan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan. Selain daripada itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja serta alat untuk mendorong terwujudnya *good governance.*

Dalam Perspektif yang lebih luas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik yang selanjutnya akan disusun dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 yang akan dipublikasikan secara luas melalui *website* Pemerintah Kota Balikpapan, selain Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan menginputan Sistem Informasi Elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) Tahun 2023 Kota Balikpapan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun, semoga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan ini sebagai bahan koreksi guna meningkatkan kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Terima kasih.

Balikpapan Kota Beriman (Bersih, Indah, Aman dan Nyaman)

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela (Kubangun dengan Amal, Kujaga dengan Iman dan Kubela dengan Doa).

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-115/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH, RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, perlu membentuk tim penyusun LPPD, LKPj dan RLPPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun LPPD, LKPj, dan RLPPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun LPPD, LKPj, dan RLPPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun LPPD, LKPj, dan RLPPD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
a. Pembina;
b. Tim Penyusun Kota;
c. Tim Penyusun Perangkat Daerah; dan
d. Tim Reviu.

KETIGA : Tim Penyusun Kota sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
a. menyusun kebijakan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyusunan LPPD, LKPj dan RLPPD;
b. melaksanakan koordinasi bersama dengan Sekretaris Daerah, Asisten dan perangkat daerah dalam penyusunan LPPD, LKPj dan RLPPD; dan
c. melaksanakan koordinasi bersama dengan Sekretaris Daerah, Asisten dan perangkat daerah dalam menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas LPPD dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas LKPj Wali Kota Balikpapan;
d. membuat perencanaan kegiatan penyusunan LPPD, LKPj dan RLPPD setiap tahun anggaran;
e. menyelenggarakan rapat koordinasi/teknis yang diperlukan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal lainnya;
f. mengonsolidasikan elemen data kinerja masing-masing perangkat daerah sesuai dengan elemen data Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diminta dalam LPPD;
g. melaksanakan koordinasi kegiatan penghimpunan bahan penyusunan LPPD, LKPj dan RLPPD dari seluruh perangkat daerah penyelenggara urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum, realisasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sesuai materi LPPD, termasuk dengan instansi vertikal terkait;
h. melakukan sinkronisasi dan verifikasi data laporan penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum, realisasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal

dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dari masing-masing perangkat daerah;

i. menyusun materi LPPD, LKPj, dan RLPPD berpedoman pada format dan sistematika laporan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunannya;
j. melaksanakan koordinasi dengan Tim Reviu dalam rangka pelaksanaan reviu atas dokumen LPPD;
k. melakukan finalisasi penyusunan dokumen LPPD berdasarkan hasil reviu oleh Tim Reviu dan menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur;
l. melakukan finalisasi penyusunan dokumen LKPj Wali Kota Balikpapan yang disampaikan kepada DPRD Kota Balikpapan, serta penyampaian LKPj kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur;
m. melakukan finalisasi penyusunan dokumen RLPPD untuk disampaikan kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
n. memberikan penjelasan akuntabilitas dan transparansi materi LPPD kepada semua pihak yang memerlukan penjelasan; dan
o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota terkait perencanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan LPPD, LKPj dan RLPPD Kota Balikpapan.

KEEMPAT : Tim Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas:

a. melaksanakan kebijakan Ketua Tim Penyusun;
b. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan LPPD, LKPj dan RLPPD;
c. menyiapkan dokumen/data penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum, realisasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang telah dilaksanakan perangkat daerah;
d. mengesahkan format/blangko lampiran IKK LPPD perangkat daerah bersangkutan dan dokumen data dukung IKK;
e. menyiapkan dan menyampaikan elemen data keuangan dan capaian kinerja berikut dokumen/data pendukung IKK sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan format/blangko daftar isian dan IKK LPPD dari masing-masing perangkat daerah;
f. memberikan penjelasan akuntabilitas dan transparansi dokumen/data sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam hal diperlukan sinkronisasi dan verifikasi dokumen/data oleh Tim Penyusun Kota, Tim Evaluasi LPPD tingkat Kota dan Tim Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Tim Reviu sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk Reviu yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD;
c. memberikan hasil reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah Inspektorat yang dituangkan dalam catatan hasil reviu dan menjadi dasar penyusuanan rancangan LPPD.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Januari 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MASUD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-115/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

SUSUNAN PERSONEL TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. PEMBINA:		
	Wali Kota Balikpapan	Penanggung Jawab
B. TIM PENYUSUN KOTA:		
1	Sekretaris Daerah Kota Balikpapan	Ketua
2	Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Wakil Ketua I
3	Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Wakil Ketua II
4	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Sekretaris
5	Kepala Bappedalitbang Kota Balikpapan	Anggota
6	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Anggota
8	Seluruh Analis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Anggota
C. TIM PENYUSUN PERANGKAT DAERAH:		
NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris DPRD Kota Balikpapan	Anggota
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	Anggota
3	Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Anggota
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Anggota
5	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Anggota
6	Kepala Satpol PP Kota Balikpapan	Anggota
7	Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan	Anggota

8	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	Anggota
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan	Anggota
10	Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	Anggota
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Anggota
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan	Anggota
15	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan	Anggota
16	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan	Anggota
17	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	Anggota
18	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	Anggota
19	Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	Anggota
20	Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan	Anggota
21	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan	Anggota
22	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
23	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan	Anggota
24	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Anggota
25	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Anggota
26	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Anggota
27	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Anggota
28	Kepala Bagian Kerja Sama dan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Anggota
D. TIM REVIU:		
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Inspektur Kota Balikpapan	Verifikator

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD



terimah kasih

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN